

# **JURNAL ACCOUNTABILITY**

---

Vol. 5. No. 2 Desember 2016

ISSN. 2338-3917



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

# **JURNAL ACCOUNTABILITY**

---

## **Staff Editorial Jurnal Accountability**

### **Penanggung Jawab**

Dr. Winston Pontoh, SE., MM., Ak.

### **Anggota Redaksi**

Winston Pontoh, SE.,MM.,Ak

Stanly Alexander, SE.,MM.,Ak

Steven Tangkuman SE.,MAk.,Ak

Novi S. Budiarmo, SE.,MSA.,Ak

Andreita Agama, SE.,Ak

### **Reviewer**

Prof. Dr. David P. E. Saerang, SE.,MCom(Hons)

Dr. Herman Karamoy, SE.,MSi.,Ak

Dr. Jullie J. Sondakh, SE.,MSi.,Ak.,CPA

Dr. Grace Mogi, SE.,MSA.,Ak.,CPA

Dr. Ventje Ilat, SE.,MSi

Dr. Jenny Morasa, SE.,MSi.,Ak

### **Alamat Redaksi**

Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

Manado, Jl. Kampus UNSRAT Bahu – Sulawesi Utara, Indonesia

Telp/Fax: (0431) 823093

Email : [accountability@unsrat.ac.id](mailto:accountability@unsrat.ac.id)

## DAFTAR ISI

<b>PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK PADA PELAKSANAAN SANKSI DENDA, PELAYANAN FISKUS DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS TERHADAP WAJIB PAJAK RESTORAN ORANG PRIBADI DI KOTA MANADO DAN DI KABUPATEN MINAHASA)</b>	<b>1-10</b>
Anjeline Kodoati, Jullie J. Sondakh, Ventje Ilat	
<b>PENGARUH PENGALAMAN AUDIT, KEAHLIAN AUDIT DAN TEKANAN KETAATAN TERHADAP <i>AUDIT JUDGMENT</i> BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA</b>	<b>11-22</b>
Christin Lisa Sanger, Ventje Ilat, Winston Pontoh	
<b>ANALISA PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH OLEH INSPEKTORAT DI PROVINSI SULAWESI UTARA</b>	<b>23-36</b>
Theyza Korah, Herman Karamoy, LintjeKalangi	
<b>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA</b>	<b>37-51</b>
Harsya K. Tahir, Agus T. Poputra, Jessy D. L. Warongan	
<b>PENGARUH KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KETIDAKPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP OPINI BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA</b>	<b>52-62</b>
Justisia Sulastris Maabuat, Jenny Morasa, David P. E. Saerang	
<b>PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, MOTIVASI, <i>JOB RELEVANT INFORMATION</i>, KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PELIMPAHAN WEWENANG TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SKPD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD</b>	<b>63-71</b>
Aljeni Murahati Rellam, Grace B. Nangoi, Yenny Morasa	
<b>ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA MANADO</b>	<b>72-83</b>
Juddy Julian Pilat, Jullie J. Sondakh, Hendrik Manossoh	
<b>ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</b>	<b>84-97</b>
Enda Baisida Lauma, Jenny Morasa, Lintje Kalangi	
<b>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD</b>	<b>98-109</b>
Imelda Latjandu, Lintje Kalangi, Jantje J. Tinangon	

- FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) BERBASIS KINERJA PADA PEMERINTAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA** 110-118  
Anestasye Agnes Woinalang, Jullie J. Sondakh, Ventje Ilat
- FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS AUDIT PADA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA** 119-140  
Grace M. Turangan, Herman Karamoy, Jantje J. Tinangon
- PENGARUH PERENCANAAN, KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD** 141-151  
Deiby Isilda Alumbida, David P.E. Saerang, Ventje Ilat
- PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI INFORMASI, REVIU LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA** 152-167  
Merlyn C. T. Kalumata, Ventje Ilat, Jessy D. L. Warongan
- ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 PADA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN** 168-177  
Ariel Rorimpandey, Grace B. Nangoy, Hendrik Manossoh
- ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEANDALAN DAN KETEPATAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA** 178-190  
Anando Iphan Kosegeran, Lintje Kalangi, Heince Wokas
- STUDI KOMPARATIF PEMBOBOTAN KRITERIA AUDIT KINERJA AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DENGAN PEMBOBOTAN MENGGUNAKAN METODE *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS* (STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD)** 191-206  
Iwan Bin Lawitan, Herman Karamoy, Agus Tony Poputra
- ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL, RISIKO DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS: BANK SYARIAH MANDIRI KC MANADO)** 207-223  
Kartika Soetopo, David Paul Elia Saerang, Lidia Mawikere
- ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BITUNG** 224-236  
Gebriany Pirade Wenur, Herman Karamoy, Jessy Warongan

# **JURNAL ACCOUNTABILITY**

**Vol. 5. No. 2 Desember 2016**

**ISSN. 2338-3917**

---

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN 237-248**  
**KONSERVATISME AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG**  
**TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, BURSA MALAYSIA DAN**  
***SINGAPORE STOCK EXCHANGE* TAHUN 2010-2014**

Melisa Mamesah, David Paul Elia Saerang, Linda Lambey

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK MUSLIM, PEMBIAYAAN, DAN BAGI 249-259**  
**HASIL TERHADAP JUMLAH NOMINAL TABUNGAN NASABAH PADA BANK**  
**SYARIAH DI INDONESIA**

Sudarmin Amdar, Ventje Ilat, Agus Tony Poputra

**ANALISIS PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI DAN INFORMASI NON 260-268**  
**AKUNTANSI DALAM KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS KREDIT**  
**PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk AREA MANADO**

Marshella Patricia Niode, David Paul Elia Saerang, Ventje Ilat

**PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK PADA PELAKSANAAN SANKSI DENDA,  
PELAYANAN FISKUS DAN KESADARAN PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(STUDI EMPIRIS TERHADAP WAJIB PAJAK RESTORAN ORANG PRIBADI DI  
KOTA MANADO DAN DI KABUPATEN MINAHASA)**

Anjeline Kodoati, Jullie J. Sondakh, Ventje Ilat

[Anjelinekodoati@gmail.com](mailto:Anjelinekodoati@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Taxes are the largest revenue source in addition to oil and gas. In the era of Indonesia's tax reform, the tax collection system is set to a self-assessment system, which gives full trust to the taxpayer to calculate, pay, and report all taxes that become his obligations. One of the obstacles that may hinder the effectiveness of tax collection is tax compliance. This is happened in every region in Indonesia, including in the Manado City and Minahasa District, which has a decrease tendency of tax compliance since 2010 until 2014 based on the data from the Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado (Local Revenue Office of Manado City) and Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa (Local Revenue Office of Minahasa District). As tax authorities, these offices tried to uphold the norms of taxation by applying administrative sanctions such as fines for taxpayers who are late paying taxes in accordance with the district's legislation, but it has not been able to increase tax compliance in paying taxes. Therefore, this study is aimed to analyze the influence of the attitude of the taxpayer on the implementation of financial penalties on tax compliance, the service tax authorities on tax compliance, and tax awareness on tax compliance. By using qualitative research methods with multiple linear regression, this study concluded that the attitude of taxpayer on the implementation of financial penalties affect tax compliance, service tax authorities did not affect tax compliance, and awareness of tax affect tax compliance.*

*Keywords : Tax Compliance, Tax Authorities, Tax Awareness.*

## **1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar disamping minyak dan gas bumi. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD. Menurut Soemitro dalam (Mardiasmo:2013:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal-balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap atau perilaku seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Meskipun demikian, dalam praktek sulit

untuk membedakan apakah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan perpajakan

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi restoran di Kota Manado dan di Kabupaten Minahasa terus mengalami penurunan. Variabel-variabel yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kepatuhan WP adalah sikap wajib pajak, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **2 TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Theory of Planned Behavior**

1. *Behavioral Beliefs*, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. *Normative Beliefs*, merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control Beliefs*, merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.2 Teori Atribusi (*Atribution Theory*)**

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan kondisi internal maupun eksternal wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang taat membayar pajak dilihat dari kondisi internal maupun eksternalnya, begitu pula sebaliknya.

### **2.3 Teori Pembelajaran Sosial**

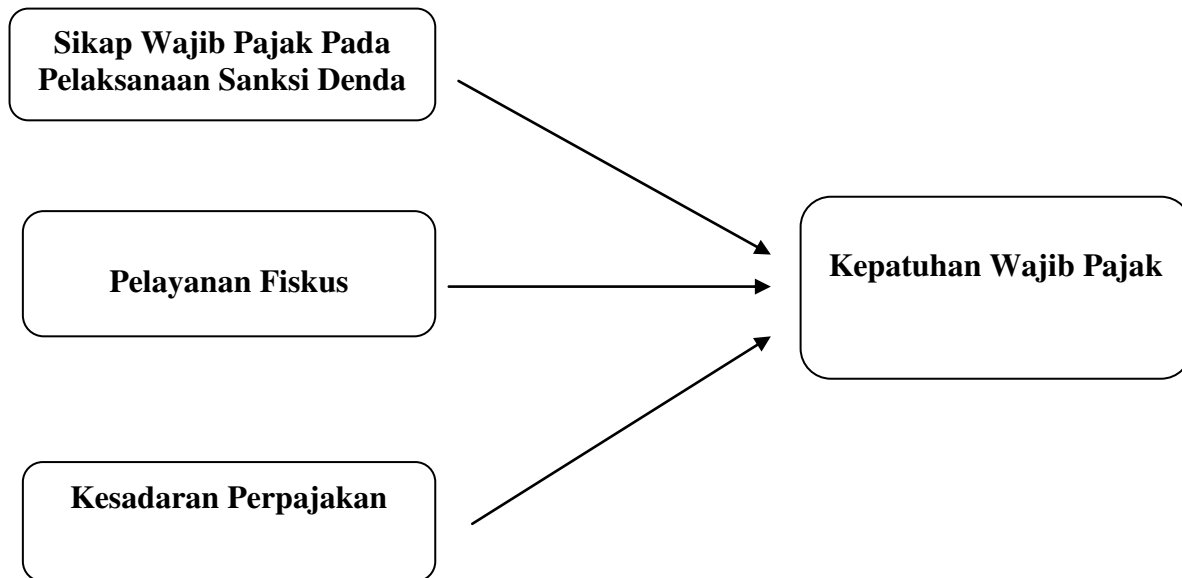
Albert Bandura menjelaskan bahwa individu belajar banyak melalui imitasi, dan imitasi melibatkan serangkaian proses kognitif. Bandura menekankan proses kognitif memiliki hubungan yang sangat erat dengan lingkungan dan tingkah laku (*behavior*).

teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat membayar pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya. Terkait dengan proses penguatan, proses tersebut cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 3 HIPOTESIS

Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan karena diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kerangka pemikiran teoretis penelitian ini disajikan pada gambar

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis**



Berdasarkan tinjauan terhadap teori yang ada dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah:

- H<sub>1</sub> : Sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H<sub>2</sub> : Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H<sub>3</sub> : Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 4 METODE PENELITIAN

#### 4.1 Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para WP yang ada di kota Manado dan WP yang ada di kabupaten Minahasa. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para WP yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

Sumber data ini diperoleh dari Dinas Pendapatan Kota Manado dan Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemungut Pajak Daerah. Data sekunder dalam penelitian ini berupa jumlah WP efektif, terdaftar dan WP yang menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Kota Manado dan Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa.

Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak Restoran yang ada di kota Manado dan Kabupaten Minahasa. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan yang ada di Kota Manado, hingga akhir tahun 2014 tercatat sebanyak 381 WP yang merupakan WP efektif dan data dari



Dinas Pendapatan yang ada di Kabupaten Minahasa, hingga akhir tahun 2014 tercatat sebanyak 74 WP yang merupakan WP efektif. Sampel yang diambil dalam melakukan penelitian berjumlah 80 responden. Penentuan jumlah sampel responden didasarkan pada pernyataan Heir dkk (2006) yang menyatakan bahwa ukuran sampel yang baik dapat ditentukan dengan cara, jumlah pertanyaan dalam kuesioner dikali lima (5) sampai sepuluh (10). Jadi dalam penentuan jumlah sampel pada penelitian ini, perhitungannya adalah 16 pertanyaan  $\times 5 = 80$ , maka sampel penelitian yang digunakan adalah sebanyak 80 sampel.

#### 4.2 Metode Analisis

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Berikut ini estimasi regresi linier berganda

$$\text{Patuh} = \alpha + \beta_1 \text{Sikap WP} + \beta_2 \text{Fiskus} + \beta_3 \text{Sadar} + e$$

Patuh : Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien Regresi

Sikap WP : Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda

Fiskus : Pelayanan Fiskus

Sadar : Kesadaran Perpajakan

e : Error

Lokasi penelitian ini adalah di Wilayah kerja Dinas Pendapatan Kota Manado dan Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa. Waktu penelitian diperkirakan kurang lebih 3 bulan.

### 5 HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Hasil Analisis

Karakteristik responden dikelompokkan menurut usia, jenis kelamin, dan lama melakukan usaha. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka disajikan tabel mengenai responden.

**Tabel 1. Karakteristik Responden**

Data Deskriptif		Keterangan	Jumlah	Prosentase
Jenis Kelamin		Laki-laki	55	69 %
		Perempuan	25	31 %
Usia		Antara 21 th – 30 th	7	9 %
		Antara 31 th – 40 th	33	41%
		Antara 41 th – 50 th	23	29%
		Diatas 50 th	17	21%
Lama Melakukan Usaha		Kurang dari 5 th	26	33%
		Antara 6 th – 10 th	25	31%
		Antara 11 th – 15 th	16	20%
		Diatas 16 th	13	16%

Sumber data diolah (2016)

#### Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi yakni R Square variabel  $X_1$  (Sikap WP),  $X_2$  (Fiskus),  $X_3$  (Sadar) adalah sebesar 0,332 atau 33,2%. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel bebas, yaitu Sikap Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak yang diterangkan oleh model persamaan dalam penelitian

ini adalah sebesar 33,2%, sedangkan sisanya diterangkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

## Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 2. Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.733	.443			1.655	.102
X1	.191	.094	.214		2.039	.045
X2	.207	.118	.193		1.758	.083
X3	.361	.110	.341		3.275	.002

a. Dependent Variable: Y

Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = 0.733 + 0.191X_1 + 0.207X_2 + 0.361X_3 +$$

### Uji F

Hasil uji F dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikansi statistik sebesar 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel Sikap WP ( $X_1$ ), Fiskus ( $X_2$ ), dan Kesadaran ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

### Uji Statistik t (Uji t)

Hasil pengujian ini sebagaimana terdapat pada gambar 5.9 akan menjawab hipotesis 1 sampai hipotesis 3 dari penelitian ini antara lain : Pengaruh sikap wajib pajak pada sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Masing-masing hipotesis penelitian tersebut akan dijelaskan pada bagian di bawah ini :

**Tabel 3. Uji Statistik**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.733	.443			1.655	.102
X1	.191	.094	.214		2.039	.045
X2	.207	.118	.193		1.758	.083
X3	.361	.110	.341		3.275	.002

a. Dependent Variable: Y

Sumber data diolah (2016)

## 5.2 Pembahasan

### 1. Pembahasan Hipotesis Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat signifikansi variabel bebas sikap WP pada pelaksanaan sanksi denda adalah sebesar 0,045 yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansi statistik sebesar 0,05. Berdasarkan hal tersebut maka variabel sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam *theory of planned behavior*, *Control beliefs* berkaitan dengan sanksi pajak yaitu dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan formal wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Fraternesi (2001) menyatakan bahwa WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya.

Pertanyaan pertama dalam variabel Sanksi ini adalah “Anda merasa bahwa sudah sepantasnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 3,3 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab tidak pasti untuk pertanyaan ini. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju. Pertanyaan kedua adalah “Denda sebesar 2% per bulan adalah wajar”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3,41 yang artinya secara umum responden menjawab tidak pasti. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju.

Pertanyaan ketiga adalah “Pelaksanaan sanksi denda terhadap WP yang lalai oleh petugas pajak tepat pada waktunya”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3,74 yang artinya secara umum responden menjawab setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju.

Pertanyaan keempat adalah “Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap WP yang lalai membayar pajak dilakukan oleh WP yang bersangkutan”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 4,05 yang artinya secara umum responden menjawab setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju. Dari data yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan dalam variabel sikap wajib pajak pada sanksi denda, kebanyakan responden menjawab tidak pasti. Sikap wajib pajak pada sanksi denda dapat lebih ditingkatkan dengan cara memberikan sosialisasi, penyuluhan secara gratis kepada wajib pajak yang baru atau secara berkala mengirimkan pemberitahuan mengenai pelaksanaan sanksi denda agar kepatuhan wajib pajak dapat lebih tinggi.

## **2. Pembahasan Hipotesis Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tingkat signifikansi variabel bebas Pelayanan Fiskus adalah sebesar 0,085 yang lebih besar apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansi statistik sebesar 0,05. Berdasarkan hal tersebut maka variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam *theory of planned behavior*, *Normative beliefs* berkaitan dengan pelayanan fiskus, yaitu ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut dan dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Iva Farida Hidayati (2014) yang juga menemukan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta, penelitian ini dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang tergolong sebagai wajib pajak efektif, Iva Farida Hidayati mengatakan bahwa semakin wajib pajak mendapatkan pelayanan yang terbaik, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan berkurang. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di Kota Manado dan di Kabupaten Minahasa, dimana penulis mendapati bahwa semakin baik pelayanan yang dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak tidak akan bertambah. Hal ini disebabkan sistem menghitung pajak sendiri (*self assesment system*) membuat pembayaran pajak berada dipihak wajib pajak itu sendiri.

Pertanyaan pertama dalam variabel pelayanan fiskus ini adalah “Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3.47 yang artinya secara umum responden menjawab setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju.

Pertanyaan kedua adalah “Dalam menentukan pajak, ketetapan tarifnya telah adil”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3.6 yang artinya secara umum responden menjawab setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju atas pernyataan ini.

Pertanyaan ketiga adalah “Anda merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Fiskus dapat membantu pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban anda selaku WP”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3,64 yang artinya secara umum responden menjawab setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju atas pernyataan ini

Pertanyaan keempat adalah “Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah / efisien“. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3.3 yang artinya secara umum responden menjawab tidak pasti. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju atas pernyataan ini.

Dari data yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan dalam variabel pelayanan fiskus, kebanyakan responden menjawab setuju. Untuk itu fiskus dapat bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur sesuai yang ditetapkan, tanpa perlu melakukan inovasi-inovasi yang baru untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **3. Pembahasan Hipotesis Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tingkat signifikansi variabel bebas kesadaran perpajakan adalah sebesar 0,002 yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansi statistik sebesar 0,05. Berdasarkan hal tersebut maka variabel kesadaran perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam *theory of planned behavior*, *Behavioral beliefs* berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, yaitu ketika sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya, sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

Penelitian Suyatmin (2004) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Soemarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Lerche (1980) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk itu dinas pendapatan Kota Manado dan dinas pendapatan kabupaten Minahasa perlu membuat sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran perpajakan bagi wajib pajak yang ada.

Ada empat indikator yang digunakan untuk variabel Sadar. Pertanyaan pertama adalah “Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3.43 yang artinya secara umum responden menjawab tidak pasti. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju atas pernyataan ini.

Pertanyaan kedua adalah “Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3.38 yang artinya secara umum responden menjawab tidak pasti. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju atas pernyataan ini.

Pertanyaan ketiga adalah “Pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3.4 yang artinya secara umum responden menjawab tidak pasti. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju atas pernyataan ini.

Pertanyaan keempat adalah “Anda merasa yakin bahwa pajak yang sudah anda bayar benar-benar digunakan untuk pembangunan”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3.6 yang artinya secara umum responden menjawab setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2 yang artinya terdapat responden yang menjawab tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju atas pernyataan ini.

Dari data yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan dalam variabel kesadaran perpajakan, dapat diketahui bahwa kebanyakan responden penelitian ini masih memiliki kesadaran perpajakan yang tidak pasti. Kesadaran perpajakan dapat lebih ditingkatkan dengan cara memberikan sosialisasi melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya agar kepatuhan wajib pajak dapat lebih tinggi.

## 6 KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap WP pada pelaksanaan sanksi denda maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.
2. Pelayanan fiskus secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus kepada wajib pajak tidak membuat kepatuhan wajib pajak meningkat.
3. Kesadaran perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi Kesadaran perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

### Saran

1. Sanksi denda harus disosialisasikan dengan baik kepada para WP agar WP dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi denda serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi denda terhadap WP. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan secara gratis bagi para WP baru atau secara berkala mengirimkan pemberitahuan mengenai pelaksanaan sanksi denda.
2. Sistem menghitung pajak sendiri (*self assesment system*) membuat pelayanan fiskus menjadi tidak penting bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam hal pelayanan kepada wajib pajak, fiskus bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur sesuai yang ditetapkan, tanpa perlu melakukan inovasi-inovasi yang baru.
3. Perlu disosialisasikan sikap sadar membayar pajak di masyarakat. Sosialisasi ini dapat melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya. Bila perlu secara berkala Dinas Pendapatan di Kota Manado dan di Kabupaten Minahasa mengadakan acara yang mendidik serta menghibur masyarakat agar memiliki kesadaran perpajakan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek (1991), *The Theory of Planned Behavior*, Organization and Human Decision Processes 50, 179-211 (1991), Academic Press.Inc.
- Boediono, (2003), *Pelayanan Prima Perpajakan.*, Jakarta : Rineka Cipta..
- Cohen-Charash, Y., dan Spector, P. E. 2001. *The role of justice in organizations: A meta-analysis*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86 (2): 278-321
- Deden Saefudin (2003), "Hukuman dan Penghargaan Untuk Wajib Pajak," *Berita Pajak*, No. 1492/Tahun XXXV.
- Devano, S. dan Rahayu, S. K. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*, Cetakan Ketujuh . Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Ilyas, W. B. dan Burton, R. 2008. *Hukum Pajak (Edisi 4)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jogiyanto, H.M. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Lerche, Dietrich (1980), "Efficiency of Taxation in Indonesia," *BIES*, Vol. 16 No. 1.
- Malle, Bertram F. (2011), *Attribution Theories: How People Make Sense of Behavior*, dalam Chadee D. (ed.), *Theories in Social Psychology* (pp.72-95), Wiley-Blackwell.
- Miando Sahala H. Panggabean (2002), "Self Assessment, Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak," *Berita Pajak*, No. 1462/Tahun XXXIV.
- M. Said (2003), "Fenomena Pajak," *Berita Pajak*, No. 1488/Tahun XXXV.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Novak, Norma D. (1989), *Tax Administration in Theory and Practice*, London : Preager Publisher.
- Novitasari, Fin., (2007)., *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak.*, Skripsi Universitas Kristen Petra Surabaya.
- Nurmanto., Safri., (2003)., *Pengantar Perpajakan.*, (edisi kedua)., Jakarta : Granit.
- Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Minahasa
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia (Edisi 2)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Robbins, Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*, Edisi Duabelas, Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Robbins, Stephen P. (1996) *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia, Prenhallindo, Jakarta.
- Rustiyaningsih, Sri., (2011)., *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.*, Widya Warta No.02 Tahun XXXV / Juli 2011.
- Santi, A. N. 2012. *Analisis Pengaruh kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda, dan Sikap Fiskus Terhadap kepatuhan Wajib Pajak*, E-Journal Universitas Diponegoro Semarang, (Online), (<http://eprints.undip.ac.id/>), diakses 17 November 2013).
- Siat, Cahyaputra Christian., dan Toly, Agus Arianto., (2013)., *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya.*, Tax&Accounting Review, Vol.1, No.1, 2013.
- Soemarso S.R. (1998), “Dampak Reformasi Perpajakan 1984 Terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan Indonesia,” *Ekonomi dan Keuangan Perpajakan di Indonesia*, Vol. 46 No. 3.
- Suandy, E. 2008. *Hukum Pajak (Edisi 4)*. Jakarta: Salemba Empat.

# **PENGARUH PENGALAMAN AUDIT, KEAHLIAN AUDIT DAN TEKANAN KETAATAN TERHADAP AUDIT JUDGMENT BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

Christin Lisa Sanger, Ventje Ilat, Winston Pontoh  
(Email: [christin.sanger@yahoo.com](mailto:christin.sanger@yahoo.com))

## **ABSTRACT**

*This study aimed to examine the effect of audit experience, audit expertise, and obedience pressure to audit judgment taken by auditor. The sample of this research are auditors who worked on Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Representative of Nort Sulawesi Province. The sample was conducted by purposive sampling method. Collecting data was conducted by questionnaire distributed directly to auditors as much 50 and only 38 questionnaire replayed. Data analysis used multiple linear regression method with SPSS (Statistical Product and Service Solution). The result of this research showed that audit experience significantly affect audit judgment taken by auditor, obedience pressure significantly affect audit judgment taken by auditor, but audit expertise didn't significantly affect audit judgment taken by auditor, because the audit expertise in variabel measurement only use indicator : adetailed knowledge of the financial statements, have the ability to perform an audit in accordance with the regulations and have many types of certification / recognition of the expertise of technical training (does not represent an operational definition of variables). So that the results are less present facts on the ground.*

*Keywords: audit experience, audit expertise, obedience pressure, audit judgment.*

## **1. PENDAHULUAN**

Dewasa ini, pengguna laporan keuangan pemerintah daerah menuntut adanya transparansi atas penggunaan dana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengguna laporan keuangan mengharapkan adanya laporan keuangan yang dapat dipercaya, lengkap, dan benar sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Atas tuntutan akan pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan maka diterbitkannya PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kini telah diganti dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 oleh Pemerintah.

Selain diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan wajib diaudit oleh BPK. SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah akan lebih berkualitas, dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah pada tahun 2025 kedepan baik Provinsi dan Kabupaten Kota semua akan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan hal ini sudah mulai ditunjukkan oleh beberapa pemerintah daerah yang dimulai dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang meraih WTP dua kali berturut pada tahun 2009 dan 2010 dan diikuti oleh beberapa Kabupaten Kota yang mendapat Opini WTP serta Kabupaten Kota yang naik peringkat atau terjadi perubahan pengelolaan



keuangan daerah dari disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hingga Wajar Tanpa Pengecualian.

Penelitian mengenai *audit judgment* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Chung dan Monroe (2001) yang menguji pengaruh gender dan kompleksitas tugas terhadap *audit judgment* memberikan kesimpulan bahwa gender dan kompleksitas tugas yang tinggi berpengaruh secara signifikan terhadap *judgment* yang diambil oleh auditor. Penelitian Herliansyah dan Ilyas (2006) memberikan bukti tambahan bahwa pengalaman berpengaruh terhadap *audit judgment*. Wijayatri (2010) juga menguji variabel tekanan ketaatan dan keahlian yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit judgment* masih ada ketidakkonsistenan dari hasil penelitian mengenai *audit judgment* di Indonesia. Hal ini dikarenakan *judgment* auditor merupakan sebuah pertimbangan subyektif dari seorang auditor dan sangat tergantung dari persepsi individu mengenai suatu situasi. Selain itu hasil penelitian terdahulu juga belum dapat digeneralisir untuk seluruh Indonesia dalam pengambilan *judgment* auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga membutuhkan tambahan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi auditor dalam membuat suatu *judgment*. Hal tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai, “Pengaruh Pengalaman Audit, Keahlian Audit dan Tekanan Audit terhadap *Audit Judgment* BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, maka permasalahan dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap *audit judgment* yang diambil oleh auditor?
2. Apakah keahlian audit berpengaruh terhadap *audit judgment* yang diambil oleh auditor?
3. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh terhadap *audit judgment* yang diambil oleh auditor?
4. Apakah pengalaman audit, keahlian audit dan tekanan ketaatan berpengaruh terhadap *audit judgment* yang diambil oleh auditor ?

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Teori Motivasi**

McClelland mengemukakan motivasi didasarkan dari kekuatan yang ada pada diri manusia adalah motivasi prestasi dimana seseorang dianggap mempunyai apabila dia mempunyai keinginan berprestasi lebih baik dari pada yang lain pada banyak situasi.

### **2.2. Teori X dan Y McGregor**

McGregor mengemukakan dua pandangan mengenai manusia yaitu teori X (negatif) dan teori Y (positif). Seorang auditor pada dasarnya termasuk dalam tipe Y dimana auditor dapat bertanggungjawab terhadap tugasnya sebagai auditor. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan seorang auditor harus mematuhi standar auditing, dimana dalam standar tersebut disebutkan bahwa auditor harus mempertahankan independensi dan tanggung jawabnya dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan. Auditor tidak boleh terpengaruh oleh gangguan yang dapat merusak tanggung jawabnya, baik gangguan pribadi, eksternal, dan organisasi.

### **2.3. Teori Penetapan Tujuan**

Teori penetapan tujuan dikemukakan oleh Edwin Locke pada tahun 1990. Teori penetapan tujuan menjelaskan hubungan antara tujuan dengan perilaku apabila seseorang memahami tujuan maka akan terpengaruh kinerjanya. Locke mengemukakan bahwa niat mencapai sebuah tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Tujuan akan memberi tahu seorang individu apa yang harus dilakukan dan berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan.

Auditor yang dapat memahami apa yang menjadi tujuannya dan apa yang dia harapkan atas hasil kinerjanya, tidak akan bersikap menyimpang ketika mendapat tekanan dari atasan atau entitas yang diperiksa. Pemahaman mengenai tujuannya dapat membantu auditor membuat suatu *audit judgment* yang baik. Auditor seharusnya memahami bahwa tugas auditor adalah

memberikan jasa profesional untuk menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan manajemen kepada masyarakat yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Melalui pemahaman ini auditor akan tetap bersikap profesional sesuai dengan etika profesi dan standar profesional yang berlaku meskipun menghadapi rintangan dalam tugas auditnya.

#### 2.4. Teori Kognitif

Psikologi kognitif menjelaskan bahwa perilaku manusia tidak ditentukan oleh stimulus yang berada diluar dirinya, melainkan oleh faktor yang ada pada dirinya sendiri. Faktor internal tersebut berupa kemampuan atau potensi yang berfungsi untuk mengenal dunia luar, dan dengan pengenalan itu manusia mampu memberikan respon terhadap stimulus. Berdasarkan pada pandangan itu, teori kognitif memandang belajar sebagai proses pemfungsian unsur-unsur kognisi terutama pikiran untuk mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Dengan kata lain, aktivitas belajar manusia ditentukan pada proses internal dalam berpikir yakni pengolahan informasi.

Teori kognitif dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana auditor mengambil suatu pertimbangan berdasarkan pengalaman dan keahliannya dalam melaksanakan tugas audit. Ketika pengalaman audit seorang auditor bertambah maka *judgment* yang dibuat akan lebih berkualitas. Setiap kali auditor melakukan audit maka auditor akan belajar dari pengalaman sebelumnya, memahami serta meningkatkan kecermatan dalam pelaksanaan audit. Auditor akan mengintegrasikan pengalaman auditnya dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Proses memahami dan belajar inilah yang menjadi proses peningkatan keahlian auditor. Auditor yang berpengalaman dan didukung keahlian dalam mengaudit dapat menghasilkan *judgment* yang lebih berkualitas dibandingkan dengan auditor yang tidak berpengalaman dan tidak mempunyai keahlian audit.

#### 2.5. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. SPKN ini ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 sebagaimana amanat UU yang ada. Sejak ditetapkannya Peraturan BPK ini dan dimuatnya dalam Lembaran Negara, SPKN akan mengikat BPK, akuntan publik dan pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Tujuan dari SPKN adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sehingga diharapkan hasil pemeriksaan BPK dapat lebih berkualitas yaitu memberikan nilai tambah yang positif bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia.

#### 2.6. Kode Etik Pemeriksa

Peraturan BPK RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang kode etik BPK RI mulai diberlakukan sejak tanggal 7 Oktober 2011. Kode Etik bertujuan untuk memberikan pedoman yang wajib ditaati oleh Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK lainnya untuk mewujudkan BPK yang berintegritas, independen, dan profesional demi kepentingan negara. Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara/Pejabat Negara dalam melaksanakan pemeriksaan dan dalam kehidupan sehari-hari, baik selaku individu dan anggota masyarakat, maupun selaku warga Negara.

#### 2.7. *Audit judgment*

*Audit judgment* merupakan suatu pertimbangan pribadi atau cara pandang auditor dalam menanggapi informasi yang mempengaruhi dokumentasi bukti serta pembuatan keputusan

pendapat auditor atas laporan keuangan suatu entitas. Jamilah, dkk (2007) menyatakan *audit judgment* adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status, atau jenis peristiwa lainnya. Setiap langkah dalam proses *incremental judgment*, jika informasi terus menerus datang akan muncul pertimbangan baru dan keputusan atau pilihan baru.

*Audit judgment* diperlukan karena audit tidak dilakukan terhadap seluruh bukti. Bukti inilah yang digunakan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, sehingga dapat dikatakan bahwa *audit judgment* ikut menentukan hasil dari pelaksanaan audit. Rochmawati (2009) menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat melakukan *audit judgment* yaitu merumuskan persoalan, mengumpulkan informasi yang relevan, mencari alternatif tindakan, menganalisis alternatif yang fleksibel, memilih alternatif yang terbaik, kemudian pelaksanaan dan evaluasi hasilnya.

## 2.8. Pengalaman Audit

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku (Anugrah, 2012). Pengalaman seseorang dapat diartikan sebagai suatu proses yang dapat membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Pengalaman dapat memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin trampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Puspaningsih, 2004).

. Pengalaman audit adalah pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan suatu entitas. Abdolmohammadi dan Wright (1987) menemukan bahwa *judgment* auditor yang tidak berpengalaman mempunyai tingkat populasi kesalahan yang secara signifikan lebih besar dibandingkan auditor berpengalaman. Semakin berpengalaman seorang auditor maka dia akan semakin mampu dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam melakukan pemeriksaan.

## 2.9. Keahlian Audit

Dalam Standar pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Tentang Standar Umum pada paragraph 11 menyebutkan bahwa keahlian yang dibutuhkan dalam tugas pemeriksaan keuangan adalah keahlian di bidang akuntansi dan auditing, memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa, dan memiliki sertifikasi. Secara kolektif pemeriksa harus membagi tugas pemeriksaan sesuai keahlian masing-masing dan mendapatkan komitmen dari anggota pemeriksa akan peran mereka dalam penyelesaian tugas dan memenuhi harapan pemberi tugas agar dapat dilaksanakan pemeriksaan yang efektif dan efisien.

Keahlian merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor independen untuk bekerja sebagai tenaga profesional (Asih, 2006). Keahlian audit mencakup antara lain: merencanakan pemeriksaan, melaksanakan program kerja pemeriksaan, menyusun kertas kerja, menyusun berita pemeriksaan, dan laporan hasil pemeriksaan. Keahlian auditor dalam melakukan audit menunjukkan tingkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki auditor.

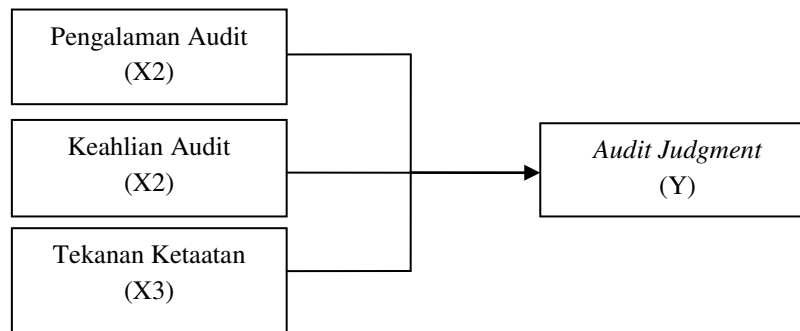
## 2.10. Tekanan Ketaatan

Tekanan ketaatan pada umumnya dihasilkan oleh individu yang memiliki kekuasaan. Dalam hal ini tekanan ketaatan diartikan sebagai tekanan yang diterima oleh auditor junior dari auditor senior atau atasan dan entitas yang diperiksa untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari standar etika dan profesionalisme. Intruksi atasan dalam suatu organisasi akan mempengaruhi perilaku bawahan karena atasan memiliki otoritas (Grediani dan Slamet, 2007).

Pengaruh dari tekanan ketaatan biasanya dialami oleh auditor pemula, karena mereka biasanya masih cenderung untuk menaati perintah atasan maupun entitas yang diperiksa meskipun perintah tersebut tidak benar bahkan dapat melanggar standar profesional. Tekanan ketaatan dapat menghasilkan variasi pada *judgment* auditor dan memperbesar kemungkinan pelanggaran standar etika dan profesional.

### 3. Hipotesis dan Model

Kerangka pikir dari penelitian “Pengaruh Pengalaman Audit, Keahlian Audit dan Tekanan Ketaatan Terhadap Audit Judgment BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara” adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Model

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengalaman audit berpengaruh terhadap *judgment* yang diambil oleh auditor.

H2 : Keahlian audit berpengaruh terhadap *judgment* yang diambil oleh auditor.

H3 : Tekanan ketaatan berpengaruh terhadap *judgment* yang diambil oleh auditor.

H4 : Pengalaman audit, keahlian audit dan tekanan ketaatan berpengaruh terhadap *judgment* yang diambil oleh auditor.

### 4. METODE PENELITIAN

#### 4.1. Data

Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang. Pada penelitian ini menggunakan sampel. Besarnya sampel yang diambil adalah menggunakan prinsip sampel besar yaitu menurut statistik sampel besar adalah minimal 30. Pada penelitian ini jumlah sampel yang diambil sebesar 50 pemeriksa (syarat ini telah memenuhi sampel minimal).

#### 4.2. Variabel dan Pengukuran Variabel

Pada penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur *audit judgment* (Y) adalah sebagai berikut :

1. Materialitas adalah salah saji dalam laporan keuangan
2. Perekayasa transaksi oleh entitas adalah kemampuan pemeriksa untuk mendeteksi adanya perekayasa transaksi oleh entitas.
3. Memperluas pengujian berdasarkan bukti audit adalah keinginan yang besar dari pemeriksa untuk melakukan pendalaman terhadap bukti yang ada.

Variabel Independen

Pengalaman audit adalah pengalaman yang dimiliki oleh auditor dalam menjalankan profesinya sebagai auditor eksternal pemerintah. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Susetyo (2009).

Pada penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur pengalaman audit (X1) adalah sebagai berikut:

1. Intensitas Penugasan audit adalah persepsi dari pemeriksa terhadap banyak sedikitnya penugasan audit dilapangan.
2. Intensitas lama waktu audit adalah persepsi dari pemeriksa terhadap lamanya waktu melaksanakan masa penugasan.
3. Tugas diberbagai daerah adalah persepsi pemeriksa bahwa tugas diberbagai tempat penting bagi keahlian diri.

Pada penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur keahlian audit (X2) adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan auditor adalah kemampuan mengetahui secara detail laporan keuangan dari entitas.
2. Kemampuan melakukan audit adalah kemampuan pemeriksa melakukan sesuai dengan peraturan
3. Sertifikasi /pengukuran keahlian adalah persepsi atas banyaknya pelatihan teknis yang diikuti.

Pada penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur tekanan ketaatan (X3) adalah sebagai berikut :

1. Instruksi atasan adalah intensitas kuatnya pemeriksaan untuk patuh dan taat pada instruksi atasan. (Grediani dan Slamet, 2007)
2. Perubahan Psikologis adalah tetap konsisten walau bekerja dalam tekanan. (Hartanto, 2011)
3. Standar etika adalah tetap berpegang pada standar-standar moral walaupun bekerja dalam tekanan.

Semua indikator pada penelitian ini menggunakan skala likert menurut Sugiyono (2014), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Dengan nilai terendah 1 dan tertinggi 5 dengan klasifikasi sebagai berikut : sangat setuju 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1.

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode regresi berganda (*multiple regression*) dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

## 5. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Regresi

$$Y = 2,293 + 0,495 X_1 + 0,030 X_2 + 0,330 X_3 + \varepsilon$$

Persamaan regresi berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menunjukkan bahwa pengalaman audit memiliki pengaruh positif terhadap *audit judgment* yang diambil oleh auditor dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,495.
2. Menunjukkan bahwa keahlian audit memiliki pengaruh positif terhadap *audit judgment* yang diambil oleh auditor dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,030.
3. Menunjukkan bahwa tekanan ketaatan memiliki pengaruh positif terhadap *audit judgment* yang diambil oleh auditor dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,330.

4. Nilai intersep sebesar 2,293 menunjukkan bahwa apabila pengalaman audit, keahlian audit dan tekanan ketaatan dianggap konstan, maka *audit judgment* akan bertambah sebesar 2,520 satuan.

#### Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Melalui uji statistik secara simultan, menunjukkan bahwa  $F_{hitung} = 11,746$ , sehingga  $F_{hitung} = 11,746 > F_{tabel} = 2,88$  juga dapat dilihat tingkat signifikansi adalah  $0,000 < 0,005$  atau dibawa 5% ataupun 1 %. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel pengalaman audit, keahlian audit dan tekanan ketaatan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *audit judgment*.

#### Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pengaruh pengalaman audit (X1) terhadap audit judgment Nilai  $t_{hitung}$  dari variabel pengalaman audit adalah 2,945, sehingga:

$$t_{hitung} = 2,945 > t_{tabel} = 2,03224$$

1. Signifikansi dari variabel pengalaman audit adalah sebesar  $0,006 < 0,05$ .
2. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a1}$  diterima dan  $H_{o1}$  ditolak, sehingga terbukti bahwa pengalaman audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit judgment*.

#### Pengaruh keahlian audit (X2) terhadap audit judgment

1. Nilai  $t_{hitung}$  dari variabel keahlian audit adalah 0,275, sehingga:

$$t_{hitung} = 0,275 < t_{tabel} = 2,03224$$

2. Signifikansi dari variabel keahlian audit adalah sebesar  $0,785 > 0,05$ .
3. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a2}$  ditolak dan  $H_{o2}$  diterima, sehingga tidak terbukti bahwa keahlian audit berpengaruh secara signifikan terhadap *audit judgment*. Jadi, keahlian audit tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*.

#### Pengaruh tekanan ketaatan (X3) terhadap audit judgment

1. Nilai  $t_{hitung}$  dari variabel pengalaman audit adalah 2,172, sehingga:

$$t_{hitung} = 2,172 > t_{tabel} = 2,03224$$

2. Signifikansi dari variabel tekanan ketaatan adalah sebesar  $0,037 < 0,05$ .
3. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a3}$  diterima dan  $H_{o3}$  ditolak, sehingga terbukti bahwa tekanan ketaatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit judgment*.

#### Uji Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (*adjusted R*<sup>2</sup>)

Hasil uji koefisien korelasi yang dihasilkan antara variabel independent pengalaman audit (X1), keahlian audit (X2) dan tekanan ketaatan (X3) dengan variabel *audit judgment* (Y) adalah sebesar 0,713 artinya ketiga variabel independen secara bersama-sama memiliki hubungan yang kuat sebesar 71,3%. Hasil perhitungan koefisien determinasi dalam penelitian ini tampak bahwa nilai koefisien determinasi adalah 0,466. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel bebas, yaitu pengalaman audit, keahlian audit, tekanan ketaatan terhadap variabel terikat yaitu *audit judgment* yang diterangkan oleh model persamaan dalam penelitian ini adalah sebesar 47%, sedangkan sisanya sebesar 53% disebabkan oleh faktor-faktor lain diluar pengujian ini.

## 5.2 Pembahasan

### 5.2.1 Pengaruh Pengalaman Audit (X1) terhadap Audit Judgemen (Y)

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pada variabel Pengalaman audit,  $t_{hitung} = 2,945 > t_{tabel} = 2,232$  sehingga pengalaman audit berpengaruh secara signifikan terhadap *audit judgment* yang diambil oleh Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengalaman audit yang dimiliki oleh seorang auditor maka *judgment* yang diambil auditor juga akan semakin baik dan tepat. Banyaknya

pengalaman dalam bidang audit dapat membantu auditor dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang cenderung mempunyai pola yang sama.

Berdasarkan teori kognitif, praktik-praktik dalam bidang auditing sebagai auditor independen dapat menjadi sarana pembelajaran dan pengalaman bagi auditor. Auditor akan mengintegrasikan pengalaman serta pengetahuan yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas yang akan datang. Dibidang audit, pengalaman auditor merupakan faktor penting yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pengalaman audit adalah pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan suatu entitas. Sehingga semakin berpengalaman seorang auditor maka dia akan semakin mampu dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas pemeriksaan setiap kali auditor melakukan audit maka auditor akan belajar dari pengalaman audit sebelumnya dan meningkatkan kecermatan serta memperkaya pengetahuan dalam pelaksanaan audit sehingga *judgment* yang diambil oleh auditor tersebut akan semakin berkualitas.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2016) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam melakukan *Audit Judgment* pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah dan DIY disimpulkan bahwa semakin tinggi pengalaman auditor maka *judgment* yang diambil oleh auditor cenderung tepat. Didukung juga oleh Praditaningrum (2012), menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit judgment* pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah disimpulkan bahwa Pengalaman audit yang tinggi dapat memberikan kenaikan *audit judgment*, penelitian Zulaikha (2006) menjelaskan bahwa pengalaman auditor memiliki *main effect* terhadap pertimbangan audit, dimana dalam penugasan audit utamanya perlu memperhatikan pengalamannya sebagai auditor.

#### 5.2.3. Keahlian audit (X2) terhadap Audit Judgemen (Y)

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pada variabel keahlian audit,  $t_{hitung} = 0,275 < t_{tabel} = 2,032$  sehingga keahlian audit tidak berpengaruh terhadap *audit judgment* yang diambil oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Hasil pengujian ini menunjukan bahwa keahlian audit oleh seorang auditor tidak berpengaruh terhadap *judgment*.

Dalam Standar pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Tentang Standar Umum pada paragraph 11 menyebutkan bahwa keahlian yang dibutuhkan dalam tugas pemeriksaan keuangan adalah keahlian di bidang akuntansi dan auditing, memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa, dan memiliki sertifikasi. Secara kolektif pemeriksa harus membagi tugas pemeriksaan sesuai keahlian masing-masing dan mendapatkan komitmen dari anggota pemeriksa akan peran mereka dalam penyelesaian tugas dan memenuhi harapan pemberi tugas agar dapat dilaksanakan pemeriksaan yang efektif dan efisien.

Keahlian dapat diartikan sebagai keberadaan dari pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah yang timbul dari lingkungan tersebut dan ketrampilan untuk memecahkan masalah tersebut sehingga auditor dapat mengerjakan pekerjaan secara mudah, cepat, intuisi, dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.

Keahlian merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor independen untuk bekerja sebagai tenaga profesional. Kemampuan dan pengetahuan auditor di bidang auditing dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun keikutsertaan dalam pelatihan atau seminar sehingga auditor dapat merencanakan pemeriksaan, melaksanakan program kerja pemeriksaan, menyusun kertas kerja, menyusun berita acara pemeriksaan, dan laporan hasil pemeriksaan. Selain itu keahlian auditor juga dapat bertambah seiring dengan pengalaman kerja maupun praktek audit yang telah dilakukannya.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Drupadi (2015) yang menganalisis pengaruh keahlian auditor, tekanan ketaatan dan independensi pada *audit judgment* auditor KAP di wilayah Bali disimpulkan bahwa semakin tinggi keahlian seorang auditor maka semakin akurat *audit judgment* yang dihasilkan. Keahlian seorang auditor dapat meningkat dengan tinggi pendidikan dan banyaknya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki auditor. Begitu pula dengan penelitian Mayangsari (2003) yang menyatakan bahwa auditor yang mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik atas laporan keuangan, akan lebih mampu memberikan penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan penelitian Waspodo (2007) juga menyatakan auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai pandangan yang lebih luas mengenai berbagai hal.

#### 5.2.4. Tekanan Ketaatan (X3) terhadap Audit Judgemen (Y)

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pada variabel tekanan ketaatan,  $t_{hitung} = 2,172 > t_{tabel} = 2,032$  sehingga tekanan ketaatan berpengaruh secara signifikan terhadap *audit judgment* yang diambil oleh auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Tekanan ketaatan pada umumnya dihasilkan oleh individu yang memiliki kekuasaan. Dalam hal ini tekanan ketaatan diartikan sebagai tekanan yang diterima oleh auditor junior dari auditor senior atau atasan dan entitas yang diperiksa untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari standar etika dan profesionalisme. Intruksi atasan dalam suatu organisasi akan mempengaruhi perilaku bawahan karena atasan memiliki otoritas.

Pengaruh dari tekanan ketaatan biasanya dialami oleh auditor pemula, karena mereka biasanya masih cenderung untuk menaati perintah atasan maupun entitas yang diperiksa meskipun perintah tersebut tidak benar bahkan dapat melanggar standar profesional. Tekanan ketaatan dapat menghasilkan variasi pada *judgment* auditor dan memperbesar kemungkinan pelanggaran standar etika dan profesional.

Berdasarkan teori penetapan tujuan, auditor yang tidak mengetahui dengan pasti tujuannya biasanya cenderung mudah berperilaku menyimpang dengan menuruti perintah dari atasan dan entitas yang diperiksa untuk berperilaku menyimpang dari standar etika dan profesional. Hal ini akan mengakibatkan auditor tidak mampu membuat *judgment* yang baik dan tepat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hartanto (2000) menunjukkan bukti bahwa auditor yang mendapatkan perintah tidak tepat baik itu dari atasan ataupun dari klien cenderung akan berperilaku menyimpang dari standar profesional sehingga mengakibatkan tekanan ketaatan berpengaruh secara signifikan terhadap *judgment* yang diambil oleh auditor. Penelitian Jamilah,dkk. (2007) juga memberikan bukti bahwa tekanan ketaatan dapat mempengaruhi auditor dalam membuat suatu *judgment*. Hal ini berarti semakin tinggi tekanan ketaatan yang diterima oleh auditor maka *judgment* yang diambil oleh auditor akan semakin tidak baik dan tidak tepat.

#### 5.2.5. Pengalaman Audit (X1), Keahlian Audit(X2) dan Tekanan Ketaatan (X3) terhadap Audit Judgemen (Y)

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa  $F_{hitung} = 11,746$ , sehingga  $F_{hitung} = 11,746 > F_{tabel} = 2,88$  juga dapat dilihat tingkat signifikansi adalah  $0,000 < 0,005$  atau dibawah 5% ataupun 1 %. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pengalaman audit, keahlian audit dan tekanan ketaatan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap *audit judgment* yang diambil oleh auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Pengalaman mengarah kepada proses pembelajaran dan penambahan potensi bertingkah laku dari pendidikan formal maupun nonformal. Pengalaman juga bisa dikatakan sebagai proses yang membawa seseorang menuju kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Semakin



berpengalaman seorang auditor maka dia akan semakin mampu dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas pemeriksaan setiap kali auditor melakukan audit maka auditor akan belajar dari pengalaman audit sebelumnya dan meningkatkan kecermatan serta memperkaya pengetahuan dalam pelaksanaan audit sehingga *judgment* yang diambil oleh auditor tersebut akan semakin berkualitas.

Keahlian auditor mengarah pada tingkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki auditor. Kemampuan dan pengetahuan auditor di bidang auditing dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun keikutsertaan dalam pelatihan atau seminar. Keahlian auditor juga dapat bertambah seiring dengan pengalaman kerja maupun praktek audit yang telah dilakukannya sehingga *judgment* yang diambil oleh auditor tersebut akan semakin berkualitas.

Tekanan ketaatan mengarah kepada tekanan yang didapatkan dari atasan dan juga tekanan yang berasal dari entitas yang diperiksa. Entitas yang diperiksa mempengaruhi proses pemeriksaan dan menekan auditor untuk mengambil tindakan yang melanggar standar pemeriksaan. Situasi ini membuat auditor dalam situasi konflik, dimana auditor berusaha untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya yang harus dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran, integritas dan menjunjung praktek yang fair dan bermoral tetapi disisi lain dituntut pula untuk mematuhi perintah dari entitas yang diperiksa maupun dari atasannya. Adanya tekanan untuk taat dapat membawa dampak pada *judgment* yang diambil oleh auditor. Semakin tinggi tekanan yang dihadapi oleh auditor maka *judgment* yang diambil oleh auditor cenderung kurang tepat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Praditaningrum (2012), menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit judgment* yang menyatakan bahwa pengalaman audit, keahlian audit dan tekanan ketaatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *audit judgment*.

## **6. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini meneliti pengaruh pengalaman audit, keahlian audit dan tekanan ketaatan terhadap *audit judgment*. Auditor pada penelitian ini yaitu auditor yang ada di BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada 38 orang auditor. Kuesioner diolah menggunakan alat statistik SPSS.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pengalaman audit (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap *audit judgment* (Y). Nilai koefisien regresi pengalaman audit sebesar 0,495 satuan. Auditor akan mengintegrasikan pengalaman serta pengetahuan yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas yang akan datang. Dibidang audit, pengalaman auditor merupakan faktor penting yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Semakin berpengalaman seorang auditor maka dia akan semakin mampu dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas pemeriksaan.
- b. Keahlian audit (X2) tidak berpengaruh terhadap *audit judgment* (Y). Nilai koefisien regresi pengalaman audit sebesar 0,030. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa keahlian audit oleh seorang auditor tidak berpengaruh terhadap *judgment*. Kondisi ini menunjukkan bahwa seharusnya seorang auditor independen untuk bekerja sebagai tenaga profesional harus memiliki keahlian audit sehingga dapat menghasilkan *judgment* yang semakin akurat.
- c. Tekanan ketaatan (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap *audit judgment* (Y). Nilai koefisien regresi tekanan ketaatan sebesar 0,330. Auditor yang mendapatkan tekanan ketaatan yang besar dari atasan dan entitas yang diperiksa akan cenderung untuk berperilaku menyimpang dan menghasilkan *audit judgment* yang tidak baik dan kurang tepat.

- d. Pengalaman audit (X1), keahlian audit (X2) dan tekanan ketaatan (X3) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap *audit judgment* (Y). Nilai  $F_{hitung} = 11,746$ , sehingga  $F_{hitung} = 11,746 > F_{tabel} = 2,88$  juga dapat dilihat tingkat signifikansi adalah  $0,000 < 0,005$  atau dibawa 5% ataupun 1 %.
- e. Hubungan antara Variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) memiliki hubungan yang kuat sebesar 71,3%.
- f. Pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel (Y) sebesar 0,466 (47%) sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar pengujian ini.

#### Keterbatasan dan Saran

- a. Dalam pengukuran variabel Keahlian audit hanya menggunakan indikator memiliki pengetahuan secara detail atas laporan keuangan, memiliki kemampuan melakukan audit sesuai dengan peraturan dan memiliki banyak jenis sertifikasi/pengakuan keahlian dari pelatihan teknis (tidak mewakili definisi operasional variabel). Sehingga hasil yang didapat kurang merepresentasikan fakta yang ada di lapangan.
- b. Waktu pembagian kuesioner dilakukan pada saat waktu pemeriksaan auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sehingga pengembalian kuesioner tidak maksimal.
- c. Saran untuk penelitian berikutnya supaya dalam pembagian kuesioner jangan pada saat pemeriksaan dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian, tidak hanya BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara supaya hasil dapat digeneralis.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdolmohammadi, M dan A. Wright. 1987. An Examination of The Effect of Experience and Task Complexcity on Audit judgment., *Journal of The Accounting Review*, 62 : 1-13.
- Asih, Dwi Ananing Tyas. 2006. "Pengaruh Pengalaman Terhadap Peningkatan Keahlian Auditor Dalam Bidang Auditing". Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Bonner. 1999. *Judgment and decision making research in accounting. Journal Accounting Horizons*, 13 (3):385-398.
- Chung, J. dan G. S. Monroe. 2001. "A Research Note on The Effect of Gender and Task Complexity on Audit judgment". *Journal of Behavioral Research*, 13: 111-125.
- Drupardi, Made, Julia. 2015. "Pengaruh Keahlian Auditor, Tekanan Ketaatan Dan Independensi Pada Audit Judgment". *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.12.3 (2015). 623-655.
- Efendy, M. Taufiq. 2010. "Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Motifasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah". *Tesis Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Ghozali, Imam. 2011 *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS Update PLS Regresi Edisi*. Diponegoro.
- Hartanto, Hansiadi Yuli dan Indra Wijaya Kusuma. 2001. "Analisis Pengaruh Tekanan Ketaatan Terhadap Judgment Auditor". *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Ed. Desember, hal 1-14.
- Herliansyah, Yudhi dan Meifida Ilyas. 2006. "Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Penggunaan Bukti Tidak Relevan Dalam Auditor Judgment". *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- Jamilah, Siti, Zaenal Fanani, dan Grahita Chandrarin. 2007. "Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan, dan Kompleksitas Tugas terhadap Audit Judgment". *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar*.
- Magareta, Agnez, Novita. 2014. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Judgment pada Auditor BPK RI". *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol.3, Nomor 2, Tahun 2014.

- Mayangsari, Sekar. 2003. “*Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi Terhadap Pendapat Audit: Sebuah Kuasi Eksperimen*”. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 6 No.1 Januari, hal 1-22.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Ed.6. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Peraturan. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*.
- Peraturan. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*.
- Peraturan. 2007 Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2007, *tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- Peraturan. 2007 Peraturan BPK-RI Nomor 02 Tahun 2007, *tentang Kode Etik*.
- Praditaningrum, Anugrah Suci. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Audit Judgment (Studi pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV. ASP-06.
- Puspitasari, Novy. 2010. “Penilaian Hubungan Insentif Kinerja, Usaha, dan Kompleksitas Tugas Terhadap Kinerja Audit Judgment”. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Rahmawaty, Novita. 2016. “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Auditor Dalam Melakukan Audit Judgment*”. Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahmawi dan Setyaningtyas Honggowati. 2004. “*Pengaruh Tekanan Kepatuhan, Gender, Autorarian dan Pertimbangan Moral Terhadap Audit Judgment*”. Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol 4, No.1, 42-46.
- Rochmawati, Vivi Devi. 2009. “*Pengaruh Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan dan Pengalaman Audit Terhadap Auditor Judgment*”. Thesis, Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Susetyo, Budi. 2009. “*Pengaruh Pengalaman Audit Terhadap Pertimbangan Auditor Dengan Kredibilitas Klien Sebagai Variabel Moderating*”. Tesis, Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.
- Suyanto, Dadang. 2013, *Aplikasi AUDITING Pemeriksaan Akuntansi*, Penerbit CAPS (Center of Academic Publising Service).
- Undang-undang No. 15 Tahun 2006 *tentang Badan Pemeriksa Keuangan*, Penerbit Fokusmedia: Bandung.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*, Penerbit Fokusmedia: Bandung.
- Wijayatri, Astri. 2010. “Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, dan Keahlian Audit Terhadap Audit Judgment”. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Yustrianthe, Rahmawati Hanny. 2012. “Kajian Empiris Audit Judgement pada Auditor. Media Riset Akuntansi”. Vol 2 No.2.
- Zulaikha. 2006. “*Pengaruh Interaksi Gender, Kompleksitas Tugas, dan Pengalaman Auditor Terhadap Audit Judgment*”. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.

# **ANALISA PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH OLEH INSPEKTORAT DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

Theyza Korah, Herman Karamoy, LintjeKalangi  
[korahtheyza@yahoo.co.id](mailto:korahtheyza@yahoo.co.id)

## **ABSTRACT**

*This research done to Analyze The Implementation Of Government Regulation Number 60 Of 2008 Concerning Internal Control Systems Of Government views from the north sulawesi 5 control elements. This is descriptive qualitative research, with developing framework to analyze think. Process and meaning. Research subjects required by using purposive sampling technique. Iepemeliha informants based researchers from consideration of certain criteria, that may be as much information from various sources. The study performed in three object of research, research and this indicates that the Government In The Province Of North Sulawesi already implement effective regulation of internal control systems and needs a good cooperation in applying such regulations as between the inspectorate of internal control and inspection unit working as object.*

*Keywords ; Government Regulation Number 60 Of 2008, 5 Elements Of Internal Control*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar belakang**

Pada era pembangunan saat ini negara kita yaitu Republik Indonesia harus mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Dan untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan suatu sistem pemerintahan yang tidak kompromi atau tidak melegalkan setiap kepentingan yang berhubungan dengan pelanggaran norma-norma atau hukum yang berlaku yang sudah di atur dalam undang – undang sebagai dasar negara.

Beberapa daerah telah memenuhi standar tersebut sehingga meraih WTP. “Standar tersebut mengharuskan BPK-RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan. Agar BPK-RI memperoleh keyakinan memadai, laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah, dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan BPK secara keseluruhan, mengungkapkan ada 31 temuan 12 temuan merupakan kelemahan dalam desain dan penerapan sistem pengendalian intern, dan 19 temuan terkait kepatuhan per-undang-undangan, Dalam laporan BPK No. 14.A/LHP/XIX.MND/07/2014 tanggal 23 juli 2014, BPK menyatakan Opini WDP atas neraca Pemerintah Provinsi Sulut per 31 Desember 2013. Namun, Tahun 2014 Pemprov Sulut telah melakukan perbaikan atas masalah-masalah yang terjadi di Tahun Anggaran 2013 lalu.

Tabel. 1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2011-2014

No	Entitas Pemerintah Daerah	Opini 2011	Opini 2012	Opini 2013	Opini 2014
1	Prov.Sulawesi Utara	WDP	WTP DPP	WDP	WTP
2	Kota Manado	TW	WDP	WDP	WTP DPP
3	Kab. Minahasa Utara	TMP	WDP	WDP	WDP
4	Kab.Minahasa Selatan	TMP	TMP	TW	WDP
5	Kab.Minahasa	WDP	TW	WDP	WTP DPP
6	Kab.Minahasa Tenggara	TMP	TMP	TW	WDP
7	Kab.Bolaang Mongondow	TMP	TMP	TW	WDP
8	Kab.Bolaang Mongondow Selatan	TMP	WDP	WDP	WTP DPP
9	Kab.Bolaang Mongondow Timur	TMP	WDP	WTP DPP	WTP DPP
10	Kab.Bolaang Mongondow Utara	TMP	TMP	WDP	WDP
11	Kab.Kepulauan Sangihe	WDP	WDP	WTP DPP	WTP DPP
12	Kab. Kep, Siau Tagulandang Biaro	WDP	WDP	WTP DPP	WTP DPP
13	Kab. Kepulauan Talaud	TMP	TW	TW	WDP
14	Kota Bitung	WTP DPP	WTP DPP	WTP DPP	WTP
15	Kota Kotamobagu	TW	WDP	WTP DPP	WTP DPP
16	Kota Tomohon	TMP	WDP	WTP DPP	WTP DPP

Sumber ; Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ([www.bpk.go.id/ihrs/2015/I](http://www.bpk.go.id/ihrs/2015/I))

Hasil pemeriksaan ini memberikan dasar yang memadai bagi BPK menyatakan pendapat atau opini. Dasar pertimbangan dalam menetapkan opini dalam LHP atas LKPD Provinsi Sulut TA 2014 yang telah diserahkan antara lain adalah opini dan tingkat *planning materiality* atas LKPD Provinsi Sulut TA 2014, serta berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi atas pengendalian intern pemerintah, dan kepatuhan terhadap peraturan per-undang-undangan. Oleh karena itu, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di uraikan diatas BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP,red) atas LKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2014,” Berdasarkan penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, diuraikan kriteria kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria tersebut mencakup kesesuaian dengan akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern ; BPKP (<http://www.bpkp.go.id/sulut/berita/read/15248/0/>, 23 Nopember 2015 18:29:44) Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, sistem pengendalian internal merupakan salah satu tahap penting dalam pendeteksian indikasi adanya penyalahgunaan kewenangan, proses sampai terlaksananya setiap program yang ada di dalam setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dasar pengambilan keputusan meminta pihak auditor internal untuk melakukan audit terhadap lingkungan SKPD yang ada.

Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern oleh Inspektorat di Provinsi Sulawesi Utara (Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Pemerintah Kota Manado) dilihat dari ke 5 unsur pengendalian intern, yaitu Lingkungan Pengendaliannya, Kegiatan Pengendalian, penilaian resiko, pemantauan, dan informasi/komunikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern di Provinsi Sulawesi Utara (Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan Pemerintah Kota Manado.) dilihat dari perspektif 5 unsur pengendalian, Lingkungan Pengendaliannya, Kegiatan Pengendalian, penilaian resiko, pemantauan, dan informasi/komunikasi.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance*, Sebagai sebuah konsep yang memiliki definisi tunggal. Menurut Komite Cadbury tahun 1992- melalui Cadbury report mengeluarkan definisi tersendiri tentang good corporate dan good governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan erundang – undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang – undangan dan penegakkan huku secara konsisten (diakses tanggal 27 September 2016 jam 09:00 <https://diaryintan.wordpress.com/2010/11/15/good-corporate-governance-gcg-2/>).

Menurut *The Indonesian Institute of Corporate Governance (IIGC)*, *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai struktur, system, dan proses yang digunakan oleh organ – organ perusahaan sebagai upaya untuk member nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya berdasarkan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (IICG, 2009:3). *Corporate Governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.

### 2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tiga golongan tujuan berikut ini : keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, Presiden selaku

Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

Terdapat 5 unsur SPIP yang perlu diimplementasikan oleh seluruh pimpinan dan staf pada semua jajaran instansi pemerintah, yaitu :

1. **Lingkungan pengendalian**, adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian dalam instansi untuk menjalankan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dapat meningkatkan efektifitas sistem pengendalian intern.
2. **Penilaian risiko** adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang meliputi kegiatan identifikasi, analisis dan mengelola risiko yang relevan bagi proses atau kegiatan instansi.

3. **Kegiatan pengendalian** adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
4. **Informasi dan komunikasi**, dalam hal ini Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
5. **Pemantauan** adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Dalam implementasinya, lingkup penyelenggaraan kelima unsur yang disebutkan di atas dapat berlaku pada tingkat instansi secara keseluruhan atau hanya berlaku pada aktivitas atau fungsi tertentu saja dalam satu instansi (pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi). Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, tiap-tiap unsur tersebut dirinci lagi kedalam sub unsur-sub unsur yang lebih detail dan bersifat teknis. Misalnya unsur pertama dirinci kedalam 8 sub unsur yang harus diterapkan, unsur kedua sebanyak 2 sub unsur, unsur ketiga terdiri dari 11 sub unsur, unsur keempat sebanyak 2 sub unsur dan unsur kelima dirinci kedalam 3 sub unsur yang harus diterapkan. Semua unsur saling terkait dan terintegrasi dalam satu sistem, yaitu sistem pengendalian intern

Tahapan Penyelenggaraan SPIP di Instansi Pemerintah berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam mengimplementasikan SPIP di instansi pemerintah terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan pimpinan instansi dan lembaga untuk dapat mengimplementasikan SPIP secara efektif dan efisien, sebagai berikut:

Tahapan menumbuhkan kepedulian dan pemahaman 2. Tahapan Membangun desain SPIP 3. Tahapan Menjalankan dan mereview SPIP 4. Tahapan Peningkatan Keandalan Sistem 5. Karakteristik Konsep SPIP. Dalam mengembangkan SPIP pimpinan instansi pemerintah perlu memahami karakteristik konsep SPIP sehingga dalam pengembangannya dapat mewujudkan tujuan dari pengendalian tersebut terdapat karakteristik Konsep SPIP;

1. Holistik, atau integral, SPI dijabarkan dalam lima komponen utama yang saling terintegrasi, yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian resiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*) serta pemantauan (*monitoring*), dimana efektivitas penerapan sistem sangat dipengaruhi oleh komponen – komponen dapat mempengaruhi efektivitas komponen pengendaliannya.
2. Proses, sistem pengendalian intern adalah suatu proses bukan tujuan. SPI merupakan suatu proses yang apabila dijalankan dengan baik akan dapat memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai.
3. Tujuan organisasi sebagai pengarah (*A business Objective Driven Approach*), dalam membangun sistem pengendalian intern pimpinan instansi pemerintah wajib memperhatikan langkah – langkah.
4. Memiliki dua tingkatan pengendalian, yaitu pengendalian tingkat organisasi, dan pengendalian tingkat aktivitas

5. Fleksibel, adaptif, dan tidak ada satu model dapat diterapkan untuk semua jenis organisasi. Bukan merupakan hal yang kaku. Dalam penerapannya memperhatikan ukuran, karakteristik, kompleksitas, tingkat kebutuhan, tujuan organisasi, dan cost benefitnya.

6. Memberikan keyakinan yang memadai bukan jaminan absolut (*Reasonable Assurance*). SPI hanya memberikan keyakinan yang memadai bukan jaminan absolut atas tercapainya tujuan pengendalian

7. Bergantung pada faktor manusia (*The People Factor*), efektivitas penerapan sistem pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh orang sebagai pelaksananya yaitu jajaran pimpinan dan staf di unit organisasi tersebut. Dokumentasi penerapan pengendalian intern memang penting, namun yang lebih penting adalah efektivitas peran dari tiap – tiap pegawai.

8. Memiliki keterbatasan, efektivitas penerapan SPI pada instansi pemerintah tidak akan tercapai, apabila tidak adanya kerjasama yang baik antar pemerintah SKPD. PP Nomor 60 Tahun 2008 mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam PP ini, yang terdiri dari 61 pasal, 4 Bab, dan penjelasannya. Yang dimaksud dengan SPIP dalam ketentuan ini adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu hal yang diatur dalam PP ini adalah tentang penguatan lembaga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan PP ini, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. PP ini juga menyatakan bahwa tujuan ditetapkannya SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara

Terdapat landasan undang-undang yang mendasari pengendalian Intern:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia

#### 2.2.4 Hubungan *Internal Audit* dan *Good Corporate Governance* (GCG)

Sedangkan Menurut Sutedi (2006, p.175), Corporate Governance dapat dedefinisikan sebagai “*Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan*”. Suatu tata hubungan antara para stakeholders yang digunakan untuk menentukan dan mengendalikan arah strategi dan kinerja perusahaan. Peranan internal audit dalam *good corporate governance* (GCG) yang dikeluarkan oleh KPMG dalam Purwaningsih (2008) berjudul *Internal Audit's Role in Corporate Governance* disebutkan bahwa peranan kunci internal audit adalah membantu Dewan Pengawas / Komite Audit dalam peranan internal memastikan adanya pengawasan yang memadai atas internal control dan dengan melakukan hal tersebut akan membentuk komponen yang integral dalam kerangka kerja corporate governance perusahaan. Dalam hal ini, internal audit membantu dewan pengawas dan atau komite audit dalam pemenuhan tanggung jawab atas tata kelola perusahaan yang baik.



### 2.2.5 Standar Audit Intern

Definisi audit internal menurut IIA (Institute of Internal auditor) yang dikutip oleh Boynton (2001:980) yakni: "Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes". (Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif.

## 3. Hipotesis dan Model

### Kerangka Konseptual

Kerangka penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggambarkan Inspektorat di Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini yang menjadi sampel responden yaitu Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Inspektorat Pemerintah Kota Manado, Inspektorat Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebagai Pengendali Intern menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 sebagai dasar pengendalian ke setiap (SKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang ada.

## 4. Metode Penelitian

### 4.1 Data

Jenis Data adalah seluruh informasi empiris dan dokumentatif yang diperoleh di lapangan sebagai pendukung kearah konstruksi ilmu secara ilmiah dan akademis. Data penelitian adalah "*Known or assumed*", yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Sumber data primer, sumber data yang diperoleh oleh penulis dari informan melalui wawancara kepada Kepala atau pegawai yang memiliki mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Pemerintah tersebut. sumber data sekunder, sumber data yang diperoleh peneliti dari Kantor Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,

4.2 **Jenis Penelitian**, yang dipakai adalah deskriptif kualitatif.

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Waktu Penelitian 2 Minggu

4.5 Fokus penelitian

Focus penelitian ini mengacu pada setiap pegawai atau kepala bidang yang bertanggung jawab terhadap pengimplementasian Peraturan tersebut yang diterapkan dalam prosedur ataupun program pengawasan oleh Inspektorat dalam tugasnya sebagai internal control Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

4.6 Metode dan dan Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik penelitian studi kasus dan analisis pekerjaan dan aktivitas. Dengan mengumpulkan informasi terlebih dahulu dari pegawai yang memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan program pengawasan terhadap SKPD dalam hal ini auditor. Dengan melakukan wawancara kemudian melakukan analisa sejauh mana efektifitas penerapan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008, dalam sistem pengawasan Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah. Juga masalah yang dihadapi oleh Inspektorat sebagai aparat pengawas dalam menerapkan aturan tersebut, dan bagaimana inspektorat melihat dampak dari penerapan peraturan pemerintah 60 tahun 2008 terhadap pemeriksaan pada setiap SKPD. Informasi tersebut harus real dengan bentuk tekstual. Bentuk teks digunakan dalam penyajian kutipan hasil wawancara dengan para informan dalam hal ini Pegawai, (auditor) atau Kepala bidang maupun Kepala Inspektorat Data

yang diperoleh baik yang berasal dari data primer maupun sekunder akan dianalisa dengan mengikuti konsep yang diberikan Miles, Huberman dalam Mukhtar (2013), yaitu model analisis data berlangsung atau mengalir. Menurutny ada empat aktivitas yang dilakukan melalui pendekatan ini

1. Pengumpulan Data : merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrument yang telah disiapkan, guna memperoleh informasi data melalui wawancara dan dokumentasi. Instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam pengumpulan data, seorang peneliti dapat melakukan analisis secara langsung, sesuai dengan informasi di lapangan.
2. Reduksi Data : Menunjukkan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasi data mentah yang muncul dalam penulisan catatan lapangan. Sehingga ditemukan tema atau pokok yang dianggap relevan dengan masalah dan tujuan penelitian.
3. Display Data : usaha merangkai informasi yang terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan. Biasanya bentuk display (penampilan) data kualitatif menggunakan teks narasi.
4. Verifikasi dan menarik kesimpulan : aktivitas analisis dimana, pada awal pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apakah sesuatu bermakna atau tidak mempunyai keteraturan, pola, penjelasan hubungan sebab akibat dan proposisi (Mukhtar, 2013)

## **5. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **5.1.1 Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara**

Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara.

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 63 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.

Sejalan dengan dasar hukum diatas, maka Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara memiliki ruang lingkup Tugas Pokok dan Fungsi kelembagaan sebagai berikut, Membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota dan beberapa fungsi yaitu ;

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan;
5. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.

Dengan begitu terdapat Visi Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara : Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih melalui Pengawasan yang Profesional dan Komprehensif. Dan Misi Misi Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara :

1. Mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan pengawasan yang profesional.
2. Menciptakan sinergitas pengawasan yang Komprehensif

## **5.2 Hasil Penelitian**

Memperoleh informasi mengenai Analisa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Pengawasan Internal Pemerintah Oleh Inspektorat, penulis melakukan wawancara terhadap 9 orang responden, yang terbagi atas 3 objek penelitian yang dibagi atas 5 unsur pengendalian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

### **5.2.1 Lingkungan Pengendalian**

Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Menurut responden dalam pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 efektif berjalan di berlakukan di tuangkan dalam pemeriksaan atau pengawasan Inspektorat Provinsi pada tahun 2010 mengenai perbedaan yang mendetail dari sisi pemeriksaan keuangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 dengan sebelumnya tidak terlalu signifikan namun, yang menjadikannya berdampak positif dalam penerapan sebagai aturan yang disempurnakan, kalau pada tahun sebelumnya lebih melihat pada output yang dihasilkan yang disebut WASKAT atau pengawasan melekat. Namun dalam lingkungan pengendaliannya sebagai aparat pengawas sudah efektif dan dengan diberlakukannya Peraturan tersebut banyak hal yang bisa dikatakan berdampak positif seperti terarahnya pencapaian kinerja keuangan.

Dari sisi Lingkungan Pengendalian, setiap SKPD baiknya harus ada penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan: menyusun dan menerapkan aturan perilaku; memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah; menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku; menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern, kepemimpinan yang kondusif Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

### **5.2.2 Kegiatan Pengendalian**

Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Tantangan dalam melakukan kegiatan pengendalian khususnya dalam melakukan audit pada setiap SKPD atau unit kerja. Kepala SKPD belum memahami yang menjadi tugas mereka untuk mengembangkan sistem pengendalian intern mereka sendiri, dan keterbukaan SKPD kurang sehingga pada saat pemeriksaan eksternal dalam hal ini BADAN PEMERIKSA KEUANGAN melakukan audit maka banyak terjadi kesalahan yang mengakibatkan temuan yang berpotensi untuk kerugian.

Dalam proses kegiatan pengendalian sebelum dilaksanakan pengawasan pihak pemerintah kabupaten Minahasa Utara khususnya Pihak Inspektorat bersama dengan Pihak Badan Keuangan Daerah selalu melakukan sosialisasi maupun seminar untuk meningkatkan dan

memperkuat dasar dalam pengelolaan keuangan agar pada proses berjalannya tidak memiliki kesalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Maka selanjutnya pihak Inspektorat sebagai pengendali intern melakukan kegiatan pengendalian untuk membenahi setiap kekurangan pada proses berjalannya tahun anggaran.

### **5.2.3. Penilaian Resiko**

Dalam hal penilaian resiko sesuai dengan unsur pengendalian internal dalam pp 60 tahun 2008 adakah pembobotan atau penilaian pemberian skala terhadap temuan yang ada, atau ada perlakuan khusus terhadap akun tertentu menurut resiko fraud maupun akibat yang kemungkinan terjadi?

Inspektorat sebagai pengawas internal memiliki penilaian resiko terhadap objek pemeriksaan dengan masing – masing SKPD atau unit kerja yang ada. Maka dilakukan perencanaan pengawasan dari setiap tim pengawas terhadap masing – masing objek pengawasan yang memiliki latar pekerjaan yang beragam yang signifikan yaitu SKPD yang memiliki pendapatan lebih besar dari pengeluaran, juga sebaliknya SKPD yang pengeluarannya lebih besar dari pendapatan contohnya peningkatan infrastruktur dan penerimaan pendapatan daerah. Sedangkan untuk skala pembobotan tidak ada.

### **5.2.4. Monitoring dan Pemantauan**

Monitoring dan pemantauan dilakukan Inspektorat biasanya dilakukan sebelum penyusunan anggaran biasanya monitoring dilakukan untuk *mereview* rencana kerja anggaran sebelum disahkan maka Inspektorat dalam hal ini sebagai pengawas, melakukan review atau bahas bersama rencana kerja anggaran yang akan di sahkan sesuai dengan peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku. Monitoring biasanya dilakukan pada per SKPD dan dibahas bersama sebelum anggaran di input ke BPKBMD dan selanjutnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan dengan monitoring dan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan. Juga pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Pengelolaan sistem informasi meliputi, pengendalian umum mengenai aturan dan kepegawaian, dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum terdiri atas: pengamanan sistem informasi; pengendalian atas akses; pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi. Hal ini yang menjadi monitoring terhadap SKPD yang ada.

### **5.2.5. Informasi dan komunikasi**

Dalam setiap pembahasan, maupun monitoring yang dilakukan semuanya tidak terlepas dari data berupa informasi dan untuk terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat dan kondusif dibutuhkan komunikasi yang baik. Maka setiap pengendali intern informasi dan komunikasi adalah hal yang penting. Contohnya informasi tentang asset SKPD, maupun informasi sisa persediaan itu merupakan hal yang baru pada saat standard pelaporan saat ini yang berbasis akrual maka komunikasi dan informasi sangat diperlukan secara intensif untuk terciptanya suatu informasi laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya.

## **5.3 Pembahasan Penelitian**

### **1 Lingkungan Pengendalian**

Inspektorat sebagai rekan kerja setiap SKPD yang ada menjadi suatu teladan dalam melaksanakan aturan pemerintah yang yang berlaku selain sebagai satuan kerja yang melaksanakan aturan yang berlaku menegakan nilai etika dan integritas sebagai aparat pengawas, juga memiliki komitmen terhadap kompetensi mereka masing – masing sebagai, Inspektur,

sampai pada jabatan fungsional sebagai auditor. Guna pendelegasian wewenang yang sesuai dengan kebutuhan dari pemerintahan maka dalam waktu berjalan ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan ada penambahan tenaga auditor dengan jumlah 20 orang, untuk membantu efektifnya pengawasan yang ada kesetiap SKPD. Pembentukan struktur yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang ada khususnya untuk menempati jabatan struktural yang tugasnya mengkoordinir setiap unit staf yang ada.

Dalam menjamin keamanan atau adanya aset pemerintah daerah yang ada sesuai dengan pasal 11 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, poin a; memberikan keyakinan yang memadai atas ketataatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah maka setiap Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten maupun kota harus menjamin ketersediaan, keamanan aset yang ada.

## **2 Penilaian Risiko**

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Dalam hal penilaian risiko Inspektorat sebagai aparat pengawas beberapa hal yang dilihat menjadi resiko atas pengendalian, seperti pada saat ini pada sistem pencatatan keuangan sudah komputerisasi. Dalam menjalankan sistem yang dilihat dilapangan pengelola sistem yang ada, yaitu sumber daya manusia dalam hal ini bukan Aparat Sipil Negara tetapi yang menjadi pengelola sistem keuangan yaitu tenaga harian atau tenaga kontrak. Pada dasarnya lingkungan pengendalian atas tenaga kontrak tidak memiliki dasar hukum yang mutlak dalam melaksanakan tugas tersebut. Karena apabila terjadi kesalahan terhadap sistem tersebut, maka yang bertanggung jawab yaitu pihak Aparat Sipil Negara.

## **3. Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintahan dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif. Kegiatan pengendalian dilakukan oleh Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah dalam rangka untuk meminimalisasi resiko yang mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap aset maupun tidak efisiennya pemakaian anggaran.

Sebelumnya dilakukan pengawasan melekat yang sering di sebut WASKAT. Pengawasan Atasan Langsung yang lebih familier disebut Pengawasan Melekat memiliki dasar yaitu : Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Presiden Republik Indonesia sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 diterapkan.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian dibagi pada kegiatan pokok instansi Pemerintah, harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko, kebijakan dan prosedur harus diterapkan secara tertulis. Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi, maupun Kabupaten Kota meliputi;

1. revidi atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
2. pengendalian atas fisik atas aset dan keuangan
3. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
4. dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian.

Setiap kegiatan pengendalian tersebut penting. Namun dari ketiga objek penelitian yaitu; Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Inspektorat Pemerintah Kota Manado, dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Menurut informasi yang saya peroleh yang menjadi prioritas objek pemeriksaan dari pengawas internal yaitu keuangan dan aset.

Permasalahan efisiensi yang menjadi titik penghematan anggaran. Yang adalah juga masalah ketepatan sasaran anggaran, sesuai dengan kebutuhan. Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, telah menerapkan efisiensi anggaran melalui setiap kegiatan yang dilakukan oleh intern Pemerintah di lingkungan SKPD di selenggarakan di gedung milik pemerintah daerah tidak menyelenggarakan di fasilitas seperti perhotelan dan sebagainya. Sebagai pengawas hal itu ditegaskan guna efisiensi keuangan anggaran. Seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Bagian I Lingkungan Pengendalian poin G, Di dalam Instansi Pemerintah, terdapat mekanisme untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintahan.

#### **4. Informasi dan Komunikasi**

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. Sistem informasi untuk mengidentifikasi dan mencatat informasi operasional dan keuangan yang penting yang berhubungan dengan peristiwa internal dan eksternal telah ada dan diimplementasikan. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada pimpinan dan pihak lain di lingkungan Instansi Pemerintah dalam bentuk yang memungkinkan pihak tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien dan efektif. Pimpinan Instansi Pemerintah memastikan bahwa komunikasi internal telah terjalin dengan efektif.

Informasi lainnya oleh pihak Pengawas yang dilakukan pada tahap perencanaan maka pengawasan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bab IV Penyusunan Rancangan APBD Pasal 29 sampai dengan pasal 42 dijelaskan bahwa proses penyusunan RAPBD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

APBD mempunyai fungsi :

1. Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian;
5. Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, APBD disusun dengan menggunakan metoda tradisional atau *item line budget*. Mekanisme penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih menitikberatkan pada kebutuhan untuk belanja / pengeluaran.

## **5. Monitoring dan Pemantauan**

Pemantauan atau monitoring sering dilakukan sebagai Aparat Pengawas Internal kepada setiap SKPD atau unit kerja. Monitoring setelah waktu pemeriksaan dilakukan pihak Inspektorat untuk memberi waktu apabila ada kesalahan maupun kekeliruan sengaja maupun tidak sengaja yang pada dasarnya sudah tidak sesuai dengan standard atau peraturan yang berlaku maka, pihak Inspektorat memberikan kesempatan untuk memperbaiki sebelum pemeriksaan eksternal atau dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit unit kerja yang ada. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal – hal yang merugikan Instansi Pemerintahan maupun Pemerintah Daerah yang ada.

## **6. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran**

### **6.1 Kesimpulan**

#### **1. Lingkungan Pengendalian**

Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Dilihat dari ke 5 Unsur Pengendalian Intern oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara. Dari sisi Lingkungan Pengendalian oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara penerapan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 pada setiap daerah khususnya oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, setiap pengendalian internal yang dilakukan sudah di laksanakan dengan baik dengan kerjasama antara pihak Inspektorat bersama SKPD ataupun unit kerja yang ada.

#### **2. Kegiatan Pengendalian**

Selain kerjasama antara pihak Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara bersama SKPD, juga kepala SKPD sebagai pengendali internal sendiri pada unit kerjanya. Khusus untuk lingkungan pengendalian pemerintah provinsi terus memelihara keselarasan kerja, sehingga sistem pengendalian intern yang sehat, dan positif terus berkembang dan dipertahankan.

#### **3. Informasi dan Komunikasi.**

Inspektorat melalui unsur pengendalian informasi dan komunikasi pihak Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, sudah menerapkan dalam pengawasan agar setiap SKPD atau unit kerja, untuk informasi dokumentasi atas aset fisik dan keuangan itu dilakukan secara real dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan apabila didapati adanya kekurangan informasi atas laporan atas aset dan keuangan pihak Inspektorat sebagai pengawas selalu mengkomunikasikan antar unit kerja dengan baik, agar sebaiknya di revisi sesuai dengan data real agar pertanggungjawaban laporan keuangan relevan dan dapat dipercaya.

#### **4. Pemantauan**

Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara unsur Pengendalian pemantauan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pemantauan, setelah dilakukan audit maka diberikan kesempatan unit kerja atau SKPD yang ada untuk *mereview* hasil audit yang ada, seperti kurangnya dokumen yang diberikan data hutang yang belum real atau lengkap dan juga pemantauan dilakukan sejak penyusunan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2016. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya dapat segera ditindaklanjuti pemantauan kukan review atas pengendalian piutang yang real dengan piutang yang dilaporkan oleh unit kerja atau SKPD maka Inspektorat sebagai pengawas internal mendata dan meneliti unit kerja

yang berpotensi memiliki piutang dan mereview atas pengakuan atas piutang tersebut agar informasi yang di dapat adalah informasi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan

## **6.2 Keterbatasan Penelitian**

1. Dalam pelaksanaan penelitian responden yang ada memiliki keterbatasan waktu, karena pada saat penelitian responden rata-rata sedang dalam tugas pemeriksaan ke unit SKPD sehingga waktu wawancara terbaatas sehingga jawaban dari pertanyaan yang dirancang sebagian dipilih mana yang bias dijawab.
2. Jumlah responden yang direncanakan peniliti 5 orang tapi pada saat wawancara jumlah auditor yang ada dan diberikan kesempatan oleh Inspektur seperti di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Manado yang ditugaskan oleh Inspektur atau kasubag bagian evaluasi dan pelaporan menurut peneliti adalah auditor yang memiliki waktu untuk diadakan wawancara dan juga auditor yang diketahui bahwa bisa memberikan informasi yang baik dan sesuai dengan materi peneliti.

## **6.3 Saran**

Berdasarkan pengalaman yang ada agar terciptanya Lingkungan Pengendalian yang efektif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 diharapkan setiap pemerintah daerah membutuhkan kerjasama yang baik antara pihak Inspektorat sebagai pengendali intern dan setiap pihak SKPD atau unit kerja, meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan yang baik agar dalam penilaian terhadap laporan keuangan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 mekanisme yang ada sesuai dengan SOP berjalannya administrasi yang ada. Untuk menjunjung akuntabilitas dan transparansi Laporan keuangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A.Alimul Hidayat. 2007. *Metode Penelitian Kebidanan Dan Tehnik Analisis Data*. Surabaya: Salemba empat
- Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan BPK RI No. 01 tahun 2007 tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*
- Boynton , Wiliam C., Johnson, Raymond N., and kell, Walter G. (2002). *Modern Auditing*. Edisi ke 7 Jilid 1. Jakarta ; Penerbit Erlangga
- Committee of Sponsoring Organizationsof the Treadway Commissions (COSO)*. (1992). *Internal Control - Intergrated Framework*. [Online]. Tersedia: <http://www.coso.org>. [12 Agustus 2010].
- IGC The Indonesian Institute of Corporate Gorvernance* (<http://www.bpkp.go.id/index>, jam 14:46, tgl 8 Februari 2007) [Online] (<http://xerma.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-good-corporate-governance.html>, jam 19:39, tgl 12 April 2016)
- Harahap, S. 2008. *Penerapan Economic Order Quantity (EOQ)* UGM : Yogyakarta
- Hudri Chandry (2009:10), *Tanggung Jawab Auditor*, online (<http://yann-achmad.blogspot.co.id/2012/04/auditor.html>, 19:30, 26 Maret 2016)
- Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). 2010. *Good Corporate Governance Sebagai Budaya*. Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2001:322.1) online (<http://yann-achmad.blogspot.co.id/2012/04/auditor.html>, 19:34, 26 Maret 2016)



- Miller, critied by kell and Boynton Kerangka lengkap standard audit intern, 1992 :810) dalam nasution 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern, online (<http://www.bpkp.go.id/polsoskam/konten/501/Download-PP-60.bpkp>, 21:09, 21 Maret 2016)
- Sawyer et, Dittnhofer, Scheiner. (2005). Sawyer's Internal Auditing. Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta
- Courtemanche, Gil. 2006. *The New Internal Auditing*. Cetakan kesembilan (Penerjemah : Hiro Tugiman, Yogyakarta)
- Pedoman Pemeriksaan Akuntansi, Penerbit PPA – STAN, Jakarta, 2000
- Sutedi, Adrian. 2011. Good Corporate Governance. Sinar Grafika. Jakarta.
- Widiyanto, B. 2010. *Populasi Dan Sampel Penelitian*. Jakarta: Pusat Perbukuan Kementrian Pendidikan Nasional.

# **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

Harsya K. Tahir, Agus T. Poputra, Jessy D. L. Warongan  
(Email: harsya\_tahir@yahoo.com)

## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to analysis the factors which affecting the implementation of the SAKIP in Government of North Sulawesi, the contain is factor awareness on the laws and regulation ( $X_1$ ), factor organizational commitment ( $X_2$ ) and factor role of APIP ( $X_3$ ) toward implementation of SAKIP ( $Y$ ). Method that use in this research are quantitative method. The data analysis technique has been done by using the multiple linear regressions analysis. Result of the research according the partial test show that awareness on the laws and regulation no significantly effect to the implementation of SAKIP, whereas the organizatoinal commitment and role of APIP has significantly effect to the implementation of SAKIP. The value from coefficient of determination test amount of 43,7% has been effect by awareness on the laws and regulation, organizatoinal commitment, role of APIP, whereas the remaining 56,3% is influenced by other factors outside this research.*

*Keywords : awareness of the laws and regulation, commitment of organization, role of APIP, and SAKIP*

## **1. PENDAHULUAN**

Usaha serius untuk melakukan desentralisasi terjadi setelah rezim orde baru tumbang dan berganti dengan orde reformasi. Pada masa itu berlaku hukum desentralisasi baru untuk menggantikan UU No. 5 tahun 1974, yakni dengan memberlakukan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU otonomi daerah kemudian disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan yang terakhir telah terbit UU No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah diganti dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Salah satu hubungan kekuasaan yang berubah melalui kedua UU tersebut adalah desentralisasi, yang berarti penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yuwono, et al (2008:13) menyatakan, perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi dalam penerapannya di lembaga sektor publik adalah adanya pembagian kewenangan secara mendasar yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah. Kebijakan desentralisasi pada dasarnya bertujuan untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban urusan domestik sehingga pemerintah pusat berkesempatan untuk mempelajari, memahami, dan merespons berbagai kecenderungan global serta lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makronasional yang bersifat strategis.

Konsep akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009:21) merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomi dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab. Hal ini berkaitan dengan teori keagenan yang dijabarkan diatas. Menurut Lukito (2014:2), membangun

akuntabilitas melalui pelaporan kinerja pembangunan secara transparan kepada publik perlu dilakukan oleh pemerintah yang ingin mendapatkan *trust* atau kepercayaan dari masyarakatnya. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Wujud dari pertanggungjawaban tersebut saat ini adalah dengan dikembangkannya satu sistem pertanggungjawaban yang disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang implementasinya dimulai sejak penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan pertanggungjawaban kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). SAKIP merupakan salah satu alat manajemen dalam rangka penyelenggaraan pemerintah terdesentralisasi yang diharapkan mampu memperbaiki kinerja pemerintah. Namun dalam barisan daftar laporan yang harus disusun oleh pemerintah daerah, LAKIP sering dianggap sebelah mata baik oleh anggota dewan ataupun penyelenggara pemerintahan itu sendiri. LAKIP tidak begitu populer dibandingkan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam hal proses penyusunan dan manfaat yang bisa dirasakan oleh pengguna. Kalau kualitas laporan keuangan dinilai berdasarkan opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka kualitas LAKIP ditentukan oleh penilaian hasil evaluasi yang dilakukan Kemen PAN dan RB.

Berdasarkan sumber dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016, hasil evaluasi Kemen PAN dan RB atas penerapan SAKIP Provinsi Sulawesi Utara selang tiga tahun terakhir dari tahun 2013-2015 pemerintah melalui Kemen PAN dan RB memberikan predikat “B” sesuai yang diamanatkan Permen PAN dan RB No.12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penerapan SAKIP Provinsi Sulawesi Utara yang diungkapkan dalam LAKIP kemudian dievaluasi oleh Kemen PAN dan RB ternyata belum sepenuhnya memenuhi kriteria untuk mencapai predikat sangat baik apalagi memuaskan karena penilaian pada beberapa instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih terdapat kekurangan berupa ketidak-selarasan antara rencana strategis lima tahunan dan rencana kinerja tahunan yang dituangkan kedalam penganggaran, serta indikator-indikator kinerja yang diciptakan SKPD belum berorientasi hasil. Hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan dalam pemberian predikat.

Bertolak dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengambil beberapa faktor atau variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk di analisis sesuai dengan kondisi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Faktor pertama adalah kesadaran pada peraturan perundang-undangan, faktor kedua adalah komitmen organisasi, faktor ketiga adalah peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) daerah dalam hal ini Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Teori Keagenan**

Karakteristik utama hubungan keagenan terletak pada kontrak pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dari prinsipal kepada agen. Pelimpahan ini menimbulkan pemisahan antara klaiman residu dengan otoritas pengambilan keputusan. Jensen dan Meckling (1976:4) menyatakan bahwa hubungan keagenan dapat terjadi pada semua entitas yang mengandalkan pada kontrak, baik eksplisit ataupun implisit, sebagai acuan pranata perilaku partisipan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan keagenan terjadi pada setiap entitas.

Konsep akuntabilitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan menggunakan *agency theory*, dimana dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini masyarakat yang diwakili oleh DPRD (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

### **2.1.2 Teori Birokrasi**

Birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam organisasi. Menurut Weber (1948), organisasi birokrasi yang ideal menyertakan delapan karakteristik struktural. Muskamal (2014) menyatakan untuk dapat meluruskan kembali birokrasi pada posisi dan misi atau perannya yang sebenarnya selaku “pelayan publik” (*public servant*), diperlukan kemampuan dan kemauan kalangan birokrasi untuk melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi yang mencakup perubahan perilaku yang mengedepankan “netralitas, profesionalitas, demokratis, transparan, dan mandiri”, disertai perbaikan semangat kerja, cara kerja, dan kinerja terutama dalam pengelolaan kebijakan dan pemberian pelayanan publik, serta komitmen dan pemberdayaan akuntabilitas instansi pemerintah. Untuk memperbaiki cara kerja birokrasi diperlukan birokrasi yang berorientasi pada hasil.

Selanjutnya, diperlukan sosok pemimpin yang memiliki komitmen dan kompetensi terhadap reformasi birokrasi negara secara tepat, termasuk dalam penyusunan agenda dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang ditujukan pada kepentingan rakyat, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa. Dalam rangka itu, diperlukan pula reformasi struktural, seperti independensi sistem peradilan dan sistem keuangan negara, disertai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitasnya kepada publik.

### **2.1.3 Teori Akuntabilitas**

Menurut Turner dan Hulme (1997), akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Mardiasmo (2009:20) mengartikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Lukito (2014:2) memaparkan akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Menurut Setiyono (2014:181) akuntabilitas adalah konsep yang memiliki beberapa makna. Terminologi ini sering digunakan dengan beberapa konsep seperti *Answerability*, *responsibility*, *liability* dan terminologi lain yang berkaitan dengan “*the expectation of accounting*” (harapan pemberi mandat dengan pelaksana mandat). Dengan demikian, *accountability* mencakup harapan atau asumsi perilaku hubungan antara pemberi dan penerima mandat.

#### **2.1.4 Kesadaran pada Peraturan Perundang-Undangan**

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran pada hukum atau aturan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut pendapat Soekanto (1982:140) mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yaitu, (1) pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat ataupun di negara Indonesia; (2) pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum, contohnya bukan hanya sekedar dia tahu ada hukum tentang pajak, tetapi dia juga mengetahui isi peraturan tentang pajak tersebut; (3) sikap positif terhadap peraturan-peraturan hukum; dan (4) menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Salman dan Susanto (2004:153) apabila ke empat indikator kesadaran hukum tersebut betul-betul terlaksana dalam masyarakat sesuai dengan harapan pemerintah serta tidak ada implikasinya, maka peraturan tersebut dapat dianggap efektif.

Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas dari faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan yang ada. Dalam pendapatnya Kelman (1958:53) membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu (1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi; (2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak; dan (3) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

#### **2.1.5 Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi secara umum dapat didefinisikan sebagai keterikatan antara pegawai dan organisasi secara psikologis. Menurut Meyer, Allen, dan Smith (1993) ada 3 sumber komitmen organisasi sebagai berikut, (1) Komitmen afektif (*affective commitment*) berkaitan dengan keterikatan emosional dan keterlibatan pegawai pada organisasi. Pegawai dengan komitmen afektif yang tinggi akan selalu menjadi anggota dalam organisasi tersebut karena memang memiliki keinginan untuk itu. Hal ini berarti bahwa individu tersebut akan memiliki motivasi dan keinginan untuk berkontribusi secara maksimal terhadap organisasi. Pada dimensi komitmen afektif ini, anggota organisasi memilih organisasi lebih disebabkan adanya dedikasi yang tinggi agar organisasi menjadi lebih berkembang; (2) Komitmen kontinuan (*continuance commitment*), menunjukkan adanya pertimbangan untung rugi dalam diri pegawai yang berkaitan dengan keinginan untuk tetap bekerja atau keluar dari organisasi. Komitmen kontinuan menunjukkan bahwa komitmen anggota organisasi lebih disebabkan biaya hidup. Pegawai dengan komitmen kontinuan yang tinggi bertahan dalam organisasi karena adanya kesadaran kerugian besar yang akan dialami jika meninggalkan organisasi. Pegawai akan menghindari kerugian financial dan kerugian lain, sehingga memungkinkannya melakukan usaha yang tidak maksimal; (3) Komitmen normatif (*normative commitment*), berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam organisasi yang didasari pada adanya keyakinan tentang apa yang benar serta berkaitan dengan masalah moral. Komitmen normatif menimbulkan perasaan kewajiban pada pegawai untuk memberi balasan atas apa yang telah diterimanya dari organisasi. Pegawai dengan komitmen normatif yang tinggi akan tetap bertahan dalam organisasi karena merasa itu adalah kewajibannya dan harus dilakukan sebagai balasan atas keuntungan yang telah dia terima dari organisasi.

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada berbagai aspek pelaksanaan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan dituangkan dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Komitmen ini sudah menjadi agenda yang harus dilaksanakan guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik, tidak terkecuali komitmen APIP untuk selalu meningkatkan peran sertanya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

#### **2.1.6 Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)**

Menurut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2013:1), APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*). Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peran APIP yang efektif, yaitu dalam wujud, (1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*); (2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*); dan (3) memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

#### **2.1.7 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Sistem adalah kesatuan unsur atau unit yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi sedemikian rupa, sehingga muncul dalam bentuk keseluruhan, bekerja, berfungsi atau bergerak secara harmonis yang ditopang oleh sejumlah prosedur yang diperlukan, sedangkan prosedur merupakan urutan kinerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam dan terpadu. (menerangkan sumber informasi)

Menurut LAN (2003:3) SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk memperpertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

### **3. HIPOTESIS**

#### **3.1 Hipotesis Penelitian**

##### **3.1.1 Pengaruh Kesadaran pada Peraturan Perundang-undangan terhadap Penerapan SAKIP**

Penelitian Riantiarno dan Azlina (2011) mengungkapkan kepatuhan atau ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada daerah yang mereka teliti yaitu Kabupaten Rokan Hulu ditentukan langsung oleh ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Soleman (2007), dimana ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh sangat signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasriani dan Chandra (2009), hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel kesadaran tentang akuntabilitas serta variabel hukum tentang akuntabilitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi SAKIP. Berdasarkan hal tersebut hipotesis yang diangkat adalah sebagai berikut.

Ha<sub>1</sub> : Kesadaran Pada Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan SAKIP.

### 3.1.2 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Penerapan SAKIP

Penelitian yang dilakukan oleh Silvia (2013) menunjukkan komitmen manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya semakin tinggi komitmen manajemen, maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurkhamid (2008), Norman (2010) tentang komitmen manajemen terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Mereka menemukan bahwa keberadaan komitmen manajemen yang tinggi akan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Komitmen manajemen yang tinggi menjadikan individu peduli dengan nasib organisasi dan berusaha menjadikan organisasi kearah yang lebih baik, berdasarkan hal tersebut hipotesis yang diangkat adalah sebagai berikut.

Ha<sub>2</sub> : Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Penerapan SAKIP.

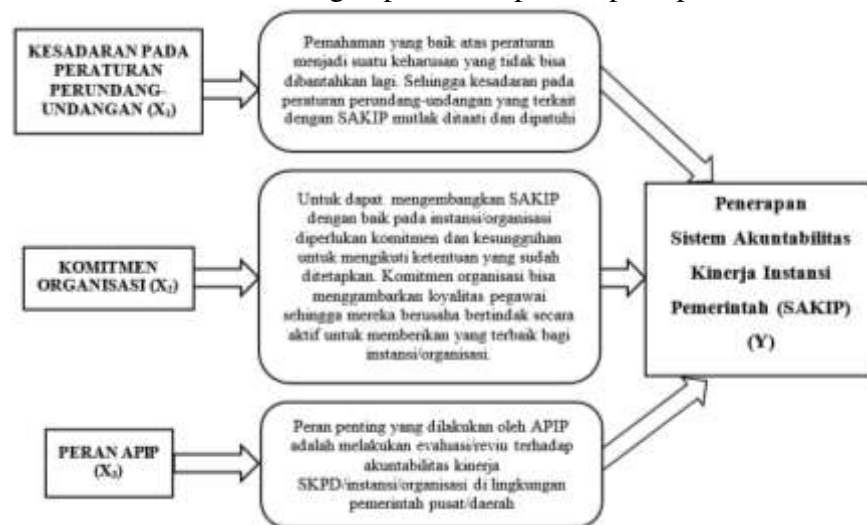
### 3.1.3 Pengaruh Peran APIP terhadap Penerapan SAKIP

Penelitian yang dilakukan Astuti (2013), menunjukkan bahwa ada pengaruh fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah di DPPKAD Kabupaten Grobogan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi pemeriksaan intern yang baik dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah, berdasarkan hal tersebut hipotesis yang diangkat adalah sebagai berikut.

Ha<sub>3</sub> : Peran APIP berpengaruh signifikan terhadap Penerapan SAKIP.

## 3.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang dibangun dalam penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan tentang penelitian yang akan dilakukan penulis secara keseluruhan, yaitu menganalisis faktor Kesadaran pada peraturan perundang-undangan, Komitmen Organisasi, serta Peran APIP terhadap penerapan SAKIP pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kerangka konsep dalam penelitian ini menggambarkan paradigma metode penelitian secara komprehensif, yang dapat digambarkan dalam suatu skema kerangka proses berpikir seperti pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

## 3.3 Model Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Menurut Ghozali (2006), analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh

antara lebih dari satu variabel predictor (variabel bebas) terhadap variabel terikat. Model analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

## **4. METODE PENELITIAN**

### **4.1 Data**

#### **4.1.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif untuk menganalisis “Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara”. Berdasarkan hubungan antara variabel yang diteliti, maka penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal yaitu hubungan yang bersifat sebab-akibat.

#### **4.2 Populasi, Teknik Pengambilan Sampel dan Besar Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang bekerja dibidang perencanaan, pelaporan, dan atau bidang lain terdiri dari staf pelaksana, pejabat eselon IV sub bagian perencanaan, pelaporan, dan atau sub bagian lain yang bertugas menyiapkan laporan kinerja SKPD dan pejabat eselon III yang kompeten dalam memberikan informasi dan pendapat mengenai SAKIP serta APIP yang melaksanakan fungsi pengawasan atas laporan kinerja SKPD. Jumlah populasi sebesar 124 ASN tersebar di 20 SKPD pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Nonprobability Sampling* dengan teknik *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dalam hal ini akan melakukan penelitian tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka respondennya adalah orang-orang yang kompeten saat ini dalam pelaporan akuntabilitas kinerja serta orang yang melakukan evaluasi terhadap pelaporan kinerja tersebut dalam hal ini APIP.

Sementara sampel dalam penelitian ini yaitu ASN yang bekerja dibidang perencanaan, pelaporan, dan atau bidang lain yang terdiri dari staf pelaksana, pejabat eselon IV atau kepala pada sub bagian perencanaan, pelaporan, dan atau kepala sub bagian lain yang bertugas menyiapkan laporan kinerja SKPD dan pejabat eselon III yang kompeten dalam memberikan informasi dan pendapat mengenai SAKIP serta APIP yang melaksanakan fungsi pengawasan dan yang kompeten melakukan evaluasi atas laporan kinerja SKPD. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden/ASN dan tersebar di 20 SKPD pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

#### **4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhadap ASN yang bekerja pada 20 SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan jangka waktu penelitian selama 3 bulan yaitu mulai bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2016.

#### **4.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

##### **4.4.1 Kesadaran Pada Peraturan perundang-Undangan ( $X_1$ )**

Tabel 4.1 Operasionalisasi Variabel dan Pengukuran Variabel Kesadaran Pada Peraturan Perundang-Undangan



Variabel	Indikator	No. Item Pernyataan	Data
Kesadaran Pada Peraturan Perundang-undangan (X <sub>1</sub> )	I. Memiliki Pengetahuan Tentang Peraturan Hukum yang Berlaku	1 & 2	Interval
	II. Memahami Isi Peraturan	3, 4 & 5	Interval
	III. Memiliki Sifat Positif terhadap peraturan	6 & 7	Interval
	IV. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh peraturna perundang-undangan yang berlaku	8	Interval

Sumber: Soerjono Soekanto. (1982:140) *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Jakarta: Rajawali Press*

#### 4.4.2 Komitmen Organisasi (X<sub>2</sub>)

Tabel 4.2 Operasionalisasi Variabel dan Pengukuran Variabel Komitmen Organisasi

Variabel	Indikator	No. Item Pernyataan	Data
Komitmen Organisasi (X <sub>2</sub> )	I. <i>Affective Commitment</i>	1, 2 & 3	Interval
	II. <i>Continuance Commitment</i>	4, 5 & 6	Interval
	III. <i>Normative Commitment</i>	7 & 8	Interval

Sumber : Meyer and Allen (1997) "*Commitment in the workplace theory research and aplication*". California: Sage Publication.

#### 4.4.3 Peran APIP (X<sub>3</sub>)

Tabel 4.3 Operasionalisasi Variabel dan Pengukuran Variabel Peran APIP

Variabel	Indikator	No. Item Pernyataan	Data
Peran APIP (X <sub>3</sub> )	I. Memberikan Keyakinan yang memadai ( <i>Assurance Activity</i> )	1, 2 & 3	Interval
	II. Memberikan Peringatan Dini ( <i>Anti Corruption Activity</i> )	4, 5 & 6	Interval
	III. Memelihara dan meningkatkan Kualitas Tata Kelola ( <i>Consulting Activity</i> )	7 & 8	Interval

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 11 mengenai perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

#### 4.4.4 Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Y)

Tabel 4.6 Operasionalisasi Variabel dan Pengukuran Variabel Penerapan SAKIP

Variabel	Indikator	No. Item Pernyataan	Data
Penerapan SAKIP (Y)	I. Rencana Strategis	1, 2, 3, 4 & 5	Interval
	II. Perjanjian Kinerja	6, 7, 8 & 9	Interval
	III. Pengukuran Kinerja	10 & 11	Interval
	IV. Pengelolaan Data Kinerja	12, 13 & 14	Interval
	V. Pelaporan Kinerja	15, 16 & 17	Interval
	VI. Reviu dan Evaluasi Kinerja	18, 19 & 20	Interval

Sumber: Perpres No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 5.

#### 4.5 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah upaya menyelidiki secara mendalam tentang data yang berhasil diperoleh peneliti selama penelitian berlangsung, sehingga akan diketahui makna dan keadaan yang sebenarnya dari apa yang telah diteliti. Analisis deskriptif dalam penelitian ini meliputi: (1) Tabulasi Data; (2) Deskriptif responden; (3) Statistik deskriptif.

#### 4.6 Uji Asumsi Klasik

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heterokedastisitas.

#### 4.7 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen dan satu variabel dependen. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode regresi berganda (multiple regression), yaitu regresi yang digunakan untuk menguji  $H_{a1}$ ,  $H_{a2}$  dan  $H_{a3}$  dengan pendekatan interaksi yang bertujuan untuk memenuhi ekspektasi penelitian mengenai “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara”. Sementara itu, langkah-langkah untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu Kesadaran pada Peraturan Perundang-undangan, Komitmen Organisasi, dan Peran APIP dilakukan dengan uji statistik melalui, (1) Uji bersama-sama (Uji F); (2) Uji parsial (Uji t); (3) Uji koefisien korelasi dan koefisien determinasi.

### 5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Hasil Analisis

##### 5.1.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan pada variabel kesadaran pada peraturan perundang-undangan ( $X_1$ ) semua pernyataan berjumlah 8 item yang diajukan adalah valid serta handal dengan nilai *Cronbach's alpha* 0,7776. Uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan pada variabel komitmen organisasi ( $X_2$ ) semua pernyataan berjumlah 8 item yang diajukan adalah valid serta handal dengan nilai *Cronbach's alpha* 0,855. Uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan pada variabel peran APIP ( $X_3$ ) semua pernyataan berjumlah 8 item yang diajukan adalah valid serta handal dengan nilai *Cronbach's alpha* 0,909. Uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan pada variabel penerapan SAKIP (Y) semua pernyataan berjumlah 20 item yang diajukan adalah valid serta handal dengan nilai *Cronbach's alpha* 0,961.

##### 5.1.2 Statistik Deskriptif

Tabel. 5.1 Statistik Deskriptif

<i>Variable</i>	<i>N</i>	<i>Range</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Variance</i>
Kesadaran	100	16	24	40	32.61	3.275	10.725
Komitmen	100	18	22	40	32.99	3.563	12.697
APIP	100	16	24	40	32.32	3.819	14.583
SAKIP	100	28	72	100	85.50	7.714	59.505
Valid N (listwise)	100						

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif yang dituangkan dalam Tabel 5.1 dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata jawaban responden terhadap variabel kesadaran pada peraturan perundang-undangan dan variabel peran APIP adalah netral sedangkan variabel komitmen organisasi dan variabel penerapan SAKIP adalah setuju.

##### 5.1.3 Uji Asumsi Klasik

###### 5.1.3.1 Uji Normalitas

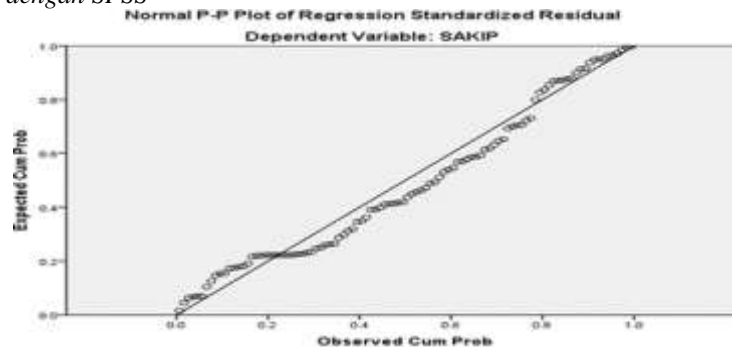
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi normal. Pengujian tentang normal tidaknya data dilakukan dengan normal P-Plot. Jika titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik data searah mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Pada gambar 5.1 terlihat bahwa titik data menyebar di sekitar garis

diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Jadi dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 5.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kesadaran	0.731	1.369
	Komitmen	0.845	1.184
	APIP	0.817	1.224

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS



Gambar 5.1 Hasil Uji Normalitas

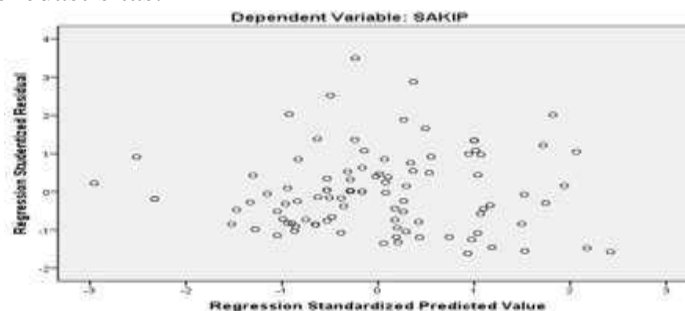
#### 5.1.3.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,1 maka variabel independen terbebas dari persoalan multikolinieritas. Tabel 5.2 menyajikan hasil uji multikolinieritas.

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa semua nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen terbebas dari multikolinieritas.

#### 5.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik plot. Jika tidak ada pola yang jelas, yaitu serat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 5.2 Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar 5.2 memperlihatkan bahwa pada scatterplot, titik-titik yang ada tidak membentuk sebuah pola namun menyebar, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji heteroskedastisitas yang lain dengan uji Glesjer seperti pada Tabel 5.3. Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas, yaitu:

1. Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05
2. Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05

Tabel 5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Model	t	Sig.
1	(Constant)	-.833	.407
	Kesadaran	.733	.466
	Komitmen	1.529	.130
	APIP	-.009	.993

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS

Tabel 5.3 menunjukkan nilai t-tabel dicari pada distribusi nilai t-tabel dengan N=100 dan t=0,050 maka diperoleh nilai t-tabel = 1,98397. Berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan metode Glesjer diperoleh nilai t-hitung lebih kecil t-tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

#### 5.1.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

<i>Coefficients<sup>a</sup></i>					
<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>			<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	27.203	7.189	3.784	.000
	Kesadaran	.042	.208	.018	.839
	Komitmen	.738	.178	.341	.000
	APIP	1.008	.169	.499	.000

a. *Dependent Variable: SAKIP*

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS

Berdasarkan Tabel 5.4 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 27.203 + 0.042X_1 + 0.738X_2 + 1.008X_3 + \epsilon$$

Dapat dilihat nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 27.203 dan bernilai positif. Hal ini berarti Penerapan SAKIP (Y) mempunyai hubungan positif atau searah dengan Kesadaran Pada Peraturan Perundang-undangan ( $X_1$ ), Komitmen Organisasi ( $X_2$ ), dan Peran APIP ( $X_3$ ).

#### 5.1.5 Hasil Pengujian Hipotesis

##### 5.1.5.1 Uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji F)

Tabel 5.5 Hasil Uji F

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2674.942	3	891.647	26.616	.000 <sup>a</sup>
	Residual	3216.058	96	33.501		
	Total	5891.000	99			

a. *Predictors: (Constant), Kesadaran, Komitmen, APIP*

b. *Dependent Variable: SAKIP*

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS

Pada Tabel 5.5 menunjukkan bahwa  $F_{hitung} = 26,616 > F_{tabel} = 2,70$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Dilihat dari nilai signifikansi adalah  $0,000 < 0,05$  sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kesadaran pada peraturan perundang-undangan, komitmen organisasi, dan peran APIP secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan SAKIP.

### 5.1.5.2 Uji koefisien regresi secara parsial (uji t)

Tabel 5.6 Hasil Pengujian Parsial (Uji t)

		<i>Coefficients<sup>a</sup></i>			<i>t</i>	<i>Sig.</i>
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	27.203	7.189		3.784	.000
	Kesadaran	.042	.208	.018	.203	.839
	Komitmen	.738	.178	.341	4.156	.000
	APIP	1.008	.169	.499	5.979	.000

a. *Dependent Variable: SAKIP*

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS

Dari Tabel 5.6 menunjukkan bahwa, (1)  $H_{a1}$  ditolak dan  $H_{o1}$  diterima, sehingga tidak terbukti bahwa kesadaran pada peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAKIP; (2)  $H_{a2}$  diterima dan  $H_{o2}$  ditolak, sehingga terbukti bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAKIP; (3)  $H_{a3}$  diterima dan  $H_{o3}$  ditolak, sehingga terbukti bahwa peran APIP berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAKIP.

### 5.1.5.3 Uji koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*)

Tabel 5.7 Hasil Uji Korelasi dan Uji Determinasi

<i>Model Summary</i>					
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	
1	.674 <sup>a</sup>	.454	.437	5.788	

a. *Predictors: (Constant), APIP, Komitmen, Kesadaran*

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS

Nilai koefisien korelasi (R) berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah.

Berdasarkan Tabel 5.7 koefisien korelasi (R) sebesar 0,674 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) merupakan hubungan yang kuat. Artinya kesadaran pada peraturan perundang-undangan, komitmen organisasi, dan peran APIP mempunyai hubungan yang kuat terhadap penerapan SAKIP karena mendekati nilai 1.

Jika nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sama dengan 0, maka variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya *adjusted R<sup>2</sup>* sama dengan 1, maka variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

Berdasarkan Tabel nilai *adjusted R<sup>2</sup>* adalah 0,437 yang artinya peningkatan penerapan SAKIP sebesar 43,7% dipengaruhi oleh kesadaran pada peraturan perundang-undangan, komitmen organisasi, dan peran APIP, sedangkan sisanya 56,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

## 5.2 Pembahasan

### 5.2.1 Pengaruh Kesadaran Pada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Penerapan SAKIP

Setelah melalui hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat dikemukakan bahwa kesadaran pada peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAKIP. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan peraturan perundang-undangan tentang pedoman SAKIP yang belum sepenuhnya bisa dipahami dan diterapkan dengan baik. Hal ini mencerminkan kesadaran pada peraturan perundang-undangan berjalan kurang efektif karena

kesadaran aparatur terhadap aturan atau hukum masih kurang. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Riantiarno dan Azlina (2011), Soleman (2007), Badruzaman dan Chairunnisa (2011), dan Putra (2003) yang menyimpulkan bahwa kesadaran, kepatuhan atau ketaatan pada peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nasriani dan Chandra (2009), hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa kesadaran tentang akuntabilitas serta hukum tentang akuntabilitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi SAKIP.

Kurangnya kesadaran pada peraturan perundang-undangan khususnya pada peraturan tentang SAKIP dan peraturan tentang penyusunan pelaksanaan pembangunan daerah inilah salah satu yang menyebabkan predikat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum dapat mencapai kategori tertinggi berdasarkan hasil evaluasi dari Kemen PAN dan RB.

### **5.2.2 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan SAKIP**

Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAKIP. Dengan demikian keberadaan komitmen organisasi yang kuat sangat dibutuhkan organisasi agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja serta penggunaan yang lebih baik atas informasi kinerja yang dihasilkan. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah, karena dengan komitmen organisasi yang kuat dimulai dari pimpinan sampai bawahannya maka akan lebih mudah untuk mencapai hasil yang diinginkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, dibanding dengan organisasi yang tidak memiliki komitmen. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Silvia (2013) bahwa komitmen manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Begitu juga dengan penelitian Nusantara dan Subiyanto (2009), menyimpulkan bahwa komitmen pemerintah daerah secara signifikan mempengaruhi efektivitas penerapan SAKIP.

Pegawai dengan komitmen normatif yang tinggi akan tetap bertahan dalam organisasi karena merasa itu adalah kewajibannya dan harus dilakukan sebagai balasan atas keuntungan yang telah dia terima dari organisasi yang menaunginya. Sebagai bentuk balasan kepada organisasi pegawai yang baik akan memberikan kinerja serta tingkah laku yang baik pula agar bisa diikuti oleh pegawai lain. Sikap ini secara langsung memberikan pengaruh yang positif terhadap penerapan SAKIP pada organisasinya.

### **5.2.3 Pengaruh Peran APIP Terhadap Penerapan SAKIP**

Peran APIP berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAKIP. Hal ini tidak lepas dari sifat APIP yang semakin independen dalam melaksanakan tugas evaluasi kinerja dan pengawasan lainnya dan APIP memberikan jaminan atas pelaksanaan tugas instansi/organisasi pemerintah. Selain itu juga APIP memberikan arahan perbaikan bila ditemukan hal-hal yang menyimpang pada instansi/organisasi pemerintah. Sehingga peran APIP terhadap penerapan SAKIP pada instansi/organisasi pemerintah pada khususnya dan pemerintah provinsi Sulawesi Utara pada umumnya berjalan dengan baik sesuai pedoman dan regulasi yang telah dikeluarkan. Hasil penelitian Darwanis dan Chairunnisa (2013) menunjukkan bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan memiliki korelasi positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2013), dimana fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan nilai signifikansi sebesar 0,002, karena berada dibawah nilai signifikansi yang dipersyaratkan yaitu 0,05.

Peran APIP memberi nilai tambah kepada organisasi sebagai sumber yang objektif melalui saran-saran yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal organisasi.

## 6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran pada peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAKIP. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan peraturan perundang-undangan tentang pedoman SAKIP yang belum sepenuhnya bisa dipahami dan diterapkan dengan baik. Hal ini mencerminkan kesadaran pada peraturan perundang-undangan berjalan kurang efektif karena ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan atau hukum masih kurang.
2. Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAKIP. SAKIP akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan komitmen yang tinggi dari setiap unsur penyelenggara SAKIP itu sendiri, karena dengan komitmen organisasi yang kuat dimulai dari pimpinan sampai bawahannya maka akan lebih mudah untuk mencapai hasil yang diinginkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, dibanding dengan organisasi yang tidak memiliki komitmen.
3. Peran APIP berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAKIP. Hasil ini tidak lepas dari APIP yang semakin independen dalam melaksanakan tugas evaluasi kinerja dan pengawasan lainnya dan APIP memberikan jaminan atas pelaksanaan tugas instansi/organisasi pemerintah. Selain itu juga APIP. memberikan arahan perbaikan bila ditemukan hal-hal yang menyimpang pada instansi/organisasi pemerintah.
4. Kesadaran pada peraturan perundang-undangan, komitmen organisasi dan peran APIP secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAKIP.
5. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi, nilai adjusted R<sup>2</sup> dalam penelitian ini adalah 0,437 yang artinya peningkatan penerapan SAKIP sebesar 43,7% dipengaruhi oleh kesadaran pada peraturan perundang-undangan, komitmen organisasi, dan peran APIP, sedangkan sisanya 56,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah. 2013. *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*. Jakarta: Komite Standar Audit AAIP.
- Astuti, R. M. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Grobogan)*. Naskah Publikasi. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C., and W. H. Meckling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics. 3(4): 305-360.
- Kelman, H. C. 1958. *Compliance, identification, and internalization three processes of attitude change*. Conflict Resolution. II(1). Harvard University.
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta

- Lukito, P. K. 2014. *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Kedepan*. Jakarta: Grasindo.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Meyer, J. P., N. J. Allen., and C. A. Smith. 1993. *Commitment to Organisations and Occupations: Extension and test of a Three-Component Conceptualisation*. Journal of Applied Psychology, 78(4): 538-551.
- Meyer J. P., N. J. Allen.1997. *Commitment In The Workplace: Theory Research and Application*. Thousand Oaks. California: Sage Publication. Inc.
- Muskamal. 2014. *Aktualisasi Konsep Birokrasi Dalam Menjawab Tantangan Reformasi Birokrasi Di Indonesia*. <http://makassar.lan.go.id>, diakses tanggal 19 Juli 2016.
- Nasriani dan T. Chandra. 2009. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau*. Jurnal Tepak Manajemen Bisnis. 1(3): 107-131.
- Norman, F. 2010. *Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bengkulu*. Jurnal SNA XIII. Purwokerto.
- Nurkhamid, M. 2008. *Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. 3(1).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Riantiarno, R., dan N. Azlina. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Pekbis Jurnal, 3(3): 560-568.
- Salman, O., dan A. F. Susanto. 2004. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Rafika Aditama.
- Setiyono, B. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik: Prinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Negara Terkini*, Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Silvia. 2013. *Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi, Komitmen Manajemen, dan Otoritas Pengambilan Keputusan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh)*. Skripsi. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Soekanto, S. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soleman, R. 2007. *Pengaruh Kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Disertasi. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Turner, M., and D. Hulme. 1997. *Governance, Administration, and Development: Making The State Work*. London: MacMillan Press Ltd.
- Weber, M. 1948. *From Max Weber: Essays in Sociology*. Edited by H. Gerth., and C. W. Mills. London: Routledge and Kegan Paul.
- Yuwono, S., et al. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang: Banyumedia Publishing.



**PENGARUH KELEMAHAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL, KETIDAKPATUHAN PADA PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA  
TERHADAP OPINI BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

Justisia Sulastri Maabuat, Jenny Morasa, David P. E. Saerang  
(E-mail : justisiamaabuat@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aimed to examine the effect of the internal controls weaknesses, non-compliance with the laws and regulations and the settlement of regional losses against granting BPK-RI audit opinion on LKPD in Indonesia. The sample in this study amounted to 230 LKPD 2014 throughout Indonesia and used multinominal logistic regression analysis. This study used secondary data which obtained by the Information and Communication Centre (PIK) BPK-RI. The results showed that the accounting controls and reporting system weaknesses (KSPAP), the implementation system of the budget revenue and expenditure weaknesses, the non-compliance with laws and regulations that cause value of local losses influence the granting BPK-RI audit opinion. The internal control structure weaknesses, adherence to laws and regulations that lead to the potential loss of area, a lack of revenues and irregularities in the administration and the settlement of regional losses do not affect granting BPK-RI audit opinion on LKPD.*

*Keywords: The internal control system weaknesses, non-compliance with the laws and regulations, the settlement of regional losses, BPK-RI audit opinion, LKPD*

**PENDAHULUAN**

Disentralisasi fiskal di Indonesia yang terjadi di awal Januari 2001 telah memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah bagi kesejahteraan masyarakat dimana pemerintah pusat berperan sebagai pengawas pelaksanaan disentralisasi fiskal tersebut. Pemerintah daerah berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada pemerintah pusat dan masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jaminan kualitas atas akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah diberikan dalam bentuk pernyataan atau pendapat profesional Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang dikenal dengan opini audit BPK-RI. *Opini audit* BPK RI dengan status WTP atas LKPD merupakan salah satu indikator dalam RPJMN 2010-2014 yang tidak mencapai target 60% LKPD memperoleh *opini* dengan status WTP yang telah ditetapkan, dimana faktor sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan permasalahan yang menyebabkan BPK-RI memberikan *opini* dengan status WTP kepada pemerintah daerah kurang dari target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014.

Berdasarkan fenomena, teoritikal gap dan riset gap dan yang terjadi maka penulis memandang penting untuk meneliti kembali tentang "Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan dan Penyelesaian Kerugian Negara terhadap *opini Audit* BPK-RI atas LKPD di Indonesia".

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dilihat dari jenis penggunaannya. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan Pengaruh Kelemahan Sistem

Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan dan Penyelesaian Kerugian Negara terhadap *opini Audit* BPK-RI atas LKPD di Indonesia. Bagi pemerintah daerah hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas paradigma dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas laporan keuangan untuk memperoleh peningkatan *opini* WTP dari BPK-RI yang berdampak pada peningkatan kepercayaan pemerintah pusat, investor dan masyarakat terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah.

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Keagenan, Opini Audit dan Laporan Keuangan**

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan konsep teori keagenan terbentuk oleh hubungan keagenan berupa kontrak yang mengikat antara prinsipal dengan agen yang melakukan aktivitas-aktivitas pelayanan atas nama prinsipal yang telah mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada pihak agen. Menurut Davis, Schoorman dan Donaldson sebagaimana dikutip Adzani dan Martani (2014) terdapat asumsi yang menyatakan bahwa pihak prinsipal dan pihak agen merupakan *homo economicus* yang oportunis dan mementingkan diri sendiri. Sebagai makhluk *homo economicus*, pihak prinsipal dan pihak agen bersama-sama ingin memperoleh keuntungan yang maksimal bagi pihaknya sendiri yang akan menimbulkan konflik kepentingan. Dalam konsep pemerintahan, pihak agen diperankan oleh pemerintah yang menerima mandat dari masyarakat yang menuntut penyelenggaraan pemerintahan negara yang dapat memberikan manfaat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, BPK-RI tampil sebagai penengah di antara kepentingan masyarakat dan pemerintah sebagai pemberi keyakinan atas penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan oleh pemerintah dan mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada masyarakat dalam bentuk pendapat atau yang dikenal sebagai *opini* BPK-RI atas LKPD.

### **Teori Nilai Tambah Audit**

*With higher audit quality providing greater assurance of high financial reporting quality* (DeFond dan Zhang, 2014:313). *The audit is likely to have value in reducing the manager's divergent actions if the market holds a non-zero probability the auditor will report a breach in the contract(s)* (Watts dan Zimmerman, 1981:6). *The quality of audit services is defined to discover a breach in the client's accounting system and report the breach* (DeAngelo, 1981:186). *The more recommendations are acted upon, the better the quality of local government financial statements* (Setyaningrum, et al., 2013:102). Audit yang bernilai tinggi akan memperbesar jaminan terhadap tingginya kualitas laporan keuangan. Suatu audit dikatakan memiliki nilai ketika audit memberikan peluang bagi auditor untuk menemukan perbuatan yang melawan ataupun mengabaikan peraturan, membuktikan adanya temuan dan melaporkan temuan tersebut serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi auditor. Dalam konteks teori nilai tambah audit, pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan akan mengungkapkan tingkat penyimpangan, ketidakekonomisan, penyelewengan atau keborosan (*Breach*) yang terjadi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan penyelesaian kerugian negara dalam konteks teori nilai tambah audit dilihat sebagai tingkat tindak lanjut atas hasil temuan yang telah dilaporkan dan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti.

### **Opini Audit**

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (UU Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 1 Butir 11). Pendapat auditor merupakan pernyataan tertulis mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material yang didasarkan pada evaluasi bukti audit yang diperoleh dan temuan auditor (Arens, Elder dan Beasley, 2015: 42).

### **Sistem Pengendalian Internal (SPI)**

ISA 315 *Auditor shall obtain an understanding of internal control relevant to the audit that allows the auditor to identify factors that affect the risk of material misstatement within financial statement* (Colling, 2011: 99). Satu kelemahan sistem pengendalian internal yang material mengharuskan manajemen untuk menyimpulkan bahwa pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan tidak efektif (Arens *et al.*, 2015: 342). Efektivitas sistem pengendalian internal ditunjukkan dengan jumlah temuan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD (Yamin dan Sutaryo, 2015). Temuan kelemahan sistem pengendalian intern terbagi atas kelompok: temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sertatemuan kelemahan struktur pengendalian intern (BPK-RI, 2010).

Berdasarkan teori keagenan, teori nilai tambah audit, *uncertainty reduction theory*, opini audit, laporan keuangan dan efektivitas sistem pengendalian internal maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

1. kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (KSPAP) mempengaruhi pemberian *opini* BPK-RI atas LKPD.
2. kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (KSPPAPB) mempengaruhi pemberian *opini* BPK-RI atas LKPD.
3. kelemahan struktur pengendalian internal (KStPI) mempengaruhi pemberian *opini* BPK-RI atas LKPD.

### **Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah selain pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internal. Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah *auditee* telah mengikuti serangkaian prosedur yang spesifik, tata cara, dan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi (Arens *et al.*, 2015:14). Standar pemeriksaan keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh BPK-RI menyatakan kewajiban pemeriksa untuk menyiapkan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang mengungkapkan temuan ketidakpatuhan yang berpengaruh secara langsung dan materil terhadap laporan keuangan daerah. ISA 250.18: *Where an act of non compliance has been identify by the auditor, the auditor shall gain an understanding of the nature of the the act of non compliance and the reasons behind its occurance and evaluate the possible effect on the financial statements* (Collings, 2011). BPK-RI mengkategorikan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan dampak terhadap laporan keuangan yang mungkin terjadi karena perbuatan ketidakpatuhan. *The audit should be designed to provide reasonable assurance of detecting material misstatements resulting from noncompliance that have a material and direct effect on the financial statement* (Arens *et al.*, 2012: 820). Dampak ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dibagi menjadi kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terdiri atas temuan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kelompok temuan potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kelompok temuan kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, kelompok temuan administrasi dan kelompok temuan indikasi tindak Pidana (BPK-RI, 2010).

Berdasarkan teori keagenan, teori nilai tambah audit, opini audit, laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

4. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah (NKD) mempengaruhi pemberian *opini* BPK-RI atas LKPD.

5. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah (NPKD) mempengaruhi pemberian *opini* BPK-RI atas LKPD.
6. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan (NKP) mempengaruhi pemberian *opini* BPK-RI atas LKPD.
7. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi (Adm) mempengaruhi pemberian *opini* BPK-RI atas LKPD.

### **Penyelesaian Kerugian Negara**

*With higher audit quality providing greater assurance of high financial reporting quality* (DeFond dan Zhang,2014:313). *The more recommendations are acted upon, the better the quality of local government financial statements* (Setyaningrum, et al.,2013:102). Suatu audit dikatakan memiliki nilai ketika audit memberikan peluang bagi auditor untuk menemukan perbuatan yang melawan ataupun mengabaikan peraturan, membuktikan adanya temuan dan melaporkan temuan tersebut serta memantau tindaklanjut atas rekomendasi auditor. Audit yang bernilai tinggi akan memperbesar jaminan terhadap tingginya kualitas laporan keuangan. Apabila semakin banyak kerugian negara yang diselesaikan, maka akan mempengaruhi pemberian *opini audit* BPK-RI atas LKPD. Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Sari (2012) membuktikan bahwa penyelesaian temuan audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan berimplikasi positif terhadap penerapan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian Adzani dan Martani (2014) mengungkapkan bahwa nominal temuan, nominal rekomendasi dan tindak lanjut berpengaruh terhadap pemberian *opini* audit.

Berdasarkan teori keagenan, teori nilai tambah audit, *opini* audit, laporan keuangan dan penyelesaian kerugian negara maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

8. Penyelesaian kerugian daerah mempengaruhi pemberian *opini* BPK-RI atas LKPD.

## **METODE PENELITIAN**

### **Data Sampel**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Pusat Informasi dan Komunikasi BPK-RI berupa hasil pemeriksaan terhadap LKPD Tahun Anggaran 2014. Data yang digunakan berupa kasus kelemahan sistem pengendalian internal, temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan *opini* audit tahun anggaran 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah 539 LKPD tahun 2014 yang diperiksa oleh BPK-RI. Sampel dalam penelitian ini sebesar 230 LKPD tahun anggaran 2014 yang telah diaudit. Besar sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat keyakinan 95% atau pada batas toleransi kesalahan (*error tolerance*) sebesar 5%.

### **Klasifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **Variabel Independen**

Penelitian ini menggunakan delapan variabel independen yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen tersebut terhadap variabel dependen, yaitu:

1. **Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi Dan Pelaporan (KSPAP)** adalah temuan kelemahan sistem pengendalian terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas asset (BPK-RI, 2010). Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan diukur berdasarkan jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (Fatimah, Sari dan Rusali, 2014).
2. **Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (KSPPAPB)** adalah temuan kelemahan pengendalian terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat mempengaruhi efisiensi dan

efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (BPK-RI, 2010). Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja diukur berdasarkan jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (Fatimah, Sari dan Rusali, 2014).

3. **Kelemahan Struktur Pengendalian Internal (KstPI)** adalah temuan kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian internal atau efektivitas struktur pengendalian internal yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian internal secara keseluruhan (BPK-RI, 2010). Kelemahan struktur pengendalian internal diukur berdasarkan jumlah temuan kasus kelemahan struktur pengendalian internal (Fatimah, Sari dan Rusali, 2014).
4. **Ketidakpatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Kerugian Daerah (NKD)** adalah temuan permasalahan berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (BPK-RI, 2010). Ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah diukur berdasarkan nilai kerugian daerah yang ditimbulkan (Atmaja dan Probohudono, 2015).
5. **Ketidakpatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah (NPKD)** adalah temuan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya (BPK-RI, 2010). Ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah (NPKD) diukur berdasarkan nilai potensi kerugian daerah yang ditimbulkan (Atmaja dan Probohudono, 2015).
6. **Ketidakpatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan (NKP)** adalah temuan yang mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan (BPK-RI, 2010). Ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan (NKP) diukur dengan menggunakan nilai kekurangan penerimaan (Atmaja dan Probohudono, 2015).
7. **Ketidakpatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi (Adm)** temuan yang mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana. (BPK-RI, 2010). Ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi (Adm) diukur berdasarkan jumlah kasus penyimpangan administrasi (Atmaja dan Probohudono, 2015).
8. **Penyelesaian kerugian negara (PKD)** adalah tingkat penyelesaian kerugian daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yang ditentukan oleh total jumlah rekomendasi, tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. Penyelesaian kerugian negara (PKD) diukur berdasarkan hasil penjumlahan nilai nominal rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan nilai nominal rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti dibagi dengan total

nilai nominal rekomendasi sebagaimana yang telah digunakan oleh Setyaningrum *et al.*, (2013). Atau secara matematis dapat ditulis kembali sebagai berikut:

$$PKD = \frac{[\text{Nominal rekomendasi yang telah ditindak lanjuti} + \text{Nominal rekomendasi yang tidak dapat ditindak lanjuti}]}{\text{total nominal rekomendasi}}$$

### Variabel Dependen

Penelitian ini menggunakan *Opini audit BPK-RI (Opinit)* sebagai variabel dependen untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel *Opini audit BPK-RI (Opinit)*. *Opini audit BPK-RI* adalah *opini* yang diterbitkan BPK-RI atas LKPD (Nurdiono, 2015). Variabel *opini* diukur berdasarkan skala ordinal yang dapat diurutkan 1 sampai dengan 5 atas kelima jenis *opini audit BPK-RI* dari peringkat yang kurang baik menuju yang paling baik. Kelima jenis *opini audit BPK-RI* yang diskalakan dalam penelitian ini adalah *opini TMP*, *TW*, *WDP*, *WTP-DPP* dan *WTP* (Adzani dan Martani, 2014).

### Hasil Penelitian

Hasil penelitian menggambarkan data dari 230 pemerintah daerah yang dijadikan sampel, *Opini* terbanyak pada tahun 2015 adalah *Opini WTP* sebesar 30,4%, *Opini WTP-DPP* sebesar 17,8%, *Opini WDP* 47,8%, *Opini TW* 0,9% dan *Opini* Tidak memberi Pendapat sebesar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa 96,2% pemerintah daerah di Indonesia telah mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar, sedangkan 3,9% Pemerintah Daerah di Indonesia belum mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar.

Hasil uji Model Fitting Information nilai signifikansi (*p-value sig*) 0,000 <  $\alpha = 5\%$  dan nilai *Chi Square* hitung sebesar 70,384 yang lebih besar dari *Chi Square* tabel (0,05;32) sebesar 46,194 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat minimal satu variabel bebas yang secara signifikan mempengaruhi variabel terikat atau menunjukkan bahwa model sesuai dengan data. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian model fitting information maka selanjutnya dapat dilakukan pengujian signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil uji Goodness of Fit menunjukkan signifikansi (*p-value sig*) 1,00 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  yang berarti bahwa modelnya baik untuk digunakan dalam penelitian, hal ini sama dengan uji simultan.

Hasil Uji *Pseudo R-Square* dengan menggunakan pendekatan *Nagelkerke* 0,292 yang mengindikasikan bahwa keragaman data variabel bebas dalam penelitian mampu menjelaskan keragaman data variabel terikatnya sebesar 29,2% sedangkan sisanya atau sebesar 70,8% dijelaskan oleh variabel bebas lain yang ada di luar model penelitian.

Hasil *likelihood ratio tests* berupa nilai signifikansi (*p-value sig*) KSPAP sebesar 0,002 dan NKD sebesar 0,011. Nilai signifikansi (*p-value sig*) untuk variabel KSPAP dan NKD lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Variabel KSPAP signifikan mempengaruhi variabel terikat *Opinit*.
- 2) Variabel NKD signifikan mempengaruhi variabel terikat *Opinit*.

Kesimpulan yang sama diperoleh dengan membandingkan *Chi Square* variabel KSPAP sebesar 17,242 dan NKD sebesar 12,967 lebih besar dari *Chi Square* tabel (0,05;4) sebesar 9,487. Nilai *Chi Square* menunjukkan variabel KSPAP dan NKD mempengaruhi pemberian *opini audit BPK-RI* atas pemeriksaan LKPD.

Sebaliknya nilai *p-value sig* untuk variabel KSPAP sebesar 0,112, KStPI sebesar 0,164, NPKD sebesar 0,503, NKP sebesar 0,333, Adm sebesar 0,955 dan PKD sebesar 0,109 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Variabel KSPAP tidak mempengaruhi variabel terikat *Opinit*,
- 2) Variabel KstPI tidak mempengaruhi variabel terikat *Opinit*,

- 3) Variabel NPKD tidak mempengaruhi variabel terikat *Opinit*,
- 4) Variabel NKP tidak mempengaruhi variabel terikat *Opinit*,
- 5) Variabel Adm tidak mempengaruhi variabel terikat *Opinit*, dan
- 6) Variabel PKD tidak mempengaruhi variabel terikat *Opinit*.

Kesimpulan yang sama diperoleh dengan membandingkan *Chi Square* hitung variabel KSPPAPB sebesar 7,5, KStPI sebesar 6,509, NPKD sebesar 3,337, NKP sebesar 4,585, Adm sebesar 0,667 dan PKD sebesar 7,566 lebih kecil dari *Chi Square* tabel (0,05;4) sebesar 9.487. Nilai *Chi Square* menunjukkan variabel KSPPAPB, KstPI, NPKD, NKP, Ad, dan PKD tidak berpengaruh atas pemberian *opini audit* BPK-RI atas pemeriksaan LKPD.

## PENGUJIAN HIPOTESIS

### 1. Pengaruh kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terhadap pemberian *opini audit* BPK-RI atas LKPD

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan *parameter estimates* menunjukkan bahwa variabel kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (KSPAP) memperoleh nilai signifikansi (*p-value sig*) 0,000 untuk kategori *opini* WDP. Nilai signifikansi (*p-value sig*) untuk kategori *opini* WDP lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (KSPAP) berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian *opini audit* BPK-RI atas LKPD atau **Hipotesis (H1) diterima**. Nilai signifikansi (*p-value sig*) menjelaskan jumlah temuan kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan berpengaruh positif terhadap peluang BPK-RI memberikan *opini* WDP atau WTP atas LKPD. Nilai signifikansi (*p-value sig*) 0,000 untuk kategori WDP bermakna bahwa jumlah temuan kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan berpengaruh sebesar 100% terhadap pemberian *opini* WDP atas LKPD.

### 2. Pengaruh kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (KSPPAB) terhadap pemberian *opini audit* BPK-RI atas LKPD.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (KSPPAB) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan *opini*-BPK RI atas LKPD. Variabel kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (KSPPAPB) memperoleh nilai signifikansi (*p-value sig*) 0,049 untuk kategori *opini* WTP-DPP. Nilai signifikansi (*p-value sig*) untuk kategori *opini* WTP-DPP lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (KSPPAPB) berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian *opini* BPK-RI atas LKPD atau **Hipotesis (H2) diterima**. Nilai signifikansi (*p-value sig*) menjelaskan jumlah temuan kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja berpengaruh positif terhadap peluang BPK-RI memberikan *opini* WTP-DPP atau WTP atas LKPD. Nilai signifikansi (*p-value sig*) 0,000 untuk kategori WTP-DPP bermakna bahwa jumlah temuan kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja berpengaruh sebesar 95,1% terhadap pemberian *opini* WTP-DPP atas LKPD.

### 3. Pengaruh kelemahan struktur pengendalian internal (KStPI) terhadap penerimaan *opini* atas LKPD.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kelemahan struktur pengendalian internal (KstPI) tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian *opini audit* BPK-RI atas LKPD. Nilai signifikansi (*p-value sig*) variabel kelemahan struktur pengendalian internal (KstPI) untuk kategori *opini* TMP 0,066, TW 0,301, WDP 0,422 dan WTP-DPP 0,454 lebih besar dari nilai  $\alpha = 5\%$ . Nilai signifikansi (*p-value sig*) menunjukkan bahwa kelemahan struktur pengendalian internal (KstPI) tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian *opini audit* BPK-RI atas LKPD atau **hipotesis (H3) ditolak**. Dengan demikian walaupun

pemeriksaan menemukan sejumlah kasus kelemahan struktur pengendalian internal namun tidak akan mempengaruhi peluang BPK-RI memberikan *opini* WTP atas LKPD.

**4. Pengaruh ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah terhadap pemberian *opini audit* BPK-RI atas LKPD**

Hasil pengujian hipotesis memenuhi hipotesis ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah (NKD) mempengaruhi pemberian *opini audit* BPK-RI atas LKPD atau **hipotesis (H<sub>4</sub>) diterima**. Nilai signifikansi (*p-value sig*) untuk kategori *opini* TMP 0,016 dan TW 0,043 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa nilai kerugian daerah yang ditimbulkan karena ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mempengaruhi pemberian *opini audit* BPK-RI sebesar 98,4% untuk memperoleh *opini* status TMP dan 95,7% untuk memperoleh *opini* status TW.

**5. Pengaruh ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah terhadap pemberian *opini audit* BPK-RI atas LKPD**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah (NPKD) tidak mempengaruhi pemberian *opini audit* BPK-RI atas LKPD atau **hipotesis (H<sub>5</sub>) ditolak**. Nilai signifikansi (*p-value sig*) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah (NPKD) untuk kategori *opini* TMP 0,597, TW 0,946, WDP 0,317 dan WTP-DPP 0,287 lebih besar dari nilai  $\alpha = 5\%$  dan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah (NPKD) tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian *opini* TMP, TW, WDP, WTP-DPP dan WTP.

**6. Pengaruh ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan terhadap pemberian *opini audit* BPK-RI atas LKPD**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan tidak mempengaruhi pemberian *opini audit* BPK-RI atas LKPD atau **hipotesis (H<sub>6</sub>) ditolak**. Nilai signifikansi (*p-value sig*) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan (NKP) untuk kategori *opini* TMP 0,111, TW 0,954, WDP 0,273 dan WTP-DPP 0,874 lebih besar dari nilai  $\alpha = 5\%$  dan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan (NKP) tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian *opini* TMP, TW, WDP, WTP-DPP dan WTP.

**7. Pengaruh ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi terhadap pemberian *opini audit* BPK-RI atas LKPD**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi tidak mempengaruhi pemberian *opini audit* BPK-RI atas LKPD atau **hipotesis (H<sub>7</sub>) ditolak**. Nilai signifikansi (*p-value sig*) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi (Adm) untuk kategori *opini* TMP 0,429, TW 0,840, WDP 0,801 dan WTP-DPP 0,972 lebih besar dari nilai  $\alpha = 5\%$  dan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi (Adm) tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian *opini* TMP, TW, WDP, WTP-DPP dan WTP.



## 8. Pengaruh penyelesaian kerugian negara terhadap *opini audit* BPK-RI atas LKPD.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan penyelesaian kerugian negara tidak mempengaruhi pemberian *opini audit* BPK-RI atas LKPD atau **hipotesis ( $H_8$ ) ditolak**. Penyelesaian kerugian negara memperoleh nilai signifikansi (*p-value sig*) untuk kategori *opini* TMP 0,703, TW 0,875, WDP 0,160 dan WTP-DPP 0,143 lebih besar dari nilai  $\alpha = 5\%$  dan menunjukkan bahwa penyelesaian kerugian negara tidak mempengaruhi pemberian *opini* TMP, TW, WDP, WTP-DPP dan WTP.

## KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, landasan teori, hipotesis dan hasil pengujian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (KSPAP) dan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (KSPPAB) berpengaruh terhadap pemberian *opini audit* BPK-RI atas LKPD.
2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (KSPPAB) berpengaruh terhadap pemberian *opini audit* BPK-RI atas LKPD.
3. Kelemahan struktur pengendalian internal (KStPI) tidak berpengaruh terhadap pemberian *opini audit* BPK-RI atas LKPD.
4. Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah (NKD) berpengaruh terhadap *opini audit* BPK-RI atas LKPD.
5. Ketidapatuhan pada peraturan perundang-undangan yang menyebabkan potensi kerugian daerah tidak berpengaruh terhadap pemberian *opini audit* BPK-RI atas LKPD.
6. Ketidapatuhan pada peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kekurangan penerimaan tidak berpengaruh terhadap pemberian *opini audit* BPK-RI atas LKPD.
7. Ketidapatuhan pada peraturan perundang-undangan yang menyebabkan penyimpangan administrasi tidak berpengaruh terhadap pemberian *opini audit* BPK-RI atas LKPD.
8. Penyelesaian kerugian daerah tidak mempengaruhi pemberian *opini* BPK-RI atas LKPD.

## KETERBATASAN DAN SARAN

Beberapa keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian ini dan perlu menjadi bahan pengembangan pada penelitian selanjutnya:

1. Koefisien determinasi (Nagelkerke R square) adalah sebesar 0,292 untuk penilaian model penelitian yang berarti variabilitas variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas adalah sebesar 29,2 persen, sedangkan sisanya sebesar 70,8 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.
2. Hasil penelitian ini hanya dilakukan pada pemerintah daerah yang mendapatkan *opini* atas laporan keuangannya pada tahun anggaran 2014.
3. Hasil penelitian ini terbatas pada objek penelitian yang tidak memiliki nilai temuan, rekomendasi dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dalam bentuk mata uang asing.
4. Kesulitan dalam mengakses data, maka dalam penelitian ini tidak mempertimbangkan unsur materialitas sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan *opini*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (KSPAP), kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (KSPPAB) dan ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang

mengakibatkan kerugian daerah (NKD) berpengaruh terhadap *opini audit* BPK-RI atas LKPD diharapkan membawa implikasi praktis bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat menyusun strategi agar dapat meningkatkan kewajaran laporan keuangan dengan memperoleh *opini* status WTP.

## Referensi

- Adzani, A.H. dan Martani, D. 2014. *Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik dan Kepatuhan regulasi terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi ke-17. Mataram Lombok
- Arens, *et.al.* 2015. *Auditing & Jasa Asurance: Pendekatan Terintegrasi*, Edisi Kelima belas Jilid 1. Jakarta: Erlangga
- , 2012. *Auditing and Assurance Service: an Integrated Approach*, 14th Edition. United States of America: Pearson.
- Atmaja, W, R.S.A dan Probohudono, A.N. 2015. *Analisis Audit BPK-RI terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidapatuhan dan Kerugian Negara. Jurnal Integritas.* (Vol. 1). 81-110
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2014, Buku II Pemeriksaan Laporan Keuangan, September 2014*. Jakarta : Penerbitan BPK-RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2014, Buku I Ringkasan Eksekutif, September 2014*. Jakarta: Penerbitan BPK-RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan*. Jakarta: Penerbitan BPK-RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2010. *Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 5/K/I-XIII.2/8/2010 Tentang Petunjuk Teknis Koding Temuan Pemeriksaan*. Jakarta: Penerbitan BPK-RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Standar Pemeriksaan Keuangan Negera Nomor 01 Tahun 2007*. Jakarta: Penerbitan BPK-RI.
- Boynton, J., dan Kell. 2003. *Modern Auditing (alih bahasa Rajoe, P.A., et.al)*. Jakarta: Erlangga.
- Collings, Steven. 2011. *Interpretation and Application of International Standards on Auditing*. United Kingdom: Wiley
- DeANGELO, E. Linda. 1981. *Auditor Size and Audit Quality*. Journal of Accounting and Economics No.3. 183-199
- DeFond, Mark., dan Zhang, Jieying. 2014. *A Review of archival auditing research*. Journal of Accounting and Economics. No. 58. 275-326
- Fatimah, D. Sari, R.N dan Rasuli, M. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia*. Jurnal Akuntansi (Vol. 3) No. 1:1-15
- Jensen and Meckling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. (Vol. 3): 305-360
- Lasena, S. 2011. *Analisis Faktor pada Opini Disclaimer BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2011*. Tesis. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

- Merrifield A. Nicole, 2011. *A Relational Approach to Reducing Uncertainty During a Crisis through the use of Mobile Technology*. Research Paper. University of Tennessee: Knoxville.
- Mulyadi, 2002. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nalurita, N. 2015. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan dan Karakteristik Daerah terhadap Kredibilitas Laporan Keuangan Pemerintah di Indonesia*. Tesis. Program Studi Magister Akuntansi. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Surakarta
- Nurdiono. 2015. *Analisis Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia*. Disertasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Presiden Republik Indonesia . 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Presiden Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Penerbitan Sekretariat Negara RI.
- Presiden Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Penerbitan Sekretariat Negara RI.
- Presiden Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta: Penerbitan Sekretariat Negara RI.
- Presiden Republik Indonesia . 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah*. Jakarta: Penerbitan Sekretariat Negara RI.
- Sari, D. 2012. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Penyelesaian Temuan Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan*. Indonesia Journal of Economics and Business.(Vol. 2). No. 2
- Setyaningrum, D. et.al.2013. *The Effect of Auditor Quality on the Follow-Up of Audit Recommendation*. International Research Journal of Business Studies.(Vol. 6).No. 2. 89-104
- Watts, L. Ross., dan Zimmerman, L. Jerold. 1981. *The Market for Independence and Independent Auditors*. Unpublished Manuscript.
- Yamin, R., dan Sutaryo. 2015. *Faktor Penentu Jumlah Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi Ke-18. No. 119. Medan.

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, MOTIVASI, *JOB RELEVANT INFORMATION*, KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PELIMPAHAN WEWENANG TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SKPD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

Aljeni Murahati Rellam, Grace B. Nangoi, Jenny Morasa  
(Email : rellamjeni@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of budget participation to managerial performance SKPD Talaud Islands, to determine the effect of motivation budgeting on managerial performance SKPD Talaud Islands, To know the job relevant information budgetary against Managerial Performance SKPD Talaud Islands, to know the Policy Formulation budget of the Managerial performance Talaud Islands, to determine the influence of delegation of authority budgeting on Managerial performance SKPD Talaud Islands, to determine jointly the effect of budget participation, motivation budgeting, job relevant information budgeting, policy budgeting, delegation of authority budgeting on managerial performance SKPD Talaud Islands. The population in this study was 105 respondents from 35 SKPD in Government Talaud Islands. Samples were selected using purposive sampling method, as many as 105 employees / officers who have served as Secretary, Head of Finance and Head of Planning / Program for primary data tested were from 105 respondents are already established. The analytical method used is multiple linear regression analysis and before the data is processed first tested using the classical assumption test. As for the process of research data using SPSS version 15.0. The results showed evidence that budget participation, motivation budgeting, job relevant information budgeting, no significant effect on managerial performance. And research shows evidence that the policy of budgeting, delegation of authority budgeting significant effect on managerial performance.*

*Keywords: Participation budgeting, motivation budgeting, job relevant information budgeting, budgeting policies, delegation of authority budgeting on managerial performance*

**PENDAHULUAN**

Indonesia menerapkan suatu azas desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan di berbagai daerah, dengan maksud untuk memberikan suatu kebebasan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui Otonomi Daerah. Otonomi dan desentralisasi fiskal di Indonesia diatur dalam beberapa aturan. Pemerintah Daerah diharapkan untuk lebih memperhatikan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan segala kondisi untuk mensejahterahkan rakyat dengan menerapkan asas-asas pelayanan publik yang didalamnya meliputi; (1) transparansi; (2) akuntabilitas; (3) partisipatif; (4) kesamaan hak; (5) keseimbangan hak; (6) dan kewajiban. Untuk maksud tersebut diatas perlu adanya perencanaan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Motivasi Penyusunan Anggaran, *Job Relevant Information* Penyusunan Anggaran, Kebijakan Penyusunan Anggaran dan Pelimpahan Wewenang Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD karena diangkatnya Kinerja Manajerial sebagai faktor kunci yang diteliti. Kinerja Manajerial sangat berpengaruh terhadap kinerja seorang pimpinan atau kinerja pemerintah daerah ditentukan oleh kinerja aparat yang ada di SKPD pada pemerintah daerah tersebut. Kinerja aparat pada SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud masih menimbulkan pertentangan (Kontradiktif) antara kedekatan pimpinan daerah dengan aparat yang ada di SKPD, Seorang aparat yang

mempunyai hubungan secara khusus dengan pimpinan daerah akan diperlakukan secara khusus pula oleh pimpinan daerah, hal ini dapat dilihat dalam penentuan aparat pada jabatan dengan tidak memperhatikan kinerja maupun tingkat kompetensi yang sesungguhnya (Waney 2012:8), yang artinya Kinerja aparatur pemerintah tidak diukur dengan kemampuan melakukan suatu pekerjaan (kompetensi) atau sesuai dengan tingkat pendidikan tetapi diukur kedekatan dengan pimpinan yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini terdapat penyusunan anggaran di Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagian besar masih ketergantungan pada keputusan top manajemen, kurangnya pelimpahan wewenang kepada middle manajemen yang secara langsung berhubungan dengan teknik lapangan, Sehingga perlu adanya keterlibatan dari middle manajemen dalam perencanaan penyusunan anggaran, Pemilihan SKPD yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud, karena masih banyak permasalahan yang perlu dibenahi yang terjadi, untuk bisa mendapat opini yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka akan diperjelas objek yang diteliti dengan pertanyaan sebagai berikut.

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud ?
2. Apakah motivasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud ?
3. Apakah *job relevant information* penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud ?
4. Apakah kebijakan penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud ?
5. Apakah pelimpahan wewenang penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud ?

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial pemerintah di SKPD.
2. Menganalisis pengaruh motivasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial pemerintah di SKPD.
3. Menganalisis pengaruh *job relevant information* penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial pemerintah di SKPD.
4. Menganalisis pengaruh kebijakan penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial pemerintah di SKPD.
5. Menganalisis pengaruh pelimpahan wewenang penyusunan anggaran, terhadap kinerja manajerial di SKPD.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori keagenan (*Agency Theory*)**

Agensi teori mengakibatkan hubungan yang asimetri antara masyarakat dan pemerintah, untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep *Good Corporate Governance* yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan *corporate governance* berdasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen yaitu pemerintah secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) yaitu masyarakat dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan perjanjian kerja (kontrak). Mekanisme *corporate governance* memiliki kemampuan pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara principal (masyarakat) dan agen

(pemerintah), sehingga dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki kandungan informasi laba yang berkualitas (Boediono, 2005:176).

### **Partisipasi Penyusunan Anggaran**

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (Echols John M & Hasan Shadily 2000:419). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46).

### **Teori Motivasi.**

Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah teori yang diungkapkan oleh Abraham Maslow. Ia beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal memotivasi. Berdasarkan pengamatan Maslow, didapatkan kesimpulan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Maslow juga menambahkan bahwa, pemuasan berbagai kebutuhan tersebut didorong oleh dua kekuatan yakni motivasi kekurangan (*deficiency motivation*) dan motivasi perkembangan (*growth motivation*). Motivasi kekurangan bertujuan untuk mengatasi masalah ketegangan manusia karena berbagai kekurangan yang ada.

### **Job Relevant Information penyusunan anggaran**

Omposunggu dan Bawono (2006) mengidentifikasi 2 jenis informasi utama dalam organisasi yaitu *decision influencing* dan *Job-Relevant Information (JRI)*. *Decision influencing* adalah informasi yang dikumpulkan tentang sikap manajer untuk mengevaluasi kinerja. Sedangkan *Job-Relevant Information (JRI)* adalah informasi internal organisasi yang cenderung berhubungan dengan tugas yang dihasilkan oleh karyawan. Informasi-informasi tersebut dapat memberikan prediksi lingkungan dengan lebih tepat dan memungkinkan pilihan suatu kebijakan yang lebih baik sehingga memperbaiki kinerja.

### **Kebijakan Penyusunan Anggaran**

Definisi kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak. Definisi Kebijakan juga diungkapkan lagi oleh Nugroho, menurut Nugroho (2004) kebijakan adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah sebagai tokoh sentral publik. Dengan demikian suatu kebijakan erat kaitannya dengan berbagai produk kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan (organisasi sektor publik).

Dalam penelitian ini, Variabel yang diambil dalam kebijakan penyusunan anggaran adalah kemampuan seorang manajer atau aparat pemerintahan mengenai pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai variabel independen, dimana variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap penyusunan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan yang ada di SKPD, dengan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah, pencapaian realisasi pelaksanaan kegiatan, seberapa banyak program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia dan apa dampak dari hasil kegiatan yang dilaksanakan terhadap pegawai dengan kebijakan yang diambil.

### **Pelimpahan Wewenang Penyusunan Anggaran**

Menurut Lubis secara Etimologis, istilah Kewenangan berasal dari kata Wewenang. Sedangkan menurut Bagir Manan, istilah Wewenang dengan kekuasaan itu berbeda. Kekuasaan menurutnya hanya digambarkan hak untuk berbuat, sedangkan Wewenang memiliki pengertian yang lebih luas meliputi hak dan kewajiban. Secara teoritik, mengenai kewenangan dapat dilihat pendapat Stout yang dikutip oleh Ridwan (2006)

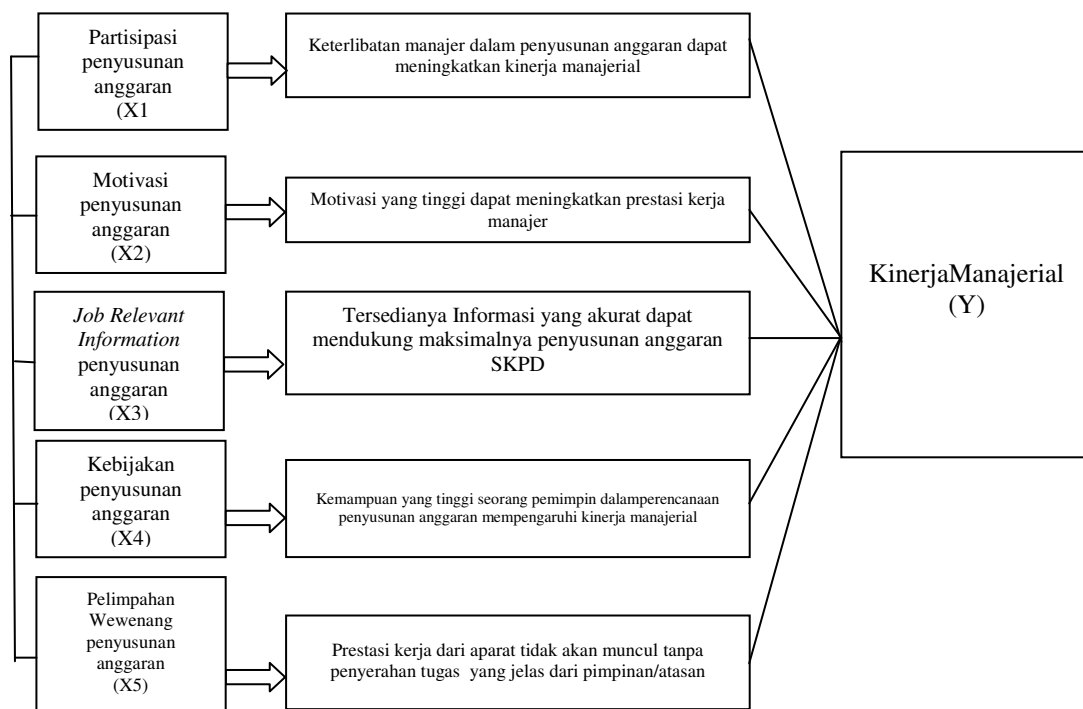
mengatakan: “Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari Hukum Organisasi Pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan Wewenang Pemerintahan oleh subjek Hukum publik didalam hubungan Hukum publik. Pandangan yang melihat lebih jauh pada sisi tindakan, yaitu ungkapan Nicolai dalam Ridwan (2006:102) Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengakibatkan tindakan Hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat Hukum).

### Kinerja Manajerial

Penelitian Anwar (2010) menyatakan bahwa kinerja manajerial merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pencapaian kinerja dan dikomunikasikan secara terus menerus oleh pimpinan kepada karyawan, antara karyawan dengan atasannya langsung. Menurut Mulyadi (2001) dikutip oleh Albertus dan Ardianu (2010) Penilaian Kinerja adalah Penentu secara Periodik efektivitas suatu Organisasi, bagian Organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran standard dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini mendefinisikan kinerja manajerial sebagai kinerja anggota individu untuk pencapaian tujuan banyak orang lewat sumbangan tenaga fikiran dan waktu tanpa pamrih.

### KERANGKA KONSEPTUAL

Hubungan tidak langsung antara partisipasi penyusunan anggaran, motivasi penyusunan anggaran, *job relevant information* penyusunan anggaran, kebijakan penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dimediasi oleh komitmen organisasi dan persepsi inovasi sebagai variabel intervening. Variabel-variabel ini yang kemungkinan akan mempengaruhi Kinerja Manajerial aparatur Pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas di SKPD masing-masing. Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka dengan teori-teori yang telah dijelaskan, maka kerangka konseptual dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

## Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya dan kerangkakonseptual tersebut diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

- Ha1 : Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Ha2 : Motivasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja Manajerial SKPD Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud
- Ha3 : *Job Relevant Information* Penyusunan Anggaran berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
- Ha4 : Kebijakan Penyusunan Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
- Ha5 : Pelimpahan Wewenang penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian yang Digunakan

Sumber data penelitian ini adalah data primer yang berasal dari jawaban responden atas beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti melalui wawancara kuesioner dan data sekunder yang didapat secara langsung oleh peneliti dari literatur, studi pustaka, jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian dalam penelitian ini.

### Populasi, Sampel, Besar Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah unsur pimpinan dan staf dinas/badan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Talaud antara lain yaitu: (Sekretariat Daerah, DPPKAD, BAPEDA, Sekretariat Dewan, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Badan, Kantor, Satuan dan kecamatan, dengan jumlah Populasi sebanyak 35 SKPD dan jumlah sampel sebanyak 105 responden.

### Klasifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. **Kinerja Manajerial (Y)**; adalah suatu cara kerja individu, anggota dalam suatu organisasi dalam melaksanakan suatu tugas dan tanggungjawab yang kegiatannya antara lain: perencanaan, investigasi, koordinasi, pengaturan staf, negosiasi dan lain-lain.
2. **Partisipasi Penyusunan Anggaran (X<sub>1</sub>)**; Adalah Suatu keterlibatan dari seseorang atau kelompok dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
3. **Motivasi penyusunan anggaran (X<sub>2</sub>)**; adalah merupakan derajat sampai dimana individu ingin dan berusaha untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik (Ghosali 2002).
4. **Job Relevant Information penyusunan anggaran (X<sub>3</sub>)**; adalah merupakan kemampuan baik dalam tingkat individu, organisasi/ kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.
5. **Kebijakan Penyusunan Anggaran (X<sub>4</sub>)**; adalah sebagai sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah sebagai tokoh sentral publik, Nugroho (2004)
6. **Pelimpahan Wewenang penyusunan anggaran (X<sub>5</sub>)**, adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi (menurut mekanisme tertentu dalam organisasi) dalam melakukan berbagai aktifitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut.



## ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### 1. Uji Asumsi Klasik

**Uji Normalitas,** Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel memenuhi persyaratan distribusi normal. Persyaratan data disebut normal jika probabilitas atau  $p > 0,05$  pada uji normalitas dengan kolmogorovsmirov. Pada Tabel 5.7 untuk variabel Kinerja Manajerial terdistribusi normal dengan nilai  $p = 0,129 > 0,05$  maka data variabel Kinerja Manajerial pada 105 (Seratus Lima) sampel adalah normal atau memenuhi persyaratan uji normalitas.

**Uji Multikolinearitas,** digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat di antara variabel-variabel independen yang diikutsertakan dalam pembentukan model. Dengan melihat Angka VIF pada table 5.22 semua variabel independen berada di bawah 5, yaitu partisipasi penyusunan anggaran (X1) sebesar 1,381, motivasi penyusunan anggaran (X2) sebesar 1,135, *job relevant information* penyusunan anggaran sebesar 1,329, kebijakan penyusunan anggaran (X4) sebesar 2,035, pelimpahan wewenang penyusunan anggaran (X5) sebesar 2,149, yang berarti antar variabel independen tidak terjadi efek multikolinearitas.

**Uji heteroskedastisitas,** menggunakan uji *Glesjer*. Suatu penelitian terjadi heteroskedastisitas dapat dilihat melalui tingkat signifikansi pada table 5.23 statistik heteroskedastisitas apakah tingkat signifikansinya  $> 0,05$ . Berdasarkan table 5.23 dapat disimpulkan bahwa variable partisipasi penyusunan anggaran (X1), motivasi penyusunan anggaran (X2), *job relevant information* penyusunan anggaran (X3), kebijakan penyusunan anggaran (X4), pelimpahan wewenang penyusunan anggaran (X5), tingkat signifikansi variable independent terhadap residual error data berada diatas 0,05, sehingga varians data penelitian tidak mengalami gejala heteroskedasitas.

### Uji Hipotesis

**Uji Model Fit (Uji F),** Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen partisipasi penyusunan anggaran (X1), motivasi penyusunan anggaran (X2), *job relevant information* penyusunan anggaran (X3), kebijakan penyusunan anggaran (X4), pelimpahan wewenang penyusunan anggaran (X5) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen Kinerja Manajerial (Y). Dari hasil output uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F) dapat diketahui nilai F pada Tabel 5.26. Berdasarkan Tabel 5.26, hasil uji F diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 6.424 dengan menggunakan tingkat signifikan  $P = 0.00 < \alpha = 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran (X1), motivasi penyusunan anggaran (X2), *job relevant information* penyusunan anggaran (X3), kebijakan penyusunan anggaran (X4), pelimpahan wewenang penyusunan anggaran (X5) secara bersama-sama uji F menunjukkan hasil signifikan yang berarti bahwa model penelitian adalah fit dan seluruh variabel independen secara simultan adalah signifikan terhadap variabel dependen.

**Uji t,** Penggunaan regresi linier berganda dalam uji t memberikan hasil yang bila dimasukkan ke dalam persamaan penelitian menjadi: maka persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:  $Y = 2,043 - 0,177X_1 - 0,031X_2 + 0,122X_3 + 0,278X_4 + 0,310X_5$

Variabel  $X_1$  (partisipasi penyusunan anggaran) sebesar 0,177, ini berarti bahwa jika partisipasi meningkat sebesar 1 satuan skor, maka akan mengalami penurunan nilai kinerja manajerial sebesar 0,177 satuan skor dari kondisi sebelumnya, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hal ini berarti pula bahwa tidak terdapat hubungan yang positif antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Dengan kata lain adanya peningkatan pada variabel partisipasi penyusunan anggaran ( $X_1$ ), akan menurunkan kinerja manajerial (Y) SKPD pada pemerintah kabupaten kepulauan Talaud.

Variabel  $X_2$  (motivasi penyusunan anggaran) sebesar 0,031, ini berarti bahwa jika motivasi meningkat sebesar 1 satuan skor, maka akan mengalami penurunan nilai kinerja

manajerial sebesar 0,031 satuan skor, maka akan mengalami penurunan nilai kinerja manajerial sebesar 0,031 satuan skor dari kondisi sebelumnya, dengan asumsi variable lainnya tetap. Hal ini berarti pula bahwa tidak terdapat hubungan yang positif antara motivasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Dengan kata lain adanya peningkatan pada variable motivasi penyusunan anggaran ( $X_2$ ), akan menurunkan kinerja manajerial (Y) SKPD pada pemerintah kabupaten kepulauan Talaud.

Variabel  $X_3$  (*job relevant information* penyusunan anggaran) sebesar 0,112, ini berarti bahwa jika *job relevant information* penyusunan anggaran meningkat sebesar 1 satuan skor, maka akan mengalami peningkatan nilai kinerja manajerial sebesar 0,112 satuan skor dari kondisi sebelumnya, dengan asumsi variable lainnya tetap. Hal ini berarti pula bahwa terdapat hubungan yang positif antara *job relevant information* penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Dengan kata lain adanya peningkatan pada variable *job relevant information* penyusunan anggaran ( $X_3$ ), akan meningkatkan kinerja manajerial (Y) SKPD pada pemerintah kabupaten kepulauan Talaud.

Variabel  $X_4$  (kebijakan penyusunan anggaran) sebesar 0,278, ini berarti bahwa jika kebijakan penyusunan anggaran meningkat sebesar 1 satuan skor, maka akan mengalami peningkatan nilai kinerja manajerial sebesar 0,278 satuan skor dari kondisi sebelumnya, dengan asumsi variable lainnya tetap. Hal ini berarti pula bahwa terdapat hubungan yang positif antara kebijakan penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Dengan kata lain adanya peningkatan pada variable kebijakan penyusunan anggaran ( $X_4$ ), akan meningkatkan kinerja manajerial (Y) SKPD pada pemerintah kabupaten kepulauan Talaud.

Variabel  $X_5$  (pelimpahan wewenang penyusunan anggaran) sebesar 0,310, ini berarti bahwa jika pelimpahan wewenang penyusunan anggaran meningkat sebesar 1 satuan skor, maka akan mengalami peningkatan nilai kinerja manajerial sebesar 0,310 satuan skor dari kondisi sebelumnya, dengan asumsi variable lainnya tetap. Hal ini berarti pula bahwa terdapat hubungan yang positif antara pelimpahan wewenang dengan kinerja manajerial. Dengan kata lain adanya peningkatan pada variable pelimpahan wewenang penyusunan anggaran ( $X_5$ ), akan meningkatkan kinerja manajerial (Y) SKPD pada pemerintah kabupaten kepulauan Talaud.

**Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dan Korelasi (r)**, nilai koefisien korelasi linier @ yang dihasilkan antara variable partisipasi penyusunan anggaran ( $X_1$ ), motivasi penyusunan anggaran ( $X_2$ ), *job relevant information* penyusunan anggaran ( $X_3$ ), kebijakan penyusunan anggaran ( $X_4$ ), pelimpahan wewenang penyusunan anggaran ( $X_5$ ) dan variable kinerja manajerial (Y) sebesar 0,495. Nilai korelasi @ sebesar 0,495 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variable  $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$  dengan variable Y. Sedangkan nilai R Square atau koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,245 menunjukkan bahwa kontribusi variable  $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$  untuk menjelaskan model variable Y adalah sebesar 24,5% dan sisanya 75,5% dijelaskan oleh factor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## **Pembahasan**

### **1. Pengaruh Partisipasi penyusunan anggaran ( $X_1$ ) terhadap Kinerja Manajerial (Y)**

Variabel partisipasi penyusunan anggaran ( $X_1$ ) mempunyai nilai (- 0,177) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial. Dengan artian Jika partisipasi penyusunan anggaran naik maka kinerja manajerial turun (berbanding terbalik). Hal ini disebabkan karena tidak semua pegawai yang memiliki Partisipasi penyusunan anggaran yang tinggi paham dan bisa menyelesaikan permasalahan dalam Penyusunan anggaran.

### **2. Pengaruh Motivasi penyusunan anggaran ( $X_2$ ) terhadap Kinerja Manajerial (Y)**

Hasil penelitian ini bahwa secara parsial variabel Motivasi penyusunan anggaran ( $X_2$ ) mempunyai nilai (-0,031) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial. Dalam artian jika motivasi penyusunan anggaran naik maka kinerja manajerial akan turun (berbanding terbalik).

### **3. Job Relevant Information penyusunan anggaran( $X_3$ ) terhadap Kinerja Manajerial( $Y$ )**

Hasil penelitian hipotesis ini menyatakan bahwa variabel *Job Relevant Information* penyusunan anggaran ( $X_3$ ) mempunyai nilai (0,112) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial.

### **4. Pengaruh Kebijakan Penyusunan Anggaran ( $X_4$ ) terhadap Kinerja Manajerial ( $Y$ )**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel Kebijakan Penyusunan Anggaran ( $X_4$ ) mempunyai nilai (0,278) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial.

### **5. Pengaruh Pelimpahan Wewenang penyusunan anggaran ( $X_5$ ) terhadap Kinerja Manajerial ( $Y$ )**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel Pelimpahan Wewenang Penyusunan Anggaran ( $X_5$ ) dengan nilai (0,310) berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Partisipasi penyusunan anggaran ( $X_1$ ) menunjukan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam artian bahwa tidak ada keterlibatan aparat SKPD level menengah dalam penyusunan anggaran SKPD. Dengan demikian penelitian ini tidak mendukung hipotesis 1. Yang berarti keterlibatan Sekretaris, Kasubag Keuangan, Kasubag Perencanaan/Program tidak mempengaruhi Kinerja Manajerial.
2. Hipotesis Motivasi penyusunan anggaran ( $X_2$ ) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial SKPD pada Kabupaten Kepulauan Talaud, Hasil pengujian uji parsial atau uji t Motivasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja manajerial SKPD pada Kabupaten Kepulauan Talaud. Yang berarti keterlibatan dari sekretaris, Kasubag Keuangan, Kasubag Perencanaan/Program, tidak mempengaruhi Kinerja Manajerial.
3. *Job Relevant information* penyusunan anggaran ( $X_3$ ) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial SKPD pada Kabupaten Kepulauan Talaud, Hal ini berarti *Job Relevant Information* penyusunan anggaran tidak bisa berperan sebagai variabel moderating terhadap partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.
4. Kebijakan Penyusunan Anggaran ( $X_4$ ) secara parsial berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Dalam artian bahwa keterlibatan dari sekretaris, kasubag keuangan, kasubag perencanaan/program di SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam kebijakan penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja manajerial.
5. Pelimpahan wewenang penyusunan anggaran ( $X_5$ ) secara parsial berpengaruh terhadap kinerja manajerial artinya semakin ada pelimpahan wewenang yang jelas maka semakin tinggi kinerja manajerial.

### **Saran**

1. Penelitian berikutnya harus mempertimbangkan karakteristik atau variabel lain yang mempengaruhi Kinerja Manajerial daerah misalnya komitmen dan gaya kepemimpinan.
2. Penelitian ini memberikan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat membantu pengembangan Ilmu Akuntansi khususnya Akuntansi sektor publik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar Prabu Mangkunegara. 2010. *Evaluasi Kinerja SDM*. Hal 61-77.
- Albertus, Doni Koesuma. 2010. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.

- Boediono, G. SB. 2005. Kualitas Laba : Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. Simposium Nasional Akuntansi VIII : 172-194.
- Echols, John M, and Hassan Shadyli, 2000, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ghozali dan Casstellan. 2002. Statistik Non Parametrik "Tori dan Aplikasi dengan Program SPSS", Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang.
- I Nyoman Sumaryadi 2010, Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama
- Mekson Waney, 2012. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kepuasan kerja budaya organisasi terhadap kinerja aparatur SKPD.
- Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, & Rekayasa. Edisi 3. Yogyakarta: Salemba Empat
- Ompusunggu Krisler Bomadi & Bawono, Ick Rangga,, (2006).. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan *Job Relevant Information (JRI)* terhadap informasi asimetris (studi pada badan layanan umum) universitas di kota Purwokerto Jawa Tengah
- Riant Nugroho D, 2004, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Gramedia, Jakarta.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. 2006, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surya, Dharma. 2005. Manajemen Kinerja: Falsafah Teori dan Penerapannya, Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yogi Adrianto (2008), Analisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan kepuasan kerja, job relevant information, dan kepuasan kerja sebagai variable intervening.
- Yusfaningrum, 2005, Analisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui komitmen tujuan anggaran dan job relevant information (JRI) sebagai variable intervening. Usahawan ,07 juli hal. 7-13
- Depdagri RI. 2007. Permendagri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
- Depdagri RI. 2006. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
- [http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202014%20Pemerintahan%20Daerah)
- <http://www.djpk.depkeu.go.id>, UU 33 2004,, tentang Perimbangan Keuangan
- <http://manado.bpk.go.id>
- <http://www.bpk.go.id>, Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara

# **ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA MANADO**

Juddy Julian Pilat, Jullie J. Sondakh, Hendrik Manossoh  
(Email: [jjulian189@gmail.com](mailto:jjulian189@gmail.com))

## **ABSTRACT**

*Local autonomy gives authority to local governments to implement their own financial management, which led to public accountability through the presentation of financial statements to the public. The obligation of governments to use information technology to simplify and improve the ability of financial data processing. Implementation of an integrated Financial LMIS can facilitate financial management to produce financial information that is integrated, comprehensive, precise and accurate. The purpose of this research is to (1). analyze the supporting factors owned by Manado City Government in order to implement the Financial LMIS, (2). analyze Financial LMIS as a local financial information system in assisting the local financial management and (3). analyze internal control of Financial LMIS in financial data processing. The analytical method used is qualitative descriptive phenomenology. Qualitative data were obtained by indepth interviews, observation and documentation. Validity and reliability of the data were determined by data and resources triangulation. The acquired data were coded into patterns and analysed, data interpretation and conclusion. Results of research and analysis indicate that Manado City Government had supporting factors such in order to implement the Financial LMIS optimally such as: communication, resources, disposition/attitude and bureaucratic structures. Financial LMIS is very important and very helpful in helping an integrated local financial management as well as play a role in order to: support the organization's operations, support decision making and support the achievement of strategic goals and objectives of the organization. Financial LMIS has been supported by adequate internal controls to ensure the effectiveness and efficiency implementation of a system that has been designed with some type of control, such as: control of access and user authority, control of physical security, control of menu based functions and control of applications.*

*Keywords: Financial Local Management Information System (LMIS), Local Financial Management.*

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik melalui penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) mewajibkan Pemda untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku *internal auditor* dan pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjawab tuntutan tersebut di atas sekaligus memfasilitasi Pemda dengan merancang suatu sistem informasi terintegrasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Peran dan fungsi SIMDA Keuangan telah membantu pengelolaan keuangan daerah, sehingga wajib diawasi dan ditingkatkan penerapannya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Manado telah menerapkan SIMDA Keuangan secara utuh sejak tahun 2012. Berdasarkan gambaran secara umum, masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang perlu dibenahi untuk dapat menerapkan SIMDA Keuangan secara optimal,

antara lain; SIMDA Keuangan tidak terintegrasi dengan aplikasi sistem informasi dan komunikasi lainnya di Pemkot Manado, *database* yang tidak lengkap dan terpadu, tidak berbasis *website* secara *online* serta administrator *database* yang bukan PNS tetapi seorang tenaga kontrak/honorir. Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Apa saja faktor-faktor pendukung yang dimiliki Pemerintah Kota Manado sehingga mampu menerapkan SIMDA Keuangan?
2. Bagaimana SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi keuangan daerah dapat membantu tugas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Manado?
3. Bagaimana pengendalian internal SIMDA Keuangan dalam pengolahan data keuangan pada Pemerintah Kota Manado?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

*Agency Theory* mendasarkan hubungan kontrak agar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya. Inti dari *Agency Theory* atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan (Scott, 1997).

### **Implementasi Kebijakan**

Menurut Edward III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi (*Communications*), Sumber daya (*resources*), Sikap (*disposition*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat variabel tersebut dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Subarsono, 2005), terdapat enam variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan, yakni: Pertama, standar dan sasaran kebijakan. Kedua, Sumber daya. Ketiga, hubungan antar organisasi. Keempat, karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Kelima, kondisi sosial politik dan ekonomi yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan implementasi kebijakan. Keenam, Disposisi implementor.

### **Konsep Sistem Informasi**

Sistem informasi menurut Leitch dan Davis (1983) adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan bagi pihak luar tertentu berupa laporan-laporan yang diperlukan.

Menurut O'Brien dan Marakas (2011), Sistem informasi dapat merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, *hardware*, *software*, jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Tiga peran utama sistem informasi dalam bisnis adalah (1). Mendukung proses bisnis dan operasional, (2). Mendukung pengambilan keputusan dan (3). Mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif.

PP No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disebut SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan

sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

### **Teori Jaringan Aktor/Actor Network Theory (ANT)**

Pada dasarnya teori ANT (Latour, 2005), mengembangkan konsep tentang jaringan, aktor, translasi dan intermediari. Yang dapat dipahami bahwa konsep jaringan tidak hanya berfokus pada hubungan sosial aktor manusia, tetapi mencakup aktor-aktor non manusia--yaitu sebuah jaringan heterogen (beragam). ANT menggambarkan di antara manusia dan objek teknologi didalamnya berlangsung dua proses. Di satu pandangan adalah proses translasi dalam bentuk desain dan konstruksi. Namun di sisi lain adalah pembelajaran yang melewati pembuatan dan penggunaan.

### **Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan**

Program aplikasi komputer SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya (BPKP, 2008). Fungsi utama pengimplementasian SIMDA Keuangan adalah sebagai berikut.

1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban);
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat;
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya;
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan; dan
5. Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi *Electronic Data Processing (EDP) audit*.

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut.

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; dan
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

### **Pengendalian Internal dalam Sistem Informasi Akuntansi Terkomputerisasi**

Pengendalian khusus atau pengendalian aplikasi (*application controls*) ialah kontrol internal komputer yang berlaku khusus untuk aplikasi komputerisasi tertentu pada suatu organisasi (Gundodinyoto, 2007:371). Kategori pengendalian aplikasi dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Kategori Pengendalian Aplikasi**

Kategori Pengendalian	Jenis-Jenis Pengendalian
1. <i>Boundary Control</i>	- Otoritas akses ke sistem aplikasi - Identitas dan otentisitas pengguna
2. <i>Input Control</i>	- Otoritas dan validasi masukan - Transmisi dan konversi data - Penanganan kesalahan
3. <i>Process Control</i>	- Pemeliharaan ketepatan data - Pengujian terprogram atas batasan dan memadainya pengolahan
4. <i>Output Control</i>	- Rekonsiliasi keluaran - Penelaahan dan pengujian hasil pengolahan - Distribusi keluaran - <i>Record retention</i>
5. <i>Database Control</i>	- Akses - Integritas data
6. <i>Communication Control</i>	- Pengendalian kegagalan unjuk kerja - Gangguan komunikasi

Sumber: Diolah dari Weber, Vasarhelyi dan Lin (1988).

### Penelitian Terdahulu

**Penelitian Mitami (2013)**, dengan judul analisis penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) Keuangan pada pemerintah daerah kabupaten pangkep, menggunakan metode deskriptif fenomenologi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum pegawai DPKAD Pangkep sudah memahami makna SIMDA keuangan serta gambaran pelaksanaannya yang berkaitan dengan input dan output datanya. Faktor-faktor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan yaitu komunikasi, sumber daya manusia, sikap/disposisi dan struktur birokrasi, adapun nilai-nilai yang dimiliki untuk menunjang penerapan SIMDA keuangan yaitu integritas, profesionalisme, komitmen, sinergi serta kesempurnaan.

**Penelitian Nugraha (2013)**, dengan judul analisis implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan SKPD (studi kasus pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara), menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa: aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi akuntansi daerah telah mempermudah tugas pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah, pengendalian intern sistem yang diterapkan guna mencapai tujuan pelaporan berjalan dengan baik dan aplikasi SIMDA Keuangan telah menghasilkan informasi laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dengan kualitas relevansi, akurasi dan ketepatan waktu yang lebih baik dari sebelumnya.

**Penelitian Kahari, Kathogo dan Wanyoike (2015)**, dengan judul *assessment of factors affecting the implementation of integrated financial management information system in the county governments: a case of Nyandarua County, Kenya*. Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei deskriptif terhadap sampel 70 karyawan. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat, negatif dan signifikan secara statistik antara resistensi staf dan implementasi IFMIS; dan bahwa ada hubungan yang kuat, positif dan signifikan secara statistik antara kapasitas dan keterampilan pengguna IFMIS dan pelaksanaannya.

Proposisi yang dapat ditetapkan sebagai pernyataan awal untuk menjawab pertanyaan riset dan memberikan solusi terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



1. Penerapan SIMDA Keuangan secara optimal harus didukung oleh faktor-faktor seperti: komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi yang memadai;
2. Sebagai sistem informasi keuangan daerah, SIMDA Keuangan sangat penting dan sangat bermanfaat dalam membantu pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi; dan
3. SIMDA Keuangan telah didukung dengan pengendalian internal yang memadai untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penerapan sistem yang dirancang.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007:68). Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi, dimana penelitian ini dilakukan dengan situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Creswell (2003:15) menyebutkan bahwa “dalam studi fenomenologi yang diteliti adalah pengalaman manusia melalui deskripsi dari orang yang menjadi partisipan penelitian, sehingga peneliti dapat memahami pengalaman hidup partisipan”.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara mendalam kepada beberapa informan kunci pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Pemerintah Kota Manado serta dokumen/arsip SKPD berupa gambaran umum, struktur organisasi dan *job description*. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada informan kunci yaitu Kepala BPK-BMD, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Perbendaharaan dan *Database Administrator* SIMDA Keuangan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan, literatur, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2014:62), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka tidak mungkin akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), pengamatan/observasi (*observation*) dan dokumentasi (*documentation*).

### **Teknik Pengujian Keabsahan Data**

Menurut Sugiyono (2014:120) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (objektivitas). Penelitian ini menggunakan metode triangulasi dalam pengujian kredibilitas, yaitu dengan cara pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

### Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun ke lapangan (Sugiyono, 2014).

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Kota Manado yang merupakan pusat *access point* dan *server* aplikasi SIMDA Keuangan Pemerintah Kota Manado. Waktu Penelitian selama kurang lebih 4 (empat) bulan, sejak Mei sampai dengan Agustus 2016, yang dimulai dari tahap penyusunan usulan penelitian (proposal) sampai tesis selesai dirampungkan.

### Informan Penelitian

Informan yang terpilih dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Data Informan**

NO.	NAMA dan NIP	Pangkat, Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Drs. Manarsar Pandjaitan, M.Si NIP. 19631128 198503 1 001	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala BPK-BMD (PPKD/BUD)
2.	Ir. M. V. S. Tulenan, M.Si NIP. 19660528 199803 2 004	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Anggaran
3.	Florensia S. Pedah, SE, M.Si, Ak, CA NIP. 19761022 200212 2 002	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Bidang Akuntansi
4.	J. J. Mangindaan, SE, S.ST, MM, Ak NIP. 19700705 199703 2 005	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Perbendaharaan (Kuasa BUD)
5.	Raphi Mardiyono, A.Md	Tenaga Kontrak	Administrator <i>Database</i> SIMDA Keuangan

Sumber: BPK-BMD Kota Manado (data diolah).

### Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data yang dikembangkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data dari wawancara, observasi dan dokumentasi diorganisir kesamaan dan perbedaannya sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian;
2. Data yang sudah diorganisir ditentukan temanya;
3. Mencari keterkaitan antara tema;
4. Interpretasi atas semua temuan sesuai dengan keterkaitan antar tema dengan menggunakan teori/konsep yang relevan; dan
5. Hasil interpretasi dituangkan secara deskriptif analisis kontekstual.

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data wawancara, data dokumentasi dan data observasi langsung yang diperoleh, kemudian dilakukan organisasi data yaitu kategorisasi dan *coding* berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Selanjutnya dilakukan pemahaman untuk menemukan tema yang ada. Untuk menjawab masalah pertama yaitu “apa saja faktor-faktor pendukung yang dimiliki Pemerintah Kota Manado sehingga mampu menerapkan SIMDA Keuangan” ditemukan empat tema yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi.

Untuk menjawab masalah kedua yaitu “bagaimana SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi keuangan daerah dapat membantu tugas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Manado” ditemukan tiga tema yaitu operasional organisasi, pengambilan

keputusan dan sasaran strategis. Untuk menjawab masalah ketiga yaitu “bagaimana pengendalian internal SIMDA Keuangan dalam pengolahan data keuangan pada Pemerintah Kota Manado” ditemukan empat tema yaitu pengendalian akses dan wewenang *user*, pengendalian keamanan umum, pengendalian menu berdasarkan fungsi dan pengendalian aplikasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya dilakukan interpretasi atas temuan yang ada sesuai dengan dengan teori/konsep yang mendukung hasil penelitian. Adapun analisis terhadap hasil penelitian dan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut.

### **Faktor-Faktor Pendukung yang Dimiliki oleh Pemerintah Kota Manado dalam Penerapan SIMDA Keuangan**

Penerapan SIMDA Keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado tentunya tidak lepas dari prakondisi yang menjadi faktor pendukungnya. Dari hasil penelitian, berbagai faktor pendukung yang dimiliki untuk menerapkan SIMDA Keuangan adalah sebagai berikut.

#### **1. Komunikasi**

Untuk penerapan SIMDA Keuangan yang optimal pada Pemerintah Kota Manado telah didukung oleh adanya komunikasi yang aktif dari semua pihak yang terkait. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward III (1980) dimana komunikasi merupakan faktor penentu keberhasilan penerapan. Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Subarsono, 2005), dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain agar sasaran kebijakan/program tercapai.

#### **2. Sumber Daya**

Penerapan SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kota Manado didukung oleh beberapa komponen, yaitu: sumber daya manusia yang memang handal/memenuhi baik dalam jumlah maupun kapasitasnya, peningkatan kemampuan/keterampilan SDM melalui kegiatan bimbingan teknis (BimTek) yang teratur dan rutin dilaksanakan dan sumber daya *hardware* dan *software* yang memadai dan saling mendukung. Menurut Edward III (1980), komponen sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan serta cukup untuk menerapkan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan kebijakan, adanya wewenang yang menjamin bahwa kebijakan dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan seperti dana dan sarana prasarana.

Walaupun semua sumber daya yang dibutuhkan untuk penerapan SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kota Manado sudah tersedia, tetapi masih ada hal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan yaitu mengenai ruang *entry* data. Ruangan yang ada saat ini sangat kecil dan sempit, tidak memadai untuk aktivitas operasional SIMDA Keuangan bagi operator SKPD. Selain itu juga, perlu diperhatikan dan ditingkatkan untuk ketersediaan sumber daya data dan jaringan untuk optimalisasi penerapan SIMDA Keuangan sehingga dapat mendukung pelaksanaan setiap tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

#### **3. Disposisi/Sikap**

Respon terhadap penerapan SIMDA Keuangan di Pemerintah Kota Manado sudah baik sehingga penerapannya dapat terlaksana dengan baik dan dilaksanakan dengan senang hati oleh setiap implementor. Dalam penerapan SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kota Manado telah didukung sepenuhnya oleh Kepala BPK-BMD selaku PPKD, sehingga tidak heran jika para pegawai dapat menjalankannya secara optimal. Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Subarsono, 2005),

disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting yaitu: 1).Respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan; 2).Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan; dan 3).Intensitas disposisi implementor.

#### 4. Struktur Birokrasi

Pemerintah Kota Manado belum tertib dalam hal struktur birokrasi dan organisasi pengelolaan SIMDA Keuangan. Tidak ada Tim Pengelola SIMDA yang ditetapkan melalui SK, sehingga berbagai fungsi dijalankan dengan sangat fleksibel. Pemisahan tugas dan fungsi pengelola serta pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam penerapan SIMDA Keuangan tidak berjalan sebagaimana mestinya suatu organisasi atau pun sub-unit yang ada didalamnya. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Satgas Pengembangan SIMDA Keuangan(BPKP, 2008), dalam hal sumber daya manusia untuk penerapan SIMDA Keuangan.

### **SIMDA Keuangan Sebagai Sistem Informasi Keuangan Daerah Dapat Membantu Tugas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Manado**

SIMDA Keuangan berperan penting bagi Pemerintah Kota Manado, dalam hal sebagai berikut:

#### **Operasional Organisasi**

Penerapan SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kota Manado berperan penting dalam mendukung operasional SKPKD, mulai dari bidang penganggaran, akuntansi sampai pada perbendaharaan. Kecuali untuk efektifitas dan efisiensi tugas pemerintahan dalam hal konektivitas dan integrasi aplikasi sistem informasi dan komunikasi masih perlu dibenahi dan ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan konsep sistem informasi yang menyatakan bahwa kemampuan sistem informasi untuk dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi ke berbagai fungsi bisnis menjadi kritis/penting sehingga mendukung proses bisnis dan operasional organisasi (O'Brien dan Marakas, 2001).

#### **Pengambilan Keputusan**

Penerapan SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kota Manado dapat menghasilkan informasi secara cepat, tepat dan akurat sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan bermakna oleh pihak yang berwenang. Hal ini sejalan dengan konsep sistem informasi yang mengemukakan bahwa Sistem informasi dapat mengkombinasikan informasi untuk membantu manajer menjalankan bisnis dengan lebih baik, informasi yang sama dapat membantu para manajer mengidentifikasi kecenderungan dan untuk mengevaluasi hasil dari keputusan sebelumnya. Sistem Informasi akan membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat dan lebih bermakna (O'Brien dan Marakas, 2001). Tujuan pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan (BPKP, 2008), salah satunya adalah menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.

#### **Sasaran Strategis**

penerapan SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kota Manado dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi BPK-BMD selaku SKPKD. Hal ini sesuai dengan konsep sistem informasi yang menyatakan bahwa sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis organisasi dapat menciptakan keunggulan bersaing (O'Brien dan Marakas, 2011).

### **Pengendalian Internal SIMDA Keuangan Dalam Pengolahan Data Keuangan pada Pemerintah Kota Manado**

Terdapat beberapa jenis pengendalian internal yang diterapkan dalam pengolahan data keuangan melalui aplikasi SIMDA Keuangan, yaitu pengendalian akses dan wewenang *user*, pengendalian keamanan umum, pengendalian menu berdasarkan fungsi dan pengendalian aplikasi.

### **Pengendalian Akses dan Wewenang User**

Penerapan SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kota Manado telah dilengkapi dengan pengendalian akses dan wewenang *user* yang menjamin keamanan data yang diolah SIMDA Keuangan. Hal ini sesuai dengan manfaat penerapan SIMDA Keuangan yang terintegrasi (BPKP, 2008). Aplikasi SIMDA dapat diimplementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, menggunakan teknologi *multi user* dan teknologi *client/server*, dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan baik dilaksanakan di SKPKD maupun di SKPD. Weber (1988) juga menyebutkan tentang pengendalian batas (*boundary control*) yang meliputi adanya otoritas akses ke sistem aplikasi dan mengatur identitas serta otentisitas pengguna.

### **Pengendalian Keamanan Umum**

Penerapan SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kota Manado dapat menjamin keamanan data yang diolah melalui pengendalian keamanan secara fisik. Hal ini sejalan dengan manfaat penerapan SIMDA Keuangan yang terintegrasi (BPKP, 2008), dimana salah satunya menyebutkan adanya kesinambungan pemeliharaan *hardware* dan *software* dengan mendapat dukungan penuh dari pimpinan serta dibantu oleh eksistensi BPKP Perwakilan. Walaupun pengendalian keamanan umum dalam penerapan SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kota Manado telah mampu dilaksanakan melalui pemeliharaan dan pengamanan semua sarana pendukung secara fisik, tetapi masih terdapat kekurangan, antara lain: ruang *server* masih kurang aman karena dinding tidak terbuat dari beton tetapi hanya papan dan sekat kaca sehingga pendingin ruangan (AC) pun tidak bisa berfungsi secara maksimal dan air AC dapat merusak dinding kayu. Selain itu instalasi kabel listrik tidak aman karena hanya menempel di dinding kayu dan sekat kaca tidak masuk ke dalam beton seperti yang seharusnya.

### **Pengendalian Menu Berdasarkan Fungsi**

penerapan SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kota Manado telah menjalankan pengendalian menu berdasarkan fungsi untuk menjamin keamanan data per bidang di SKPKD dan untuk validitas *input* data. Hal ini sesuai dengan pendapat Weber (1988) yang mengemukakan pengendalian jenis ini dalam bentuk pengendalian basis data (*database control*) melalui pengendalian validitas dan integritas data. BPKP (2008) juga menyatakan bahwa salah satu manfaat penerapan aplikasi SIMDA Keuangan yang terintegrasi adalah menjamin pengendalian transaksi dari setiap fungsi/bidang yang ada yaitu; penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.

### **Pengendalian Aplikasi**

Penerapan SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kota Manado telah menjalankan pengendalian aplikasi dengan baik melalui pengendalian masukan, pengendalian proses dan pengendalian keluaran untuk memastikan aplikasi SIMDA Keuangan telah berjalan dengan baik dan memenuhi harapan. Hal ini sesuai dengan Keunggulan atau nilai tambah yang ditawarkan oleh SIMDA Keuangan (BPKP, 2008), yaitu: *output*/laporan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan; berbasis windows; validasi Inputan data lebih terjamin dan terdapat menu otoritas dan unit otoritas.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi yang dijumpai dalam penelitian, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kota Manado telah memiliki beberapa faktor pendukung dalam penerapan SIMDA Keuangan, tetapi ada juga beberapa faktor pendukung yang belum terpenuhi, antara lain sebagai berikut.

- a. Komunikasi aktif telah dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan penerapan SIMDA Keuangan. Adanya komitmen pimpinan selaku pembuat kebijakan untuk memahami maksud dan tujuan penerapan kebijakan serta didukung dengan pemahaman bersama dari semua implementor tentang SIMDA Keuangan. Sosialisasi sebelum penerapan dan komunikasi selama penerapan dengan semua implementor pada Pemerintah Kota Manado dan juga pendampingan dari Tim Pengawasan BPKP Perwakilan Propinsi SULUT menjadikan aplikasi SIMDA Keuangan mampu dijalankan secara optimal.
  - b. Sumber Daya yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Sumber daya manusia yang ada dan dipersiapkan untuk penerapan SIMDA Keuangan memang handal/memenuhi baik dalam jumlah maupun kapasitasnya, peningkatan kemampuan/keterampilan SDM melalui kegiatan bimbingan teknis (BimTek) yang teratur dan rutin dilaksanakan serta didukung oleh ketersediaan sumber daya *hardware* dan sumber daya *software* yang memadai.  
Sumber daya manusia dalam hal ketersediaan administrator *database* belum terpenuhi karena SDM yang ada saat ini hanya seorang tenaga kontrak.  
Sumber daya data belum lengkap, terpadu dan komprehensif, sehingga tidak efisien dalam penerapan SIMDA Keuangan, karena setiap penyusunan anggaran tahun berikutnya harus dilakukan *entry* data secara berulang-ulang.  
Sumber daya jaringan tidak mendukung fungsi pengambilan keputusan oleh eksekutif (Walikota) dan fungsi *monitoring* oleh legislatif (DPRD).
  - c. Disposisi/Sikap yang baik untuk menerima/setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan dan melaksanakannya dengan senang hati serta didukung oleh komitmen dan sikap demokrasi dari pimpinan.
  - d. Struktur Birokrasi/Organisasi pengelolaan SIMDA Keuangan belum tertib dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado karena tidak ada SK Tim Pengelola SIMDA Keuangan di Pemerintah Kota Manado sesuai yang disyaratkan oleh Satgas Pengembangan SIMDA Keuangan-BPKP.
2. Sebagai sistem informasi keuangan daerah, SIMDA Keuangan sangat penting dan sangat bermanfaat dalam membantu pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi pada Pemerintah Kota Manado serta berperan dalam rangka:
- a. mendukung operasional organisasi pada setiap bidang; penganggaran, akuntansi dan perbendaharaan;
  - b. mendukung pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang melalui penyajian informasi secara cepat, tepat dan akurat; dan
  - c. mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- Namun, SIMDA Keuangan tidak terintegrasi dengan aplikasi sistem informasi dan komunikasi lainnya di Pemerintah Kota Manado sehingga tugas pemerintahan menjadi tidak efektif dan efisien dalam mewujudkan *good governance*.
3. Dalam pengolahan data keuangan pada Pemerintah Kota Manado, SIMDA Keuangan telah didukung dengan pengendalian internal yang cukup memadai untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penerapan sistem yang telah dirancang melalui beberapa jenis pengendalian, antara lain sebagai berikut.
- a. pengendalian akses dan wewenang *user* yang memungkinkan pembatasan akses aplikasi SIMDA Keuangan yang ditujukan hanya kepada pihak tertentu seperti operator SIMDA Keuangan;
  - b. pengendalian keamanan umum yang dilakukan secara fisik;
  - c. pengendalian menu berdasarkan fungsi untuk menjamin validitas *input* data aplikasi SIMDA Keuangan secara terintegrasi; dan

- d. pengendalian aplikasi untuk memastikan bahwa sistem yang diaplikasikan telah berjalan sesuai yang diharapkan dan menjamin bahwa seluruh transaksi yang diproses dalam aplikasi SIMDA Keuangan merupakan transaksi yang valid, terotorisasi dan dicatat secara lengkap, akurat dan benar melalui pengendalian masukan, pengendalian proses dan pengendalian keluaran.

## Saran

Untuk dapat menerapkan SIMDA Keuangan secara maksimal pada Pemerintah Kota Manado, ada beberapa hal yang dapat disarankan untuk menjadi perhatian demi perbaikan ke depan antara lain sebagai berikut.

1. Untuk peningkatan SDM implementor SIMDA Keuangan, seharusnya diadakan atau diikutsertakan pelatihan khusus bagi administrator *database* dan operator SKPKD dalam rangka *continuous improvement*.
2. Sumber daya data harus dilengkapi dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan sumber daya jaringan perlu ditenahi dengan membuat koneksi secara *online* berbasis *website* untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengambilan keputusan eksekutif dan *monitoring* legislatif serta bisa menjadi media pertanggungjawaban publik.
3. Pemerintah Kota Manado harus mengatur dengan jelas dan menetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota untuk Tim Pengelola SIMDA dengan struktur dan komposisi personil seperti yang disyaratkan oleh Satgas Pengembangan SIMDA Keuangan BPKP yang terdiri dari: penanggung jawab, pembantu penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim dan beberapa anggota tim; administrator *database*, asisten administrator dan timnya, serta seluruh operator SKPD.
4. Pemerintah Kota Manado harus mempersiapkan administrator *database* yang kompeten; mahir dalam menggunakan komputer, menguasai program *database*, memahami pentingnya pengamanan data dan antusiasme tinggi untuk mempelajari sistem informasi teknologi serta harus merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai pada BPK-BMD Kota Manado untuk tujuan jangka panjang, karena administrator *database* yang ada sekarang adalah seorang tenaga kontrak yang setiap saat bisa saja keluar dari Pemerintah Kota Manado.
5. Ruang *entry* data SIMDA Keuangan yang ada saat ini sangat kecil dan sempit sehingga perlu disediakan tempat yang lebih memadai dan bisa menampung semua operator SKPD dalam mengoperasikan SIMDA Keuangan dengan lebih baik dan nyaman.
6. Ruang *server* yang ada saat ini belum memadai sesuai standar keamanan karena hanya ber dinding papan dan sekat kaca sehingga perlu diperbaiki dan harus dibuat dinding beton. Begitu pula dengan instalasi kabel listrik yang hanya menempel sepanjang dinding papan dan sekat kaca perlu diatur dan ditenahi supaya aman dan bisa bermanfaat untuk jangka panjang.
7. Untuk penelitian selanjutnya, supaya lebih menggali topik atau tema-tema yang lain sehubungan dengan penerapan SIMDA Keuangan selain faktor pendukung, mekanisme pengelolaan keuangan daerah atau pengendalian internal sistem/aplikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: KENCANA.
- Creswell, John W. 2003. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications, Inc.

- Edwards , George C. III. 1980. "Implementing Public Policy". Washington DC: Congressional, Quartely Press.
- Grizzle, Gloria A. dan Carole D. Pettijohn, 2002, "Implementing Performance-Based Program Budgeting: A System-Dynamic Perspective", *Public Administration Review*, Jan/Feb 2002;62,1.
- Gundodiyoto, Sanyoto. 2007. Audit Sistem Informasi + Pendekatan Cobit. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kahari, Gathogo dan Wanyoike. 2015. "Assessment Of Factors Affecting The Implementation Of Integrated Financial Management Information System In The County Governments: A Case Of Nyandarua County, Kenya", *International Journal of Economics, Commerce and Management. Volume III*. United Kingdom.
- Leitch, Robert A. Dan Davis, K. Roscoe. 1983. Accounting Information Systems. New Jersey: Prentice Hall.
- Latour, Bruno. 2005. Reassembling the Social. New York: Oxford University Press.
- Mitami, Dian M. 2013. Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- O'Brien, James A. dan Marakas, George M. 2011. Management Information Systems-10<sup>th</sup> edition. New York: McGraw Hill/Irwin.
- PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2005. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. 2010. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Satgas Pengembangan SIMDA 2008. SIMDA dan Penerapannya. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
- Subarsono. 2005. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 2014. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Vasarhelyi, Miklos dan Thomas, W. Lin. 1988. Advanced auditing: Fundamentals of EDP and Statistical Auditing Technology. Reading, Mass.: Addison-Wesley.
- Weber, Ron. 1988. EDP auditing: Conceptual Foundations and Practice, 2nd edition. New York: McGraw-Hill.



# **ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Enda Baisida Lauma, Jenny Morasa, Lintje Kalangi  
(email: [enda.lauma@gmail.com](mailto:enda.lauma@gmail.com))

## **ABSTRACT**

*Government Accounting Standard have changed from Cash Basis is to comply with the Government Regulation number 24 2005s to Government Regulation number 71 2010s. Requirement to implemented Accrual basis SAP by the Local Government was start in the Local Government Financial Statement for the year ended on December 2015s. The District Government of Bolaang Mongondow, before implemented accrual basis PP 71/2010 always received non-WTP opinion, because of asset problems. The objective of the research is to analyze the implementation of Government Accounting Standard to Fix Asset on the District Government of Bolaang Mongondow. The result of research indicate that although the District Government of Bolaang Mongondow has implemented the SAP based on accrual basis on this fix assets based on regulation (PP 71/2010) at Local Government Financial Statement Budget Year 2015s, it is found that financial statement still have constraints such differences in recording those assets between accounting division and assets division. In addition, there is non-current asset which do not master by SKPD, there is no information regarding existing assets, and some assets are also not clearly described. Those constraints have caused to gain Qualified Opinion of LKPD 2015s as audited by BPK.*

*Keywords : Implementation, Governmental Accounting Standard, Fix Asset.*

## **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan dan masyarakatnya berbentuk Laporan keuangan dan laporan kinerja. Pemerintah pusat mengatur bahwa Laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 harus menggunakan SAP berbasis akrual sesuai PP 71/2010, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, hutang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berdasarkan basis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Menghadapi tuntutan aturan tersebut, dalam pencatatan aset pada LKPD, maka Pemda wajib mencantumkan nilai sewajarnya dari suatu aset. Penggunaan basis akrual berkaitan pula dengan penerapan penyusutan atas aset tetap.

Aset tetap merupakan bagian utama aset pemerintah daerah karena nilainya yang sangat signifikan dalam Neraca (Winarno, 2012:1). Penilaian aset sangat penting bukan saja dalam rangka pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset/barang milik daerah yang dilelang/dijual, tetapi secara praktis memiliki hubungan langsung dengan, penyajian Neraca daerah. Menurut Setiadi (2008) jika aset tetap tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi opini yang diberikan BPK, karena aset tetap merupakan komponen laporan keuangan yang signifikan. Perolehan opini atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebelum penerapan PP71/2010 berbasis akrual belum mendapat opini WTP. Hasil evaluasi BPK yang termuat dalam setiap LHP dan termuat dalam beberapa Siaran Pers BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan bahwa pemeriksaan meliputi penilaian atas penggunaan SAP oleh entitas dan penyajian laporan keuangan secara

keseluruhan, bahwa permasalahan yang menjadi dasar pertimbangan penetapan opini antara lain adalah masalah aset tetap.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana Pemda se-Indonesia, harus menerapkan PP 71/2010 yang berbasis akrual dalam penyusunan LKPD Tahun 2015. Aset yang disajikan Pemda, terdiri dari aset lancar dan aset tetap, harus disajikan dalam nilai yang wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, sedangkan penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Jika nilai wajar aset telah dicantumkan dalam laporan keuangan, maka laporan tersebut sudah dapat dikatakan bisa dipercaya dan diandalkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Jensen dan Meckling (1976: 308) menyatakan bahwa:

*We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal.*

### **Teori Aktiva (*Asset*)**

Kieso, Weygandt, dan Warfield (2012:216) mengatakan bahwa *assets is probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events*. Kata *assets* diartikan sebagai aktiva. Istilah “aktiva” yang masih banyak digunakan di Indonesia, pada awalnya, digunakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 (Revisi 1998) kemudian direvisi menjadi “aset” oleh PSAK 1 (Revisi 2009). Warren *et.al.* (2005:21) menyatakan

*the assets section of the balance sheet normally presents assets in the order that they will be converted into cash or used in operations. Cash is presented first, followed by receivables, supplies, prepaid insurance, and other assets. The assets of a more permanent nature are shown next, such as land, buildings, and equipment.*

PSAK 16 (Revisi 2011) mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap dikelompokkan berdasarkan kepemilikan sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal entitas, contohnya tanah, tanah dan bangunan, mesin, kapal, pesawat udara, kendaraan bermotor, perabotan, dan peralatan kantor.

### **Teori Aktiva Tetap (*Fix Asset*)**

Baridwan (2004:22) mendefinisikan aktiva tetap sebagai aktiva-aktiva yang dapat digunakan lebih dari satu periode, seperti tanah, gedung-gedung, mesin dan alat-alat, perabot, kendaraan, dan lain-lain. Suatu aktiva diakui sebagai aktiva tetap menurut Darise (2008:71) jika aset tersebut berwujud dan memenuhi kriteria berikut: mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, serta diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

PSAK 16 menyebutkan bahwa aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Biaya historis (*historical cost*) diukur oleh kas atau harga ekuivalen kas untuk memperoleh aktiva dan membawanya ke lokasi serta kondisi yang diperlukan untuk tujuan penggunaannya. Jika suatu aktiva tetap diperoleh tanpa nilai, maka menurut Darise (2008:72) aktiva tetap tersebut diukur berdasarkan nilai wajar saat perolehan, yaitu nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Dalam menilai aset tetap Chan dan Zhang (2012:13) menyatakan bahwa *Non-financial assets are stated in terms of their original acquisition costs (sometimes called historical cost) adjusted for depreciation*. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut (Darise, 2008:78). Penyusutan (*depreciation*) adalah proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aktiva berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aktiva tersebut (Kieso *et.al.*, 2008:60). PSAK 16 (p.16.7) mengatur bahwa setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah. Dampak signifikan dari metode penyusutan yang digunakan terhadap laporan keuangan, menurut Kieso *et.al.* (2008:85) harus dibuat pengungkapan terkait: Beban penyusutan untuk periode berjalan; Saldo kelas utama dari aktiva yang dapat disusutkan, menurut sifat dan fungsi; Akumulasi penyusutan, baik menurut kelas utama aktiva yang dapat disusutkan maupun dalam jumlah total; serta Sesuai uraian umum tentang metode yang digunakan dalam menghitung penyusutan berkaitan dengan kelas utama aktiva yang dapat disusutkan.

#### **Standar Akuntansi Pemerintahan**

Salah satu aspek penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan adalah penggunaan SAP (Mahmudi, 2011:271). Standar akuntansi menurut Mardiasmo (2009:149) diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan.

Undang-undang Keuangan Negara telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan yang mengacu pada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional (Darise, 2008:4). Pasal 32 UU 17/2003 menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. PP 71/2010 mendefinisikan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

SAP berisi prinsip-prinsip akuntansi yang menurut Mahmudi (2011:271) diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintahan. Manfaat adanya standar akuntansi ini antara lain: digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan; digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya; digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan; diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi dan keandalan laporan keuangan; serta menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.

Akuntansi aset tetap dalam PP 71/2010 dimuat pada Lampiran I.08 PSAP No.07 Akuntansi Aset Tetap, dilengkapi dengan Bultek 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI dan Bultek 18 tentang Penyusutan Aset Tetap Berbasis AkruaI. Isi pokok dari SAP mengatur tentang: definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan suatu transaksi atau akun.

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pelaporan keuangan daerah menurut Yuwono, Utomo, Zein, dan Azrafiany (2008:429) merupakan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dikelola serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan kebijakan akuntansi keuangan daerah selama satu periode tertentu.

Entitas pelaporan menurut Darise (2008:258) membuat laporan keuangan pemerintah yang dilakukan dengan menggabungkan/mengkompilasi seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan keuangan Bendahara Umum Daerah (BUD). Tujuannya adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Komponen laporan keuangan berdasarkan PP 71/2010 dan menurut Yuwono *et.al.* (2008:144) meliputi Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Setiap entitas pelaporan harus menyajikan laporan-laporan tersebut, kecuali LAK dan LPSAL. Karena LAK hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, sedangkan LPSAL hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Pemerintah daerah membuat LKPD berdasarkan SAP dengan tujuan untuk memperoleh opini wajar atas peyajian laporannya. Opini wajar diistilahkan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Darise (2008:269) menjelaskan bahwa pendapat WTP diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, jika memenuhi kondisi:

1. Prinsip akuntansi berterima umum digunakan untuk menyusun laporan keuangan;
2. Perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari periode ke periode telah cukup dijelaskan;
3. Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

### **Konsep Aset Pemerintah**

Aset pemerintah yang termuat dalam laporan keuangan (Neraca), didefinisikan oleh PP 71/2010 dan Darise (2008:59) sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya (Tanjung, 2008:214) ke dalam aset lancar dan non-lancar, di mana aktiva tetap merupakan salah satu dari aset non-lancar (Darise, 2008:60). PSAP 07 menerangkan bahwa aktiva tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian Neraca (Darise, 2008:70). Aktiva tetap pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi: (a) tanah, (b) peralatan dan mesin, (c) gedung dan bangunan, (d) jalan, irigasi, dan jaringan, (e) aset tetap lainnya, dan (f) konstruksi dalam pengerjaan (Darise, 2008:60, Permendagri 17/2007, dan PSAP 07).

KPP71/2010 menyatakan bahwa pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran menurut PP 71/2010 sebagai proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengukuran dan penilaian aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, bila tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan (Mahmudi, 2011:291 dan PP71/2010). Biaya perolehan menurut Darise (2008:72) adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

PP71/2010 menyebutkan bahwa aset tetap yang diperoleh tanpa nilai, maka biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan menurut Darise (2008:72) bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi). Penilaian kembali hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

PP71/2010 menyatakan bahwa untuk masing-masing jenis aset tetap suatu laporan keuangan harus mengungkapkan: (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), dan mutasi aset tetap lainnya; serta (c) Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Dampak signifikan dari metode penyusutan yang digunakan terhadap laporan keuangan menurut Kieso *et.al.* (2008:85) harus mengungkapkan: (a) Beban penyusutan untuk periode berjalan, (b) Saldo kelas utama dari aktiva yang dapat disusutkan, menurut sifat dan fungsi, (c) Akumulasi penyusutan, baik menurut kelas utama aktiva yang dapat disusutkan maupun

dalam jumlah total, (d) Sesuai uraian umum penggunaan metode dalam menghitung penyusutan berkaitan dengan kelas utama aktiva yang dapat disusutkan.

Laporan keuangan juga, menurut Mahmudi (2011:295), harus mengungkapkan eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka menurut Darise (2008:78) harus diungkapkan dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap, tanggal efektif penilaian kembali, nama penilai independen (jika ada), hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, serta nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Terhadap aset tetap yang tidak digunakan lagi harus dieliminasi dari neraca. PSAP 07 mengatur bahwa aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila secara permanen aset tersebut dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset yang dilepaskan, diungkapkan dalam CaLK.

### **Penyusutan Aset Tetap Pemerintah**

Penyusutan penting diperhatikan selama pemanfaatan suatu aset tetap (Ramadhan, 2013:3). Bagi para akuntan, penyusutan bukan merupakan masalah penilaian, namun merupakan alat alokasi biaya (Kieso *et.al.*, 2008:60). Penyusutan menurut PSAP 07 adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyusutan aktiva pada Pemerintah Daerah di Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013. Aturan tersebut digunakan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Lampiran I.08 PP 71/2010. Pemerintah menggunakan Buletin Teknis SAP Nomor 18 sebagai dasar penyusutan dan metodenya, sedangkan untuk menilai aset digunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.06/2015.

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu pemerintah harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset (Bultek SAP 18).

Penyusutan BMN berupa Penyusutan Aset Tetap menurut Permenkeu 1/PMK.06/2013 adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset, yang dilakukan untuk dapat menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Penyusutan terhadap aset ini dilakukan untuk dapat mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa Manfaatnya yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan. Penyusutan juga dilakukan untuk dapat memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Masa manfaat atau periode di mana suatu Aset Tetap diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik (Permenkeu 1/PMK.06/2013) diatur secara rinci dalam UU 36/2008. UU 36/2008 mengatur masa manfaat serta tarif penyusutan

## **PERTANYAAN RISET DAN PROPOSISI**

Pertanyaan riset: Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Proposisi: Apabila Standar Akuntansi Pemerintah diterapkan sesuai dengan PP 71/2010 terhadap Aset Tetap, maka pengakuan, pengukuran, pengklasifikasian, penyajian dan pengungkapan aset tetap dapat diyakini kewajarannya sehingga Pemerintah Daerah bisa memperoleh opini WTP.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yakni angka-angka aset tetap yang tertuang dalam Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Tahun 2015 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015. Data kualitatif yakni uraian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 dan hasil wawancara yang memberi keyakinan mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap aset tetap.

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan Bagian Aset dan Bagian Akuntansi pada DPPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan daftar pertanyaan. Data sekunder berupa dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan dokumen aset yang tertuang dalam LBMD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, serta berbagai referensi berupa dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi, Kebijakan Akuntansi, dan profil daerah.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu

1. Studi Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menganalisa dokumen yang menyajikan aset tetap Tahun 2015 dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Wawancara

Wawancara, yaitu kegiatan berhadapan langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi penelitian secara lisan dan sebagai alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya serta untuk menemukan informasi terkait kendala dalam penerapan SAP sesuai PP 71/2010

### **Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisa menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam bentuk studi kasus yaitu menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap dalam LKPD dan LBMN Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menurut PP 71/2010. Untuk mendukung analisa dari *findings* penelitian ini dilakukan wawancara terhadap *key persons* guna menjustifikasi hasil analisa dari *findings* terhadap data sekunder. Hasil wawancara dianalisa dengan menggunakan *content analysis*.

## **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

LKPD adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang berisi rangkaian laporan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran PPKD, Neraca PPKD, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan tentang Aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow disajikan dalam Neraca.

LBMD adalah Laporan Barang Milik Daerah yang merupakan rangkaian tabel berisi angka nilai aset, yang terdiri atas Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap aset tetap, dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengklasifikasian, penyajian dan pengungkapan dalam LKPD. LKPD yang dihasilkan selanjutnya harus direkonsiliasi dengan data aset yang disajikan dalam LBMD, untuk menyesuaikan data yang ada pada Bagian Aset dan Bagian Akuntansi.

### **Analisa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015**

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, mengakui suatu aset sebagai aset tetap jika dikuasai dan dimilikinya, dengan memperhatikan keberwujudan aset dimaksud, manfaat ekonomik yang dapat diperoleh, masa manfaatnya yang lebih dari 12 (dua belas) bulan, serta biaya perolehannya dapat diukur dengan andal, dan diperoleh untuk digunakan dalam operasionalisasi pemerintahan. Sebagaimana diatur oleh PP 71/2010.

Setelah proses pengukuran, aset tetap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya, sesuai dengan SAP PP 71/2010, terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Klasifikasi aset tetap ini disajikan dalam Neraca dan LBMD.

LKPD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 sudah mencantumkan nilai penyusutan. Nilai penyusutan ini dihitung secara manual menggunakan *Microsoft excel* dan tidak menggunakan aplikasi yang ada yaitu Simda-BMD. Nilai penyusutan yang dihitung adalah akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan Tahun 2014 dan beban penyusutan aset tetap untuk Tahun 2015. Namun hasil perhitungan penyusutan sampai dengan Tahun 2014 tidak dicantumkan ke dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisa bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam mengakui suatu aset sebagai aset tetap telah menerapkan sesuai SAP PP 71/2010, yaitu pengakuan nilai tercatat dan penyusutannya. Namun penerapan tersebut masih terkendala dengan tidak disajikannya nilai penyusutan dan akumulasi penyusutan Tahun 2014 pada Neraca Tahun 2014.

Analisa untuk setiap klasifikasi aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah:

#### **1. Aset Tetap Tanah**

Pengakuan Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow belum memenuhi semua kriteria SAP PP71/2010. Hal ini dikarenakan masih ada perbedaan nilai antara Bagian Akuntansi dengan Bagian Aset, diakibatkan oleh penyerahan aset ke daerah pemekaran. Dalam hal penyesuaian nilai asset melalui reklasifikasi dan kapitalisasi atas Aset Tetap Tanah sudah mengikuti ketentuan PP 71/2010.

#### **2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menerapkan SAP terhadap Aset Tetap Peralatan dan Mesin miliknya untuk Tahun 2015 sudah menggunakan PP 71/2010 dengan diberlakukannya penyesuaian melalui reklasifikasi dan kapitalisasi atas aset tersebut. Baik itu reklasifikasi ke dalam Aset Tetap Peralatan dan Mesin maupun reklasifikasi ke luar aset tersebut. Kekurangannya bahwa dalam penyusunan laporan Tahun 2015 tidak ditelusuri dan disesuaikan nilai minus dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin, sehingga hal ini menjadi temuan BPK.



Penundaan penelusuran nilai minus aset ini, mencerminkan fenomena prokrastinasi pada Pemerintah Daerah kabupaten Bolaang Mongondow. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibrahim (2015) bahwa dalam hal penerapan akuntansi akrual terjadi fenomena prokrastinasi pada kebanyakan pemerintah daerah di Indonesia. Padahal terkait aset, standar akuntansi menyebutkan bahwa aset bersaldo debet, jadi tidak bisa negatif. Hal ini tidak sejalan dengan keharusan dalam teori agensi (*agency theory*), bahwa akuntabilitas publik dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto *et al*, 2007 dalam Faristina, 2011).

3. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan biaya perolehan sesuai yang dimaksudkan dalam par.32 PSAP 07 PP 71/2010. Namun masih ada beberapa masalah tetapi sudah diperbaiki, berupa salah klasifikasi sehingga sudah direklasifikasi. Seperti reklasifikasi dari aset yang lain, reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta reklasifikasi dari belanja barang dan jasa. Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus dengan bantuan aplikasi *Microsoft excel* dan bukan menggunakan aplikasi Simda BMD.

4. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan`

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mencatat biaya perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Sedangkan penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, dihitung berdasarkan harga perolehan Perhitungan dilakukan untuk perolehan sampai dengan Tahun 2014 guna mendapatkan akumulasi penyusutan awal periode 2015, perhitungan beban penyusutan untuk Tahun 2015, serta nilai buku pada akhir periode 2015, dengan menggunakan metode garis lurus, didasarkan dengan aturan dalam Bultek SAP 18.

5. Aset Tetap Lainnya

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menyajikan Aset Tetap Lainnya sesuai pengklasifikasian yang dimaksud oleh PP 71/2010 dan Bultek SAP 15, yaitu aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, serta jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset ini terdiri atas buku, barang bercorak kebudayaan dan alat olah raga, serta renovasi aset dan belanja hewan.

6. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kabupaten Bolaang Mongondow menyajikan data Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang pengakuan dan pencatatannya sudah mengikuti PP 71/2010 yaitu mencatat aset yang belum selesai pengerjaannya pada tanggal pelaporan.

Namun dari penjelasan aset ini pada CaLK terlihat bahwa tidak ada keterangan mengenai rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian pada tanggal neraca, nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya, uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca, jumlah retensi.

Dalam perspektif teori agensi, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Pemerintah Daerah (*agent*) bertanggungjawab kepada masyarakat (*principal*) sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah, dengan membuat pertanggungjawaban dalam bentuk LKPD dan LBMD. Pemerintah Daerah sebagai *agent* harus menerapkan SAP terhadap aset tetap daerah untuk LKPD dan LBMD, sehingga laporan yang dihasilkan *agent* dapat diyakini kewajarannya.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Bagian Aset dan Bagian Akuntansi DPPKAD telah mengkompilasi data aset dari semua SKPD yang ada pada pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow. Aset-aset tersebut telah diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas sesuai PP 71/2010. Proses ini dilakukan di DPPKAD karena di SKPD masih terkendala pada SDM dan Aplikasi Simda-BMD yang digunakan tidak dapat maksimal untuk menyajikan nilai aset.

Untuk kepentingan pencantuman nilai aset dalam LKPD 2015, Bagian Aset DPPKAD meninjau kembali pengakuan aset dan pengukurannya. Sehingga ada beberapa aset yang nilainya direklasifikasi dan dikapitalisasi sebelum dilakukan perhitungan penyusutan. Seperti penambahan harga perolehan aset tetap selain karena ada realisasi belanja modal, namun ada juga kapitalisasi yang dilakukan sehubungan dengan adanya aset yang belum tercatat, atau adanya belanja barang dan jasa yang ternyata menambah nilai suatu aset seperti sertifikat tanah menambah nilai aset tanah, atau reklasifikasi dari aset tetap yang lain ke aset tetap bersangkutan. Demikian juga dengan pengurangan nilai aset tetap, yang terjadi karena ada aset yang tidak dapat dicatat oleh pemda sebagai miliknya karena telah diserahkan ke pihak lain, ada aset yang tidak dapat dicantumkan sebagai aset tetap semula tapi harus direklasifikasi ke aset lain, atau aset yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sehingga walaupun dianggarkan dan direalisasikan sebagai belanja modal namun harus direklasifikasi ke belanja barang dan jasa.

Setelah persoalan saldo aset pada awal Tahun 2015 rampung, kemudian Bagian Aset menghitung penyusutan untuk aset peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Perhitungan dilakukan secara manual menggunakan aplikasi *microsoft excel*. Menurut Kepala Bidang Aset dan Kepala Seksi Pendayagunaan, penggunaan aplikasi *microsoft excel* sangat membantu dan lebih akurat untuk mendapatkan nilai penyusutan dibandingkan dengan dimasukkan dalam aplikasi Simda-BMD. Karena persoalan aset di Kabupaten Bolaang Mongondow bukan aset yang berdiri tunggal, melainkan banyak aset lama yang sudah ada penambahan maupun reparasi yang menambah nilai aset. Penyusutan dilakukan menggunakan metode garis lurus. Selain itu, Simda-BMD hanya ada di Bagian Aset DPPKAD, sedangkan di SKPD belum ada Simda-BMD yang terkoneksi ke Simda-BMD DPPKAD.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini meneliti penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Penerapan SAP dimaksud adalah merujuk pada PP 71/2010 berbasis akrual, yang sesuai ketentuan harus dilaksanakan Pemda se-Indonesia mulai LKPD 2015. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada 8 *key person* untuk mendukung data sekunder berupa LKPD dan LBMD yang berbasis akrual.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan SAP berbasis akrual dilakukan dengan mengkompilasi data aset dari semua SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow, meninjau kembali nilai saldo aset per 31

- Desember 2014, menghitung akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2014, serta menghitung beban penyusutan untuk tahun 2015.
2. Penerapan SAP berbasis akrual terhadap aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah dilakukan sesuai dengan PP 71/2010 adalah dalam hal pengukuran, pengklasifikasian, penyajian dan perhitungan penyusutan dari aset tetap. Sedangkan untuk pengakuan aset tetap belum memenuhi semua kriteria pengakuan, dan pengungkapan aset tetap belum dilakukan sebagaimana seharusnya.
  3. Penerapan SAP berbasis akrual terhadap aset tetap pada Kabupaten Bolaang Mongondow masih menghadapi kendala berupa adanya selisih pencatatan antara Simda-BMD dengan Neraca, masih adanya aset yang tidak dikuasai oleh SKPD (Nilai minus aset peralatan dan mesin), masih adanya aset yang tidak diketahui keberadaannya (aset tanah yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya), serta masih adanya aset tetap yang tanpa rincian yang jelas (Dicatat secara gabungan antara aset gedung dan bangunan, aset peralatan dan mesin, serta aset jalan, irigasi dan jaringan).
  4. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tersebut sejalan dengan temuan atas hasil pemeriksaan BPK yang mengakibatkan diperolehnya opini Wajar Dengan Pengecualian untuk LKPD 2015.
  5. Walaupun masih terdapat kendala, namun Kabupaten Bolaang Mongondow telah berupaya untuk dapat melaksanakan amanat PP 71/2010 berbasis akrual.

#### **Saran**

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Menyiapkan SDM yang kompeten dengan akuntansi aset dan menguasai aplikasi Simda-BMD di semua SKPD hingga ke Sekolah, Puskesmas, Pustu, dan Kelurahan, yang terkoneksi dengan Simda-BMD DPPKAD melalui jaringan LAN.
2. Melakukan inventarisasi menyeluruh (sensus aset) di semua SKPD hingga ke sekolah-sekolah, Puskesmas, Pustu, dan Pemerintah Kelurahan, untuk mendapatkan kondisi aset yang sebenarnya terkait aset tetap yang tidak dapat diukur secara handal.
3. Melakukan rekonsiliasi aset dengan semua pengguna dan pemakai barang (SKPD hingga ke Sekolah, Puskesmas, Pustu, dan Kelurahan) serta dengan Bagian Akuntansi secara berkala.
4. Memperhatikan kelengkapan pengungkapan aset dalam LKPD.

Diharapkan kedepan penerapan SAP benar-benar sesuai aturan dan dilakukan oleh SDM yang cakap di seluruh bagian pemerintahan, bukan hanya oleh Bagian Aset dan Bagian Akuntansi DPPKAD, sehingga opini WTP dapat diraih.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.
- BPKP. 2016. *Laporan Hasil Pengawasan BPKP Pada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015*.
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09. 2010. *Akuntansi Aset*. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- \_\_\_\_\_. 15. 2014. *Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual*. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
- \_\_\_\_\_. 18. 2014. *Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual*. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
- Bungin, Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group
- Chan, James L., dan Qi Zhang. 2012. *Government Accounting Standards and Policies. Handbook on public financial management*.

- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: PT. Indeks
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, proses, dan Penerapan*. Edisi 1. Yogyakarta: Andi
- Djajadikerta, Hamfri. 2004. Perbandingan Pengendalian Intern dan Pengendalian Manajemen dalam Hubungannya dengan Agency Theory. *Jurnal Bina Ekonomi* Vol. 8 Nomor 1.
- Faristina, Rosalin, 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang)*.
- Hanafi, M. Mamduh., dan Abdul Halim. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP YKPN
- Harun, Suyatno. 2008. *Carut Marut Aset Negara*. Majalah IAI. No. 13: 14-15
- Hasfi, Nyemas., Martoyo dan Dwi Haryono. 2013. *Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang)*. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN
- Hilmah, Fairoza KH. 2013. *Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Dan Akuntansi Aset Tetap Pada Dpka Kota Padang*. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Tidak dipublikasikan
- Hyndman, Noel., dan Ciaran Connolly. 2011. *Accrual Accounting in the Public Sector: a Road not Always Taken*. Management Accounting Research 22 (2011) 36–45. Journal.
- Ibrahim, Pajaruddin. 2015. *Studi Komparatif Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Daerah: Pendekatan Riset Campuran*. Tesis. MAKSI FEB UGM Yogyakarta. Belum dipublikasikan.
- Indriantoro, Nur. dan B. Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Iskandar, 2013. Analisis Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Bogor Dan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Jurnal.
- Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics* 3:305-360. North-Holland Publishing Company.
- KJPP. 2012. *Pengelolaan Aset Daerah Kendala Perolehan Opini WTP*.
- Kieso, Donald E. J.J. Weygandt, dan T.D. Warfield. 2008. *Intermediate Accounting, Twelfth edition*. USA: Jhon Willey & Sons, Inc. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Emil Salim, dengan judul Akuntansi Intermediate, edisi keduabelas Jilid 2, penerbit Erlangga Jakarta
- Kieso, Donald E., J.J. Weygandt, dan T.D. Warfield. 2012. *Intermediate Accounting. 14<sup>th</sup> edition*. USA: Jhon Willey & Sons, Inc.
- Kuntadi, Chris. 2008. *Salah Kelola Aset, LKPD Disclaimer*. Majalah IAI. No. 13: 14-15.
- Lestari, Prettya. dan Arief Surya Irawan. 2014. *Pra Kondisi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu)*. Jurnal Volume 10, November 2014.
- Locke, J. 1690. *An Essay Concerning the True Original, Extent and End of Civil Government In Social Contract*. London: Oxford University Press. (1690): 84.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Monteiro, Bento Rodrigo Pereira., dan Ricardo Corrêa Gomes. 2013. *International Experiences with Accrual Budgeting in the Public Sector*. R. Cont. Fin. – USP, São Paulo, v. 24, n. 62, p. 103-112

- Mulyani, Pujiatik. dan Rindah F. Suryawati. 2011. *Analisis Peran dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP/PP No.60 Tahun 2008) dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 7, No.2, September 2011, 102-116.
- Munawir, S. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Myers, Margaret. 2000. *Qualitative Research and The Generalizability Question: Standing Firm with Proteus*. The Qualitative Report. (Vol. 4), Num. 3/4
- Newberry, Susan. 2014. *The Use of Accrual Accounting in New Zealand's Central Government: Second Thoughts*. De Gruyter Accounting, Economics and Law – A Convivium 2014; 4(3): 283-297. Australia.
- Nugraheni, Purwaniati., dan Imam Subaweh. 2008. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi Bisnis, No.1 Vol.13, April 2008, Hal.48-58.
- Nugroho, Priyono Dwi. 2014. *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)*.  
 \_\_\_\_\_ 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.  
 \_\_\_\_\_ 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.  
 \_\_\_\_\_ 166/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Barang Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah.  
 \_\_\_\_\_ 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.  
 \_\_\_\_\_ 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.  
 \_\_\_\_\_ 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 (Revisi 1998) Penyajian Laporan Keuangan.  
 \_\_\_\_\_ 1 (Revisi 2009) Penyajian Laporan Keuangan.  
 \_\_\_\_\_ 16 (Revisi 2011) Aktiva Tetap.
- Ramadhan, Hudan Akbar. 2013. *Analisis Revaluasi Aset Tetap Pada Penghematan Beban Pajak Penghasilan Pada PT. Inka Madiun*. Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya.
- Reeve, James M., Carl S.Warren, dan Jonathan Duchac. 2009. *Principles of Accounting*. South-Western: Cengage Learning
- Salainti, Agnes Fanda. 2013. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Manado*. Jurnal EMBA, Vol.1 No.3 September 2013, Hal.890-900.
- Setiadi, Doddy. 2008. *Aset Merupakan Komponen Laporan Keuangan Yang Besar Pengaruhnya Terhadap Opini*.
- Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Smith, W. Robert and Mark Bertozzi. 1998. *Principals and Agents : An explanatory model of public budgeting*. Journal of Public Budgeting and Financial Management (Fall): 325-353
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutopo, HB. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah. Konsep dan Aplikasi (sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  
 \_\_\_\_\_ 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- \_\_\_\_\_ 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_ 36 Tahun 2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- Warren, Carl S., James M. Reeve, dan Philip E. Fess. 2005. *Accounting*. South-Western: Thomson Corporation
- Williamson, Oliver. 2007. *The Economics of Governance*. American Economic Review, Vol.95:1-18.
- Winarno, Eko Hery. 2012. *Kapitalisasi Aset Tetap: Solusi Yang Belum Tergarap Optimal*.
- Yusup, Al Haryono. 2003. *Dasar-Dasar Akuntansi*. STIEYKPN
- Yuwono, Sony., Dwi Cahyo Utomo, Suhaery Zein, dan Azrafiany A. R. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya. Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Malang: Banyumedia Publishing.

# **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

Imelda Latjandu, Lintje Kalangi, Jantje J. Tinangon  
(Email: [imelda.latjandu@gmail.com](mailto:imelda.latjandu@gmail.com))

## **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the influence of organization commitment, human resources competence, utilization of information technology, and the effectiveness of internal control to quality of government financial statement at Talaud Island Regency Government. The sample in this research were the Head and Accounting Staff at Talaud Island Regency Government as 64 respondents. This research is quantitative using multiple regression analysis. To test the data quality by validity and reliability. Beside that testing by the classical assumption of normality, multicollinearity and heteroscedasticity. This research result indicates that organization commitment, utilization of information technology, and the effectiveness of internal control has effect significantly to the quality of government financial statements at Talaud island Regency Government and the human resource competence has effect but not significantly to quality of government financial statement at Talaud Island Regency Government. Suggestions to Talaud Island Regency Government is expected to improve qualifications in the field of education, namely the employees who receive educational background in accounting, as seen from the respondent data, proving that there are many officers who worked in the accounting who have educational non accounting.*

*Keywords: Quality of Local Government Financial Statements, Organization Commitment, Human Resources Competence, Utilization of Information Technology, and the Effectiveness of Internal Control*

## **PENDAHULUAN**

Tuntutan terhadap sektor publik, mewajibkan lembaga-lembaga publik khususnya pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud apabila LKPD telah memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Opini BPK atas LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun 2011 mendapat opini tidak memberikan pendapat (TMP), Tahun 2012 dan 2013 tidak wajar (TW), Tahun 2014 dan 2015 wajar dengan pengecualian (WDP). Meskipun dalam 2 (dua) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud telah mendapat predikat WDP oleh BPK, namun masih terdapat banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan terutama pada tingkat SKPD. Menurut pengamatan Bidang Akuntansi DPPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud selaku konsolidan dan pengguna laporan keuangan SKPD, masih dijumpai hal-hal sebagai berikut : data yang disajikan tidak akurat, ketidakmampuan SKPD dalam menyajikan pos-pos laporan keuangan dengan tepat, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang kurang lengkap dan informatif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informatika berpengaruh terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud?

4. Apakah Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud ?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Pada teori agensi (*agency theory*), akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto *et al*, 2007 dalam Rosalin, 2011).

### **Teori Kepatuhan**

Menurut Tyler dalam Septiani (2005) terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam tangible, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

### **Laporan Keuangan**

Ikatan Akuntan Indonesia (2012) dalam Standar Akuntansi Keuangan, menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa laporan keuangan pemerintah disajikan berdasarkan basis akrual, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diatur mengenai unsur laporan keuangan pemerintah berbasis akrual, yang terdiri atas Laporan Pelaksanaan Anggaran (terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih), Laporan Finansial (terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas), serta Catatan atas Laporan Keuangan.

### **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

McDaniel *et. al* (2002), menyatakan untuk menilai kualitas laporan keuangan menggunakan tiga karakteristik yaitu relevance, reliability dan comparability. Ferdy van Beest, *et. al* (2009) menulis artikel dengan judul Quality of Financial Reporting: measuring qualitative characteristics. Dalam artikel dinyatakan mereka membangun sebuah alat ukur komprehensif untuk menilai kualitas pelaporan keuangan dalam hal karakteristik kualitatif yang mendasar (misalnya relevan) dan meningkatkan karakteristik kualitatif (understandability, comparability, dan verifiability) seperti yang didefinisikan dalam Kerangka Konseptual untuk Pelaporan Keuangan dari FASB (2008).

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

**Komitmen Organisasi;** Robbins dan Judge (2008) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi.

**Kompetensi Sumber daya manusia;** Menurut Bastian (2006) bahwa penyiapan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. SDM menjadi faktor kunci dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menyusun laporan keuangan adalah mereka yang menguasai SAP.

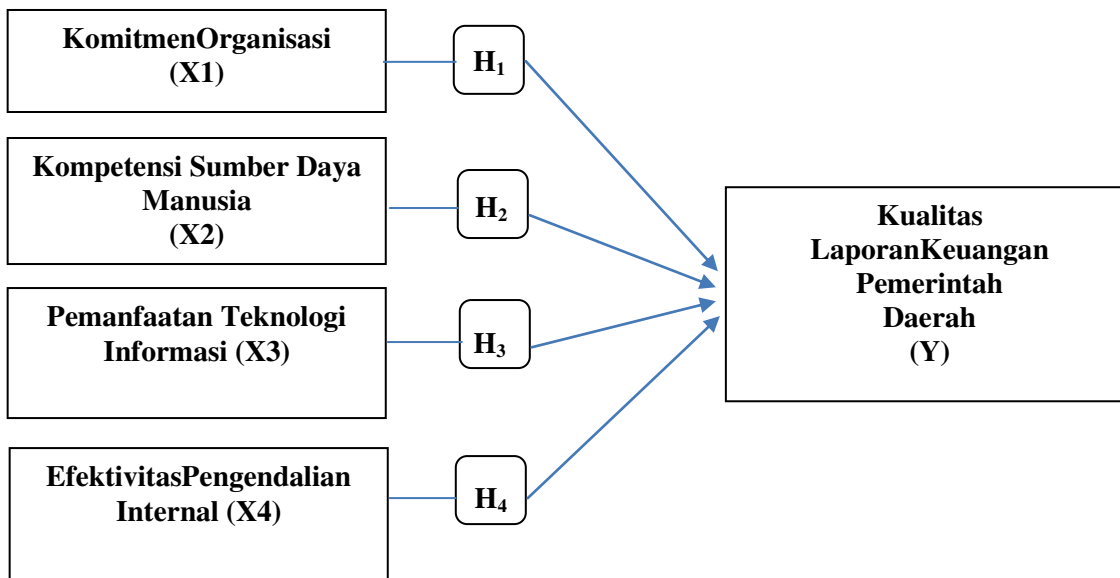


Betapapun bagus SAP, tanpa didukung SDM yang handal, maka laporan keuangan yang berkualitas sulit dicapai.

**Pemanfaatan Teknologi Informasi;** Menurut Junali dan Supomo (2002) pemanfaatan teknologi informasi adalah pemrosesan, pengolahan dan penyebaran data yang didapat dari mengkombinasikan alat perangkat komputer dengan telekomunikasi.

**Efektivitas Pengendalian Internal;** Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 ini SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

**Gambar 3.1 Kerangka Konseptual**



Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya dan kerangka konseptual tersebut diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**1. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Setiap pejabat pengelola keuangan daerah harus mengetahui secara utuh apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sehingga setiap ada perubahan peraturan perundang-undangan siap untuk melaksanakan perubahan tersebut. Secara substansi, istilah komitmen sarat dengan nilai dan sasaran. Istilah tersebut mengandung makna sebuah proses bagaimana nilai dan sasaran tersebut tercapai atau dengan kata lain komitmen merupakan syarat sebuah keberhasilan.

**Ha<sub>1</sub> : Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

**2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia di pemerintah daerah saat ini, menunjukkan bahwa aparat yang memperoleh kuasa dalam mengelola keuangan daerah belum dapat menyusun laporan secara komprehensif (berupa neraca, laporan arus kas, dan laporan realisasi anggaran) disebabkan karena baru memahami sebagian materi atau konsep akuntansi dan manajemen keuangan (Halim, *et. al*, 2010).

**Ha<sub>2</sub> : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

**3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemanfaatan teknologi informasi dipandang sangat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah daerah dengan bantuan alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti adanya perangkat keras komputer dan perangkat lunak sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan lebih efisien dan lebih tepat waktu dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

**Ha<sub>3</sub> : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

**4. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Efektivitas pengendalian internal dipandang sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

**Ha<sub>4</sub>: Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

**Model Analisis**

Penelitian ini akan dilakukan pengujian dengan model analisis regresi linier berganda. Menurut Sugiyono (2015), analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Dimana :

Y	=	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
$\alpha$	=	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	=	Koefisien Regresi
$X_1$	=	Komitmen Organisasi
$X_2$	=	Kompetensi Sumber Daya Manusia
$X_3$	=	Pemanfaatan Teknologi Informasi
$X_4$	=	Efektivitas Pengendalian Internal
$\varepsilon$	=	Error

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara purposive, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

**Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang berbentuk asosiatif yaitu data primer.

1. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari responden, melalui kuesioner yang disebar.
2. Data sekunder yaitu berupa literatur-literatur kepustakaan yang digunakan sebagai dasar teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dan penelitian-penelitian sebelumnya.

## Populasi dan Sampel

**Tabel 4.1 Daftar SKPD dan Jumlah Kuesioner yang Dibagikan**

No.	SKPD	Kuesioner
1	Sekretariat Daerah	3
2	Sekretariat DPRD	3
3	Inspektorat Kab. Kepl. Talaud	3
4	Badan Kesbang Politik dan Linmas	3
5	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	3
6	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan	3
7	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	3
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3
9	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	3
10	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	3
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3
12	Dinas Kehutanan Pertambangan Dan Energi	3
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	3
14	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	3
15	Dinas Kesehatan	3
16	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3
17	Dinas Pekerjaan Umum	3
18	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3
20	Dinas Pengelola Pasar Kebersihan dan Pertamanan	3
21	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	3
22	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	3
23	Dinas Pertanian Perkebunan Dan Peternakan	3
24	Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3
25	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	3
<b>JUMLAH</b>		<b>75</b>

Sumber: Data Hasil Olahan (2016)

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Objek dalam penelitian ini mengambil lokasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan waktu penelitian selama 3 (tiga) bulan yaitu mulai bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2016.

### Cara Pengolahan dan Analisis Data

#### Uji Asumsi Klasik

**Uji Normalitas;** Menurut Ghozali (2006:147) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

**Uji Multikolinieritas;** dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen.

**Uji Heteroskedastisitas;** bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas.

## Pengujian Hipotesis

Untuk membuktikan kebenaran uji hipotesis, digunakan uji statistik terhadap output yang dihasilkan oleh model Regresi Berganda. Uji statistik meliputi:

### a. Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen.

### b. Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

### c. Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2, X3, dan X4) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak, sedangkan uji koefisien determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1, X2, X3, dan X4) secara serentak terhadap variabel dependen (Y).

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Responden

**Tabel 5.1**  
**Pengumpulan Data Penelitian**

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kuesioner yang disebar	75	100
2.	Kuesioner yang kembali	65	86,7
3.	Kuesioner yang tidak kembali	10	13,3
4.	Kuesioner yang dapat diolah	64	85,3

Sumber: Data Olahan (2016)

**Tabel 5.2**  
**Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	37	57,8
Perempuan	27	42,2
Jumlah	64	100

Sumber: Data Olahan (2016)

**Tabel 5.3**  
**Komposisi Responden Berdasarkan Usia**

Usia (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
20 – 30	8	12,5
31 – 40	26	40,6
41 – 50	18	28,1
> 50	12	18,8
Jumlah	64	100

Sumber: Data Olahan (2016)

**Tabel 5.4**  
**Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
SMA	5	7,8
Diploma	3	4,7
S1	40	62,5
S2	16	25
Jumlah	64	100

Sumber: Data Olahan (2016)

**Tabel 5.5**  
**Komposisi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

Latar Belakang Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
Akuntansi	9	14,1
Ekonomi	21	32,8
Sospol	3	4,7
Hukum	7	10,9
Lainnya	24	37,5
Total	64	100

*Sumber: Data Olahan (2016)*

**Tabel 5.6**  
**Komposisi Responden Berdasarkan Lama Waktu Bekerja**

Pengalaman Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
< 1 tahun	6	9,4
1 – 5 tahun	17	26,5
> 5 tahun	41	64,1
Total	64	100

### **Pembahasan**

Penelitian ini untuk menguji pengaruh komitmen organisasi, kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan efektivitas pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda didapatkan hasil sebagaimana ditampilkan pada tabel 5.20.

**Tabel 5.20**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Hipotesis	Hasil Pengujian
Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ( $H_{a1}$ )	Diterima
Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ( $H_{a2}$ )	Ditolak
Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ( $H_{a3}$ )	Diterima
Efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ( $H_{a4}$ )	Diterima

*Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2016)*

### **Pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan**

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pada komitmen organisasi,  $t_{hitung} = 4,910 > t_{tabel} = 2,00100$  sehingga komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai koefisien regresi komitmen organisasi sebesar 0,370 menunjukkan bahwa penambahan satu satuan komitmen organisasi akan menambah kualitas laporan keuangan sebesar 0,370 satuan.

### **Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan**

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pada kompetensi SDM  $t_{hitung} = 1,482 < t_{tabel} = 2,00100$  sehingga kompetensi SDM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai koefisien regresi kompetensi SDM sebesar 0,165 menunjukkan bahwa penambahan satu satuan kompetensi SDM hanya akan menambah kualitas laporan keuangan sebesar 0,165 satuan.

### **Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan**

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pada teknologi informasi  $t_{hitung} = 3,201 > t_{tabel} = 2,00100$  sehingga pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,396 menunjukkan bahwa penambahan satu satuan teknologi informasi akan menambah kualitas laporan keuangan sebesar 0,396 satuan.

### **Pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan**

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa pada efektivitas pengendalian internal,  $t_{hitung} = 2,605 > t_{tabel} = 2,00100$  sehingga efektivitas pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai koefisien regresi efektivitas pengendalian internal sebesar 0,284 menunjukkan bahwa penambahan satu satuan efektivitas pengendalian internal akan menambah kualitas laporan keuangan sebesar 0,284 satuan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa :

- a. Dari hasil uji t atau secara parsial, dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas LKPD (Y) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, karena penambahan satu satuan komitmen organisasi akan menambah kualitas laporan keuangan sebesar 0,370 satuan;
- b. Variabel kompetensi SDM (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas LKPD (Y) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, karena penambahan satu satuan kompetensi SDM hanya akan menambah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,165 satuan;
- c. Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas LKPD (Y) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, karena penambahan satu satuan pemanfaatan teknologi informasi akan menambah kualitas laporan keuangan sebesar 0,396 satuan;
- d. Variabel efektivitas pengendalian internal (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, karena penambahan satu satuan efektivitas pengendalian internal akan menambah kualitas laporan keuangan sebesar 0,284 satuan;
- e. Dari hasil uji f atau secara simultan, dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi (X1), Kompetensi SDM (X2), pemanfaatan teknologi informasi (X3) dan efektivitas pengendalian internal (X4) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun beberapa saran dapat disajikan sebagai berikut :

1. Saran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, agar dapat :
2. Meningkatkan komitmen organisasi pimpinan instansi dan pegawai pengelola keuangan. Pertama pimpinan instansi sebagai pelaksana pengendalian internal harus memiliki komitmen organisasi yang kuat dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dengan merumuskan dan menerapkan standar pengendalian internal. Kedua bagi pegawai pengelola keuangan untuk terus meningkatkan komitmen organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pegawai pengelola keuangan. Pertama pimpinan pemda mendorong dan memberikan fasilitas tugas belajar kepada pegawai pengelola keuangan untuk melanjutkan studi dalam bidang akuntansi. Kedua meningkatkan

keterlibatan pegawai pengelola keuangan dalam pelatihan atau kursus tentang pengelolaan keuangan daerah. Ketiga penempatan pegawai pengelola keuangan di SKPD harus sesuai dengan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki.

4.Saran untuk penelitian berikutnya:

5.Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lain yang belum diteliti pada penelitian ini agar dapat mengetahui faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

6.Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan menggunakan metode metode campuran kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian, dimana metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan hasil yang diperoleh dari metode kuantitatif sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aidil, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi)*, USU, Medan.
- Aranya, N., and K.R Ferris (1984). "A Reexamination of Accountant Organizational-Professional Conflict". *The Accounting Review*. 59.pp 1-15.
- Azhar.2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 pada Pemerintah Kota Banda Aceh*. Tesis. Program Pascasarjana USU. Medan.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- BPK RI, 2014, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014*, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2015, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015*, Jakarta.
- Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision (COSO), 1994. *Internal Control-Integrated Framework*. AICPA Publication.
- Darlis,Edfan.2002.*AnalisisPengaruh Komitmen Organisasional danKetidakpastian LingkunganterhadapHubungan antara PartisipasiAnggaran denganSenjangan Anggaran*.Jurnal RisetAkuntansi Indonesia. UniversitasRiau. (Vol.5).Januari.Hlm.85 – 100.
- Desi dan Ertambang, 2008,*Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Ecivahyani, Sagung Inten. 2015. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
- Ferdy Van Beest, Geert Braam, and Suzanne Boelens. 2009. *Quality of Financial Reporting: Measuring Qualitative Characteristics*. Nijmegen Center for Economics (NiCE). Working Paper 09-108 April.
- Gaa and Thore, 2004, *Basic Accounting Education in Asia*, *Education of Journal*, Elsevier, London.
- Gafarov, T. 2009. *Financial Reporting Quality Control for Internal Control Implementation*. A. Disertasi For the award of Doctor of Philosophy, Business and Management Faculty Institute of Finances, Brno University of Technology.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guy, Dan M., Alderman, C. Wayne dan Winters, Alan J. 2002.*Auditing*:Jilid 1. Jakarta:Erlangga.
- Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

- \_\_\_\_\_, 2010, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Hilton, R. W., Michael, W. M. And Frank, H. S. 2000. *Cost Management, Strategies for Business Decision*. International Edition. McGraw-Hill Companies, Inc.
- Hornngren, C. T., G.Foster, and S. M. Datar. 2003. *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*. 11<sup>th</sup> Edition. Pretice-Hall International. Inc.
- Indriasari dan Nahartyo, 2008, *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. PSAK. Cetakan Keempat. Buku Satu. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Jensen, M, and W. Theory, Meckling, *Of The Firm: Managerial (1976), Behavior, Agency "Cost and Ownership Strukture". Journal Of Financial Economics, (3): 305-360.*
- Junali, Teddy dan Bambang Supomo. 2002. *Pengaruh Faktor-faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Akuntan Publik*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol.5 No.2, Hal.214-228.
- Laudon, K. C., Jane P. Laudon. 2006. *Management Information System*. 9th edition. New Jersey : Prentice-Hall, Inc
- Mahaputra dan Wayan, 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Martin, E. W., C. W. Brown, D. W. DeHayes, J. A. Hofer, dan W. C. Perkins. 2002. *Managing Information Technology*. New Jersey : Prentice-Hall, Inc.
- McDaniel. Linda, Roger D Mrtin and Laureen A. Maines, 2002, *Evaluating Financial Reporting Quality*. *Accounting Review*. December 1
- Meyer, J. P. and N. J. Allen. 1997. *Commitment in the Workplace: Theory, Research and Application*. *Journal of Vacation Behavior*. (Vol. 14): 24-27.
- Mowdey, R. T., R. M. Steers, and L. W. Porter. 1979. *The Measurement of Organizational Commitment*. *Journal of Vocational Behaviour*. (Vol. 14): 224-247.
- Nuryanto M. dan N. N. Afiah. 2013. *The Impact of Apparatus Competence, Information Technology Utilization and Internal Control on Financial Statement Quality (Study on Local Government of Jakarta Province - Indonesia)*. *World Review of Business Research*. (Vol. 3): No. 4. November 2013 Issue. Pp. 157 – 17.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pangkong, Terry Corie. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Biak Numfor*. Tesis. Program Magister Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Ponamon Irene Fransisca. 2014. *Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah pada SKPD Pemerintah Kota Manado*.
- Pradono, F. C. dan Basukiato. 2015. *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi pada SKPD Pemerintah Jawa Tengah)*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol.22. No.2 September 2015, Hal.188-200. ISSN 1412-3126.



- Ratifah, Ifa. 2014. *Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang*
- Robbins, Stephen P, Judges, Timothy A, 2008, *Perilaku Organisasi*, Edisi 12, Salemba Empat, Jakarta.
- Rosalin, Faristina, 2011, *Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan Keahlian Pemakai Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Studi pada BLU di Kota Semarang*.
- Prayitno, Tim Peneliti BKN. 2003. *Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil*. Puslitbang BKN, Jakarta.
- Saerang, D. P. E. dan H. R. N. Wokas. 2011. *Pengaruh Komitmen, dan Pendidikan Terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Daerah Sulawesi Utara*.
- Sudiarianti, Ni Made. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
- Syarifudin, Akhmad. 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen)*. Jurnal Fokus Bisnis, Vol.14. No.02 Desember 2014, Hal.26-44.
- Sekaran, U, 2006, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Septiani, Aditya, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal Yang Sedang Berkembang; Perpektif Teori Pengungkapan*.
- Silviana, 2012, *Pengaruh Komitmen Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat*.
- Sopiah, 2008, *Perilaku Organisasi*, Andi, Yogyakarta
- Stephen J. Gauthier, 2007, *Interpreting Local Government Financial Statement. Government Finance Review*.
- Sukmaningrum, Tantriani, 2012, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Suwanda D. 2015, *Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK)*. Research Journal of Finance and Accounting (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) (Vol.6): No.4.
- Warisno, 2009, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi*, USU, Medan.
- Warongan, J. D. L. 2015. *Determinan Efektivitas Pengendalian Internal dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Wilkinson, J. W., Cerullo, M. J., Raval, V., and Wong-On-Wing, B. 2000. *Accounting Information System: Essential Concepts and Applications*. New York: John Wiley & Sons. Inc.
- Winidyaningrum, Celviana dan Rachmawati. 2010. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian*

- Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten). SNA XIII. 13-14 Oktober. Purwokerto.*
- Zainani, Elva. 2013.*Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran). Jurnal.*
- Zuliarti, 2012,*Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus.*

# **FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) BERBASIS KINERJA PADA PEMERINTAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA**

Anestasye Agnes Woinalang, Jullie J. Sondakh, Ventje Ilat  
(Email : [ag17es@ymail.com](mailto:ag17es@ymail.com))

## **ABSTRACT**

*Public demands to create good governance such as accountability for local financial management drives government to increase their effort in achieve successful implementation of performance based budgeting by clearly ensure the related between expenditure allocation and performance with efficiency and effectiveness. This research aims to analyze the affecting of budgeting integration with planning and organizing, comprehensive planning and budgeting system and monitoring and evaluating of APBD simultaneous and partially.*

*This study uses samples for 70 people to test the hypothesis of budgeting integration with planning and organizing, comprehensive planning and budgeting system and monitoring and evaluating of APBD simultaneous and partially used F test and T test with multiple linear analysis method. The result prove that budgeting integration with planning and organizing, comprehensive planning and budgeting system and monitoring and evaluating simultaneous affect significantly to performance based budgeting of APBD. Budgeting integration with planning and organizing and monitoring and evaluating partially affect significantly to performance based budgeting of APBD*

*Keywords : APBD, Reinventing Government, Agency, Kebijakan*

## **PENDAHULUAN**

Perubahan cara pandang masyarakat di Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi desentralisasi yang telah menjadi fenomena bagi negara-negara di dunia. Pasca reformasi, banyak tuntutan daerah untuk meminta kewenangan lebih besar dalam mengelola keuangan di daerahnya masing-masing. Hal ini terjadi sebagai efek dari desentralisasi berbagai macam urusan pemerintahan yang selama ini dipegang oleh pemerintah pusat menjadi kewenangan dan tanggungjawab daerah, termasuk dalam hal keuangan untuk membangun *good governance*. Reformasi di bidang keuangan ditandai dengan lahirnya tiga paket undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Ketiga UU tersebut memulai era baru dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu dari administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan (*financial management*). Salah satu wujud perubahan adalah penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based budget*). Penganggaran berbasis kinerja merupakan teknik penganggaran yang mengikuti pendekatan *new public management*. Pendekatan yang dilakukan dengan sistem ini adalah dengan memperjelas keterkaitan alokasi pendanaan dan kinerja serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian kinerja. Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diberlakukan dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Utomo *et.al.*2007). Madjid dan Ashari 2013, menyatakan bahwa pemerintah di Indonesia telah melaksanakan anggaran berbasis kinerja tetapi belum utuh dan konsisten. Pada kenyataannya penerapan *performance*

*based budgeting* hanya diikuti daerah pada tingkat perubahan teknis dan format, namun perubahan paradigma belum banyak terjadi (Rahayu *et.al.*2007). Utari, 2009 menyatakan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Kabupaten Temanggung ditemukan beberapa kendala dan hambatan antara lain, 1) struktur SKPD belum memberi ruang yang cukup bagi penyusunan perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi, 2) tim anggaran belum terlibat secara penuh pada setiap tahapan perencanaan, 3) kurangnya pengetahuan, pemahaman dan juga motivasi pegawai untuk menerapkan anggaran kinerja secara optimal, 4) keterbatasan anggaran daerah. Selanjutnya Hananto *et.al.* (2013) menyimpulkan bahwa Universitas Negeri Semarang (UNS) telah menetapkan sistem anggaran berbasis kinerja, namun belum efektif walaupun UNS telah memiliki sumberdaya untuk dapat menerapkan anggaran berbasis kinerja yang optimal. Sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban belum terintegrasi, sehingga antara laporan kinerja operasional dan laporan keuangan belum berasal dari satu kesatuan sistem yang terintegrasi. Kota Bitung adalah salah satu daerah otonomi di Provinsi Sulawesi Utara dengan pemerintahnya yang dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai 44 SKPD sebagai penunjang kinerja pemerintahan. Dalam hal penganggaran, Pemerintah Kota Bitung telah menyesuaikan struktur APBD secara bertahap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk merancang dan mengelola anggaran berbasis kinerja. Dalam *Better Practice Guide* Penganggaran Berbasis Kinerja oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia edisi 2014, karakteristik penganggaran yang efektif, yaitu : 1) Integrasi proses penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi; 2) perencanaan dan penganggaran yang komprehensif; 3) monitoring dan evaluasi. Tujuan penelitian apakah integrasi penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi, perencanaan dan penganggaran yang komprehensif, monitoring dan evaluasi berpengaruh terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja pada Pemerintah Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori *Reinventing Government***

Teori ini dikemukakan oleh David T. Osborne dan Ted Gaebler pada tahun 1992 mengemukakan pandangannya yang berisi tentang reformasi di bidang pemerintahan dengan menggunakan *Reinventing Government* Salah satu perspektif dalam *reinventing government* ini adalah *Mission Driven Budgeting*, atau anggaran yang digerakan oleh tujuan. Jadi dengan perspektif ini yang jadi pokok dari anggaran adalah tujuannya atau misi anggaran tersebut dimanfaatkan.

### **Teori *Agency***

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah hubungan kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Hubungan tersebut terkadang menimbulkan masalah diantara kedua pihak yang melakukan kontrak. Hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif (pemerintah) adalah *agent* dan legislatif (DPRD) adalah *principal*. Sebelum penyusunan APBD dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang arah dan kebijakan umum serta prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. Eksekutif membuat rancangan APBD yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda).

Dalam perspektif keagenan hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*) yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

### **Teori Kebijakan**

Menurut Jones (1997) kebijakan merupakan keputusan tetap yang dicirikan oleh pelaku bersifat konsisten dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Dengan kata lain keputusan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat sehingga harus dibuat secara konsisten serta harus dilaksanakan oleh semua pihak yang berada di dalam ruang lingkup berlakunya kebijakan tersebut, termasuk diantaranya pihak-pihak yang membuat kebijakan. Dalam melaksanakan kebijakan publik tadi perlu dikontrol dan dievaluasi, sejauh mana kinerja mereka dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsinya masing-masing..

### **Implementasi Kebijakan**

George C. Edward III. Menurut Edwards, ada empat variabel dalam implementasi kebijakan publik yaitu Komunikasi (*communications*), Sumberdaya (*resources*), Sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

### **Teori Anggaran**

Negara/daerah sebagai suatu entitas sektor publik juga memanfaatkan anggaran sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebagaimana disebutkan dalam teori kebijakan, bahwa dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan tersebut mengandung dua ranah yaitu ranah administrasi dan ranah politik. Demikian juga dengan kebijakan anggaran sangat dipengaruhi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan politik, begitu banyak kepentingan yang harus dialokasikan menurut keinginan pihak-pihak tertentu yang masing-masing ingin diprioritaskan. Menurut Shah dan Shen, anggaran publik dibutuhkan untuk memenuhi beberapa fungsi sesuai dengan mandat yang diberikan kepada pemerintah. Dibutuhkan perencanaan jangka panjang, pengendalian keuangan, pelaksanaan yang efisien, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah terhadap masyarakat.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Bastian (2006) adalah merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

### **Proses Penyusunan APBD berbasis kinerja**

Tahapan penyusunan APBD berbasis kinerja seperti yang dijelaskan diatas, maka penerapan penganggaran berbasis kinerja lebih menekankan pada informasi kinerja atas pelaksanaan suatu program dan kegiatan serta dampak/hasilnya pada masyarakat luas. Dari tahapan siklus penganggaran berbasis kinerja yang harus dijalani, lebih disederhanakan menjadi :

- 1) penetapan sasaran strategis;
- 2) penetapan *outcome* program dan *output* kegiatan;
- 3) penetapan

indikator kinerja utama program dan indikator kinerja kegiatan; 4) penetapan standar biaya; 5) penghitungan kebutuhan anggaran. Setelahnya untuk dapat menilai/menjamin efektivitas dan efisiennya penyusunan anggaran termasuk program dan kegiatan dalam pelaksanaan anggaran dibutuhkan pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja kemudian ditindaklanjuti dengan proses monitoring dan evaluasi.

### **Integrasi penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi**

Perencanaan strategis adalah merupakan suatu proses merencanakan hasil dan strategi secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada/timbul (Tjandra, 2013). Guna menjabarkan rencana strategis yang disusun pemerintah daerah lebih lanjut harus membuat rencana kinerja tahunan, yang mencakup periode tahunan rencana strategis yang disusun. Di dalamnya, instansi pemerintah mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan. Rencana kinerja menjadi dasar penyusunan dan pengajuan anggaran berbasis kinerja.

### **Perencanaan dan penganggaran yang komprehensif**

Dalam *Better Practice Guide : Developing and Managing Internal Budget* yang di *published* pada *Australian National Audit Office* 27 Juni 2008 yang menjelaskan bahwa menyusun dan melaksanakan proses/sistem penganggaran adalah langkah utama pada sebagian besar organisasi. Proses penyusunan dilakukan secara berkesinambungan sepanjang tahun dan melibatkan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, agar proses penganggaran berjalan efektif maka dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut (Kementerian Keuangan RI, 2014) : 1) koordinasi dan perencanaan yang efektif; 2) pendekatan penganggaran yang efektif; 3) koordinasi dan *quality assurance* yang efektif.

### **Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring merupakan suatu penilaian secara berkesinambungan atas implementasi rencana program/kegiatan, terutama berkaitan dengan jadwal waktu yang telah disepakati, penggunaan sumber daya, serta kualitas yang telah direncanakan. Sedangkan evaluasi merupakan penilaian *periodic* atas suatu program/kegiatan, yang berkaitan dengan relevansi dari program/kegiatan tersebut, tingkat kinerjanya, efisien dan efektivitas, serta dampak yang terjadi, yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan (Kementerian Keuangan, 2014). Keterkaitan antara monitoring dan evaluasi adalah laporan hasil monitoring biasanya akan digunakan sebagai sumber informasi dasar bagi pelaksanaan evaluasi.

## **HIPOTESIS DAN MODEL**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka konseptual, maka hipotesis penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut.

- Ha1 = Integrasi Penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi berpengaruh signifikan terhadap Penyusunan APBD berbasis Kinerja
- Ha2 = Perencanaan dan Penganggaran yang Komprehensif berpengaruh signifikan terhadap Penyusunan APBD berbasis Kinerja
- Ha3 = Monitoring dan Evaluasi berpengaruh signifikan terhadap Penyusunan APBD berbasis Kinerja

Formulasi dari regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

dimana:

Y : Penyusunan APBD berbasis kinerja

- a : Nilai intersep (konstanta)
- $\beta_1$  : koefisien regresi integrasi penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi
- $\beta_2$  : koefisien regresi perencanaan dengan penganggaran yang komprehensif
- $\beta_3$  : koefisien regresi monitoring dan evaluasi
- $X_1$  : integrasi penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi
- $X_2$  : perencanaan dengan penganggaran yang komprehensif
- $X_3$  : monitoring dan evaluasi
- $e$  : *error*

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Dilihat dari sumber data, penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu data diambil langsung dari sumber data (pengguna anggaran dan kepala sub bagian perencanaan/keuangan), yaitu hasil kuesioner dan interview. Sumber data sekunder yaitu RPJMD 2011-2016, RKPD 2015, KUA-PPAS 2015, RKA-SKPD 2015 dan LAKIP Kota Bitung 2015. Berdasarkan cara atau teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan kuesioner dan interview. Menurut Sugiyono (2014), kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner tertutup. Interview dalam penelitian ini hanya berupa pendampingan kepada populasi pada saat pengisian kuesioner untuk menjaga agar penelitian tidak bias. Populasi pada penelitian ini adalah personel yang terkait dengan proses penganggaran berbasis kinerja sebanyak 132 Orang dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 orang untuk menguji hipotesis pengaruh faktor integrasi penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi, perencanaan dan penganggaran yang komprehensif dan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan APBD secara simultan dan parsial digunakan Uji F dan Uji t dengan metode analisis linier berganda.

### Pengujian Hipotesis

#### 1. Uji Regresi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen, dimana hipotesis statistiknya sebagai berikut:

$H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ , berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila koefisien regresi variabel independen  $\neq 0$ .

$H_o : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$ , berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila koefisien regresi variabel independen  $= 0$ .

#### 2. Uji Regresi Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, dimana hipotesis statistiknya sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Integrasi penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ , berarti integrasi penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.

- Ho :  $\beta_1 = 0$ , berarti integrasi penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.
- Hipotesis 2 : Perencanaan dan penganggaran yang komprehensif berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.
- Ha :  $\beta_2 \neq 0$ , berarti perencanaan dan penganggaran yang komprehensif berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.
- Ho :  $\beta_2 = 0$ , berarti perencanaan dan penganggaran yang komprehensif tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.
- Hipotesis 3 : Monitoring dan evaluasi berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.
- Ha :  $\beta_3 \neq 0$ , Monitoring dan evaluasi berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.
- Ho :  $\beta_3 = 0$ , berarti Monitoring dan evaluasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Regresi

**Tabel 1**  
**Hasil Regresi Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,565	4,441		,352	,726
	Integrasi penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi	,404	,070	,430	5,816	,000
	Perencanaan dan penganggaran yang komprehensif	,048	,077	,043	,626	,534
	Monitoring dan evaluasi	,746	,102	,552	7,307	,000

a. Dependent Variable: Penyusunan APBD berbasis kinerja

*Sumber: Hasil Olah data dengan SPSS*

Berdasarkan tabel 1, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 1.565 + 0,404X_1 + 0,048X_2 + 0,746X_3 + e$$

Persamaan regresi berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Penyusunan APBD berbasis kinerja pada Pemerintah Kota Bitung (Y) berhubungan positif atau searah dengan integrasi penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi (X1), perencanaan dan penganggaran yang komprehensif (X2), dan monitoring dan evaluasi (X3).
- Model penelitiannya untuk integrasi penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi menunjukkan bahwa integrasi penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi memiliki hubungan searah terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,404. Hal ini menunjukkan bahwa semakin terintegrasinya



penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi maka penyusunan APBD berbasis kinerja semakin baik.

- c. Model penelitiannya untuk perencanaan dan penganggaran yang komprehensif menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran yang komprehensif memiliki hubungan searah terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,048. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya perencanaan dan penganggaran yang komprehensif proses penyusunan APBD berbasis kinerja akan semakin baik.
- d. Model penelitiannya untuk monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi memiliki hubungan searah terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,746. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi maka proses penyusunan APBD berbasis kinerja akan semakin baik setiap tahunnya.
- e. Nilai intersep sebesar 1,565 menunjukkan bahwa apabila integrasi penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi, perencanaan dan penganggaran yang komprehensif dan monitoring dan evaluasi dianggap konstan, maka penyusunan APBD berbasis kinerja akan meningkat sebesar 1,565 satuan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh integrasi penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi terhadap penyusunan APBD Berbasis Kinerja**

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pada variabel integrasi penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi,  $t_{hitung} = 5,816 > t_{tabel} = 1,99656$  sehingga integrasi penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja pada Pemerintah Kota Bitung. Nilai koefisien regresi integrasi penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi sebesar 0.404 menunjukkan bahwa jika adanya integrasi penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi maka penyusunan APBD berbasis kinerja akan semakin baik. Hasil penelitian ini juga berarti bisa menggambarkan bagaimana Pemerintah Kota Bitung (*agency*) telah melibatkan masyarakat langsung maupun masyarakat melalui DPRD (*principal*) dalam proses penyusunan anggaran. Dengan adanya integrasi penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi yang diukur dengan sumber informasi/data yang sama serta komitmen dari seluruh pihak yang berpengaruh signifikan terhadap proses penyusunan APBD di Kota Bitung maka Visi, Misi dari Kepala Daerah terpilih yang merupakan janji politiknya, bisa ditepati dan dilaksanakan oleh pemerintahannya. Pemerintah bisa menjadi *agent* yang baik dengan pelaksanaan penganggaran yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Teori dasar penganggaran berbasis kinerja yaitu *reinventing government* dengan *mission driven budgeting* terpenuhi karena visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses perencanaan dapat didanai dengan baik melalui penganggaran program/kegiatan prioritas.

### **Pengaruh perencanaan dan penganggaran yang komprehensif terhadap penyusunan APBD Berbasis Kinerja**

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pada variabel sistem perencanaan dan penganggaran yang komprehensif,  $t_{hitung} = 0,534 < t_{tabel} = 1,99656$  sehingga variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja. Nilai koefisien regresi kompetensi hanya sebesar 0,048 menunjukkan bahwa dengan adanya perencanaan dan penganggaran yang komprehensif tidak berpengaruh signifikan untuk proses penyusunan APBD berbasis kinerja di Kota Bitung. Sesuai dengan teori *reinventing government* Osborne dan

Gaebler (1992), diantaranya *Mission driven Budgeting* (anggaran yang digerakan oleh misi) akan sangat menyederhanakan proses anggaran. Program dan kegiatan beserta dengan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan diintegrasikan/diselaraskan dengan proses penganggaran kemudian dalam penganggaran dihitung jumlah uang yang harus digunakan tentunya tetap merujuk pada ASB dan standar satuan harga. Sehingga bisa dikatakan bahwa walaupun perencanaan dan penganggaran yang komprehensif tidak berpengaruh signifikan proses penyusunan anggaran berbasis kinerja tetap berjalan, asalkan proses penganggaran dengan perencanaan terintegrasi, juga dilaksanakannya monitoring dan evaluasi atas penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

### **Pengaruh monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja**

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pada variabel monitoring dan evaluasi,  $t_{hitung} = 7,307 > t_{tabel} = 1,99656$  sehingga monitoring dan evaluasi berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja. Nilai koefisien regresi pertimbangan risiko audit hanya sebesar 0,746 menunjukkan jika pelaksanaan monitoring dan evaluasi baik akan meningkatkan penyusunan APBD berbasis kinerja. Hal ini sejalan dengan teori kebijakan khususnya tentang analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (1981) yang menyatakan bahwa analisis kebijakan bertujuan untuk memberikan informasi, kritik, serta rekomendasi kepada para pembuat serta pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan dengan tepat, sehingga tujuan utama perumusan kebijakan, yakni untuk mengatasi permasalahan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan anggaran berbasis kinerja adalah salah satu cara untuk menjadi *Check and Balance* juga sebagai *lesson learned* dalam penganggaran tahun-tahun selanjutnya dan dalam pengukuran kinerja untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Integrasi penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja. Penyusunan APBD berbasis kinerja akan efektif apabila didukung dengan data yang terintegrasi, komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dan alokasi anggaran yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD, dapat diidentifikasi sampai ke jenjang eselonisasi paling bawah. Perencanaan dan penganggaran yang komprehensif tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja. Hal ini karena indikator variabel yang menjadi inti pelaksanaan sistem yang komprehensif belum dilaksanakan dengan tepat. Monitoring dan evaluasi berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai *check and balance* atas pelaksanaan rencana dan anggaran serta kinerja yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi berguna untuk memastikan bahwa suatu pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan jalur yang semestinya.

### **Saran**

1. Meningkatkan dan memperhatikan integrasi perencanaan dengan penganggaran serta tata kelola organisasi. Penelitian ini memberi masukan kepada Pemerintah Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara untuk memaksimalkan pemenuhan integrasi perencanaan dengan penganggaran serta tata kelola organisasi. Salah satu upaya adalah dengan menggunakan informasi/data yang sama dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta tetap berkomitmen untuk pencapaian target kinerja serta ikut bertanggungjawab dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

2. Berupaya untuk menjalankan sistem perencanaan dan penganggaran yang komprehensif. Penelitian ini memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara untuk memaksimalkan sistem perencanaan dan penganggaran yang komprehensif terutama dengan membuat Analisis Standar Belanja (ASB) yang mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya efisiensi secara terus-menerus.
3. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Penelitian ini memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara agar berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai sarana *check and balance* atas pelaksanaan rencana dan anggaran serta kinerja yang ditetapkan.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian, dengan mengambil sampel pada kabupaten dan kota yang ada di provinsi Sulawesi Utara.
5. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian, dimana metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan hasil yang diperoleh dari metode kuantitatif sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
6. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kuesioner lebih lanjut mengenai faktor yang berpengaruh terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Australia National Audit Office (ANAO), 2008 *Better Practice Guide : Developing and Managing Internal Budget*.
- Bastian Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Edwards George C 1980, *Implementing public policy (Politics and public policy series)*, Congressional Quarterly Press
- Hananto Santoso Tri, Kurniasih Ramadhan L. A, Juliati 2013, *Desain sistem penganggaran berbasis kinerja studi UNS*, Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia 2014
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, Oktober, 1976.
- Jones Charles O., 1977. *An Introduction to The Study of Public Policy Massachusetts*, Duxbury Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2014, *Better Practice Guide Penganggaran Berbasis Kinerja*
- Osborne David and Gaebler Ted, 1992, *Reinventing Government* (New York: Plume, 1993)
- Madjid Noor Cholis dan Ashari Hasan, 2013, *Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan)*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
- Rahayu Sri, Ludigdo Unti, Afandy Didied 2007, *“Studi Fenomenologis terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah (Bukti Empiris dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Propinsi Jambi)”*, Simposium Nasional Akuntansi X
- Shah Anwar and Shen Chunli, 2005. *“Public sector Governance and Accountability series: Budgeting and budgetary institutions”*. edited by Anwar Shah. The World Bank, 1818 H Street, NW, Washington.
- Sugiyono, (2014), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit CV. Alfabeta Bandung
- Utari Nuraeni, 2009. *Studi Fenomenologis Tentang Proses Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Temanggung*. Tesis Dipublikasikan Undip.

## **FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS AUDIT PADA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA**

Grace M. Turangan, Herman Karamoy, Jantje J. Tinangon  
(email: [garce.marvela.gmt@gmail.com](mailto:garce.marvela.gmt@gmail.com))

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to examine the effect of the competence, experience, independence, objectivity, integrity and motivation auditor in North Sulawesi Provincial Inspectorate to audit quality. The study population was all auditors in Inspectorate of North Sulawesi province with a total sample of 60 auditors working in the Inspectorate of North Sulawesi province. The sampling technique used purposive approach / judgment sampling. The results of multiple regression analysis explains that the quality of the audit which is owned by the Inspectorate of North Sulawesi associated positively or direction of the competence, experience, independence, objectivity, integrity and motivation. the results of the study to simultaneously show that variables, Competence, experience, independence, objectivity, integrity and motivation together significantly influence the variable quality of the audit. While in partial competence, experience and independence not significant effect on audit quality otherwise variable objectivity, integrity and motivation have a significant effect on audit quality. The correlation coefficient (R) of 0.803 indicates that the relationship between competence, experience, independence, objectivity, integrity and motivation have a relationship (correlation) is very strong on audit quality, as it approaches a value of 1. The value of adjusted R<sup>2</sup> as the coefficient of determination is 0.605, which means improvement of audit quality by 60.5% influenced by competence, experience, independence, objectivity, integrity and motivation, while the remaining 39.5% is influenced by other factors outside the research or explained by other variables not included in this study.*

*Key Words : Audit quality, competence, experience, independence, objectivity, integrity and motivation.*

### **PENDAHULUAN**

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Permenpan, 2008 : 5).

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2013) dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, menyatakan bahwa APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government). Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peran APIP yang efektif. Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan auditor yang profesional dan kompeten dengan hasil audit intern yang semakin berkualitas. Jadi auditor yang berkualitas akan menghasilkan audit yang berkualitas pula. Untuk mencapai hasil audit intern yang berkualitas maka pelaksanaan audit harus sesuai dengan Standar Audit yang ada.

Kelancaran pelaksanaan tugas APIP perlu didukung dengan peraturan perundang – undangan dan pedoman tentang pengawasan intern pemerintah yang merumuskan ketentuan ketentuan pokok dalam bidang pengawasan intern pemerintah dalam rangka menjamin terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang efisien dan efektif. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun 2008 telah melakukan penyusunan kode etik dan standar audit dan telah menerbitkannya dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Per/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik dan Per/05/M.PAN/03/2008 tentang standar audit. Penyusunan kode etik dan standar audit tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan audit berkualitas, siapapun yang melaksanakannya diharapkan menghasilkan suatu mutu audit yang sama ketika auditor melaksanakan auditnya sesuai dengan kode etik dan standar audit yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur nomor 5 tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menyatakan bahwa, auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP. Selanjutnya menurut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2013) dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, pengertian auditor di atas mencakup Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan APIP. Pemeriksaan yang dilakukan APIP terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang menonjol. Masalah lain yang dihadapi dalam peningkatan kualitas APIP adalah bagaimana meningkatkan sikap atau perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan efisien (Sukriah, dkk 2009). Prinsip – prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain integritas, obyektifitas dan kompetensi. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit. Obyektifitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit serta kompetensi auditor didukung oleh pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas (Sukriah, dkk 2009). Apabila aparat pemeriksa yang berada didalamnya mempunyai motivasi yang tinggi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah, maka pemeriksa yang berada pada inspektorat maupun inspektorat itu sendiri akan mendapatkan pengakuan yang baik dan kepercayaan yang tinggi terhadap badan/organisasi tersebut dari stakeholder (Wirasuasti, 2014).

Selanjutnya untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya tersebut, Pemerintah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 secara khusus telah memasukkan peningkatan kapabilitas APIP sebagai bagian dari agenda pembangunan. Hal ini dipertegas kembali oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern dengan tema Peningkatan Kapabilitas APIP tanggal 13 Mei 2015 di Jakarta. Salah satu perintah Presiden adalah agar kapabilitas APIP di setiap K/L/D pada akhir tahun 2019 berada pada Level 3 (Integrated), jika dinilai dengan menggunakan Internal Audit Capability Model (IACM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditor (IIA) tahun 2009. Sebagaimana diketahui dalam kerangka IACM kapabilitas pengawasan intern dikelompokkan menjadi lima tingkatan, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). (BPKP, 2015).

Kapabilitas APIP se-Sulawesi termasuk Provinsi Sulawesi Utara saat ini masih berada di level 1 (initial) dimana Secara konseptual tingkatan kapabilitas level 1 tersebut dapat

dipahami dengan makna bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya belum atau tidak ada praktik pengawasan yang tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan masih tergantung kepada kinerja auditor yang dimiliki sehingga APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi (BPKP, 2013).

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Kegiatan Audit dan Reviu LK APIP Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2012 dan semester I tahun 2013 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara bertujuan menilai efektifitas kegiatan audit dan reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh APIP untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka dipaparkan pokok – pokok hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian antara lain disebutkan bahwa kompetensi tenaga pengawas pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara belum memadai untuk mendukung kegiatan audit dan reviu Laporan Keuangan. Dimana pada pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2008, diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaksanaan reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan disajikan telah sesuai dengan SAP.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka saya tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas Audit Auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, sehubungan dengan itu saya mengangkat judul : “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Atribusi**

Teori atribusi yang dikemukakan oleh Robbins (1996) menyatakan bahwa :

*“Attribution theory has been proposed to develop explanations of the ways in which we judge people differently, depending on what meaning we attribute to a given behavior.<sup>2</sup> Basically, the theory suggests that when we observe an individual’s behavior, we attempt to determine whether it was internally or externally caused. That determination, however, depends largely on three factors: (1) distinctiveness, (2) consensus, and (3) consistency. First, let’s clarify the differences between internal and external causation and then we will elaborate on each of the three determining factors. Internally caused behaviors are those believed to be under the personal control of the individual. Externally caused behavior is seen as resulting from outside causes; From an attribution perspective, if consensus is high, you would be expected to give an external attribution to the employee’s tardiness, whereas if other employees who took the same route made it into work on time, your conclusion as to causation would be internal.”*

Teori atribusi menjelaskan perilaku seseorang yang disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Dimana Robbins mengembangkan penjelasan tentang cara yang berbeda dalam menilai orang, tergantung pada atribut perilaku tertentu, yang ditunjukkan oleh penyebab internal atau eksternal. Penyebab perilaku internal diyakini berada dibawah kendali pribadi individu. Penyebab perilaku eksternal dipandang sebagai akibat dari pengaruh luar yaitu perilaku yang terbentuk karena situasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena akan melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi auditor terhadap kualitas hasil audit, khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Pada dasarnya karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu terhadap kualitas hasil audit yang

akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas.

### **Teori Behaviorisme**

Teori belajar behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman (dalam Muh. Hizbul Muflihini, 2009:123). Teori psikologi behaviorisme adalah suatu teori belajar yang memandang kehidupan manusia terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Teori ini sangat menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur.

Teori behaviorisme ini memiliki tiga rumpun yang terdiri atas 1) teori *connectionism* dengan tokohnya Edward L. Thorndike; 2) *conditioning classic* dengan tokohnya Ivan Pavlov; dan 3) psikologi penguatan (*operant conditioning*) dengan tokoh yang terkenal yaitu B.F Skinner.

Teori behaviorisme dalam penelitian ini berhubungan dengan variabel kompetensi. Kompetensi yang dimiliki oleh auditor diperoleh dari hasil belajar secara terus menerus dan bukan merupakan sifat bawaan seseorang sehingga kompetensi dapat diukur. *Reinforcement* pada kompetensi dilakukan dengan adanya pengembangan kompetensi secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendidikan maupun penugasan yang bertujuan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor.

### **Audit**

Terdapat banyak definisi mengenai auditing, berikut ini akan disajikan beberapa definisi audit yaitu :

Menurut Mulyadi (2002) “Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil – hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, “Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara”

Menurut Arens. A.A., R.J. Elder., dan M.S, Beasley (2015, 1-15) “auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”

Audit pada umumnya dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu : audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional.

### **Audit Intern**

Definisi audit intern menurut Sawyer dalam Modul pusdiklatwas BPKP (2014) audit intern adalah sebuah penilaian sistematis dan objektif yang dilakukan auditor intern terhadap operasi dan control yang berbeda – beda dalam organisasi untuk menentukan apakah : (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan (organisasi) telah diidentifikasi dan minimalisasi; (3) peraturan ekstren serta kebijakan dan prosedur intern yang bisa diterima telah dipenuhi; (4) kriteria operasi (kegiatan) yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumberdaya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggungjawabnya secara efektif

### **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

Sebagaimana diatur dalam Permenpan nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan. Adapun tugas pokok dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat adalah kegiatan yang meliputi (1) Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. (2) Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. (3) Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. (4) Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (5) Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. (6) Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektifitas. (7) Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

### **Kualitas Audit**

Sampai saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai apa dan bagaimana kualitas audit yang baik. Tidak mudah untuk menggambarkan dan mengukur kualitas audit secara obyektif dengan beberapa indikator. Hal ini dikarenakan kualitas audit merupakan sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami, sehingga sering kali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya. Hal ini terbukti dari banyaknya penelitian yang menggunakan dimensi kualitas audit yang berbeda-beda.

DeAngelo (1981b:186) menyatakan bahwa:

*The quality of audit services is defined to be the market-assessed joint probability that a given auditor will both (a) discover a breach in the client's accounting system, and (b) report the breach. The probability that a given auditor will discover a breach depends on the auditor's technological capabilities, the audit procedures employed on a given audit, the extent of sampling, etc. The conditional probability of reporting a discovered breach is a measure of an auditor's independence from a given client.*

Jadi kualitas audit didefinisikan sebagai gabungan antara penilaian pasar dengan probabilitas bahwa auditor akan: (a) menemukan pelanggaran pada sistem akuntansi klien, dan (b) melaporkan pelanggaran tersebut. Kemungkinan bahwa auditor akan menemukan pelanggaran tergantung pada kompetensi auditor berupa kemampuan teknologi auditor, prosedur audit yang digunakan pada audit yang diberikan, dan sampling yang digunakan. Kemungkinan auditor akan melaporkan pelanggaran yang ditemukan adalah ukuran independensi auditor tersebut.

Jadi kualitas audit bergantung pada individu-individu kompeten yang menggunakan pengalaman mereka dan menerapkan integritas, objektivitas, dan skeptisisme yang memungkinkan mereka untuk membuat penilaian yang tepat yang didukung oleh fakta – fakta dan keadaan pada saat pelaksanaan audit. Kualitas ketekunan dan ketahanan dari



seorang auditor juga penting dalam memastikan bahwa perubahan yang diperlukan terhadap laporan keuangan, atau, kondisi dimana tidak perlu dilakukan perubahan, untuk memastikan bahwa laporan auditor tersebut benar-benar wajar.

### **Kompetensi**

*Government Internal Audit Profession* (2007) dalam *Government Internal Audit Competency Framework* menyatakan bahwa :

*"A common definition is that competencies are: Clusters of behaviours, skills and knowledge which are needed to undertake a job effectively."*

Jadi kompetensi didefinisikan secara umum sebagai gabungan dari perilaku, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan secara efektif.

*Government Accountability Office* (2011) Dalam *Government auditing Standards chapter 3* tentang *General Standards* menyatakan bahwa :

*"Maintaining competence through a commitment to learning and development throughout an auditor's professional life is an important element for auditors."*

Jadi Mempertahankan kompetensi melalui komitmen untuk belajar dan pengembangan seluruh kehidupan profesional seorang auditor merupakan elemen penting bagi auditor.

### **Pengalaman Kerja**

Yuniarsih dan Suwatno (2013) menyatakan bahwa, pengalaman kerja yaitu pengalaman seseorang tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu. Pengalaman kerja dinyatakan dalam : (a) pekerjaan yang harus dilakukan (b) lamanya melakukan pekerjaan itu. Faktor pengalaman perlu mendapat pertimbangan karena ada kecenderungan, makin lama bekerja, makin banyak pengalaman yang dimiliki dan sebaliknya makin singkat masa kerja, makin sedikit pengalaman yang diperoleh.

Ardana, dkk (2012) menyatakan bahwa, pengalaman bekerja yang banyak memberikan kecenderungan bahwa yang bersangkutan memiliki keahlian dan ketrampilan yang relatif tinggi. Pengalaman kerja yang dimiliki seseorang lebih banyak membantunya dalam mengerjakan sesuatu dibandingkan dengan pendidikan yang diikutinya.

### **Independensi**

Mulyadi (2002:26) mendefinisikan independensi sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Jadi independensi didefinisikan sebagai "keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain" dan auditor yang independen haruslah auditor yang tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan.

Arens dkk ( 2015) mendefinisikan independensi dalam pengauditan sebagai "penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut dan pelaporan hasil temuan audit".

*The Institute of Internal Auditors* (2012) dalam *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)* menyatakan bahwa :

*Independence is the freedom from conditions that threaten the ability of the internal audit activity to carry out internal audit responsibilities in an unbiased manner.*

### **Obyektifitas**

Obyektifitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektifitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias serta bebas dari benturan kepentingan atau

berada dibawah pengaruh pihak lain (Mulyadi, 2002-57). Menurut Arens, dkk (2015) bebas dari konflik kepentingan berarti tidak ada hubungan yang dapat mencampuri objektivitas atau integritas.

*The Institute of Internal Auditors* (2012) dalam *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)* menyatakan bahwa :

*Objectivity is an unbiased mental attitude that allows internal auditors to perform engagements in such a manner that they believe in their work product and that no quality compromises are made. Objectivity requires that internal auditors do not subordinate their judgment on audit matters to others.*

Jadi Objektivitas adalah sikap mental yang benar/tidak bias sehingga memungkinkan auditor internal untuk melakukan keterlibatan sedemikian rupa bahwa mereka percaya pada hasil pekerjaan mereka dan bahwa tidak ada kompromi kualitas yang dibuat. Objektivitas mengharuskan penilaian tentang hal-hal audit yang dibuat oleh auditor internal tidak dibawah pengaruh orang lain.

### **Integritas**

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil (Mulyadi, 2002-56). Menurut Arens, dkk (2015) bebas dari konflik kepentingan berarti tidak ada hubungan yang dapat mencampuri objektivitas atau integritas.

Sebagaimana yang diatur dalam Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang kode etik APIP menyebutkan bahwa prinsip – prinsip yang wajib dipatuhi oleh auditor salah satunya adalah integritas dimana Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

### **Motivasi**

Menurut Ardana, dkk (2012) motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau tidak. Sedangkan motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja atau pendorong semangat kerja. Suwandi (2005), dalam blog mahasiswa akuntansi Indonesia dalam konteks organisasi, motivasi adalah pemaduan antara kebutuhan organisasi dengan kebutuhan personil. Hal ini akan mencegah terjadinya ketegangan / konflik sehingga akan membawa pada pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Wirasuasti (2014), menyatakan bahwa apabila dikaitkan dengan teori kebutuhan, maka motivasi sangat berkaitan dengan proses audit yang dilakukan. Dalam teori kebutuhan terdapat lima jenjang kebutuhan manusia yang terdiri dari: kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan/prestise, dan kebutuhan aktualisasi diri. Pada kebutuhan yang keempat, kebutuhan akan penghargaan maka seseorang akan melakukan suatu tindakan agar mendapatkan pengakuan dari orang lain.

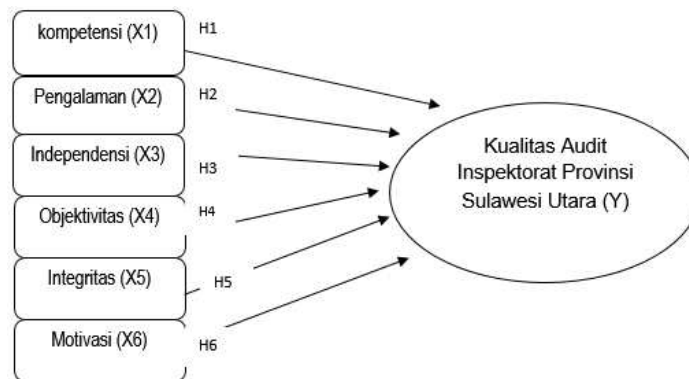
Dalam modul Pusdiklatwas BPKP (2007) tentang kepemimpinan, menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu upaya dari seorang pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi melalui orang lain dengan cara memberikan motivasi agar orang lain tersebut mau melaksanakannya. Dengan demikian agar dapat menggerakkan anggotanya, seorang ketua tim harus mampu memotivasi anggotanya. Motivasi seseorang dapat ditingkatkan jika perlakuan pihak lain dapat memberikan stimulus yang mampu menimbulkan respon secara positif. Untuk ini seorang ketua tim harus memiliki sarana yang dapat diperankan untuk dijadikan stimulus. Tim dapat dikembangkan jika para anggota di dalam tim (termasuk ketuanya) merasa puas bekerja dan ada motivasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya dalam modul Pusdiklatwas BPKP (2008) tentang Supervisi audit, menyatakan bahwa dalam suatu tim yang melaksanakan audit perlu tercipta suasana

yang memberikan motivasi kerja, hal ini merupakan salah satu tugas pokok dari supervisor atau pengendali teknis.

## KERANGKA KONSEPTUAL

### Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sekaran, 1992; Sugiyono, 2014). Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, dan teori yang ada maka kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Permenpan nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit yang menyatakan bahwa untuk mencapai mutu audit yang tinggi maka diperlukan kriteria standar yang harus dimiliki para auditor APIP, yaitu latar belakang pendidikan serta sikap dan perilaku.

### Hipotesis Penelitian

#### Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor menyatakan bahwa, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. *Government Internal Audit Profession* (2007) menyatakan bahwa kompetensi adalah gabungan dari perilaku, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Standar Audit Intern Pemerintah Seksi 2120 paragraf 24 menyatakan bahwa Auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan teknik. Oleh karena itu, APIP selaku auditor internal Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa mengerahkan seluruh kompetensi yang dimiliki agar audit yang dilakukan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Sukriah (2009) pada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat sepulau Lombok sebagai populasi penelitian, menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian Sukriah (2009) mendukung penelitian yang dilakukan oleh Efendy, (2010); Ayuningtyas dan Pamudji, (2012); dan Badjuri, (2012); Perdany dan Suranta, (2013) Musdar, (2014); dan Wirasuasti dkk., (2014) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hasil tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kualitas audit, seorang auditor sangat bergantung pada tingkat kompetensinya. Jika auditor memiliki kompetensi yang baik maka auditor akan dengan mudah melakukan tugas tugas auditnya dan sebaliknya jika rendah maka dalam melaksanakan tugasnya, auditor akan mendapatkan kesulitan-kesulitan sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan rendah pula.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

$H_1$  : *Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat.*

#### **Pengaruh Pengalaman Terhadap Kualitas Audit**

Auditor yang berpengalaman akan memiliki keunggulan dalam hal: 1) mendeteksi kesalahan, 2) memahami kesalahan secara akurat, dan 3) mencari penyebab kesalahan. Maka jika *auditee* mempersepsikan bahwa auditor berpengalaman, setelah mengamati sikap yang ditunjukkan auditor selama melakukan pemeriksaan, kecenderungan *auditee* akan menilai tim audit tersebut berkualitas dan menimbulkan kepuasan *auditee* (Tubb, 1992; Zawitri, 2009).

Penelitian yang dilakukan Nataline (2007) pada auditor kantor Akuntan Publik di Semarang, menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukriah, dkk (2009); Mabruri dan Winarna, (2010); Prasetyo (2016) yang berhasil membuktikan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan karena lama bekerja adalah sebagai suatu ukuran tentang lama waktu masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas – tugas suatu pekerjaan dan telah dilaksanakannya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor maka semakin meningkat kualitas auditnya. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

$H_2$  : *Pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat.*

#### **Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit**

Mulyadi (2002:26) mendefinisikan independensi sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun (Pusdiklatwas BPKP, 2008).

Hasil penelitian Lubis (2009) pada Auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara secara empiris membuktikan bahwa independensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian dan Wirasuasti (2014) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Suatu proses audit tidak dibenarkan memihak kepada siapapun, karena apabila seorang auditor kehilangan sikap independensinya walaupun memiliki kompetensi yang tinggi, maka auditor tersebut tidak akan bisa untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Kerjasama dengan klien yang terlalu lama bisa menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor. Selain itu juga berbagai fasilitas yang disediakan oleh kliennya selama penugasan audit untuk auditor. Sehingga auditor akan berada pada posisi yang dilematis karena mungkin akan mudah dikendalikan oleh auditan. Sehingga untuk menjaga tingkat independensi sangatlah tidak mudah agar tetap sesuai dengan jalur yang seharusnya. Independensi mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas audit ini berarti bahwa semakin auditor mampu menjaga independensinya dalam menjalankan penugasan profesionalnya maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

$H_3$  : *Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat.*

### **Pengaruh Obyektifitas Terhadap Kualitas Audit**

Pusdiklatwas BPKP (2008) menyatakan bahwa prinsip obyektifitas mengharuskan auditor bersikap adil, tidak memihak, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya.

Penelitian Ayuningtias dan Pamudji (2012) pada auditor yang bekerja di Inspektorat Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Pekalongan dan Kabupaten Salatiga menunjukkan bahwa obyektifitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian ini didukung oleh penelitian Sukriah, dkk.,(2009); Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

*H<sub>4</sub> : Obyektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat.*

### **Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Audit**

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil (Mulyadi, 2002).

Penelitian yang dilakukan oleh Mabruri dan Winarna, (2010) pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat tingkat kota/kabupaten atau Bawasda di Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, dan Wonogiri berhasil membuktikan bahwa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas dan Pamudji, (2012); Oklivia dan Marlinah, (2014); Musdar, (2014); Prasetyo, (2016); dan Badjuri, (2012) yang menyatakan bahwa Integritas merupakan perwujudan dari kejujuran auditor dalam melakukan penugasan secara profesional, dengan kejujuran dalam mengungkapkan temuan audit maka kualitas hasil pemeriksaan akan terjaga. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya (Pusdiklatwas BPKP, 2008)

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

*H<sub>5</sub> : Integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat.*

### **Pengaruh Motivasi Terhadap Kualitas Audit**

Penelitian yang dilakukan oleh Efendy (2010) pada aparat Inspektorat Kota Gorontalo, menyatakan bahwa motivasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Demikian pula dengan penelitian Suli, (2009) dan Wirasuasti (2014) turut mendukung hasil penelitian ini. Goleman (2001) dalam Efendy (2010) menyatakan bahwa hanya motivasi yang akan membuat seseorang mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Respon atau tindak lanjut yang tidak tepat terhadap laporan audit dan rekomendasi yang dihasilkan akan dapat menurunkan motivasi aparat untuk menjaga kualitas audit.

Wirasuasti (2014), menyatakan bahwa seorang auditor yang melakukan audit dengan baik maka akan mendapatkan pengakuan yang baik juga dari lingkungannya. Begitupun juga dengan suatu badan/organisasi independen yang bertugas melakukan pemeriksaan maupun pengawasan terhadap pengelolaan keuntungan daerah yang dalam hal ini adalah inspektorat. Apabila aparat pemeriksa yang berada di dalamnya mempunyai motivasi yang tinggi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah, maka pemeriksa yang berada pada inspektorat maupun inspektorat itu sendiri akan mendapatkan pengakuan yang baik dan kepercayaan yang tinggi terhadap badan/organisasi tersebut dari stakeholder. Dalam modul Pusdiklatwas BPKP (2007) tentang kepemimpinan seorang ketua tim harus mampu memotivasi anggotanya, sehingga Tim dapat dikembangkan jika para anggota di dalam tim

(termasuk ketuanya) merasa puas bekerja dan ada motivasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya dalam modul Pusdiklatwas BPKP (2008) tentang Supervisi audit, menyatakan bahwa dalam suatu tim yang melaksanakan audit perlu tercipta suasana yang memberikan motivasi kerja, hal ini merupakan salah satu tugas pokok dari supervisor atau pengendali teknis. Sehingga adanya supervisi yang baik dari ketua tim terhadap anggota tim serta supervisi dari pengendali teknis kepada tim audit maka akan menambah semangat dari auditor/aparat untuk meningkatkan kualitas auditnya.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

$H_6$  : *Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat.*

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah metode kuantitatif. Menurut. Berdasarkan hubungan antara variabel yang diteliti, maka penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal yaitu hubungan yang bersifat sebab-akibat. Jadi penelitian ini akan menguji pengaruh variabel independen yaitu kompetensi, pengalaman, independensi, obyektifitas, integritas dan motivasi terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit.

### **Populasi Sampel, Besaran Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah auditor yang berada di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara sejumlah 52 orang auditor dan 28 orang calon auditor. Sampel penelitian ini adalah auditor yang berada di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara sejumlah 37 orang auditor yang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD dan 23 orang calon auditor. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan *purposive/judgement sampling* yaitu auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD dan calon auditor yaitu calon Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD yang telah mengikuti serta telah lulus sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD. *Judgement sampling* adalah salah satu jenis *purposive sampling* di mana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian (Kuncoro, 2013). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data diperoleh melalui kuesioner yang langsung disebarkan kepada para responden. Setiap jawaban dari pernyataan dalam kuisisioner tersebut telah ditentukan skornya berdasarkan skala Likert 5 poin yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-Ragu, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukan sesuai dengan kondisi mereka yang sesungguhnya. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014).

### **Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Obyek dalam penelitian ini mengambil lokasi di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara dengan waktu penelitian selama 1 (satu) bulan yaitu selama bulan Agustus 2016.

### **Klasifikasi Variabel Dan Defenisi Operasional Variabel**

#### **Klasifikasi Variabel**

Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel independen yang terdiri dari kompetensi, pengalaman, independensi, obyektifitas, integritas, dan motivasi terhadap variabel dependen yaitu kualitas hasil audit.

#### **Definisi Operasional Variabel**

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah kompetensi, pengalaman, independensi, obyektifitas, integritas, dan motivasi. Sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit APIP.

Tabel 4.3. Operasionalisasi Variabel dan Skala Pengukuran Variabel			
Variabel	Dimensi	Indikator	No. Item Pernyataan
Kompetensi (X <sub>1</sub> ) <b>Perka BPKP No. PER-211/K/JF/2010 (2010); Government Internal Audit Profession (2007)</b>	Kompetensi Inti	Manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola sektor publik	1-7
		Strategi Pengawasan	8-12
		Pelaporan Hasil Pengawasan	13-14
		Sikap Profesional	15-18
	Kompetensi Pendukung	Komunikasi	19-21
		Lingkungan Pemerintahan	22
	Kompetensi Manajerial	Manajemen Pengawasan	23-24
Pengalaman (X <sub>2</sub> ) <b>Ardana, dkk (2012); Yuniarsih dan Suwatno (2013)</b>	Lamanya bekerja sebagai auditor		1-6
	Banyaknya Tugas Pemeriksaan		7-14
Independensi (X <sub>3</sub> ) <b>Mulyadi (2002); Arens dkk (2015); The Institute of Internal Auditors (2012)</b>	Independensi penyusunan program		1-3
	Independensi pelaksanaan pekerjaan		4-6
	Independensi pelaporan		7-9
	Gangguan intern		10-13
	Gangguan ekstern		14-15
Obyektivitas (X <sub>4</sub> ) <b>Mulyadi (2002); Arens dkk (2015); The Institute of Internal Auditors (2012)</b>	Bebas dari benturan kepentingan		1-4
	Pengungkapan kondisi sesuai fakta		5-8
Integritas (X <sub>5</sub> ) <b>Mulyadi (2002); Arens dkk (2015);</b>	Kejujuran APIP		1-3
	Keberanian APIP		4-6
	Sikap Bijaksana APIP		7-9
	Tanggungjawab APIP		10-14
Motivasi (X <sub>6</sub> ) <b>Ardana, dkk (2012); Goleman (2001); Larkin (1990)</b>	Tingkat Aspirasi: Urgensi Audit yang Berkualitas		1-4
	Ketangguhan		5
	Keuletan		6-7
	Konsistensi		8-9
	Tunjangan		10
	Rewaard		11
	Lembur		13
	Suasana kerja		14-18
Kualitas Audit (Y) <b>DeAngelo (1981); PCAOB (2013), IAASB(2013)</b>	Kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit		1-5
	Keakuratan temuan audit		6-7
	Sikap skeptic		8
	Kejelasan laporan		9
	Kualitas hasil laporan pemeriksaan		10-16
	Nilai rekomendasi		17
	Manfaat audit		18
		Tindak lanjut hasil audit	<b>19-20</b>

## Instrumen Penelitian

### Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas adalah untuk menguji dan mengetahui sah tidaknya instrumen kuisioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti (Ghozali, 2006). Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung nilai *cronbach alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Reliabilitas menunjukkan konsistensi stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran). Reliabilitas

berbeda dengan validitas karena yang pertama memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedangkan yang kedua lebih memperhatikan masalah ketepatan (Kuncoro, 2013).

### **Teknik Analisis Data**

#### **1. Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran data dengan kriteria nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness*

#### **2. Uji Asumsi Klasik**

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari: uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

#### **3. Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda. Analisis linear berganda menurut Sugiyono dan Wibowo (2002:347) beberapa variable independen digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen. Sehingga analisis regresi linear berganda yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut :

Fungsi Regresi Berganda :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \epsilon$$

Sementara itu, langkah-langkah untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu kompetensi, pengalaman, independensi, integritas, obyektifitas dan motivasi Auditor dilakukan dengan uji simultan dan uji parsial.

## **ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Uji Validitas dan Realibilitas**

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah pertanyaan/ Pernyataan dalam kuesioner telah sesuai mengukur konsep yang dimaksud. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor total. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor total mempunyai tingkat signifikansi  $< 0,05$ , maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya (Ghozali, 2006). Hasil uji validitas atas Kompetensi, Pengalaman, Independensi, Obyektifitas, Integritas, Motivasi dan Kualitas Audit. Dimana jumlah Responden 60 orang artinya  $n = 60$ . Dari nilai  $r_{tabel}$   $n = 60$  yaitu 0,254 (5%) dan 0,330 (1%). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan menggunakan teknik *Cronbach Alpha*. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan atau *Cronbach Alpha*  $\geq 0,60$  (Ghozali, 2006).

#### **Uji Asumsi Klasik**

##### **Uji Normalitas**

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yakni : jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5.13 dengan menggunakan Uji *Kolmogorov Smirnov* diatas, maka tingkat signifikansi residual error data sebesar 0.726 atau berada diatas 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual error data terdistribusi dengan normal.

##### **Uji Multikolinearitas**

Dasar pengambilan keputusan pada uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melihat nilai Tolerance (1) Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terdapat multikolinearitas terhadap data yang diuji. (2) Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya terdapat multikolinearitas terhadap data yang diuji. Melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) (1) Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji. (2) Jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka



artinya terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji. Pada tabel 5.14, Dengan melihat nilai tolerance lebih besar dari 0,10 pada setiap variabel independen yaitu Kompetensi 0,960, pengalaman 0,704, independensi 0,780, obyektifitas 0,423, integritas 0,475 dan motivasi 0,876 serta juga dengan melihat nilai VIF setiap variabel independen lebih kecil dari 10,00, yaitu Kompetensi 1,042, pengalaman 1,420, independensi 1,282, obyektifitas 2,366, integritas 2,106 dan motivasi 1,142, maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel penelitian bebas efek multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas yakni :

1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas
2. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas.

Variabel independen yaitu Kompetensi 0,521, pengalaman 0,902, independensi 0,224, obyektifitas 0,190, integritas 0,946 dan motivasi 0,182, tingkat signifikansi variabel independen terhadap residual error data berada diatas 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians data penelitian bebas efek heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis data menggunakan analisis regresi Linear berganda dapat dilihat pada table 5.16 berikut ini :

**Tabel 5.16 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.588	11.348		.316	.753
(X1) Kompetensi	.005	.074	.006	.066	.948
(X2) Pengalaman	.105	.122	.084	.856	.396
(X3) Independensi	.116	.106	.102	1.096	.278
(X4) Obyektifitas	.589	.277	.268	2.127	.038
(X5) Integritas	.451	.149	.359	3.019	.004
(X6) Motivasi	.310	.098	.276	3.158	.003

a. Dependent Variable: Kualitas Audit

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan software SPSS version 22.00 seperti pada tabel 5.16 maka persamaan regresi berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

$$Y = 3,588 + 0,005X_1 + 0,105 X_2 + 0,116 X_3 + 0,589X_4 + 0,451 X_5 + 0,310X_6 + e$$

Persamaan regresi berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Dengan Interpretasi Konstanta  $\alpha$  sebesar 3,588 menunjukkan bahwa apabila kompetensi( $X_1$ ), pengalaman( $X_2$ ), independensi( $X_3$ ), obyektifitas( $X_4$ ), integritas ( $X_5$ ) dan motivasi ( $X_6$ ) audit dianggap konstan atau sama dengan nol (0), maka besarnya kualitas audit aparat Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara 3,588 satuan skor.
- b. Nilai  $\beta_1$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_1$  (kompetensi) sebesar 0,005 ini berarti bahwa jika kompetensi meningkat sebesar 1 satuan skor, maka akan mengalami peningkatan nilai kualitas audit sebesar 0,005 satuan skor dari kondisi sebelumnya, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hal ini berarti pula bahwa terdapat hubungan yang positif dan searah antara kompetensi dengan kualitas audit. Dengan kata lain adanya peningkatan pada variabel kompetensi ( $X_1$ ), akan meningkatkan kualitas audit (Y) Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.

- c. Nilai  $\beta_2$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_2$  (pengalaman) sebesar 0,105 ini berarti bahwa jika pengalaman meningkat sebesar 1 satuan skor, maka akan mengalami peningkatan nilai kualitas audit sebesar 0,105 satuan skor dari kondisi sebelumnya, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hal ini berarti pula bahwa terdapat hubungan yang positif dan searah antara pengalaman dengan kualitas audit. sehingga adanya peningkatan pada variabel pengalaman ( $X_2$ ), akan meningkatkan kualitas audit (Y) Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.
- d. Nilai  $\beta_3$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_3$  (independensi) sebesar 0,116 ini berarti bahwa jika independensi meningkat sebesar 1 satuan skor, maka akan mengalami peningkatan nilai kualitas audit sebesar 0,116 satuan skor dari kondisi sebelumnya, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hal ini berarti pula bahwa terdapat hubungan yang positif dan searah antara independensi dengan kualitas audit. sehingga adanya peningkatan pada variabel independensi ( $X_3$ ), akan meningkatkan kualitas audit (Y) Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.
- e. Nilai  $\beta_4$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_4$  (obyektifitas) sebesar 0,589 ini berarti bahwa jika obyektifitas meningkat sebesar 1 satuan skor, maka akan mengalami peningkatan nilai kualitas audit sebesar 0,589 satuan skor dari kondisi sebelumnya, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hal ini berarti pula bahwa terdapat hubungan yang positif dan searah antara obyektifitas dengan kualitas audit. sehingga adanya peningkatan pada variabel obyektifitas ( $X_4$ ), akan meningkatkan kualitas audit (Y) Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.
- f. Nilai  $\beta_4$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_5$  (integritas) sebesar 0,451 ini berarti bahwa jika integritas meningkat sebesar 1 satuan skor, maka akan mengalami peningkatan nilai kualitas audit sebesar 0,451 satuan skor dari kondisi sebelumnya, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hal ini berarti pula bahwa terdapat hubungan yang positif dan searah antara integritas dengan kualitas audit. Dengan kata lain adanya peningkatan pada variabel integritas ( $X_5$ ), akan meningkatkan kualitas audit (Y) Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.
- g. Nilai  $\beta_6$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_6$  (motivasi) sebesar 0,005 ini berarti bahwa jika motivasi meningkat sebesar 1 satuan skor, maka akan mengalami peningkatan nilai kualitas audit sebesar 0,005 satuan skor dari kondisi sebelumnya, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hal ini berarti pula bahwa terdapat hubungan yang positif dan searah antara motivasi dengan kualitas audit. Dengan kata lain adanya peningkatan pada variabel motivasi ( $X_6$ ), akan meningkatkan kualitas audit (Y) Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.

### Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Dari hasil output uji koefisien regresi secara simultan/bersama-sama (Uji F) dapat diketahui nilai F pada Tabel 5.17 berikut :

**Tabel 5.17 Hasil Pengujian Simultan (Uji F)**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2144.664	6	357.444	16.034	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1181.519	53	22.293		
	Total	3326.183	59			

a. Dependent Variable: Kualitas Audit

b. Predictors: (Constant), kompetensi, pengalaman, independensi, obyektifitas, integritas, motivasi

*Sumber: Hasil Olah data dengan SPSS*

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 5.17, menunjukkan bahwa hasil uji F diperoleh  $F_{hitung} = 16,034$ , sehingga  $F_{hitung} = 16,034 > F_{tabel} = 2,39$  dengan menggunakan tingkat nilai signifikansi  $P = 0,000 < \alpha = 0,005$  sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi ( $X_1$ ), pengalaman( $X_2$ ), independensi ( $X_3$ ),

obyektifitas ( $X_4$ ), integritas ( $X_5$ ) dan motivasi ( $X_6$ ) secara bersama-sama menunjukkan hasil signifikan yang berarti bahwa model penelitian adalah fit dan seluruh variabel independen secara simultan adalah signifikan terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit

#### Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen (X) secara individual terhadap variabel dependen (Y) secara parsial. Hasil uji t ini pada output SPSS dapat dilihat pada tabel 5.18 berikut :

**Tabel 5.18**  
**Hasil Pengujian Parsial (Uji t)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.588	11.348		.316	.753
X1	.005	.074	.006	.066	.948
X2	.105	.122	.084	.856	.396
X3	.116	.106	.102	1.096	.278
X4	.589	.277	.268	2.127	.038
X5	.451	.149	.359	3.019	.004
X6	.310	.098	.276	3.158	.003

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Olah data dengan SPSS

#### Uji Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*)

Tabel berikut ini merupakan hasil uji koefisien korelasi dan determinasi atas penelitian yang dilakukan.

**Tabel 5.19 Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.803 <sup>a</sup>	.645	.605	4.72153

a. Predictors: (Constant), X6, X1, X5, X3, X2, X4

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Olah data dengan SPSS

Berdasarkan tabel 5.19, koefisien korelasi (R) sebesar 0,803 menunjukkan bahwa hubungan (korelasi) antara variabel independen dengan variabel dependen merupakan hubungan yang sangat kuat. Artinya kompetensi, pengalaman, independensi, obyektifitas, integritas dan motivasi mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap kualitas audit, karena mendekati nilai 1. Santoso (2001) menyatakan bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan *adjusted R<sup>2</sup>* sebagai koefisien determinasi. Jika nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sama dengan 0, maka variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya *adjusted R<sup>2</sup>* sama dengan 1, maka variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. Berdasarkan tabel 5.19, nilai *adjusted R<sup>2</sup>* adalah 0,605 yang artinya peningkatan kualitas audit sebesar 60,5% dipengaruhi oleh kompetensi, pengalaman, independensi, obyektifitas, integritas dan motivasi, sedangkan sisanya 39,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit**

Tidak adanya pengaruh signifikan antara kompetensi terhadap kualitas audit karena auditor/aparat yang ada di inspektorat memiliki berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda – beda dimana tidak semuanya memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan belum meratanya keikutsertaan dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian tentang audit.

Simpulan dari penelitian ini bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Artinya kompetensi auditor yang rendah akan berdampak pada rendahnya kualitas audit yang dihasilkan. Sehingga diharapkan auditor inspektorat mampu mengembangkan potensi diri dalam aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku melalui pendidikan dan pelatihan tentang audit agar bisa meningkatkan kualitas audit.

### **Pengaruh pengalaman terhadap Kualitas Audit**

Ternyata banyaknya penugasan audit dan lamanya pengalaman kerja yang dimiliki auditor bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya sehingga pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit Auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, karena faktor internal dalam diri auditor juga turut mempengaruhi kualitas audit. Oleh karena itu diharapkan auditor tidak berpuas diri dengan lamanya pengalaman audit yang dimiliki dengan tetap mengikuti perkembangan peraturan perundang – undangan yang ada serta tetap mengikuti kode etik dan standar audit yang telah ditetapkan untuk terus mempertahankan kualitas audit.

### **Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit**

Independensi merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas. Independensi itu sendiri bukan saja saat pelaksanaan audit namun dimulai dari perencanaan program audit yang harus bebas dari intervensi pihak manapun. Bagi auditor/aparat inspektorat sebagai bagian dari aparat pengawasan internal pemerintah, yang pada dasarnya melakukan audit terhadap Pemerintah Daerah dan *auditeenya* adalah sesama PNS yang tidak menutup kemungkinan adalah teman ataupun saudara serta juga adanya intervensi dari pihak lain yang bisa memungkinkan adanya pembatasan ruang lingkup pelaksanaan audit itu sendiri. Sehingga mutlak bagi aparat inspektorat memiliki independensi pada saat melakukan penugasan profesionalnya.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa dari penelitian ini independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Artinya rendahnya independensi auditor akan berdampak pada rendahnya kualitas audit yang dihasilkan.

### **Pengaruh obyektifitas terhadap kualitas audit**

Sebagaimana yang diatur dalam Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang kode etik APIP menyebutkan bahwa “Obyektifitas diperlukan agar Auditor APIP menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.”

Adanya pengaruh positif dan signifikan variabel obyektifitas terhadap kualitas audit dalam penelitian ini menunjukkan, bahwa semakin tinggi obyektifitas yang dimiliki oleh auditor pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik pula

### **Pengaruh Integritas terhadap Kualitas Audit**

Adanya pengaruh positif dan signifikan variabel integritas terhadap kualitas audit dalam penelitian ini menunjukkan, bahwa semakin tinggi integritas yang dimiliki oleh auditor

Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik pula. Dimana integritas tersebut harus didukung oleh kepribadian auditor yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab.

### **Pengaruh Motivasi terhadap Kualitas Audit**

Dalam modul Pusdiklatwas BPKP (2007) tentang kepemimpinan seorang ketua tim harus mampu memotivasi anggotanya, sehingga Tim dapat dikembangkan jika para anggota di dalam tim (termasuk ketuanya) merasa puas bekerja dan ada motivasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya dalam modul Pusdiklatwas BPKP (2008) tentang Supervisi audit, menyatakan bahwa dalam suatu tim yang melaksanakan audit perlu tercipta suasana yang memberikan motivasi kerja, hal ini merupakan salah satu tugas pokok dari supervisor atau pengendali teknis. Sehingga adanya supervisi yang baik dari ketua tim terhadap anggota tim serta supervisi dari pengendali teknis kepada tim audit maka akan menambah semangat dari auditor/aparat untuk meningkatkan kualitas auditnya. Adanya pengaruh positif dan signifikan variabel motivasi terhadap kualitas audit dalam penelitian ini menunjukkan, bahwa semakin baik motivasi yang dimiliki oleh Auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik pula.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, pengalaman, independensi, obyektifitas, integritas dan motivasi terhadap kualitas audit Auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. kompetensi berpengaruh positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit artinya kompetensi auditor yang rendah akan berdampak pada rendahnya kualitas audit.
2. Pengalaman berpengaruh positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit sehingga dapat diartikan bahwa lamanya pengalaman kerja yang dimiliki bukan jaminan dapat meningkatkan kualitas audit.
3. Independensi berpengaruh positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Artinya rendahnya independensi akan berdampak pada rendahnya kualitas audit.
4. Obyektifitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit sehingga semakin tinggi obyektifitas maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik.
5. Integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit artinya semakin baik integritas maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.
6. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit sehingga semakin tinggi motivasi maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik.

### **Saran**

Saran untuk penelitian berikutnya:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian, dengan mengambil sampel pada Inspektorat kabupaten dan kota yang ada di provinsi Sulawesi Utara.
2. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan menggunakan metode – metode campuran kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian, dimana metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan hasil yang diperoleh dari metode kuantitatif sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kuesioner lebih lanjut mengenai supervisi audit, kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, audit investigative, dan probity audit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardana.I.K., N.W. Mujiati, dan I.W.M, Utama, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manuasia*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu
- Arens. A. A., R.J. Elder., dan M.S, Beasley. 2015. *Auditing dan Jasa Assurance*. Jilid1. Terjemahan. Edisi kelimabelas. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) No. S-879/D2/JF/2013 tentang *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*.
- Asih, Dwi Ananing Tyas. 2006. *Pengaruh Pengalaman Terhadap Peningkatan Keahlian Auditor Dalam Bidang Auditing*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Ayuningtyas H. Y. 2012. *Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Auditor Inspektorat Kota/Kabupaten di Jawa Tengah)*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang
- BPKP, 2007. *Kepemimpinan. Edisi Keempat*. Diklat Penjenjangan Auditor Tingkat Ketua Tim.
- , 2008. *Supervisi Audit. Edisi Keempat*. Diklat Pembentukan Auditor Pengendali Teknis.
- , 2008. *Kode Etik dan Standar Audit. Edisi Kelima*. Diklat Pembentukan Auditor Ahli.
- , 2009. *Auditing. Edisi Kelima*. Diklat Pembentukan Auditor Ahli.
- , 2013. *Pimpinan APIP Se-Sulawesi Sepakat Tingkatkan Kapabilitas Auditor*. <http://www.bpkp.go.id/berita/read/11063/25/> diakses tanggal 10 Maret tahun 2016
- Badjuri. A, 2012. “*Analysis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit Sektor Publik (Studi Empiris Pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah)*”. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Nopember 2012, Hal: 120 - 135 Vol. 1, No. 2
- Cahyat, A. 2004. *Sistem Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten*. Pembahasan Peraturan Perundangan di Bidang Pengawasan. Governance Brief Number 3
- DeAngelo. L.E. 1981a. *Auditor independence, “low balling” and disclosure regulation*. *Journal of Accounting and Economics* 3, 113-127
- DeAngelo, L.E. 1981b. “*Auditor Size and Audit Quality*”. *Journal of Accounting and Economics*. July. pp. 183—199. University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104, USA
- Efendy, Muh. Taufiq. 2010. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Gorontalo)*.Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro : Jawa Tengah.
- Estikawati F. 2016. *Pengaruh Keahlian, Independensi, Etika Terhadap Kualitas Audit Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung*. Tesis. Program Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi 3. BP Undip. Semarang.
- Government Internal Audit Profession. 2007. *Government Internal Audit Competency Framework*
- Government Accountability Office. (2011). *Government auditing Standard*. Revision
- Hanjani, A., 2014. *Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Auditor, Fee Audit, Dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor KAP Di Semarang)*. Skripsi

- tidak dipublikasikan. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Herliansyah, Yudhi. Meifida Ilyas. 2006. *Jurnal. Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Penggunaan Bukti Tidak Relevan Dalam Auditor Judgment*. SNA IX. Padang.
- Harhinto, T. 2004. *Pengaruh Keahlian dan Independensi terhadap Kualitas Audit, Studi Empiris pada KAP di Jawa Timur*. Tesis tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro Semarang.
- The Institute of Internal Auditors. (2012). *International standards for the professional practice of internal auditing (standards)*
- IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board). 2013. *A Framework of Audit Quality*.
- Kuncoro, M. 2014. *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- , 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi keempat. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Lamuda. 2013. *Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas, Kompetensi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Audit*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Lowensohn dan Collins. 2001. *The Role and Perceptions of Independent Audit Partners in the Governmental Audit Market*. Journal of Accounting and the Public Interest. Volume 1
- Lubis. 2009. *Pengaruh Keahlian, Independensi, Kecermatan Professional dan Kepatuhan Pada Kode Etik Terhadap Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat Sumatera Utara*. Tesis. Magister Sains Ilmu Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
- Luthans F. 2011. *Organizational Behavior : An Evidence-Based Approach*. Twelfth Edition. New York : McGraw-Hill/Irwin
- Mabruri dan Winarna, 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah*. Symposium nasional akuntansi XIII
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Martini. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit*. Universitas Budi Luhur. Jakarta
- Masrizal. 2010. *Pengaruh Pengalaman Dan Pengetahuan Audit Terhadap Pendeteksian Temuan Kerugian Daerah (Studi Pada Auditor Inspektorat Aceh)*. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. Volume 3 nomor 2 juli 2010 hal. 173 - 194
- McClave,J.T., P.J, Benson, dan T. Sincich. 2011. *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jilid 1. Terjemahan. Edisi kesebelas. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Mulyadi . 2002. *Auditing*. Jakarta : Penerbit Salemba Barat
- Musdar, Muh., Syarifuddin, Arifuddin, (2014). *Analisis faktor yang mempengaruhi kualitas audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) : Studi Empiris pada Inspektorat kabupaten Wakatobi*. Tesis. Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makasar
- Mufidah. 2015. *Analisis Pengaruh Independensi, Objektifitas, Integritas, kompeensi, Pengalaman Kerja dan Skeptisme Profesional terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jambi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja Volume 2 tahun 2015.
- Muflihini, M. Hizbul. 2009. *Aplikasi dan Implikasi Teori Behaviorisme dalam Pembelajaran (Analisis Strategis Inovasi Pembelajaran)*. Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. 1 No.1 hal : 123.

- Nataline. 2007. *Pengaruh Batasan Waktu Audit, Pengetahuan Akuntansi dan Auditing, Bonus dan Pengalaman terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Semarang*. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. UNNES.
- Nirwana. 2014. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Salatiga)*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.
- Okliwia dan Marlinah. 2014. *Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Faktor – Faktor Dalam Diri Auditor lainnya Terhadap Kualitas Audit*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 16, No. 2, Desember 2016 : 143 - 157
- Pasaribu Sandi H. 2015. *Pengaruh kecakapan professional, Independensi dan lama bekerja terhadap hasil pemeriksaan auditor internal pada Inspektorat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara*. Tesis. Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi
- PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board). 2013. *Standing Advisory Group Meeting Discussion - Audit Quality Indicators*.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang *Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara*
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang *Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara*.
- Peraturan Meteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang *Kode Etik Aparat Pengaweas Internal Pemerintah*.
- Peraturan Meteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang *Standar Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tahun 2009 tentang *Pedoman Kendali Mutu Audit*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang *Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia nomor 16 tahun 2015 tentang *Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*.
- Perdani dan Suranta. 2013. *Pengaruh kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Investeigatif pada Kantor Perwakilan BPK-RI Yogyakarta*. Fakultas Ekonomi Universitas sebelas maret. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 14 no. 1 Februari 2013.
- Prasetyo, D. F. 2016. *Pengaruh Independensi, Kompetensi, Integritas, Objektifitas dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Surakarta. Surakarta
- Robbins, S. P., 1996. *Organizational Behavior Concept Controversies applications*. Seventh edition. England : Pearson Education Limited
- Santoso, Singgih. 2001. *SPSS Versi Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Samelson, D., et al. 2006. *The Determinants Of Perceived Audit Quality And Auditee Satisfaction In Local Government*. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, 18 (2), 139 - 166



- Sumiok C. 2012. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara*. Tesis. Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Susmanto, B. 2008. *Pengawasan Intern pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat*. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. <http://www.menkokesra.go.id/content/view/117/323/> diakses tanggal 10 Maret tahun 2016
- Sukriah, I, B. Akram, dan A. Inapty. 2009. “*Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektivitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan*”. Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. 2007. *Modul Manajemen Fungsi Audit Internal Sektor Publik*
- Tinangon, J. J. 2012. “*Pengaruh Motivasi, Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Kinerja Auditor Inspektorat Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara*”. Disertasi. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanudin. Makasar
- Tubb, Richard, M. 1992. “*The Effect of Experience on the Auditors Organization and Amount of Knowledge*.” *The Accounting Review*, (October): vol. 67. No. 4: 783-801.
- Wirasuasti, N. W., 2014. “*Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangli dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng)*”. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014)
- Yuniarsih, T., dan Suwatno. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Zawitri, S. 2009. “*Analisis Faktor-Faktor Penentu Kualitas Audit yang dirasakan dan Kepuasan Auditee di Pemerintahan Daerah (Studi Lapangan pada Pemerintah Daerah KalBar tahun 2009)*”. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro : Jawa Tengah.

# **PENGARUH PERENCANAAN, KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

Deiby Isilda Alumbida, David P.E. Saerang, Ventje Ilat  
(email: [deibysisilda@gmail.com](mailto:deibysisilda@gmail.com))

## **ABSTRACT**

*The absorption of the budget is a very important part in the Government's financial management both central government or local governments, it is because the level of absorption of the budget can be used as an indicator of the extent of the commitment of the Government apparatus to manage the budget in accordance with the planning. Budgets which are absorbed based on planning will provide the maximum benefit to the good economy, is enabled encourage the improvement of welfare for the area which is one of the nation's national goal of Indonesia. This research was conducted in the Talaud Islands Regency with the purpose of analyzing the influence of planning, capacity of human resources and organizational commitment toward regional budget absorption rate either simultaneously or partial. This research uses 3 independent variables consist of Planning ( $X_1$ ), Human Resource Capacity ( $X_2$ ), Organizational Commitment ( $X_3$ ) the dependent variable is the Absorption Of The Budget ( $Y$ ). Data analysis was endured by using multiple linear regression analysis. The results indicates that the planning, capacity of human resources and organizational commitment affect the absorption of the regional budget of Talaud Islands Regency Government. However, only partially significantly influence planning while the capacity of the human resources and the commitment do not significantly influence the absorption of budget. Multiple linear regression analysis results show the planning, human resource capacity and commitment of the organization have a positive effect to the absorption of the budget. While the results of the analysis show that the determination of the coefficient of 36.2% absorption rate is affected by the budget planning, capacity of human resources and organizational commitment on the other hand 63.8% absorption rate is influenced by other variables which are not included in this research.*

*Keywords : Teori Institusional, Teori Pengabdian, Social Learning Theory*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke empat adalah memajukan kesejahteraan umum. Sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemerintah pusat melakukan kebijakan desentralisasi dimana sebagian wewenangnya diserahkan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah memerlukan pendanaan memadai yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), dan pada saatnya harus dikeluarkan melalui Kas Negara/Kas Daerah.

Kebijakan desentralisasi di Indonesia pertama kali digulirkan pada akhir tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yang lebih dikenal dengan undang-undang otonomi daerah. Namun meski telah ditetapkan sejak tahun 1999, UU ini baru berlaku efektif ditahun 2001. Secara umum, desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ada dalam wilayahnya, salah satunya adalah desentralisasi fiskal dimana tiap daerah diberi keleluasaan untuk mengelola keuangannya masing-masing. Desentralisasi fiskal pada dasarnya dapat mendorong peningkatan efisiensi belanja karena

Pemerintah daerah lebih tahu kebutuhan masyarakatnya daripada Pemerintah Pusat. Komitmen pemerintah pusat dalam menerapkan desentralisasi fiskal makin nampak, hal ini terlihat dari peningkatan dana transfer setiap tahun. Namun pada saat pemerintah pusat terus berupaya untuk menjalankan komitmen dalam menerapkan desentralisasi fiskal dengan meningkatkan dana transfer ke daerah disetiap tahun anggaran, sebuah fenomena yang menarik justru terjadi di daerah-daerah, yaitu minimnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sebagian besar daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejak dimekarkan dari Kabupaten Sangihe pada tanggal 2 Juli 2002 yang ditetapkan melalui UU No. 8 Tahun 2002, Kabupaten Talaud tidak terlepas dari persoalan realisasi anggaran. Dalam sistem penganggaran berbasis kinerja minimnya penyerapan anggaran memang tidak dapat dijadikan sebagai indikator buruknya kinerja birokrasi, akan tetapi kondisi perekonomian saat ini masih sangat bergantung pada konsumsi pemerintah, sehingga belanja pemerintah turut menjadi salah satu penggerak roda perekonomian di daerah yang pada akhirnya mendorong terciptanya *multiplier effect* bagi daerah tersebut sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya dalam hal ini pada Kabupaten Kepulauan Talaud. Selain itu, adanya dana yang tidak terserap hingga diakhir tahun anggaran menunjukkan adanya inkonsistensi antara perencanaan anggaran dan realisasi. Meskipun dana tersebut dapat dimanfaatkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, tetapi berdasarkan konsep *time value of money* dana tersebut berpotensi berkurang atau bahkan kehilangan manfaat belanja yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Institusional**

Teori institusionalisme merupakan sebuah teori yang berangkat dari konsep-konsep dalam Sosiologi yang menjelaskan bagaimana dinamika yang terjadi di dalam sebuah organisasi yang terdiri dari sekumpulan manusia. Teori ini berasal dari para ahli filosof yunani yang telah menyadari adanya keterkaitan antarinstitusi. Pada abad ke 19-an Max Weber mencoba mengkaji birokrasi dan institusi secara sistematis. Weber melihat bahwa politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. John W. Meyer dan Brian Rowan (1977) menulis “banyak posisi, kebijakan, program dan prosedur organisasi modern dipengaruhi oleh opini publik, pandangan konstituen, pengetahuan sah melalui sistem pendidikan, prestise sosial, hukum, dan pengadilan. Paul J. Di Maggio dan Walter W. Powell (1983) berargumen bahwa teori institusional mengkritik teori ekonomi dan kontingensi yang sangat rasional, yaitu menjelaskan struktur dan fungsi organisasi dengan ukuran efisiensi. Sementara W. Richard Scott dalam rotich (2015) menjelaskan bahwa fokus teori institusional adalah mempertimbangkan proses di mana struktur yang meliputi skema, aturan, norma, dan rutinitas sebagai panduan untuk berperilaku. Jadi menurut beberapa pandangan tersebut pada intinya teori institusional menjelaskan bahwa kebijakan atau keputusan yang diambil oleh organisasi akan dipengaruhi oleh berbagai tekanan maupun kepentingan konstituen sekaligus sebagai *stakeholder* yang berlandaskan pada aspek sosial, hukum dan disiplin ilmu yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Teori institusional merupakan teori yang sangat relevan untuk memahami organisasi sektor publik (Bealing, et al. dalam Juliani 2014).

### **Stewardship Theory (Teori Pengabdian)**

Teori Stewardship menurut Donaldson & Davis dalam Raharjo (2010), mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* akan bertindak sesuai kepentingan *principal* (pemilik). Teori stewardship merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan

organisasi. Teori ini memandang manajemen sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Konsep teori ini didasarkan pada asas kepercayaan kepada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dipandang sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggung jawab.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan hubungan yang harmonis antara *stakeholders* dan manajemen dimana *stakeholders* memberikan kepercayaan penuh kepada manajemen dalam menjalankan tugas dan mengelola seluruh sumber daya yang ada, sebaliknya dari pihak manajemen mampu melaksanakan tugas dan mengelola seluruh sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggungjawab tanpa mengutamakan kepentingan pribadi tetapi berfokus kepada kepentingan bersama.

### **Social Learning Theory**

Social Learning Theory merupakan gagasan dari Albert Bandura sejak tahun 1960an. Teori ini adalah pengembangan dari teori behaviorisme yang digagas oleh Burrhus Frederic Skinner pada tahun 1930, yang secara luas dikenal dengan teori *operant conditioning*. Teori pembelajaran sosial/ *social learning theory* mengungkapkan bahwa individu dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Setiap perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berasumsi bahwa perilaku merupakan fungsi dari konsekuensi, juga mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran.

Albert Bandura adalah salah seorang behavioris yang menambahkan aspek kognitif terhadap behaviorisme. Teori belajar sosial Bandura tentang kepribadian didasarkan kepada formula bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil interaksi timbal balik yang terus menerus antara faktor-faktor penentu internal (kognisi, persepsi, dan faktor lainnya yang mempengaruhi kegiatan manusia), dan eksternal (lingkungan), proses ini disebut *reciprocal determinism*. Namun disisi lain, Bandura Bandura menyetujui keyakinan dasar behaviorisme yang mempercayai bahwa kepribadian dibentuk melalui belajar. Sejalan dengan pandangan Bandura, Mathis (2010:5) menyebutkan “*Human capital is the collective value of the capabilities, knowledge, skills, life experiences, and motivation of an organizational workforce*”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan atau kapasitas seseorang tidak hanya lahir dari kecerdasan intelektualnya saja tetapi juga melalui proses *reciprocal determinism* (determinis resiprokal atau konsep yang saling mempengaruhi) yang menghasilkan pengalaman, keterampilan yang didasari oleh kemauan untuk belajar serta motivasi seseorang untuk melakukan pekerjaan agar memberikan hasil yang maksimal.

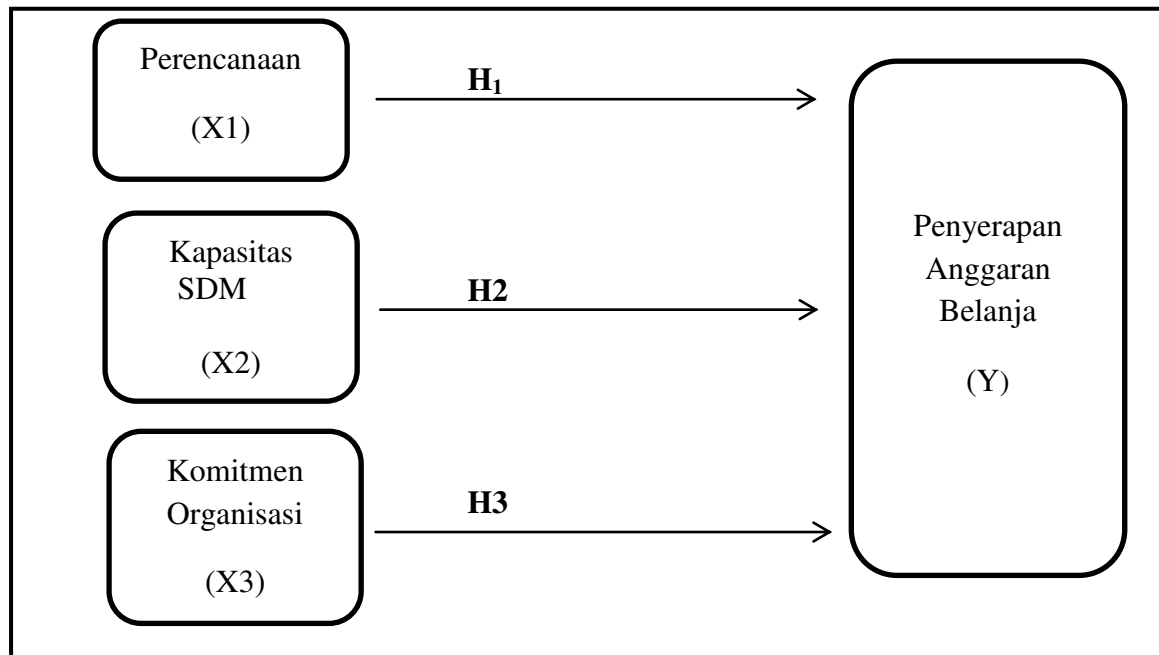
### **Kerangka Konseptual Penelitian**

Pada lingkup perekonomian daerah, konsumsi pemerintah daerah merupakan salah satu komponen yang menentukan nilai produk domestik regional bruto (PDRB), sehingga dapat dipastikan bahwa konsumsi pemerintah daerah turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Besaran konsumsi pemerintah, tergantung besarnya anggaran yang ditetapkan pada tahapan perencanaan, dan sejauh mana konsistensi dalam merealisasikan perencanaan sebagaimana tercantum pada Dokumen pelaksanaan anggaran pada instansi masing-masing yang disebut DPA-SKPD.

Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan akan berimplikasi pada penyerapan anggaran daerah, namun disisi lain, aparatur pemerintah sebagai sumber daya manusia yang terlibat dalam perencanaan anggaran sekaligus sebagai pelaksana anggaran tersebut dituntut untuk memiliki kemampuan atau kapasitas yang memadai. Sebab kualitas perencanaan anggaran ditentukan oleh kualitas sumber daya yang terlibat dalam proses perencanaan tersebut, selanjutnya sejauh mana perencanaan tersebut dapat terealisasi semua bergantung pada tingkat komitmen organisasi pemerintah selaku pengelola anggaran tersebut

dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat didalamnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dimulai dari tahap perencanaan yang terintegrasi hingga tahap pelaksanaan anggaran yang terukur oleh tingkat penyerapan anggaran tersebut hingga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat selaku *principal* (pemilik) anggaran daerah.

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengembangkan kerangka pemikiran teoritis yang mendasari penelitian ini seperti Pada Gambar 3.1 untuk mendeskripsikan alur pemikiran yang mendasari penelitian ini. Pada model atau kerangka pemikiran terlihat adanya pengaruh langsung antara variabel independen (X) terhadap Variabel dependen (Y).



**Gambar 3.1 Kerangka Konseptual**

## **HIPOTESIS**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya dan kerangka konseptual, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

### **Pengaruh Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah**

UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, perencanaan berintegrasi dengan penganggaran sebab *output* dari perencanaan adalah DPA yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan selama tahun anggaran, sehingga keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dimulai dari tahapan perencanaan.

Arif (2013) menyatakan kegagalan dalam perencanaan penganggaran akan berdampak pada tidak berjalannya program kerja pemerintah yang secara tidak langsung tentunya akan berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah. Senada dengan itu, penelitian Priatno (2013) juga menemukan Perencanaan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar. Sementara itu, penelitian Ulfa (2013) menemukan bahwa perencanaan anggaran yang belum dilakukan sesuai dengan prinsip perencanaan anggaran yang baik mengakibatkan keterlambatan pengesahan anggaran, sehingga menghambat penyerapan anggaran pada Sekretariat DPRD DKI Jakarta T.A 2010

dan 2011. Zarinah (2015) juga menemukan bahwa perencanaan berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran SKPD di Kabupaten Aceh Utara.

Perencanaan dapat dikatakan sebagai tahapan yang paling krusial dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, sebab seluruh kegiatan yang perumusan program di dalam perencanaan pada akhirnya berimplikasi pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan, sehingga keberhasilan penggunaan anggaran dimulai dari perencanaannya (Nugroho, 2015). Berdasarkan uraian teori dan penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis ke 1 adalah sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Perencanaan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja daerah.

### **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah**

UU Nomor 22 tahun 1999 pasal 8 secara implisit menyebutkan bahwa “desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia”. Dengan kata lain sumber daya manusia adalah faktor determinan keberhasilan desentralisasi. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Sumber Daya Manusia adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi (Mathis dan Jackson, 2006). Faktor kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran adalah staf yang berpengalaman dan mempunyai motivasi. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Walaupun menggunakan peralatan yang canggih dan handal namun tanpa dibarengi peran aktif sumber daya manusia yang memadai, peralatan tersebut tidak akan bekerja secara maksimal (Zarinah, 2015).

Penelitian Herryanto (2012) menemukan bahwa minimnya kapasitas SDM merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja kementerian/lembaga di wilayah Jakarta. Hal senada ditemukan dalam Penelitian Arif (2013) bahwa minimnya kapasitas SDM merupakan faktor penyebab minimnya penyerapan APBD T.A 2011 di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Penelitian Zarinah (2015) juga menemukan Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran SKPD di Kabupaten Aceh Utara. Hal berbeda ditemukan dalam penelitian Priatno (2013) dimana Sumber Daya Manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar. Berdasarkan uraian teori dan penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis ke 2 adalah sebagai berikut.

H<sub>2</sub>: Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja daerah.

### **Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah**

Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge dalam Rumenser (2014) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Komitmen merupakan seluruh upaya yang sinergi dari seluruh anggota organisasi itu sendiri dalam mewujudkan tujuan organisasinya sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Sedangkan komitmen organisasi menurut Noe (2000) adalah tingkatan dimana seseorang memosisikan dirinya pada organisasi dan kemauan untuk melanjutkan upaya pencapaian kepentingan organisasinya. Yang dimaksud organisasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sedangkan anggotanya merupakan Aparat Sipil Negara di daerah.

Penelitian Arif (2013) menemukan bahwa lemahnya komitmen organisasi merupakan salah satu faktor penyebab minimnya penyerapan APBD di Kota Dumai. Hal yang sama juga ditemukan dalam Penelitian Juliani (2014) dimana komitmen manajemen berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja barang dan jasa pada pemerintah daerah

Istimewa Yogyakarta. Dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan setiap anggota memberdayakan seluruh kemampuan atau sumber daya yang dimilikinya, sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan – pekerjaan besar akan sulit dilaksanakan. Berdasarkan uraian teori dan penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis ke 3 adalah sebagai berikut.  
 $H_3$  : Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja daerah

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Pendekatan Penelitian**

Ditinjau dari jenis data, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, merupakan pola penelitian yang pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dilihat dari hubungan antar variabel, penelitian ini merupakan penelitian korelasi. Penelitian korelasi juga sering disebut penelitian sebab akibat dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Dimana yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel Perencanaan ( $X_1$ ), variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia ( $X_2$ ) dan Komitmen Organisasi ( $X_3$ ) dan yang menjadi variabel terikat adalah Penyerapan Anggaran Belanja ( $Y$ ).

### **Data**

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan teknik penyebaran kuesioner pada SKPD di Kabupaten Kepulauan Talaud. Kuesioner yang dimaksud merupakan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden yang merupakan sampel dari penelitian.
- b. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, Produk dari Badan Pusat Statistik (Talaud Dalam Angka 2015), jurnal, laporan dan berbagai literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini dan sebagai dasar teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Sedanya Penelitian ini dilakukan di 33 SKPD, namun saat penelitian berlangsung responden yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria di 6 SKPD sedang tidak berada ditempat, maka penelitian ini hanya dilakukan di 27 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Kepulauan Talaud selama 2 bulan dengan bantuan dan arahan dari dosen pembimbing.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 150 orang dimana dalam penelitian ini, seluruh populasi dijadikan sampel. Namun karena 30 responden tidak mengisi dan mengembalikan kuesioner disebabkan kesibukan responden dan ada responden yang sedang melaksanakan tugas di luar daerah sehingga jumlah sampel sebesar 120 orang.

Adapun kriteria atau karakteristik responden yang telah tentukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengguna Anggaran (PA) SKPD di Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud;
3. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud;
4. Kepala Sub bidang Keuangan (KSK) SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud;
5. Bendahara Pengeluaran (KP) SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud.

Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan staf bidang anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Talaud.

## **Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel**

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas/independen yaitu variabel Perencanaan, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan 1 (satu) variabel dependen yaitu Penyerapan Anggaran. Pengukuran variabel dengan menggunakan kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan yang diukur dalam skala likert 4 poin. Berikut ini akan diuraikan konsep dan operasionalisasi masing-masing variabel.

### **Variabel Independen**

Seperti yang telah disebutkan pada uraian sebelumnya, yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah:

#### **Perencanaan**

Perencanaan ( $X_1$ ) adalah proses pendefinisian tujuan, penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan pengembangan serangkaian rencana komprehensif untuk menggabung dan mengkoordinasi berbagai aktivitas (Sunyoto dan Burhanudin, 2015). Perencanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penyusunan RKA- SKPD dasar penyusunan APBD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD setelah APBD tersebut ditetapkan. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, dalam konteks keuangan daerah, prosedur penganggaran dan penetapan anggaran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan. Itulah sebabnya dalam penelitian ini, perencanaan diukur berdasarkan prosedur penganggaran dan waktu penetapan anggaran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 pertanyaan dan diukur dengan skala Likert 1- 4 untuk setiap bobot pertanyaan yaitu : Tidak Benar (TB) Skor 1, Kurang Benar (KB) Skor 2, Benar (B) Skor 3, Sangat Benar (SB) Skor 4.

#### **Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Kapasitas Sumber Daya Manusia ( $X_2$ ) dalam penelitian ini tidak dibedakan dengan kompetensi. Artinya, SDM dengan kapasitas yang tinggi hanya dapat diwujudkan jika mereka memiliki kompetensi yang prima. Sebaliknya, keunggulan kompetensi akan menghasilkan profil kapasitas SDM terbaik. UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam penelitian ini Kapasitas Sumber Daya Manusia diukur berdasarkan pengetahuan, keahlian yang dimiliki dan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 pertanyaan dan diukur dengan skala Likert 1- 4 untuk setiap bobot pertanyaan yaitu : Tidak Benar (TB) Skor 1, Kurang Benar (KB) Skor 2, Benar (B) Skor 3, Sangat Benar (SB) Skor 4.

#### **Komitmen Organisasi**

Richard T. Mowday, Lyman W. Porter, & Richard M. Steers dalam Chairy (2002) mendefinisikan komitmen organisasi ( $X_3$ ) sebagai: *the relative strength of an individual's identification with and involvement in a particular organization*. Definisi menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki arti lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya. dalam penelitian ini komitmen organisasi diukur berdasarkan 3 faktor komitmen organisasi yang dikelompokkan oleh Richard M. Steers (1988) yaitu Identifikasi dengan organisasi, Keterlibatan dan Loyalitas dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 pertanyaan dan diukur dengan skala Likert 1- 4 untuk setiap bobot pertanyaan yaitu : Tidak Benar (TB) Skor 1, Kurang Benar (KB) Skor 2, Benar (B) Skor 3, Sangat Benar (SB) Skor 4.



## Variabel Dependen

Dalam penelitian ini penyerapan anggaran diukur berdasarkan tolak ukur *value for money* yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas dan ekonomis (Bastian, 2006:279) dengan menggunakan 6 pertanyaan dan diukur dengan skala Likert 1- 4 untuk setiap bobot pertanyaan yaitu : Sangat Tidak Setuju (STS) Skor 1, Tidak Setuju (TS) Skor 2, Setuju (S) Skor 3, Sangat Setuju (SS) Skor 4.

## Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan rumus regresinya adalah sebagai berikut.

$$Y' = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :  $b_0$  = Konstanta  
 $b_{1-3}$  = Koefisien Regresi Untuk  $X_{1-3}$   
 $X_1$  = Perencanaan  
 $X_2$  = Kapasitas Sumber Daya Manusia  
 $X_3$  = Komitmen Organisasi  
 $Y'$  = Penyerapan Anggaran Belanja Daerah

Sementara itu, langkah-langkah untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu perencanaan, kapasitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dilakukan dengan uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji T).

## Hasil Penelitian

### Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pejabat struktural dan Staf 27 SKPD (satuan kerja perangkat daerah) pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan SKPD, yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), Kepala Subbidang Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dan staf bidang anggaran DPPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud. Kuesioner yang disebar sebanyak 150 eksemplar namun kuesioner yang kembali hanya sebanyak 120 eksemplar.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1 Regresi Linear Berganda  
Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	
	B	Std. Error	Beta	B	Sig.
1 (Constant)	6.326	1.933		3.272	.001
X1	.522	.105	.479	4.954	.000
X2	.134	.092	.134	1.469	.145
X3	.076	.116	.063	.656	.513

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh model Analisis Regresi Linear Berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 6,326 + 0,522X_1 + 0,134X_2 + 0,076X_3$$

Berdasarkan model analisis diatas diperoleh nilai konstanta positif (+). Nilai konstanta positif menunjukkan bahwa variabel independen  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  (Perencanaan,

Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Komitmen Organisasi) berpengaruh positif terhadap variabel dependen Penyerapan Anggaran Belanja Daerah (Y) namun berbeda signifikasinya. Sehingga Bila variabel independen meningkat dalam kurun waktu 1 tahun, maka besarnya tingkat penyerapan anggaran belanja daerah pada pemerintah kabupaten kepulauan talaud akan meningkat pula.

Selanjutnya nilai  $b_1$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_1$  (Perencanaan) terhadap variabel Y (Penyerapan Anggaran Belanja Daerah) positif (+) berarti antara Perencanaan ( $X_1$ ) dan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah (Y) berhubungan positif (searah) atau dengan kata lain semakin baik perencanaan anggaran maka akan semakin baik pula tingkat penyerapan anggaran belanja daerah.

Nilai  $b_2$  merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_2$  (Kapasitas Sumber Daya Manusia) terhadap variabel Y (Penyerapan Anggaran Belanja Daerah) bernilai positif (+) artinya antara Kapasitas Sumber Daya Manusia ( $X_2$ ) dan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah (Y) berhubungan positif (searah) sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik kapasitas sumber daya manusia maka akan semakin baik pula tingkat penyerapan anggaran belanja daerah.

Sedangkan nilai  $b_3$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_3$  (Komitmen Organisasi) bernilai positif (+) berarti antara Komitmen Organisasi ( $X_3$ ) dan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah (Y) berhubungan positif (searah) atau dengan kata lain bahwa semakin tinggi komitmen organisasi maka semakin baik pula tingkat penyerapan anggaran.

Berdasarkan nilai koefisien regresi dapat diketahui bahwa ternyata faktor perencanaan lebih dominan atau signifikan berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

### Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan pengambilan keputusan mengenai penerimaan dan penolakan hipotesis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai  $t_{hitung} X_1 = 4,954 > 1,981$  dan nilai signifikansi  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan Hipotesis ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa variabel independen Perencanaan ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Penyerapan Anggaran Belanja Daerah (Y) diterima, dengan demikian  $H_0$  ditolak. Artinya, Perencanaan berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Nilai  $t_{hitung} X_2 = 1,469 < 1,981$  dan nilai signifikansi  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan Hipotesis ( $H_2$ ) yang menyatakan bahwa variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap variabel Penyerapan Anggaran Belanja Daerah (Y) ditolak, dengan demikian  $H_0$  diterima. Artinya, Kapasitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
3. Nilai  $t_{hitung} X_3 = 0,656 < 1,981$  dan nilai signifikansi  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan Hipotesis ( $H_3$ ) yang menyatakan bahwa variabel Komitmen Organisasi ( $X_3$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Penyerapan Anggaran Belanja Daerah (Y) ditolak, dengan demikian  $H_0$  diterima. Artinya, Komitmen Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Meski demikian berdasarkan kriteria penentuan hipotesis nol dan hipotesis alternatif yang telah dibahas pada bab IV tesis ini, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen Perencanaan ( $X_1$ ), Kapasitas Sumber Daya Manusia ( $X_2$ ) dan Komitmen Organisasi ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap variabel Penyerapan Anggaran Belanja Daerah (Y) Pada Pemerintah kabupaten Kepulauan Talaud meski berbeda signifikasinya.

## KESIMPULAN

Penelitian ini meneliti pengaruh Perencanaan, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Dari hasil penelitian dan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Perencanaan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Selain itu hasil analisis regresi juga menunjukkan bahwa perencanaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja daerah. Dengan demikian hal ini berarti bahwa seharusnya dengan perencanaan anggaran yang baik dapat menghasilkan penyerapan anggaran belanja daerah yang semakin baik pula.
2. Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif (+) namun tidak signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, hal ini disebabkan oleh penempatan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang disertai masih minimnya pelatihan dan bimbingan teknis mengenai pengelolaan keuangan serta tingginya frekuensi mutasi pegawai sehingga pegawai bersangkutan masih harus menyesuaikan diri dengan tugas yang baru. Nilai koefisien regresi positif (+) menunjukkan adanya hubungan searah antara sumber daya manusia dengan penyerapan anggaran belanja daerah, yang berarti bahwa dengan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia maka akan meningkatkan kemampuan penyerapan anggaran belanja daerah.
3. Komitmen Organisasi berpengaruh positif (+) namun tidak signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah. Berdasarkan hasil penelitian, minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan SKPD dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai perencanaan menjadi gambaran masih minimnya komitmen organisasi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Nilai koefisien regresi positif (+) menunjukkan adanya hubungan searah antara komitmen organisasi dengan penyerapan anggaran belanja daerah, yang berarti bahwa dengan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia maka akan meningkatkan kemampuan penyerapan anggaran belanja daerah.
4. Hasil Uji F menunjukkan bahwa Perencanaan, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Dan Komitmen Organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal yang sama ditunjukkan oleh hasil uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi, dimana menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara Perencanaan, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah kabupaten Kepulauan Talaud. Sehingga peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi sangat dibutuhkan jika kita ingin meningkatkan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

## SARAN

Untuk penelitian selanjutnya, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan menggunakan metode metode campuran (*mix method*) kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian, dimana metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan hasil yang diperoleh dari metode kuantitatif sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
2. Mempertimbangkan untuk lebih mendalami dan fokus pada satu tahun anggaran.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel dan mengembangkan kuesioner lebih lanjut sehingga mampu mengungkap variabel lain yang

mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran belanja di Kabupaten Kepulauan Talaud atau di daerah yang lain yang diteliti.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Emkhad. 2012. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011. Tesis. Riau: Universitas Islam Riau.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Badura, Albert. 1971. *Social Learning Theory*. Library Of Congress Catalog. United States Of America. Stanford University.
- Chairy S. Liche. 2002. Seputar Komitmen Organisasi. Jurnal UI. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Juliani, Dian. 2014. Pengaruh faktor-faktor kontekstual terhadap Persepsian penyerapan anggaran terkait pengadaan Barang/jasa. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Kuncoro, D. Egiastyo. 2013. Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi SiPP Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil.I Dinas PU Prov. Kaltim. Sripsi. Samarinda: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Mathis, L. Robert and J. H. Jackson. 2010. *Human Resorce Management*. Vol. 13. South Western Cengage Learning.
- Nugroho, Budi. 2015. Mengenal Lebih Dekat Konsep Anggaran Daerah. <https://konsultankti.wordpress.com/2015>. Diakses tanggal 22 September 2016.
- Priatno, A. Prasetyo. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Raharjo, Eko. *Teori Agensi Dan Teori Stewarship* Dalam Perspektif Akuntansi. Jurnal Ekonomi. Semarang. STIE Pelita Nusantara Semarang.
- Rothich, K. Charles. 2015. *Factors Affecting Budget Utilization KerichoCounty Government In Kenya*. International Journal Of Economics, Commerce and Mangement. Kenya. Jomo Kenyatta University Of Agriculture and Teknologi.
- Rumenser, Peggy. 2014. Pengaruh Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan Terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kota Manado. Manado. Fakultas Ekonomi Univeritas Sam Ratulangi.
- Sugiyoni. 2008. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Cetakan ke 4. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sunyoto, Danang dan Burhanudin. 2015. Teori Perilaku Keorganisasian. Jakarta: Penerbit CAPS (*Center Of Academic Publishing Service*).
- Ulfa, Rusda. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Di Pemda DKI Jakarta (Studi Kasus: Sekretariat DPRD DKI Jakarta Untuk T.A 2010 dan 2011. Sripsi. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Zarinah, Monik. 2015. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. Tesis. Banda Aceh. Pascasarjana Prodi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Darussalam.

# **PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI INFORMASI, REVIU LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

Merlyn C. T. Kalumata, Ventje Ilat, Jessy D. L. Warongan  
(email:merlyn\_ck@yahoo.com)

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of human resources competence, information technology, review of financial statement and internal control system on the quality of financial statement in Government of North Sulawesi. The variables in this study consist of independent variable :human resources competence (X1), information technology (X2), review of financial statement (X3) and internal control system (X4). On the other hand, the dependent variable is the quality of financial statement (Y). Data were analyzed by multiple linear regression analysis (multiple regression). The results indicate that human resources competence, information technology, review of financial statement and internal control system simultaneously have a significant influence on the quality of financial statement. The value of the coefficient of determination shows that human resources competence, information technology, review of financial statement and internal control system simultaneously contribute to the quality of financial statement.  $R^2$  is 71.3%, it means those dependent variables affect the quality of financial statement by 71.3%. While the remaining of 28.7% is influenced by other variables which are excluded within this research. Partial test results show that information technology, review of financial statement and internal control system have a significant impact on the quality of financial statement. Human resources competence has no significant impact on the quality of financial statement.*

*Keywords : quality of financial statement, human resources competence, information technology, review of financial statement, internal control system*

## **PENDAHULUAN**

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPD seluruh Indonesia menunjukkan masih banyak pemerintah daerah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk tahun pelaporan 2015, BPK mencatat hanya 58% atau 312 LKPD yang memperoleh opini WTP. Sementara itu LKPD lainnya tercatat memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 187 LKPD, Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) sebanyak 30 LKPD, dan masih ada 4 LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW). Namun secara keseluruhan pengelolaan keuangan daerah semakin baik setiap tahun, hal ini ditandai dengan terus meningkatnya persentase opini WTP, penurunan WDP dan TMP. Dibandingkan dengan tahun 2014, LKPD yang mendapat opini WTP mengalami kenaikan dari 47% menjadi 58%. Kenaikan kualitas ini didukung oleh upaya pemerintah daerah memperbaiki kelemahan yang terjadi sepanjang tahun 2014.

Hal ini menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintah daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Hasil evaluasi BPK menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki pengendalian internal yang telah memadai. Adapun LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP memerlukan perbaikan pengendalian internal.

Sesuai dengan amanat UU NO.17 Tahun 2003 Pemerintah Daerah berkewajiban mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan secara penuh pada tahun 2015. Laporan keuangan berbasis akrual dimaksud untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan. Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah

Provinsi Sulawesi Utara atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual tahun 2014 dan 2015 (sampai dengan triwulan III) masih terdapat beberapa permasalahan antara lain: (1) perangkat regulasi dan kebijakan terkait implementasi SAP berbasis akrual belum sepenuhnya mendukung SAP berbasis akrual dan diimplementasikan, (2) analisis kebutuhan SDM pengelola keuangan, aset dan teknologi informasi serta inspektorat selaku pereviu LKPD belum memadai, menyangkut analisis kebutuhan maupun optimalisasi SDM, dan (3) dari aspek pengelolaan teknologi, pemerintah daerah belum melakukan analisis sistem aplikasi yang dibutuhkan untuk implementasi SAP berbasis akrual, sistem aplikasi yang dimiliki belum sesuai kebutuhan untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual, dan pemerintah daerah belum membuat rencana dan melakukan evaluasi periodik atas sistem aplikasi tersebut.

Perubahan akuntansi berbasis kas menjadi akrual bukan sekedar masalah teknis pencatatan transaksi dan menyajikan laporan keuangan, tetapi membutuhkan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), serta mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Oleh karenanya, proses pelaporan keuangan pemerintah harus dikerjakan oleh SDM yang memiliki kompetensi agar mampu menyusun dan menyajikan LKPD yang berkualitas.

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Salah satu kegiatan pengawasan internal yaitu melalui kegiatan reviu atas LKPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK.

Sebelum diaudit oleh BPK, LKPD telah direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat, untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan dan LKPD sudah disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), seperti diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas LKPD Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, proses reviu menjadi krusial untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan amanah peraturan perundangan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola yang lebih baik.

Berdasarkan fenomena tersebut, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa terdapat tingkat signifikansi yang berbeda dari masing-masing variabel, maka penelitian ini untuk meneliti kembali faktor-faktor penentu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kompetensi SDM, teknologi informasi, reviu laporan keuangan dan sistem pengendalian internal dengan mengambil objek penelitian pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling.

Jensen dan Meckling (1976: 308) menyatakan bahwa:

*“We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal.”*

Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut *nexus of contract*. Agen berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya. Teori ini memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban agen kepada prinsipal atas pengelolaan keuangan daerah yang dibuat sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Semakin menguatnya tuntutan terhadap lembaga-lembaga publik untuk mewujudkan akuntabilitas sektor publik, mengharuskan pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

### **Laporan Keuangan**

Ikatan Akuntan Indonesia (2012) dalam Standar Akuntansi Keuangan, menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diatur mengenai unsur laporan keuangan pemerintah berbasis akrual, yang terdiri atas Laporan Pelaksanaan Anggaran (terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih), Laporan Finansial (terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas), serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Dalam lingkup pemerintah daerah yang dimaksud dengan pimpinan entitas adalah setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi dan setiap gubernur/ bupati/ walikota sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan SKPD tersebut selanjutnya disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD). PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang bertindak pula sebagai Bendahara Umum Daerah. PPKD sebagai SKPKD menyusun pula laporan keuangan sebagaimana yang berlaku pada SKPD.

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para penggunanya maka

laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Mardiasmo (2009:163) menyatakan bahwa meskipun laporan keuangan bukan merupakan satu-satunya sumber informasi untuk pembuatan keputusan, akan tetapi laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan.

Wilkinson, Cerullo, Raval dan Wong (2000:18) menyatakan bahwa:

*"The value of information, and hence the soundness of decisions, can be affected by qualities that attach to the information. Useful information qualities are relevance, accuracy, timeliness, conciseness, clarity, quantifiability, and consistency."*

Karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan untuk sektor pemerintahan dinyatakan dalam *Governmental Accounting Standards Board* (GASB, 1999) dalam *Concepts Statement No.1* tentang tujuan laporan keuangan yaitu *understandable, reliable, relevant, timely, consistent, comparable*. Karakteristik tersebut kemudian diadopsi oleh Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Spencer dan Spencer (1993:9) mendefinisikan kompetensi bahwa *"a competency is an underlying characteristic's of an individual which is causally related to criterion – referenced effective and/or superior performance in a job or situation"*.

Dalam penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Ketiga karakteristik ini kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan standar kompetensi jabatan PNS, seperti dikemukakan oleh Prayitno (2003:11) standar kompetensi mencakup tiga hal, yang disingkat dengan KSA yaitu: (1) pengetahuan (*knowledge*), yaitu fakta dan angka di balik aspek teknis; (2) keterampilan (*skills*), yaitu kemampuan untuk menunjukkan tugas pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus-menerus dengan kegiatan yang paling sedikit; (3) sikap (*attitude*), yaitu yang ditunjukkan kepada pelanggan dan orang lain bahwa yang bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerjanya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, SDM yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan SDM pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

### **Teknologi Informasi**

Teknologi informasi menurut Martin, Brown, DeHayes, Hofer dan Perkins (2002:1) adalah teknologi komputer yang digunakan untuk mengirimkan informasi. Definisi teknologi informasi sangat luas dan mencakup semua bentuk teknologi yang digunakan dalam menangkap, manipulasi, mengkomunikasikan, menyajikan dan menggunakan data yang akan diubah menjadi informasi. Wilkinson *et al.* (2000:34) menyatakan bahwa *"information technology includes computers (mainframes, mini, micro), software, databases, networks (internet, intranet), electric commerce, and other types of related technologies"*. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk memproses dan penyimpanan informasi juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran



informasi. Total volume Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dari sisi akuntansi hal itu menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah semakin besar dan semakin rumit juga kompleks. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu.

### **Reviu Laporan Keuangan**

Pengawasan intern berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 pasal 1 ayat 3 adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP ada 5 (lima) jenis yaitu Pemeriksaan Reguler, Monitoring, Pemeriksaan Khusus, Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan disajikan telah sesuai dengan SAP. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas LKPD Pasal 1 angka 9.

Reviu atas LKPD dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan ruang lingkup meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan Sistem Pengendalian Intern dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan kata lain Reviu LKPD untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

### **Sistem Pengendalian Internal**

*The Committe of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)* mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut.

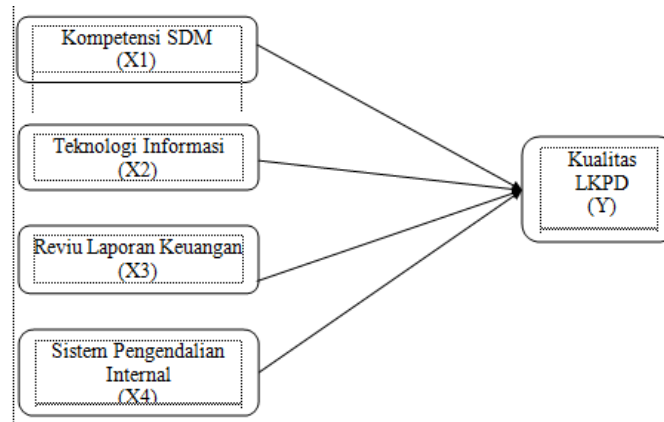
*Internal control is broadly defined as a process, effected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: (1) Effectiveness and efficiency of operations; (2) Reliability of financial reporting; (3) Compliance with applicable laws and regulations.*

COSO memperkenalkan adanya 5 (lima) unsur pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian (*control environment*), penaksiran risiko (*risk assesment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), serta pemantauan (*monitoring activities*). Penjelasan mengenai unsur pengendalian internal tersebut seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008.

Dalam lampiran 1 Permendagri No. 4 Tahun 2008, bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan, dan memelihara SPI yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal.

## KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan uraian latar belakang, rujukan teori, konsep dan sejumlah hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya, dapat digambarkan skema kerangka pikir dari penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa variabel X1 kompetensi SDM, variabel X2 teknologi informasi, variabel X3 reviu laporan keuangan, dan variabel X4 sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap variabel Y kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara.

### Hipotesis Penelitian

#### Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Sehingga untuk dapat menyajikan LKPD yang berkualitas diperlukan SDM yang memiliki kompetensi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Evicahyani (2015) pada pemerintah daerah Subosukawonosraten menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan kondisi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang sudah mencukupi baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya, selain itu uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada sudah terspesifikasi dengan jelas. Fungsi dan proses akuntansi dapat dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang ilmu akuntansi.

**Ha<sub>1</sub>: Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.**

#### Pengaruh Teknologi Informasiterhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Penelitian Zainani (2013) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah. Dengan menggunakan teknologi informasi maka informasi keuangan yang dihasilkan dapat lebih akurat jika dibandingkan dengan menggunakan proses

manual sehingga laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu dan andal (Sukirman, 2012). Sejalan dengan penelitian Pradono dan Basukianto (2014) yang menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Ha<sub>2</sub>: Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.  
Pengaruh Reviu Laporan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diaudit oleh BPK rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, proses reviu menjadi krusial untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan amanah peraturan perundangan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola yang lebih baik.

Penelitian Manaf dan Darwanis (2015) menunjukkan bahwa proses reviu laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

**Ha<sub>3</sub>: Reviu laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.**

**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan, dan memelihara SPI yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal. Dengan mengoptimalkan SPIP diharapkan pengendalian intern semakin efektif sehingga dapat memediasi dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas informasi keuangan.

Hasil penelitian Mahaputra (2014), Afiah dan Rahmatika (2014) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Peningkatan pengendalian intern akan diikuti oleh peningkatan kualitas informasi laporan keuangan (Herman, 2015).

**Ha<sub>4</sub>: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.**

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Berdasarkan hubungan antara variabel yang diteliti, maka penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal yaitu hubungan yang bersifat sebab-akibat. Jadi penelitian ini akan menganalisis pengaruh variabel independen yaitu Komitmen SDM ( $X_1$ ), Teknologi Informasi ( $X_2$ ), Reviu Laporan Keuangan ( $X_3$ ) dan Sistem Pengendalian Internal ( $X_4$ ) terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( $Y$ ).

## **Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan kuesioner yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.

## **Populasi Sampel, Besar Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah PPK-SKPD, bendahara dan staf PPK-SKPD fungsi akuntansi pada 47 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sehingga sampel berjumlah 141 orang

## **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Objek dalam penelitian ini mengambil lokasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan waktu penelitian selama 3 (tiga) bulan yaitu mulai bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2016.

## **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Penelitian ini akan menggunakan 4 (empat) variabel independen, yaitu kompetensi SDM ( $X_1$ ), teknologi informasi ( $X_2$ ), reviu laporan keuangan ( $X_3$ ), dan sistem pengendalian internal ( $X_4$ ), serta 1 (satu) variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan ( $Y$ ). Masing-masing variabel diukur dengan model skala Likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

## **Kompetensi SDM**

Kompetensi SDM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah karakteristik yang dimiliki pengelola keuangan dalam melaksanakan tugas penatausahaan keuangan (akuntansi) untuk menghasilkan laporan keuangan.

## **Teknologi Informasi**

Variabel teknologi informasi dalam penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh pengelola keuangan dengan mengkombinasikan alat perangkat komputer dengan telekomunikasi dalam proses penyusunan laporan keuangan, mulai dari pemrosesan, pengolahan dan penyebaran data. (Jurnali dan Supomo, 2002).

## **Reviu Laporan Keuangan**

Reviu laporan keuangan dalam penelitian ini adalah reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Inspektorat, di dalamnya terdapat prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

## **Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## **Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif yang dimiliki oleh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau persyaratan normatif dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

## Instrumen Penelitian

### Uji Validitas

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

### Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2006:41) uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner jika digunakan dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung koefisien *cronbach alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel.

### Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini, serta sebagai bahan dan materi untuk keperluan dan pembahasan maka metode pengumpulan data yang diperoleh meliputi: (1) Survei Pendahuluan; (2) Survei Lapangan.

### Cara Pengolahan dan Analisis Data

#### Uji Asumsi Klasik

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heterokedastisitas.

#### Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan apakah adapengaruh kompetensi SDM, teknologi informasi, revidu laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan uji statistik melalui, (1) Uji bersama-sama (Uji F); (2) Uji parsial (Uji t); (3) Uji koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan metode statistik regresi berganda (*MultipleRegression*) dengan persamaan sebagai berikut :

Fungsi Regresi Berganda :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

## HASIL PENELITIAN

### Regresi Berganda

Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompetensi SDM ( $X_1$ ), teknologi informasi ( $X_2$ ), revidu laporan keuangan ( $X_3$ ), dan sistem pengendalian internal ( $X_4$ ) terhadap kualitas laporan keuangan ( $Y$ ). Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 5.16.

**Tabel 1 Hasil Regresi Berganda**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.018	3.093		.653	.516
	x1	.145	.089	.155	1.628	.107
	x2	.225	.111	.151	2.035	.045
	x3	.185	.082	.180	2.268	.026
	x4	.501	.106	.479	4.713	.000

a. Dependent Variable: y

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS

Berdasarkan tabel 1, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$
$$Y = 2,018 + 0,145X_1 + 0,225X_2 + 0,185X_3 + 0,501X_4 + e$$

Dengan interpretasi bahwa :

Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 2,018 menunjukkan kualitas laporan keuangan (Y) mempunyai hubungan positif atau searah dengan kompetensi SDM (X1), teknologi informasi (X2), revidi laporan keuangan (X3) dan sistem pengendalian internal (X4). Variabel kompetensi SDM (X1) memiliki nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar 0,145 dan bernilai positif, menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, artinya apabila variabel lain nilainya tetap atau tidak berubah, maka setiap peningkatan kompetensi SDM akan menambah kualitas laporan keuangan (Y). Variabel teknologi informasi (X2) memiliki nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar 0,225 dan bernilai positif, menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, artinya setiap adanya peningkatan dalam teknologi informasi maka akan mengakibatkan peningkatan dalam kualitas laporan keuangan (Y) dengan asumsi faktor lain konstan. Variabel revidi laporan keuangan (X3) memiliki nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar 0,185 dan bernilai positif, menunjukkan bahwa revidi laporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, artinya setiap adanya peningkatan dalam revidi laporan keuangan maka akan mengakibatkan peningkatan dalam kualitas laporan keuangan (Y) dengan asumsi faktor lain konstan. Variabel sistem pengendalian internal (X4) memiliki nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar 0,501 dan bernilai positif, menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, artinya setiap adanya peningkatan dalam sistem pengendalian internal maka akan mengakibatkan peningkatan dalam kualitas laporan keuangan (Y) dengan asumsi faktor lain konstan.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan.**

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pada kompetensi SDM  $t_{hitung} = 1,628 < t_{tabel} = 1,98667$  sehingga kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan, pemerintah harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten. Menurut Bastian (2006:55) bahwa penyusunan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Kompetensi SDM merupakan variabel penentu dalam meningkatkan kualitas LKPD (Sudriarianti, 2015). Kompetensi yang dimiliki seorang PNS meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku (PP no.101 tahun 2000). Berdasarkan data yang diperoleh, pengelolaan SDM pengelola keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum optimal. Hal ini ditandai dengan jumlah dan kompetensi SDM pengelola keuangan yang belum sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu SDM pengelola keuangan belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pengelolaan keuangan khususnya penyusunan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena walaupun berbagai pelatihan maupun sosialisasi telah dilakukan namun pengelola keuangan yang telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi telah dimutasi. Dari data demografi responden didapati SDM yang menempati posisi pengelola keuangan masih tergolong baru dan responden yang berlatar belakang pendidikan akuntansi hanya sebesar 15%. Hal ini menyebabkan variabel kompetensi SDM dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, dalam proses penyusunan laporan keuangan telah didukung dengan teknologi informasi yang ada yang berfungsi untuk membantu kelancaran penyusunan laporan keuangan sehingga pengelola keuangan di SKPD yang bertugas membuat laporan keuangan SKPD tidak harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang siklus akuntansi karena proses akuntansi seluruhnya telah dikerjakan oleh SIMDA, SDM dalam hal ini hanya menginput data saja. Kondisi ini menyebabkan penyusunan laporan keuangan SKPD yang merupakan tanggung jawab SKPD sebagai entitas akuntansi tidak sepenuhnya terlaksana karena sebagian dikerjakan oleh SKPD, padahal SKPD adalah unit organisasi yang mandiri dan mempunyai kewajiban menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan

untuk menyajikan laporan keuangan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan (PP 71/2010).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Syarifudin (2014) pada Pemerintah Kabupaten Kebumen, di mana kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD, dalam arti meningkatnya variasi kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas LKPD. Demikian juga hasil penelitian dari Winidyaninrum dan Rachmawati (2010) pada Pemerintah Daerah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten (Subosukawonosraten), yang menunjukkan bahwa SDM berpengaruh tidak signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Pradono dan Basukianto (2015) pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik kualitas laporan keuangan SKPD. Demikian pula penelitian yang dilakukan Mahaputra dan Wayan Putra (2014), Winidyaningrum dan Rachmawati (2010), Evicahyani (2015), Zainani (2013) dan Sudriaranti (2014) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### 5.1.1 Pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pada teknologi informasi  $t_{hitung} = 2,035 > t_{tabel} = 1,98667$  sehingga teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai koefisien regresi teknologi informasi sebesar 0,225 menunjukkan bahwa penambahan satu satuan teknologi informasi akan menambah kualitas laporan keuangan sebesar 0,225 satuan.

Hasil penelitian ini mendukung literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam organisasi, termasuk pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dengan volume transaksi yang semakin meningkat dan kompleks. Penggunaan teknologi yang andal diperlukan untuk mendukung keberhasilan pengolahan data. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah memanfaatkan teknologi informasi seperti komputer, jaringan internet dan *software* akuntansi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sehingga memudahkan pegawai pengelola keuangan dalam menyusun laporan keuangan. Dengan menggunakan teknologi informasi tersebut informasi keuangan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan disajikan tepat waktu.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Zainani (2013) pada Kabupaten Pesawaran yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu mendukung juga hasil penelitian dari Winidyaningrum dan Rachmawati (2010) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

#### **Pengaruh revidi laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan.**

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pada revidi laporan keuangan,  $t_{hitung} = 2,268 > t_{tabel} = 1,98667$  sehingga revidi laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai koefisien regresi revidi laporan keuangan sebesar 0,185 menunjukkan bahwa penambahan satu satuan revidi laporan keuangan akan menambah kualitas laporan keuangan sebesar 0,185 satuan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Manaf (2014) pada kabupaten kota di Provinsi Aceh yang menunjukkan bahwa revidi laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh proses revidi LKPD oleh inspektorat. Selain itu penelitian Herman (2015) menunjukkan bahwa audit internal yang dilaksanakan oleh auditor berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan

kabupaten Jeneponto. Auditor internal menjalankan fungsinya menelaah informasi laporan keuangan untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas. Kegiatan audit internal termasuk di dalamnya revidi laporan keuangan.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 tahun 2008 bahwa revidi atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan ruang lingkup meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan SPI dan kesesuaian dengan SAP. Aparat pengawas intern pemerintah dalam hal ini inspektorat melakukan revidi dengan berpedoman pada prosedur revidi atas LKPD yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Melalui rangkaian prosedur revidi diharapkan dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP.

### **Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.**

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa padasistem pengendalian internal,  $t_{hitung} = 4,713 > t_{tabel} = 1,98667$  sehingga sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai koefisien regresi sistem pengendalian internal sebesar 0,501 menunjukkan bahwa penambahan satu satuan sistem pengendalian internal akan menambah kualitas laporan keuangan sebesar 0,501 satuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 disebutkan bahwa SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2008 lampiran I menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internnya. Untuk itu pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan, dan memelihara SPI yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal. Dengan adanya pengendalian intern yang efektif dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Pradono dan Basukianto (2015), Sudriarianti (2014) dan Syarifudin (2014) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD, artinya semakin efektif sistem pengendalian intern maka semakin baik kualitas LKPD.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kompetensi SDM, teknologi informasi, revidi laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, baik secara parsial maupun secara simultan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa :

- 1) Dari hasil uji t atau secara parsial, dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi SDM (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas LKPD (Y) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- 2) Variabel teknologi informasi (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas LKPD (Y) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- 3) Variabel revidi laporan keuangan (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas LKPD (Y) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- 4) Variabel sistem pengendalian internal (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5) Dari hasil uji f atau secara simultan, dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi SDM (X1), teknologi informasi (X2), revidi laporan keuangan (X3) dan sistem



pengendalian internal (X4) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

### Saran

Saran untuk penelitian berikutnya:

- a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian, dengan mengambil sampel pada kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara sehingga hasilnya dapat digeneralisasi.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lain yang belum diteliti pada penelitian ini agar dapat mengetahui faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan menggunakan metode metode campuran kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian, dimana metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan hasil yang diperoleh dari metode kuantitatif sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunuy Nur and D. N. Rahmatika. 2014. *Factors Influencing the Quality of Financial Reporting and its Implications on Good Government Governance*. International Journal of Business, Economics and Law, Vol.5. Issue 1 December. p.111-121. ISSN 2289-1552.
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015*. Jakarta.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, Burhan. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision (COSO), 1994. *Internal Control-Integrated Framework*. AICPA Publication.
- Darmawati, Khomsiyah dan R. G. Rahayu. (2005). *Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Yogyakarta. Vol. 8, No. 1. Hal. 65-81.
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah: Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta : RMBOOKS.
- Evicahyani, Sagung Inten. 2015. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goodhue and Thompson. 1995. *Task-Technology Fit and Individual Performance*. MIS Quarterly, Juni. 213-236.
- Governmental Accounting Standard Board (GASB). 1999. *Concepts Statement No.1: Objective of Financial Reporting*.
- Guy, Dan M., Alderman, C. Wayne dan Winters, Alan J. 2002. *Auditing*: Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Herman. 2015. *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan: Pengendalian Intern sebagai Variabel Intervening*. Tesis. Program Magister Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar.

- Hilton, R. W., Michael, W. M. and Frank, H. S. 2000. *Cost Management, Strategies for Business Decision*. International Edition. McGraw-Hill Companies, Inc.
- Indriasih, Dewi dan P. S. Koeswayo. 2014. *The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control toward the Quality of Financial Reporting and its Impact on the Performance Accountability in Local Government*. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol.5. Issue 1 December. p.90-100. ISSN 2289-1560.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*.PSAK. Cetakan Keempat. Buku Satu. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Jensen, M. and Mecking, W. 1976. *Theory of The Firm : Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Stucture*. Journal of Financial Economics 3 (4).
- Jurnali, Teddy dan Bambang Supomo. 2002. *Pengaruh Faktor-faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Akuntan Publik*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol.5 No.2, Hal.214-228.
- Kadir, Abdul. 2014. *Pengenalan Sistem Informasi*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Kesuma, I, Nadirsyah, Darwanis. 2014. *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, peran internal auditor dan aktivitas pengendalian terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kabupaten Aceh Utara)*. Jurnal.
- Kotler, Philip. 2005. *Management Pemasaran*. Jilid 1 dan 2. Edisi Kesebelas. Alih Bahasa Benyamin Molan. Jakarta : Indeks.
- Laudon, K. C., Jane P. Laudon. 2006. *Management Information System*. 9th edition. New Jersey : Prentice-Hall, Inc
- Lane, Jan-Erik. 2003. *Management and Public Organization : The principal-agent framework*. University of Geneva and National University of Singapore. Working paper.
- Mahaputra, I.P.U.R dan I.W. Putra. 2014. *Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.8. No.2, Hal.230-244. ISSN 2302-8556.
- Manaf, I. A., M. Arfan, dan Darwanis. 2014. *Pengaruh Pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Proses Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol.3. No.4. November 2014, Hal.23-35. ISSN 2302-0164.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Martin, E. W., C. W. Brown, D. W. DeHayes, J. A. Hofer, dan W. C. Perkins. 2002. *Managing Information Technology*. New Jersey : Prentice-Hall, Inc.
- Nuryanto, Muhamad and N. N. Afiah. 2013. *The Impact of Apparatus Competence, Information Technology Utilization and Internal Control on Financial Statement Quality (Study on Local Government of Jakarta Province-Indonesia)*. World Review of Business Research, Vol.3. No.4. November. p.157-171.
- Pangkong, Terry Corie. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Biak Numfor*. Tesis. Program Magister Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang *Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2008 tentang *Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang *Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2000 tentang *Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pradono, F. C. dan Basukiato. 2015. *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi pada SKPD Pemerintah Jawa Tengah)*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol.22. No.2 September 2015, Hal.188-200. ISSN 1412-3126.
- Prasetyo, Agus dan S. Pangemanan. 2012. *Analisis Dampak Reviu Inspektorat terhadap Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan (LKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara TA 2010 dan 2011*. Jurnal.
- Prayitno, Tim Peneliti BKN. 2003. *Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil*. Puslitbang BKN, Jakarta.
- Renkas, Jurij, O. Goncharenko and O. Lukianets. 2016. *Quality of Financial Reporting: Approach to Measuring*. International Journal of Accounting and Economics Studies, Vol.4(1). p.1-5.
- Riyanto dan P. Agus. 2015. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ross, S.A, Westerfield, R.W & Jaffe. 2010. *Corporate Finance*. (6th Edition). McGraw-Hill, Inc. USA.
- Ruky, Achmad. 2003. *Sumber Daya Berkualitas : Mengubah Visi menjadi realitas*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Spencer, L. and S. Spencer. 1993. *Competence At Work : Models for Superior Performance*. Canada : John Wiley & Sons, Inc.
- Sudiarianti, Ni Made. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Sukirman, H. Sularso dan E. S. Nugraheni. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan dengan Pengendalian Intern Akuntansi sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas)*. Jurnal.
- Suwanda, Dadang. 2015. *Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statement to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK)*. Research Journal of Finance and Accounting, Vol.6. No.4. p.139-157. ISSN 2222-1697.
- Syarifudin, Akhmad. 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem*

- Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen)*. Jurnal Fokus Bisnis, Vol.14. No.02 Desember 2014, Hal.26-44.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Warongan, J. D. L. 2015. *Determinan Efektivitas Pengendalian Internal dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Warongan, J. D. L., G. Pagalung, and A. H. Habbe. 2014. *The Effect of Effectiveness Mediation of Internal Control System on Competency of Human Resources and Audit Opinion in Previous Year towards Quality of Financial Statement*. Journal of Research in Business and Management, Vol.2. Issue 11. p.09-16. ISSN 2347-3002.
- Wilkinson, J. W., Cerullo, M. J., Raval, V., and Wong-On-Wing, B. 2000. *Accounting Information System: Essential Concepts and Applications*. New York: John Wiley & Sons. Inc.
- Winidyaningrum, Celviana dan Rachmawati. 2010. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten)*. SNA XIII. 13-14 Oktober. Purwokerto.
- Yaswat, Latifatul. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah*. Jurnal
- Zainani, Elva. 2013. *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran)*. Jurnal.

**ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

Ariel Rorimpandey, Grace B. Nangoy, Hendrik Manossoh  
(e-mail : [arielrorimpandey@gmail.com](mailto:arielrorimpandey@gmail.com))

**ABSTRACT**

*Local assets has important role and function for South Minahasa Regency Government to support the wheels of government and public service. The purpose of this study was to analyze the suitability of local assets management in South Minahasa Regency Government to Government Regulation No. 27 Year 2014. This study was conducted at The Local Agency Of Finance, Revenue And Assets Management In South Minahasa Regency. Local assets management based on Government Regulation No. 27 Year 2014 include requirements planning and budgeting, procurement, use, utilization, security and maintenance, assessment, transfer, destruction, disposal, administration, and guidance, supervision and control. This study is a qualitative descriptive research. The informant was determined by using purposive sampling method. Data analysis was performed with data reduction, data display and conclusion. The results showed basically, the local assets management has been cultivated implemented based on PP No. 27 year 2014, although there are obstacles in implementing local assets management such as the lack of regulation in regency such as local asset management regulation under PP No. 27 year 2014, lack of knowledge and understanding of human resources and lack of leadership commitment of SKPD in local asset management.*

*Keywords : Local assets management, government regulation, local assets*

**PENDAHULUAN**

Perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan suatu upaya dalam rangka mewujudkan *good governance* dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera. UUD 1945 mengamanatkan adanya hubungan keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Berlakunya UU (Undang-Undang) No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah membuat penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah. Oleh karena hal-hal tersebut, pemerintah daerah membutuhkan barang-barang yang akan menunjang jalannya semua urusan pemerintahan.

Permasalahan yang sering terjadi pada pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah adalah belum diterapkan secara benar aturan pengelolaan barang milik daerah yang berakibat pada pengadaan barang yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, penggunaan barang milik daerah yang tidak sesuai penetapan penggunaan, barang-barang rusak dan usang hanya dibiarkan begitu saja belum, belum lengkap administrasi aset daerah sehingga rawan hilang dan dicuri, barang-barang yang dibiarkan dan tidak terpelihara diambil alih pihak lain, laporan administrasi barang milik daerah oleh SKPD sering terlambat, barang yang tidak dikembalikan ke SKPD oleh pejabat yang telah pensiun, rendahnya kinerja pengurus dan penyimpan barang milik daerah untuk menjaga dan merawat barang milik daerah ditambah lagi aparatur daerah yang kurang berkompetensi.

Barang milik daerah mutlak menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Hal ini tidaklah berlebihan mengingat pengelolaan barang milik daerah memberikan dampak bagi jalannya roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan salah satu dasar dalam pemberian opini oleh BPK. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan barang milik daerah menurut PP No. 27 Tahun 2014 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Minahasa Selatan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 di Kabupaten Minahasa Selatan. Bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengambil keputusan/ kebijakan mengenai pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Bagi dunia pendidikan, diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan masalah pengelolaan barang milik daerah dan memperkuat teori-teori yang telah berkembang sebelumnya, serta sebagai referensi terhadap jenis penelitian yang sama.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Keagenan**

Dalam teori keagenan Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan.

### **Logistik**

Menurut Kusumastuti (2014) peran logistik dalam organisasi publik sangat berhubungan erat dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah baik secara langsung maupun tidak langsung..

### **Good Governance**

Menurut UNDP (1997) dikutip Lukow (2013) menyatakan Konsep *Good Governances* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut *good governance* (pemerintahan yang baik).

### **Barang Publik**

Menurut Pyndick (1996) dikutip Iskandar (2013) barang publik adalah barang yang dapat diproduksi dengan murah untuk konsumen, tetapi sekali barang tersebut diproduksi maka sulit melarang orang lain untuk menggunakannya.

### **Implementasi Kebijakan**

Faktor-faktor dalam implementasi kebijakan menurut Edwards III (1980) dikutip Juanda (2011) antara lain Komunikasi, Sumber daya, Disposisi/kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku, Struktur birokrasi.

### **Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2000) dikutip Hasfi (2013) akuntabilitas publik yang harus dipenuhi dalam rangka pengelolaan barang milik daerah adalah akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan

### **Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Pengelolaan barang milik daerah sesuai PP No 27 Tahun 2014 meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

### **Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas pengelolaan barang milik daerah (Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010 dan Darise 2009) seperti asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

## **Barang Milik Daerah**

Barang milik daerah dalam Peraturan pemerintah No. 27 tahun 2014 disusun menurut perkiraan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya.

## **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengelolaan barang milik daerah tentu pada akhirnya akan menghasilkan laporan barang milik daerah. Laporan barang milik daerah yang dihasilkan akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan neraca daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

## **Penelitian Terdahulu**

Penelitian menyangkut barang milik daerah telah dilakukan beberapa peneliti diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hasfi (2013) dan Priyono (2013). Hasfi (2013) meneliti tentang pengelolaan barang milik daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang dan hasilnya menunjukkan bahwa, pengelolaan barang milik daerah pada DPPKA Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam PP No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik daerah dihadapkan beberapa kendala dibidang organisasi, sumber daya aparatur, aturan dan praktek manajemen pengelolaan barang yang belum sesuai dengan aturan yang ada. Sedangkan Priyono (2013) yang meneliti keandalan informasi laporan keuangan daerah berbasis akrual (kajian pengelolaan aset tetap daerah kabupaten sampang) menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Sampang belum dilaksanakan secara memadai menurut PP No. 6 Tahun 2006. Berdasarkan penerapan asas-asas pengelolaan barang milik daerah dan selanjutnya dikaitkan dengan karakteristik keandalan informasi, maka disimpulkan bahwa penyajian informasi aset tetap daerah pada Pemerintah Kabupaten Sampang belum andal.

## **Kerangka Konseptual**

Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara professional, tertib, akuntabel dan transparan guna menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan. Barang milik daerah mutlak menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Pengelolaan barang milik daerah menurut PP No. 27 Tahun 2014 meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Pendekatan kualitatif digunakan untuk dapat menggali informasi secara utuh dari sumber informasi dan data dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahas Selatan. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif

### **Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada informan kunci dan data sekunder. Sumber data peneliti dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan informan. Sumber data lainnya dari Peraturan Pemerintah, buku, jurnal, modul, koran dan yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di DPPKA Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian pengelolaan barang milik daerah dibatasi sampai tahun anggaran 2015 yang telah diperiksa oleh BPK.

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Sugiyono (2014) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

### **Informan Penelitian**

Dalam menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan *Purposive sampling*. Informan kunci yang ditetapkan oleh peneliti berjumlah 4 (empat) orang yaitu Kepala Bidang Aset, Kepala Seksi Pengelolaan Aset, Kepala Seksi Analisa Aset, Kepala Seksi Inventaris aset dan informan biasa yakni admin 1 dan admin 2 Simda-BMD Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

### **Teknik Analisis Data**

Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing* (Sugiono, 2014).

## **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014, maka Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah dibantu oleh Sekda sebagai Pengelola barang milik daerah. Sebagai Pembantu Pengelola barang milik daerah di Kabupaten Minahasa Selatan adalah PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) yaitu Kepala Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi dalam pengelolaan barang milik daerah seperti yang telah diamanatkan, maka pengelolaan barang milik daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah membawahi Bidang Aset dengan dibantu oleh Seksi Pengelolaan Aset, Seksi Inventarisir Aset, Seksi Analisa. Kepala SKPD adalah pengguna barang milik daerah dibantu oleh Pengurus Barang, Penyimpan Barang dan Atasan Langsung Pengurus Barang.

Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah memiliki sifat yang khas, karena Kepala Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah bertindak sebagai Kepala SKPKD dan SKPD. Sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan maka Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah pada SKPD.

### **Hasil Penelitian**

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menurut hasil wawancara didasarkan pada PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perda No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan yang disadur dari PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan peraturan pelaksanaannya yakni Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### **Pembahasan**

#### **Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran**

Tahapan dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah menurut hasil penelitian pada dasarnya telah dilaksanakan, namun oleh SKPD dokumen perencanaan tidak dihimpunkan ke Bidang Aset, sehingga tugas dan fungsi dari Bidang Aset untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang untuk ditetapkan oleh Pengelola



Barang menjadi rencana kebutuhan barang milik daerah tidak terlaksana. Penerapan kebijakan pengelolaan barang milik daerah memerlukan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi yang baik antara pihak-pihak tersebut. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit (Edwards III, 1980 dalam Juanda, 2011).

### **Pengadaan**

Pengadaan barang milik daerah merupakan proses yang panjang dan rumit sehingga membutuhkan penjelasan lebih detail dalam peraturan yang secara khusus mengatur mekanisme pengadaan yakni Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mardiasmo (2000) dikutip Hasfi (2013) menyatakan bahwa pengelolaan barang harus memenuhi akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk didalamnya dilakukan *compulsory competitive tendering contract (CCTC)* dan penghapusan *mark-up*. Untuk itu perlu kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

### **Penggunaan**

Penetapan status penggunaan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dilakukan sebagai upaya penegasan pemakaian barang milik daerah dalam rangka tertib pengelolaan barang dan kepastian hak, wewenang dan tanggungjawab kepada SKPD. Penetapan status penggunaan berdasarkan dari usulan SKPD ke pengelola barang melalui Bidang Aset yang nantinya diterbitkan SK Penggunaan.

Penetapan status penggunaan dilakukan agar barang milik daerah mendapat pengamanan, tidak disalahgunakan, mudah dilakukan pengawasan dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Hal ini mendukung studi Juanda (2011) bahwa prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas.

### **Pemanfaatan**

Pemanfaatan barang milik daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sebagai upaya untuk mendayagunakan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD serta untuk optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Mardiasmo (2000) dikutip Hasfi (2013) menyatakan bahwa prinsip akuntabilitas publik harus dipenuhi dalam rangka pengelolaan barang milik daerah. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi terkait dengan akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum.

### **Pengamanan dan Pemeliharaan**

Pengamanan terhadap barang milik daerah oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tindakan yang harus dilakukan oleh Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna agar barang milik daerah terjaga dan dalam keadaan aman sehingga jumlah, kondisi, dan keberadaan barang tersebut sesuai dengan yang tercatat di administrasi.

Pemeliharaan terhadap barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dapat menambah masa manfaat atau menambah nilai barang. Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah menurut apa yang diungkapkan oleh Darise (2009) merupakan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum, sedangkan pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

### **Penilaian**

Nilai aset yang disajikan dalam neraca daerah merupakan nilai historis/nilai buku, sehingga diperlukan penilaian kembali atas aset untuk mendapatkan nilai wajar meliputi seluruh aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Penilaian yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dilakukan oleh KPKNL dalam

pengelolaan barang milik daerah sebagai upaya untuk mendukung kepastian nilai dengan adanya ketepatan jumlah dan nilai barang. Hasil ini mendukung studi yang dilakukan Simamora (2012) yang menyatakan bahwa penilaian merupakan suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

### **Pemindahtanganan**

Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dilakukan melalui penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal. Pemindahtanganan dilakukan terhadap barang yang sudah tidak diperlukan lagi dan sudah tidak dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan setelah sebelumnya ditentukan nilainya dalam penilaian barang milik daerah. Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah (2010) serta Darise (2009) menyebutkan bahwa pemindahtanganan barang milik daerah berdasarkan asas kepastian nilai yaitu adanya ketepatan jumlah dan nilai barang yang akan dilakukan pemindahtanganan.

### **Pemusnahan**

Pemusnahan barang dapat dilakukan terhadap barang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, kadaluarsa atau tidak dapat dipindahtanggankan dalam hal ini rusak dan yang jika harus dijual maka biaya yang timbul untuk penjualan akan lebih besar dari manfaat ekonomi yang di dapat. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Tukunang (2016) bahwa pemusnahan dilakukan karena tidak laku dijual, rusak, kadaluarsa, membahayakan kepentingan umum, atau karena ketentuan peraturan perundangan yang mengharuskan untuk dimusnahkan.

### **Penghapusan**

Penghapusan barang milik daerah oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang dilakukan melalui Bidang Aset sebagai tindakan membebaskan SKPD dari tanggung jawab penguasaan terhadap barang milik daerah secara fisik dan secara administrasi dengan menghapus dari daftar barang milik daerah. Subagya (1995) mendefinisikan penghapusan sebagai kegiatan dan usaha-usaha pembebasan barang dari pertanggungjawaban sesuai peraturan atau undang-undang yang berlaku. Penghapusan barang milik daerah yang dilakukan Bidang Aset meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna atau SKPD dan dari daftar barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

### **Penatausahaan**

Proses penatausahaan yang dikoordinasikan Bidang Aset sudah menggunakan aplikasi simda-BMD, dimana SKPD langsung melakukan input data ke Simda-BMD menurut perkiraan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Penatausahaan barang milik daerah harus memenuhi akuntabilitas publik yang menurut Rahman (2000) dikutip Lukow (2013) merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Pertanggungjawaban barang milik daerah melalui laporan keuangan daerah khususnya didalam neraca daerah sering terhambat sebagai akibat dari SKPD yang terlambat dalam menyampaikan laporan barang milik daerah ke Bidang Aset.

### **Pembinaan, pengawasan dan pengendalian**

Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Bidang Aset dilakukan dengan pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah. Dalam pembinaan pengelolaan barang, bimbingan sangat diperlukan karena pedoman tertulis masih bisa menimbulkan perbedaan persepsi dari Kepala SKPD, pengurus dan penyimpan barang. Pengawasan dan pengendalian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses

pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, hal ini dimulai sejak dari perencanaan sampai kepada pelaporan.

### **Hambatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Dalam penelitian ini ditemukan 3 faktor yang menghambat pengelolaan barang milik daerah yaitu sumber daya manusia, Regulasi di daerah, Komitmen pimpinan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Pada dasarnya, pengelolaan barang milik daerah telah diusahakan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, walaupun ada hambatan dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah seperti belum adanya regulasi di daerah berupa Perda pengelolaan barang berdasarkan PP 27 Tahun 2014, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia dan kurangnya komitmen pimpinan SKPD dalam pengelolaan barang milik daerah;
2. Perencanaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terhambat oleh karena tidak dimasukkannya data perencanaan setiap SKPD yang diminta Bidang Aset untuk dihipunkan menjadi rencana kebutuhan barang milik daerah. Rencana kebutuhan barang yang tidak dihipunkan ke Bidang Aset bukan berarti perencanaan tidak dibuat SKPD, tapi sebagai dampak peralihan peraturan pengelolaan barang milik daerah ke aturan yang terbaru. Pertanggungjawaban barang milik daerah melalui laporan keuangan daerah khususnya didalam neraca daerah sering terhambat sebagai akibat dari SKPD yang terlambat dalam menyampaikan laporan barang milik daerah ke Bidang Aset. Proses-proses pengelolaan barang milik daerah yang lainnya sesuai tahapan telah berjalan baik

### **Saran**

1. Perlu segera menetapkan Perda pengelolaan barang milik daerah yang berpedoman pada PP No. 27 Tahun 2014 dan Permendagri 19 Tahun 2016 yang baru diterbitkan Pemerintah sehingga pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Minahasa Selatan mendapat kepastian hukum;
2. Pemerintah Kabupaten Minahasa selatan perlu menetapkan standar operasional prosedur pengelolaan barang untuk memudahkan pemberian tugas dan tanggungjawab, memudahkan pemahaman pengelolaan barang milik daerah, mempermudah dalam mengetahui terjadinya kegagalan sistem dan penyelewengan kewenangan, memudahkan dalam kontrol ketepatan waktu pelaporan dan monitoring;
3. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan perlu mengadakan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan teknis bagi kepala SKPD, pengurus dan penyimpan barang milik daerah untuk meningkatkan komitmen, pemahaman dan kapasitas mereka dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah;
4. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan perlu menetapkan pengendalian dan pengawasan yang meliputi seluruh tahap dalam pengelolaan barang milik daerah. Pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh pejabat yang memang memiliki kapasitas dalam pengendalian dan pengawasan barang milik daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Azhar, Iqlima. 2013. *Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, Dan Sistem Informasi Terhadap Manajemen Aset (Studi Pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh)*. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Jurnal Akuntansi Volume 2, No.1 ISSN 2302-0164.

- Basir, Abd. 2009. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas Fiskal Daerah Kota Parepare*. Program Studi Magister Keuangan Daerah. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
- Bungin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Chabib Soleh dan Heru Rocmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Jakarta : Fokus Media
- Crhistine, Amela E. 2014. *Perbandingan PP 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan PP 6 Tahun 2006 dan PP 38 Tahun 2008*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : PT Indeks
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. *Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hanis, Muhammad H. 2011. *The Aplication Of Public Asset Mangement In Indonesian Local Government (Case Study In South Sulawesi Province)*. Queensland University Of Technology, Brisbane Australia. Jurnal Of Corporate Real Estate Vol. 13 No.1, 2011 PP, 36-47 DOI : 10.1108/14630011111120332
- Hasfi, Nyemas. 2013. *Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang)*. Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Jurnal Tesis PMIS UNTAN PSIAN Vol.1, No 0001.
- <http://beritakawanua.com/berita/minsel/sudah-dua-minggu-server-e-ktip-rusak-di-minsel-rusak#sthash.aUSJWuaf.dpbs> di akses tanggal 24 Juni 2016
- <http://manado.bpk.go.id/>
- <http://www.detikawanua.com/2016/05/fasilitas-umum-di-minsel-memprihtinkan.html?m=1> di akses tanggal 24 Juni 2016
- <http://www.gomando.com/2016/07/19/13911/banyak-gedung-sekolah-rusak-di-minsel-mamoto-input-dapodik-sekolah-kurang-perhatikan-fasilitas-sekolah/> di akses tanggal 19 Agustus 2016
- <http://www.identitasnews.com/2016/04/gara-gaar-jalan-lengan-wartawati.html?m=1> di akses tanggal 24 Juni 2016
- <http://www.manadoterkini.com/2015/10/18581/pemkab-minsel-gelar-bimtek-penelusuran-bmd-bagi-pejabat-dan-pegawai-pengelola/> di akses tanggal 28 Desember 2015
- <http://www.manadoterkini.com/2016/06/33757/wow-ternyata-inilah-penyebab-minsel-gagal-raih-wtp/> di akses tanggal 14 Juli 2016
- <http://www.manadoterkini.com/2016/09/37258/Wabup-Minsel-cek-keberadaan-aset-di-tiga-dinas/> di akses tanggal 26 September 2016
- <http://www.mediasulut.co/detailpost/waspadai-penggelapan-aset-daerah> di akses tanggal 26 September 2016
- Iskandar, Ika A. 2013. *Analisis pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Bogor dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)*. Fakultas Ekonomi Program Studi Mgister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.
- Istianto, Bambang. 2009. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Jensen, M dan W. Meckling. 1976. *Theory of the Firm : manegerial behavior, Agency and Ownership Stucture Journal Of Financial Economic*. University Of Rochester. Journal of Financial Economics, October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360

- Juanda. 2011. *Implementasi Good Governance Dalam Proses Transfer Aset Pemerintah Daerah Kota Metro*. Fakultas ISIP Prodi Magister Ilmu Pemerintahan. Universitas Lampung
- Kusen, Gaby Jelly. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pengelolaan Aset Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara)*. Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. Lex et societatis, vol. III/no. 2/mar/2015/edisi khusus
- Kusumastuti, Dyah. 2014. *Modul Manajemen Logistic Organisasi Publik*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas Dan Good Governance*. Jakarta Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,.
- Local Governance Support Program, Finance and Budgeting Team. 2008. *Panduan Pelatihan Pengelolaan Barang Daerah dan Penyusunan Rencana Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah)*. LGSP
- Lukow, Seftian. 2013. *Eksistensi Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Kota Manado*. Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. Vol.I/No.5/Okttober-Desember /2013
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Masdiyanti, Putu Riesty. 2016. *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 14.2 Februari 2016. 1150-1182. ISSN 2302-8556
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nadir, S. 2014 . *Modul Mata Kuliah Kebijakan Publik*. Universitas Hasanudin
- Nagor, Teuku Fahrian. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat (Studi Pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat)*. Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 4, No. 1, Februari 2015 ISSN 2302-0164 pp 72-79.
- Nordiawan, deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Jakarta : Salemba Empat
- Pekei, Beni. 2014. *The Effectiveness Of Local Asset Management (A Study On The Government Of Jayapura)*. Faculty of Economics and Business, Brawijaya University Malang, East Java, Indonesia. International Journal of Business and Management Invention ISSN (Online): 2319 – 8028, ISSN (Print): 2319 – 801X www.ijbmi.org Volume 3 Issue 3|| March. 2014|| PP.16-26.
- Ponamon, Irene Fransisca. 2014. *Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Manado*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Jurnal Going Concern Vol. 9 No. 2 ISSN 1907-9737
- Priyono, Karnanto. 2013. *Keandalan Informasi Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrua : Kajian Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kabupaten Sampang*. UIN Malang. Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 1 E-ISSN : 2442-8922
- Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan keuangan. 2010. *Pemanfaatan Barang Milik Daerah*. Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*.

- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Sekretariat Negara RI.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Sekretariat Negara RI.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 *tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Sekretariat Negara RI.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 *tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Sekretariat Negara RI.
- Sambudi. 2012. *Implementasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Pengadilan Tinggi Agama Manado*. Program Studi PSP Pascasarjana Unsrat. Jurnal Ilmu administrasi (JIA) Vol 8, No. 3 (2012)
- Simamora, Rudianto. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca Pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan Keuangan pemerintah di kab. Tapanuli selatan*. Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 10 Nomor 01.
- Subagya. 1995. *Manajemen Logistik*. Jakarta : PT. Gunung Agung
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta
- Sumampow, Nancy. 2015. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi*. Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 2, Pebruari 2015 ISSN: 2302-2019
- Suparmoko. 2001. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sutawa. 2014. *Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Aset Dan Kinerja Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Ngawi*. Fakultas Ekonomi Universitas Soerjo Ngawi. MEDIA SOERJO Vol. 14 No 1 April 2014. ISSN 1978 – 6239
- Suteja, I Made Agus. 2016. *Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sebagai Bagian Laporan Pertanggungjawaban Pada Akuntabilitas Publik dan Transparansi Pemerintah Kabupaten Badung-Bali*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.1(2016) :1-28 ISSN:2337-3067.
- Suwanda, Dadang. 2013. *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda*. Jakarta : PPM.
- Tukunang, Stanly C. F. 2016. *Manajemen Aset Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro*. Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Jurnal Emba Vol. 4 No. 2 Juni 2016. ISSN 2303-1174.
- Widodo, Joko . 2001. *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*. Surabaya : Insan Cendekia.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Public Teori Dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.

# **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEANDALAN DAN KETEPATAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Anando Iphan Kosegeran, Lintje Kalangi, Heince Wokas  
(Email: anandokosegeran@yahoo.com)

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the fact that the financial statements of local government in Fiscal Year 2008 through Fiscal Year 2012, getting Disclaimer opinion of the Audit Board of the Republic of Indonesia Representatives of the Province of North Sulawesi. Therefore, with stronger demand and transparency of public institutions, both the center and in the regions, the researchers are interested in examining the "analysis of the factors affecting the reliability and accuracy of financial statements on education in Southeast Minahasa regency government. This study aims to determine whether the factors of human resource capacity, utilization of information technology and internal control of accounting affect the reliability and accuracy of financial reports on education in Southeast Minahasa Government. This study uses a quantitative research that emphasizes the hypothesis testing. The analytical method used in this research is multiple linear regression analysis, whereas for the processing of research data using SPSS version 21. The test results partially variable by using the criteria of significance  $<0.1$  indicates that, human resource capacity, utilization of information technology and internal accounting pengendalian significant effect on the reliability and accuracy of the financial statements of the local work force in Southeast Minahasa regency government. While the test together shows that the human resource capacity, utilization of information technology and accounting internal control significant effect on the reliability and accuracy of the financial statements of the local work force in Southeast Minahasa regency government.*

*Keywords: Capacity of Human Resources, Information Technology, Internal Control, Reliability and Accuracy of Government Financial Statements, SKPD.*

## **PENDAHULUAN**

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Sedangkan perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dikutip oleh Mardiasmo, 2006). Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (*stakeholder*) (Indriasari, dan Narhatyo. 2008).

Pelaporan keuangan pada laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data yang tidak sesuai bahkan keliru. Hal ini dapat kita lihat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2008 sampai Tahun Anggaran 2012 mendapat opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yaitu Disclaimer, pada Tahun Anggaran 2013 mendapat opini BPK-RI Tidak Wajar (TW) dan pada Tahun Anggaran 2014 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (*BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara*). Laporan keuangan SKPD menurut Permendagri nomor 13 Tahun 2006 Tentang pengelolaan keuangan daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir, kenyataan dari tahun-tahun sebelumnya PPKD pada Kabupaten Minahasa Tenggara telah menyampaikan permintaan data laporan keuangan SKPD pada bulan pertama setelah tahun anggaran berakhir, akan tetapi sampai pada batas waktu pemasukan, laporan keuangan SKPD tidak semua pejabat pengguna anggaran sebagai pelaksana anggaran di SKPD menyampaikan laporan keuangan tersebut pada PPKD. Hal ini disimpulkan laporan keuangan SKPD masih belum memenuhi kriteria ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan pelaporan keuangan yang terjadi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara disimpulkan, bahwa laporan keuangan tersebut masih belum memenuhi kriteria keandalan dan ketepatan waktu. Mengingat bahwa keandalan dan ketepatan waktu merupakan unsur informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. *Pertama* yang mungkin mempengaruhi keandalan dan ketepatan laporan keuangan adalah kapasitas sumber daya manusia. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, A. 2007). Disinilah peran aparatur sebagai sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang baik untuk mengelola keuangan daerah. Salah satu cara yang dapat ditempuh aparatur dalam peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan dengan Bimbingan Teknis atau pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan atau lembaga-lembaga Pemerintah lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, sehingga tujuan pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat dicapai. *Kedua* yang mungkin mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto, 2002). Untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. *Ketiga* yang mungkin mempengaruhi keandalan laporan keuangan adalah pengendalian intern akuntansi. Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja (Riasetiawan. 2007). Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu sebagian besar SKPD belum memiliki atau mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga jalannya proses administrasi dan program kegiatan sering terhambat serta kurang akurat karena tidak memiliki acuan. Berdasarkan fenomena yang terjadi peneliti tertarik untuk



meneliti hal apa yang mungkin mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah pada Kabupaten Minahasa Tenggara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara?
3. Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara?
4. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatan laporan keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan laporan keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara?
6. Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap ketepatan laporan keuangan SKPD di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Agency Theory (Teori Keagenan)***

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*prinsipal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (*Jensen dan Meckling, 1976*).

Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*). Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya (*Faristina, 2011*).

### **Teori Kepatuhan**

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-limu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Tyler dalam Septiani, (2005), terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam *tangible*, *insentif*, dan *penalti* yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

### **Teori Atribusi**

Pencetus teori atribusi adalah Fritz Heider yang menjelaskan tentang teori tentang penyebab seseorang melakukan perilaku tertentu. Apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor disposisional (faktor *internal*), misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain sebagainya, atau disebabkan oleh keadaan eksternal, misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang

memaksa seseorang melakukan perbuatan tertentu (Luthans, 2005). Teori Atribusi (Green and Mitchel. 1979) dalam Gifandi (2011), menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang disebabkan oleh atribut penyebab. Maka tindakan seorang pemimpin atau orang yang diberi kewenangan atau kekuasaan dipengaruhi oleh atribut penyebab. Tindakan kecurangan dapat dipengaruhi adanya sistem pengendalian internal dan monitoring oleh atasan.

### **Laporan Keuangan Pemerintah**

Laporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi keuangan tersebut. Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Adapun laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

### **Keandalan (*Reliability*)**

Keterandalan atau keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi, Winidyaningrum, C. dan Rahmawati. (2010).

### **Ketepatan**

Ketepatan atau ketepatwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan, Gusrita, Ririn (2013). Ketepatan atau ketepatwaktuan laporan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan, (PP. No. 24 Tahun 2005). Konstruk nilai informasi ketepatwaktuan diukur dengan indikator sebagai berikut. *Timelines, Sistematis waktu dan Sistematis unsure*.

### **Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Mustafa, S. dan Rosidi. 2011).

Menurut Dunnetts dalam Indriasari, dan Narhatyo. (2008). anonim, *skill* adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Menurut Blanchard dan Thacker (2004) dalam Indriasari, dan Narhatyo. (2008) anonim, *skill* seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut O'Brien (2007:6) teknologi informasi adalah teknologi pendukung dari sistem informasi, yaitu sistem berbasis (TI) yang mengelola komponen-komponennya berupa *hardware*, *software*, *netware*, *dataware*, dan *brainware* untuk melakukan transformasi data menjadi informasi. Teknologi informasi dapat disimpulkan sebagai *hardware*, *software*, *netware*, *dataware*, *brainware*, dan teknologi pemrosesan informasi lainnya untuk mendukung sistem informasi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan

*software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Tingginya biaya tenaga kerja manusia yang diperlukan dalam pemrosesan data membuat pemrosesan secara manual kurang efektif jika ditinjau dari sisi volume dan biaya pemrosesan. Pemrosesan secara manual memiliki biaya yang stabil pada angka yang cukup tinggi. Sementara dengan menggunakan mesin, meski investasi awal lebih besar biayanya, namun pada perkembangannya akan dapat mengurangi biaya pemrosesan dengan tetap menjaga volume.

### **Pengendalian Intern Akuntansi**

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian intern administratif (*internal administrative control*). Pengawasan Intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Peraturan pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur pembentuk SPIP (sistem pengendalian intern pemerintah) antara lain: Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan Pemantauan pengendalian intern.

### **Penelitian Terdahulu**

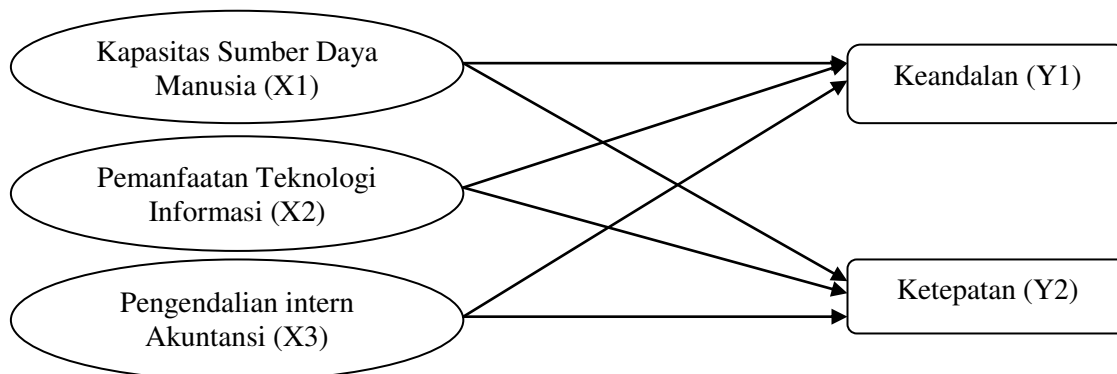
Gusrita, Ririn (2013) “Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah”. Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten Inhil. Ekasari, Winda (2013) “Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kampar”. Survei pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Kampar. Adriani, Wiwik (2010) “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Winidyaningrum, dan Rahmawati (2010) “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi”. Studi empiris pada pemerintah daerah Subosukawonosraten. Wansyah, dkk. (2012) “Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan kegiatan pengendalian terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD pada Provinsi Aceh. Indriasari, dan Narhatyo (2008) “Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern

akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah”. Studi pada pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir.

### KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual bertujuan agar penelitian ini dapat terarah secara sistematis dalam suatu alur metode penelitian yang baik, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dicapai. Kerangka konsep penelitian secara komprehensif perlu dibangun dengan mendasarkan kepada fakta masalah yang ada, keterkaitan variabel secara teoritis, kajian penelitian-penelitian sebelumnya, metodologi, metode analisis dan dengan keselarasan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian



### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keandalan dan Ketepatan Laporan Keuangan SKPD

Perubahan tersebut membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai. Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia subbagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Alimbudiono dan Fidelis (2004), Dinata (2004), Imelda (2005) serta Adriani, Wiwik (2010). Dari uraian tersebut penulis menduga terdapat hubungan positif antara kapasitas sumber daya manusia dengan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H1 Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.*

Rendahnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan, salah satunya adalah penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum/tidak memenuhi nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan (Indriasari, dan Narhatyo. 2008). Dari uraian tersebut penulis menduga terdapat hubungan positif antara kapasitas sumber daya manusia dengan ketepatan laporan keuangan pemerintah daerah, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H4 Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.*

#### Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keandalan dan Ketepatan Laporan Keuangan SKPD

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan

sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009 dalam Widyaningrum, 2010). Dari uraian tersebut penulis menduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H2 Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.*

Penelitian Cohen *et al.* (2007) dalam Winidyaningrum, dan Rahmawati. 2010. menemukan bahwa sistem/teknologi informasi yang dimiliki pemerintah daerah di kotamadya-kotamadya Yunani merupakan alat yang sangat berguna untuk menilai fungsionalitas sebuah sistem dan tingkat kesesuaian dengan lingkungan organisasional. Suatu entitas akuntansi dalam pemerintah daerah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatan waktu. Dari uraian tersebut penulis menduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan ketepatan laporan keuangan pemerintah daerah, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H5 Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.*

### **Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keandalan dan Ketepatan Laporan Keuangan SKPD**

Aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah (1) identifikasi; (2) pencatatan; (3) pengukuran; (4) pengklasifikasian; (5) pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan; (6) penyajian laporan; dan (7) penginterpretasian atas hasilnya.

Dikaitkan dengan penjelasan mengenai pengendalian intern akuntansi, maka penyebab ketidakandalan laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern akuntansi. Mustafa S, dan Rosidi (2011). Dari uraian tersebut penulis menduga terdapat hubungan positif antara pengendalian intern akuntansi dengan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H3 Pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.*

Salamun (2007) dalam Prapto, S. (2010). ketepatanwaktuan dapat dipengaruhi berbagai macam aspek, salah satunya kemampuan sistem akuntansi. Sistem akuntansi yang baik memiliki pengendalian intern yang baik pula. Pengendalian intern ini diharapkan mampu mencegah terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi serta dapat memberikan perlindungan bagi data organisasi dari ancaman sabotase sistem. Pengendalian intern disusun agar pelaporan keuangan dapat memenuhi asas ketertiban. Perwujudan dari asas ketertiban tersebut adalah penyampaian pelaporan keuangan secara tepat waktu. Dari uraian tersebut penulis menduga terdapat hubungan positif antara pengendalian intern akuntansi dengan ketepatan laporan keuangan pemerintah daerah, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H6 Pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap ketepatan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.*

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini berasal dari responden yaitu dari semua yang menjalankan fungsi keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2003:17).

### Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 140. Populasi penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode sampling purposive (*purposive sampling*). (Kuncoro, 2003:111) bahwa secara umum jumlah sampel untuk studi korelasional, dibutuhkan minimal 30 (tiga puluh) sampel untuk menguji ada tidaknya hubungan. (Sugiyono, 2006) sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, atau secara umum pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan adalah pegawai di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jumlah sampel keseluruhan yang akan di jadikan responden adalah 87 orang pegawai.

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen (kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi) dan dua variabel dependen (keandalan dan ketepatan). Pengukuran variabel menurut Sunyoto (2011), Dalam butir pertanyaan terdapat beberapa alternatif jawaban yang tersedia dengan skala ordinal (skala likert) yaitu menggunakan lima (5) tingkat skala sesuai alternatif jawaban. Pengukuran variabel dengan kuisioner menggunakan skala Likert lima poin, poin 5 sangat tinggi, poin 4 tinggi, poin 3 sedang, poin 2 rendah dan poin 1 sangata rendah.

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, khususnya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mnahasa Tenggara. Waktu pelaksanaan dalam penelitian ini dilakukan selama 6 bulan yaitu pada bulan April sampai dengan September Tahun 2015.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL

### Analisis Regresi Linear Berganda:

Analisis Regresi Linear Berganda:

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	11.174	3.166		3.529	.001
	Kapasitas Sumber Daya Manusia	.113	.063	.191	1.792	.077
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	-.103	.051	-.210	-2.023	.046
	Pengendalian Intern Akuntansi	.454	.097	.521	4.656	.000

a. Dependent Variable: Keandalan

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$Y_1 = 11,174 + 0,113X_1 + (-0,103)X_2 + 0,454X_3$$

Dari model regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Konstanta  $\alpha$  sebesar 11,174 artinya jika variabel kapasitas sumber daya manusia ( $X_1$ ), pemanfaatan teknologi informasi ( $X_2$ ), dan pengendalian intern akuntansi ( $X_3$ ) nilai adalah 0, maka besarnya keandalan laporan keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa

Tenggara adalah sebesar 11,174. Nilai  $\beta_1$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel kapasitas sumber daya manusia (X1) sebesar 0,113, nilai  $\beta_2$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel pemanfaatan teknologi informasi (X2) sebesar -0,103, nilai  $\beta_3$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel pengendalian intern akuntansi (X3) sebesar 0,454.

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.952	1.636		2.415	.018
1 Kapasitas Sumber Daya Manusia	.079	.033	.261	2.434	.017
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.054	.026	.215	2.054	.043
Pengendalian Intern Akuntansi	.102	.050	.228	2.029	.046

a. Dependent Variable: Ketepatan

$$Y_2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$Y_2 = 3,952 + 0,079X_1 + 0,054X_2 + 0,102X_3$$

Dari model regresi hipotesis kedua di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Konstanta  $\alpha$  sebesar 3,952 artinya jika variabel kapasitas sumber daya manusia(X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), dan pengendalian intern akuntansi (X3) nilai adalah 0, maka besarnya ketepatan laporan keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebesar 3,952. Nilai  $\beta_1$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel kapasitas sumber daya manusia (X1) sebesar 0,079, nilai  $\beta_2$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel pemanfaatan teknologi informasi (X2) sebesar 0,054, nilai  $\beta_3$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel pengendalian intern akuntansi (X3) sebesar 0,102.

### Pembahasan

Dengan menggunakan variabel dependen keandalan pengujian koefisien korelasi linier yang dihasilkan antara variabel kapasitas sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), pengendalian intern akuntansi (X3) dan variabel keandalan (Y1) adalah sebesar 0,567. Nilai korelasi (R) sebesar 0.567 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara variabel X1, X2, dan X3 dengan variabel Y1. Sedangkan nilai R Square atau koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.321 menunjukkan bahwa kontribusi variabel X1, X2, dan X3 untuk menjelaskan model variabel Y1 adalah sebesar 32,1% dan sisanya 67,9 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sedangkan dengan menggunakan variabel dependen ketepatan pengujian koefisien korelasi linier yang dihasilkan antara variabel kapasitas sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), pengendalian intern akuntansi (X3) dan variabel ketepatan (Y2) adalah sebesar 0,561. Nilai korelasi (R) sebesar 0.561 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara variabel X1, X2, dan X3 dengan variabel Y2. Sedangkan nilai R Square atau koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.315 menunjukkan bahwa kontribusi variabel X1, X2, dan X3 untuk menjelaskan model variabel Y2 adalah sebesar 31,5% dan sisanya 68,5 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pengujian hipotesis menggunakan taraf signifikansi sebesar 10% untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas/independen (X) terhadap variabel terikat/dipendenden (Y) secara parsial dengan menggunakan uji t memakai kriteria yaitu apabila signifikan < 0,1 maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima dan apabila signifikan > 0,1 maka  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak.

### Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1) terhadap Keandalan (Y1)

Tingkat signifikansi dari variabel kapasitas sumber daya manusia (X1) adalah 0,077 < 0,1 hal ini berarti bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan laporan keuangan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu 0,077 atau lebih kecil dari 0,1. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang telah dirumuskan yaitu kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan

laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Adriani, Wiwik (2010) yaitu kapasitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Kondisi kapasitas sumber daya manusia yang ada ditata usaha keuangan yang belum mendukung dari segi jumlah dan latarbelakang pendidikan, akan tetapi mereka mampu mengatasinya dengan bimtek dan pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten atau dengan yang bekerjasama dengan instansi lain diluar wilayah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mengenai pengelolaan keuangan.

#### **Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) terhadap Keandalan (Y1)**

Tingkat signifikansi dari variabel pemanfaatan teknologi informasi (X2) adalah  $0,046 < 0,1$ , hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang telah dirumuskan yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Indriasari, D. dan E. Narhatyo (2008) pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan *output* lainnya lebih tepat waktu.

#### **Pengendalian Intern Akuntansi (X3) terhadap Keandalan (Y1)**

Tingkat signifikansi dari variabel pengendalian intern akuntansi (X3) adalah  $0,000 < 0,1$ , hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang telah dirumuskan yaitu pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mustafa S, dan Rosidi. (2011) dengan adanya pengendalian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara seperti salah satunya rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dapat mendeteksi kesalahan-kesalahan yang dilakukan sehingga dalam laporan keuangan pemerintah daerah sudah dapat di perbaiki.

#### **Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1) terhadap Ketepatan (Y2)**

Tingkat signifikansi dari variabel kapasitas sumber daya manusia (X1) adalah  $0,017 < 0,1$ , hasil penelitian ini mendukung hipotesis keempat yang telah dirumuskan yaitu kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Indriasari, dan Narhatyo. (2008) jika seorang pegawai diberi tugas sesuai dengan latarbelakang pendidikan maka dia akan menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu, sebaliknya jika diberi tugas atau pekerjaan bukan pada latarbelakang pendidikannya maka pegawai tersebut akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya sehingga pada akhirnya tidak sesuai yang diharapkan dengan target yang diberikan oleh atasan. Dalam penelitian ini banyak pegawai di SKPD pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara diberikan tugas tidak sesuai dengan bidang keilmuannya sehingga dalam prosesnya pegawai tersebut mengalami kesulitan untuk menghasilkan output tepat pada waktunya.

#### **Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) terhadap Ketepatan (Y2)**

Tingkat signifikansi dari variabel pemanfaatan teknologi informasi (X2) adalah  $0,043 < 0,1$ , hasil penelitian ini mendukung hipotesis kelima yang telah dirumuskan yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Winidyaningrum, dan Rahmawati. (2010) pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah dengan tepat waktu. Pada penelitian ini SKPD pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sudah memanfaatkan teknologi informasi dalam proses transaksi dan pengolahan data laporan keuangan di karenakan prosesnya lebih cepat dalam suatu kegiatan



pada SKPD seperti pembuatan Surat Perintah Pembayar (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam transaksi keuangan.

### **Pengendalian Intern Akuntansi (X3) terhadap Ketepatan (Y2)**

Tingkat signifikansi dari variabel pengendalian intern akuntansi (X3) adalah  $0,046 < 0,1$ , hasil penelitian ini mendukung hipotesis keenam yang telah dirumuskan yaitu pengendalian Intern akuntansi berpengaruh terhadap ketepatan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Prapto, S. (2010) dalam penelitian ini dengan adanya pengendalian intern akuntansi dari setiap unit organisasi atau SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara akan terwujudnya ketepatan dalam laporan keuangan. Dikarenakan dalam pengendalian intern akuntansi yang dijalankan dengan tepat pada setiap SKPD akan menjadikan kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik, dan tentunya dengan kualitas laporan keuangan yang baik sehingga dalam penyajiannya dapat tepat waktu.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uji dan analisis data membuktikan ada pengaruh variabel yang diajukan sebagai alat ukur yaitu variabel kapasitas sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), pengendalian intern akuntansi (X3), terhadap keandalan (Y1) dan ketepatan (Y2) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia mempengaruhi keandalan laporan keuangan di SKPD pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara positif mempengaruhi keandalan laporan keuangan di SKPD pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi secara positif mempengaruhi keandalan laporan keuangan di SKPD pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia secara positif mempengaruhi ketepatan laporan keuangan di SKPD pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara positif mempengaruhi ketepatan laporan keuangan di SKPD pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi secara positif mempengaruhi ketepatan laporan keuangan di SKPD pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah:

1. Untuk kapasitas sumber daya manusia sebaiknya dalam penentuan posisi jabatan dalam pengelolaan keuangan di SKPD ditempati oleh pegawai yang berlatarbelakang pendidikan di bidang akuntansi, manambah pegawai yang berlatarbelakang pendidikan bidang akuntansi dalam pengelolaan keuangan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Pada pemanfaatan teknologi informasi disarankan untuk menambah jumlah fasilitas teknologi informasi seperti laptop dan personal computer untuk menunjang para pegawai dalam pengelolaan keuangan. Sedangkan pada pengendalian intern akuntansi disarankan agar para pegawai lebih memahami mengenai standar operasional prosedur (SOP) pada SKPD masing-masing terutama dalam pengelolaan keuangan.

2. Menambah jumlah pelatihan-pelatihan dalam pengelolaan keuangan dan atau bekerja sama dengan lembaga/istansi terkait dalam pengelolaan keuangan seperti Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado sebagai lembaga ilmiah.
3. Penelitian berikutnya diharapkan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang belum dimasukkan dalam penelitian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adriani, Wiwik. 2010. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol. 5.
- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. *Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 05 No. 02. Hal. 18-30.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta : PT Indeks.
- Dinata, Anton Mulhar. 2004. *Tinjauan Atas Kesiapan SDM pada Instansi Pemerintah Kota Palembang dalam Penerapan Akuntansi Daerah Menuju Terciptanya Good Governance di Era Otonomi Daerah*. Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Ekasari, Winda. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kampar. [www.google.com](http://www.google.com).
- Faristina, Rosalin. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Studi pada BLU di Kota Semarang*. Skripsi Universitas Diponegoro : Semarang.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gusrita, Ririn. 2013. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. [www.google.com](http://www.google.com).
- Indriasari, D. dan E. Narhatyo. 2008. *Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah*. *Simposium Nasional Aakuntansi, XI*. Pontianak.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Luthans, Fred, 2005. *Perilaku Organisasi, Edisi Sepuluh*, Diterjemahkan oleh : Vivin Andhika Yuwono; Shekar Purwanti; Th.Arie Prabawati; dan Winong Rosari. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No. 1, Hal. 1-17.
- Mustafa S, Sutrisno dan Rosidi. 2011. Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Tuasikal, A. 2007. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 08, No. 01. Hal:1466-1468.
- Turban, Rainer, Potter, *"Introduction To Information Technology Pengantar Teknologi Informasi"*, Edisi 3, Penerbit Salemba Infotek, 2006.
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, and Bernard Wong-OnWing. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.
- Winidyaningrum, C. dan Rahmawati. 2010. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi*. Simposium Nasional Akuntansi, XIII, Purwokerto.

**STUDI KOMPARATIF PEMBOBOTAN KRITERIA AUDIT KINERJA AUDITOR  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DENGAN PEMBOBOTAN MENGGUNAKAN  
METODE *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS*  
(STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD)**

Iwan Bin Lawitan, Herman Karamoy, Agus Tony Poputra  
(Email : ilawitan@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aimed to recalculate the weighting of performance audit criteria by using Analytical Hierarchy Process Method and comparing its results with the weighting of performance audit of Indonesian Supreme Audit Institution's Auditor (BPK). Research conducted on Supervisory Apparatus Capability Model Government (APIP) at the Office of Inspectorate of Talaud Regency. This research is a descriptive qualitative-quantitative approach. Method of data collection with interviews, documentation and questionnaire. The results showed that in weighting of performance audit criteria, BPK's auditor still use direct weighting and judgment, and there is a difference of percentage between performance audit criteria of BPK auditor and using AHP method.*

**Keywords : Weighting, Performance Audit Criteria, AHP**

**PENDAHULUAN**

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dimana satu atau lebih prinsipal (*principal*) melimpahkan wewenang kepada orang lain/agen (*agent*) untuk kepentingan mereka. Hubungan keagenan ini mengakibatkan terjadinya informasi asimetris (*assymetric information*) dan konflik kepentingan (*conflict of interest*) (Jensen dan Meckling, 1976). Informasi asimetris terjadi karena agen mempunyai lebih banyak informasi dan memiliki akses yang lebih besar atas informasi tersebut sedangkan konflik kepentingan terjadi karena agen tidak selalu bertindak sesuai kepentingan prinsipal.

Hubungan keagenan yang terjadi pada sektor publik adalah ketika adanya pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk desentralisasi dan otonomi daerah. Pihak pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam hubungan keagenan, Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan di daerah bertindak selaku agen sedangkan DPRD adalah sebagai prinsipal.

Salah satu hubungan keagenan antara Kepala Daerah dan DPRD adalah ketika Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ranperda tersebut dibahas oleh kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Untuk menjamin bahwa pertanggungjawaban APBD dan laporan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan maka dibutuhkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). APIP dalam organisasi Pemerintah Daerah menjalankan fungsi katalisator dan fungsi penjamin mutu (*quality assurance*) (KEPMENPAN 2014).

Dalam melakukan fungsinya APIP memiliki peran strategis, sebagai katalisator dan dinamisator dalam menyukseskan pembangunan daerah. APIP dibutuhkan oleh Kepala Daerah untuk membantunya dalam segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Bahkan lebih jauh lagi APIP bisa menjadi konsultan bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah

(SKPD) yang lain serta pimpinan daerah yang berkaitan dengan administrasi dan aturan yang ada, fungsi APIP di daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh Pemeriksa dalam merencanakan pemeriksaan kinerja adalah mengidentifikasi kriteria yang diperlukan untuk mengevaluasi hal-hal yang diperiksa. Penetapan kriteria dalam pemeriksaan kinerja sangat penting, karena hal tersebut merupakan salah satu unsur temuan pemeriksaan yang berisi data/informasi yang menggambarkan keadaan yang diharapkan atau seharusnya terjadi dan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja objek yang diperiksa, serta dapat memberikan gambaran komprehensif dalam memahami temuan pemeriksaan (Juknis Penetapan Kriteria Pemeriksaan Kinerja, 2011:1).

Kriteria pemeriksaan kinerja diperlukan untuk menilai objek yang diperiksa. Kriteria pemeriksaan adalah standar atau ukuran yang masuk akal dan dapat dicapai untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dari objek yang diperiksa. Kriteria menggambarkan praktik-praktik yang baik, yaitu harapan mengenai yang seharusnya dilakukan atau dihasilkan oleh objek yang diperiksa. Pemeriksaan kinerja menentukan apakah suatu program dan kegiatan telah sesuai atau tidak sesuai dengan kriteria dan memberikan rekomendasi atau perbaikan. Rekomendasi diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja entitas yang diperiksa. Kriteria digunakan untuk menilai dan mengukur apakah suatu program dan kegiatan ekonomis, efisien dan efektif. Untuk menilai dan mengukur maka kriteria pemeriksaan kinerja harus di kuantitatifkan. Mengingat kriteria penilaian lebih dari satu sehingga menghasilkan lebih satu nilai, dan untuk mendapatkan “satu nilai” maka dibutuhkan pembobotan terhadap tiap kriteria berdasarkan derajat pentingnya kriteria tersebut.

Pembobotan kriteria dengan menggunakan metode *direct weight* memiliki kelemahan yaitu satu kriteria dapat berbeda derajat pentingnya dengan kriteria yang lain sehingga tidak bisa disamakan. Selanjutnya, metode *judgement* auditor bersifat subjektif sehingga pembobotan tidak dapat digeneralisasikan. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam simpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja. Informasi yang dikumpulkan membantu dalam memahami kejadian-kejadian agar dapat mengembangkan *judgment* yang lebih baik dalam pengambilan keputusan atas kejadian-kejadian tersebut. Tidak semua informasi berguna untuk memperbaiki pemahaman dan *judgment*.

Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah salah satu metode pembobotan dilakukan dengan membandingkan antar kriteria dengan menggunakan metode berpasangan, dengan cara setiap kriteria akan dibandingkan tingkat kepentingannya dengan kriteria-kriteria yang lain dengan membuat tabel konversi dari pernyataan prioritas/kepentingan ke dalam angka-angka sehingga pada akhirnya bisa diketahui bobot untuk masing-masing kriteria. Selain itu, AHP mempunyai kemampuan memecahkan masalah yang multi obyektif dan multi kriteria yang berdasarkan pada perbandingan preferensi dari setiap elemen dalam hirarki. Sehingga dapat dikatakan bahwa AHP merupakan suatu metode pengambilan keputusan yang komprehensif.

Pembobotan kriteria audit kinerja yang akan dibandingkan adalah pembobotan kriteria pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA. 2014. Sesuai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014 BPK, 1 diantara 7 inspektorat daerah kabupaten/kota yang diperiksa kinerja atas efektivitas kegiatan aparat pengawas intern pemerintah adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Pernyataan Nomor 04 mengenai Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja, menyatakan bahwa salah satu yang harus dilakukan oleh pemeriksa dalam merencanakan suatu pemeriksaan kinerja adalah mengidentifikasi kriteria yang diperlukan untuk mengevaluasi hal-hal yang harus diperiksa. Penetapan kriteria dalam pemeriksaan kinerja sangat penting, karena: (1) Kriteria merupakan salah satu unsur temuan pemeriksaan yang berisi data/informasi yang menggambarkan keadaan yang diharapkan atau

seharusnya terjadi; (2) Kriteria akan memberikan gambaran komprehensif dalam memahami temuan pemeriksaan; dan (3) Kriteria merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja objek yang diperiksa, baik penilaian terhadap aspek ekonomi, efisiensi, maupun efektivitas.

Kriteria pemeriksaan kinerja dapat meliputi ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif. Bentuk Kriteria terkait erat dengan pendekatan pemeriksaan yang digunakan. Pada pendekatan berorientasi hasil, pemeriksa mengembangkan kriteria untuk melakukan pengukuran langsung atas kuantitas dan/atau kualitas dari *input*, *output*, *outcome*, atau dampak dari suatu program/kegiatan. Sementara itu, pada pendekatan berorientasi proses, pemeriksa dapat mengembangkan kriteria dalam suatu kerangka sistematis berupa praktik pengelolaan yang lebih baik (*better management practice*).

Berdasarkan uraian diatas, pembobotan merupakan suatu faktor penting dalam penilaian kinerja secara lebih objektif, maka rumusan masalah untuk penelitian ini dikemukakan dalam pertanyaan penelitian adalah :

1. Bagaimana perhitungan bobot kriteria audit kinerja dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) ?
2. Bagaimana perbedaan hasil audit kinerja pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menggunakan pembobotan berdasarkan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dengan hasil audit kinerja berdasarkan pembobotan kriteria audit kinerja auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Konsep *agency theory* menurut Anthony dan Govindarajan (1995) dikutip oleh Ma'ruf (2006) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas bagi kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Berkaitan dengan masalah keagenan, Mitrick (1973), Lupia (2001), dan Shapiro (2005), berpendapat bahwa masalah keagenan muncul pada teori keagenan konvensional, karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, yang membawa konsekuensi pada biaya keagenan. Maknanya adalah semakin besar konflik prinsipal dan agen akan berdampak pada semakin besar biaya keagenan yang harus dikeluarkan untuk mengurangi terjadinya perbedaan kepentingan tersebut.

Menurut Lane (2003) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi moderen didasarkan pada serangkaian hubungan *principal-agent*. Hal senada dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman dan Lane (1990) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsip agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*), *moral hazard*, dan *adverse selection*. Informasi yang tidak simetris adalah informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) asumsi.

1. Asumsi tentang sifat manusia : asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasional (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*).
2. Asumsi tentang keorganisasian : asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara prinsipal dan agen.

3. Asumsi tentang informasi : asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

### **Keagenan pada Sektor Publik**

Dalam hubungan keagenan, terdapat dua pihak melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni yang memberikan kewenangan atau kekuasaan yang disebut prinsipal dan yang menerima kewenangan yang disebut agen (Halim, Abdullah 2006). Dalam suatu organisasi hubungan ini berbetuk vertikal, yakni antara pihak atasan (sebagai prinsipal) dan pihak bawahan (agen). Masalah keagenan sering timbul antara eksekutif sebagai agen dan legislatif sebagai prinsipal.

1. Masalah keagenan di eksekutif : eksekutif memiliki keunggulan dalam hal penguasaan informasi dibandingkan legislatif (asimetri informasi).Keunggulan ini bersumber dari kondisi faktual bahwa eksekutif adalah pelaksana semua fungsi pemerintah daerah dan berhubungan langsung dengan masyarakat dalam waktu yang sangat lama.Eksekutif memiliki pemahaman yang baik tentang birokrasi dan administrasi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari seluruh aspek pemerintahan. Oleh karena itu, anggaran untuk pelaksanaan pelayanan publik diusulkan untuk dialokasikan dengan didasarkan pada asumsi-asumsi sehingga memudahkan eksekutif memberikan pelayanan dengan baik. Eksekutif akan memiliki kecenderungan mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar dari yang aktual terjadi saat ini (asas maksimal).
2. Masalah keagenan di legislatif : perilaku oportunistik legislatif dapat terjadi pada dua posisi, yakni sebagai prinsipal dan juga sebagai agen. Sebagai prinsipal bagi eksekutif, legislatif dapat merealisasikan kepentingannya dengan membuat kebijakan seolah-olah merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak, tetapi menguntungkan legislatif dalam jangka panjang, baik secara individual maupun institusional.Melalui *discretionary power* yang dimilikinya, legislatif dapat mengusulkan kebijakan yang sulit untuk ditolak oleh eksekutif, meskipun usulan tersebut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan fungsi legislatif.

Sebagai agen bagi publik (pemilih), perilaku oportunistik legislatif lebih kelihatan jelas. Dalam penganggaran, legislatif semestinya membela kepentingan pemilihnya dengan mengakomodasi kebutuhan publik dan anggaran. Usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan anggaran seharusnya didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi ketika legislatif turun ke lapangan melakukan penjangkaran aspirasi rakyat. Ada dua kondisi dimanfaatkan oleh eksekutif untuk merealisasi perilaku oportunistiknya dalam proses penyusunan anggaran. Pertama, secara eksplisit berhubungan dengan anggaran legislatif dan kedua, melalui anggaran untuk pelayanan publik dalam bentuk “titipan”.Pada kondisi pertama, legislatif mengusulkan anggaran yang meningkatkan penghasilannya sehingga memenuhi *self-interestnya* dalam jangka pendek.Hal ini memunculkan *political corruption* atas anggaran (Garamfalvi, 1997). Sementara pada kondisi kedua, *self-interest* dalam jangka panjang ingin dicapai. Usulan anggaran yang diperjuangkan adalah yang mengharumkan nama politisi di wilayah tertentu, sehingga cenderung pada usulan yang *targetable* atau hasilnya kelihatan jelas oleh masyarakat. Akibatnya pembangunan cenderung di daerah yang merupakan wilayah pemilihan politisi yang *powerful* di legislatif. Masyarakat melihat dan memahami kecenderungan ini.

### **Audit**

Secara etimologi, pemeriksaan (*audit*) berasal dari bahasa latin dengan kata “*audere*” yang berarti mendengar. Mendengar yang efektif adalah sebuah aktivitas menyerap informasi dalam suatu media dengan menggunakan alat pendengaran yang diikuti dengan respon yang terprogram (Murwanto, Budiarmo, dan Ramadhana, 2012:2). Selanjutnya

menurut Elder, Beasley, dan Arens (2010:4) “*auditing* adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen”.

## **Kriteria**

### **1. Pengertian Kriteria**

Kriteria menggambarkan hal ideal untuk kinerja aktual yang akan diukur. Kriteria mencakup harapan, standar, peraturan, kebijakan, program pembandingan, tujuan program, atau kinerja rata-rata pada program atau institusi yang sama (Waring dan Morgan, 2007:325).

### **2. Tujuan Penetapan Kriteria**

Tujuan Penetapan Kriteria Pemeriksaan adalah untuk: (a) memberikan dasar yang baik sebagai alat komunikasi dalam tim pemeriksaan dan dengan manajemen pemeriksa mengenai sifat pemeriksaan; (b) memberikan dasar yang baik sebagai alat komunikasi dengan entitas yang diperiksa; (c) menghubungkan tujuan pemeriksaan dengan program pemeriksaan yang dilaksanakan selama tahap pelaksanaan pemeriksaan; (d) memberikan dasar pada tahap pengumpulan data dan penyusunan prosedur pemeriksaan; dan (e) memberikan dasar dalam menyusun temuan pemeriksaan (Juklak Pemeriksaan BPK, Arianto 2010:67). Langkah-langkah yang harus ditempuh auditor dalam proses penentuan kriteria adalah: (a) teliti apakah entitas telah memiliki kriteria sesuai dengan tujuan pemeriksaan; (b) bila ada apakah kriteria tersebut telah memenuhi karakteristik dapat dipercaya, obyektif, bermanfaat, bisa dimengerti, bisa diperbandingkan, lengkap, bisa diterima; (c) bila kriteria dimaksud tidak ada atau tidak memenuhi tujuan pemeriksaan maka auditor harus mengembangkan kriteria; dan (d) komunikasikan kriteria yang akan dipakai kepada entitas sebelum pemeriksaan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

### **3. Manfaat Kriteria Audit**

Sebagai patokan dalam melakukan penilaian, suatu kriteria audit dapat memberikan manfaat auditor sebagai berikut (Rai 2008:115-116).

1. Sebagai dasar komunikasi antara tim audit dengan manajemen entitas yang diaudit mengenai sifat audit. Tim audit akan membuat kesepakatan dengan *auditee* mengenai kriteria serta diterima atau tidaknya temuan yang didasarkan pada kriteria tersebut.
2. Sebagai alat untuk mengaitkan tujuan dengan program audit selama tahap pengujian terinci.
3. Sebagai dasar dalam pengumpulan data dan menyediakan dasar penetapan prosedur pengumpulan data.
4. Sebagai dasar penetapan temuan serta menambah struktur dan bentuk observasi audit.

### **4. Karakteristik Kriteria Audit**

*Dapat dipercaya*; kriteria yang dapat dipercaya akan menghasilkan simpulan yang sama ketika kriteria tersebut digunakan oleh auditor lainnya dalam keadaan dan lingkungan yang sama. *Obyektif*; kriteria yang obyektif berarti bebas dari segala bias, baik dari auditor maupun manajemen. *Berguna*; kriteria yang berguna artinya kriteria tersebut akan menghasilkan temuan dan simpulan yang berguna bagi pengguna informasi (*auditee*). *Dapat dimengerti*; kriteria yang dapat dimengerti berarti kriteria tersebut secara jelas dinyatakan dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda secara signifikan. *Dapat diperbandingkan*; kriteria yang dapat diperbandingkan berarti konsisten dengan kriteria yang telah digunakan dalam audit kinerja maupun kegiatan audit yang telah dilakukan sebelumnya. *Kelengkapan*; kelengkapan kriteria mengacu pada pengembangan yang signifikan atas kriteria-kriteria tertentu yang sesuai untuk menilai suatu kinerja. *Dapat*



*diterima*; kriteria yang dapat diterima berarti kriteria tersebut dapat diterima oleh semua pihak baik lembaga yang diaudit, pemerintah, maupun masyarakat umum lainnya. Semakin tingkat diterimanya suatu kriteria, maka semakin efektif audit kinerja yang dilakukan.

## **5. Langkah-langkah dalam menentukan kriteria audit**

1. Menilai ketepatan karakteristik kriteria audit : kriteria audit haruslah tepat sesuai dengan entitas yang diaudit. Untuk menilai ketepatan kriteria audit, auditor perlu mempertimbangkan karakteristik kriteria audit.
2. Menentukan sumber kriteria : dalam audit yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas, kriteria audit kemungkinan tidak tersedia dan tidak terdokumentasi pada *auditee*. Dengan demikian, auditor menghadapi kesulitan dalam menetapkan kriteria yang akan digunakan sebagai dasar penilaiannya. Apabila *auditee* belum mempunyai kriteria audit, auditor perlu menentukan kriteria audit. Kriteria audit dapat diperoleh dari undang-undang, peraturan, dan standar yang dikembangkan oleh asosiasi profesi atau lembaga ahli. Jika sumber tersebut tidak tersedia, auditor dapat mengandalkan pada data kinerja organisasi lain, baik di dalam maupun di luar sektor pemerintahan, yang mempunyai aktivitas operasi serupa, *best practice* yang ditentukan melalui *benchmarking* atau konsultasi, dan standar yang dikembangkan oleh auditor melalui analisis atas tugas atau aktivitas. Apabila standar sudah tersedia untuk *auditee*, auditor perlu terlebih dahulu menguji apakah standar itu wajar dan ada kaitannya dengan tujuan audit, sebelum standar tersebut digunakan sebagai kriteria audit. Apabila auditor menggunakan kriteria yang bersumber dari *auditee*, sebaiknya mereka lebih berhati-hati. Ada kemungkinan informasi tersebut kurang objektif karena *auditee* mempunyai kepentingan pribadi dalam penilaian. Mungkin juga *auditee* akan mempengaruhi auditor agar mereka menentukan kriteria yang hanya dapat menghasilkan temuan positif. Namun demikian, harus diakui bahwa *auditee* mempunyai pengetahuan yang luas di bidangnya, baik dalam melaksanakan pekerjaan maupun dalam menentukan hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, informasi dari *auditee* akan sangat bermanfaat sebagai bahan kriteria audit. Auditor sebaiknya lebih menaruh perhatian pada *auditee* sebagai sumber informasi dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya karena dari *auditee* akan diperoleh banyak informasi yang berkaitan dengan standar pelaksanaan pekerjaan, termasuk standar input dan standar hasil kegiatan yang ingin dicapai. Informasi ini sangat baik untuk digunakan sebagai kriteria audit.
3. Mengembangkan kriteria audit : untuk mengembangkan kriteria yang memenuhi syarat-syarat di atas, auditor harus mengembangkan kriteria audit. Auditor dapat memulai dari pernyataan kriteria yang bersifat umum atau luas sampai dengan pernyataan kriteria yang lebih khusus/spesifik, yang dapat menuntun auditor untuk menilai tercapainya ekonomi, efisiensi, atau efektivitas pelaksanaan dan hasil pekerjaan *auditee*. Semakin umum kriteria yang digunakan oleh auditor, maka hasil penilaiannya akan semakin bersifat kualitatif dan subjektif. Pengembangan kriteria yang lebih spesifik mempunyai manfaat yang besar karena terdapat kepastian bahwa semua kriteria yang dipakai akan berkaitan dengan tujuan audit.
4. Mengkomunikasikan Kriteria dengan *Auditee* : Kriteria yang akan digunakan sebagai alat penilaian harus didiskusikan secara langsung dan sedini mungkin dengan *auditee*. Hal ini bertujuan agar *auditee* dapat mengetahui, bahkan bila perlu menyetujui, penggunaannya sebagai tolok ukur dan untuk menghindarkan penolakan atas hasil penilaian di kemudian hari.

## **6. Hubungan Antara Auditor dan *Auditee* dalam Menentukan Kriteria**

Hubungan antara auditor dan *auditee* dalam menentukan dan mengembangkan kriteria audit cukup penting, namun auditor harus menyadari pengaruh negatifnya (Rai 2008:120). Berdiskusi dengan *auditee* memberikan kesempatan bagi auditor untuk menguji objektivitas kriteria yang akan dipakai. Oleh karena itu, auditor harus memperhatikan kepentingan *auditee*, sepanjang kepentingan tersebut tidak mengarah pada kepentingan pribadi yang mempengaruhi penilaian hasil audit. Auditor harus dapat meyakinkan *auditee* tentang objektivitas kriteria yang digunakan dalam penilaian dan menunjuk sumber. Kriteria yang akan digunakan sebagai alat penilaian harus didiskusikan secara langsung dan sedini mungkin dengan *auditee*. Hal ini bertujuan agar *auditee* dapat mengetahui, bahkan bila perlu menyetujui, penggunaannya sebagai tolok ukur dan untuk menghindarkan penolakan atas hasil penilaian di kemudian hari.

### **Analytic Hierarchy Process (AHP)**

Secara umum langkah-langkah penentuan pembobotan dengan metode AHP adalah sebagai berikut :

1. Menentukan nilai prioritas : berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, dilakukan penilaian prioritas kepentingan antara kriteria dengan tabel konversi dari pernyataan prioritas ke dalam angka-angka sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Skala dasar perbandingan berpasangan**

Tingkat Kepentingan	Definisi	Keterangan
1	Sama pentingnya	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya Satu elemen sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat nyata, dibandingkan dengan elemen pasangannya.
3	Sedikit lebih penting	
5	Lebih penting	Satu elemen terbukti sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat nyata, dibandingkan dengan elemen pasangannya. Satu elemen terbukti mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada keyakinan tertinggi.
7	Sangat Penting	
9	Mutlak lebih penting	
2,4,6,8	Nilai tengah	Diberikan bila terdapat keraguan penilaian di antara dua tingkat kepentingan yang berdekatan.

Sumber: Saaty, 1986

Selanjutnya adalah membuat tabel perbandingan prioritas setiap Kriteria dengan membandingkan masing-masing kriteria. Dalam menentukan kepentingan kriteria, pemeriksa dapat melakukan dengan berbagai teknik, misalkan penyesuaian kriteria dengan tujuan entitas *auditee*, dengan tujuan pemeriksaan dan lain-lain sebagaimana diperlihatkan pada tabel 2.

**Tabel 2. Tabel prioritas**

Uraian	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Dst...
Kriteria 1				
Kriteria 2				
Kriteria 3				
Dst...				

Sumber: Saaty, 1986

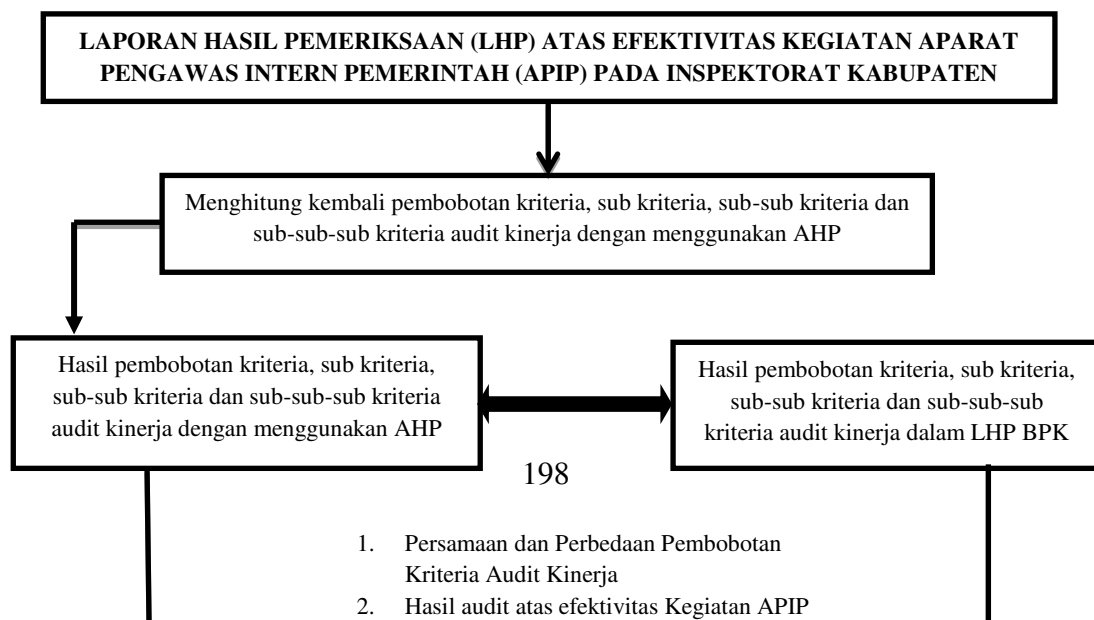
1. Perhitungan Faktor Pembobotan Hirarki : selanjutnya adalah menentukan bobot pada tiap kriteria, nilai bobot ini berkisar antara 0-1 dan total bobot untuk setiap kolom adalah 1. Cara menghitung bobot adalah angka pada setiap kotak dibagi dengan penjumlahan semua angka dalam kolom yang sama. Sesuai kaidah pembobotan, semua jumlah total bobot semua kriteria=1 (100%).
2. Uji Konsistensi Indeks dan Rasio : salah satu hal yang utama dari model *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yang membedakannya dengan model-model pengambilan keputusan yang lainnya adalah tidak adanya konsistensi mutlak. Pengumpulan pendapat antara satu faktor dengan faktor yang lain adalah bebas satu sama lain, dan hal ini dapat mengarah pada ketidakkonsistenan jawaban yang diberikan responden. Pengulangan wawancara pada sejumlah responden yang sama kadang diperlukan apabila derajat tidak konsistensinya besar. Langkah-langkah dalam penentuan uji konsistensi adalah sebagai berikut.
  - a. Menentukan nilai eigen maksimum ( $\lambda_{\max}$ ) didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom pada tabel prioritas dengan bobot (*vector eigen*).
  - b. Menentukan *Consistency Index* (CI) dengan rumus : \_\_\_\_\_  
dimana n merupakan ordo matriks atau jumlah kriteria.
  - c. Menentukan *Consistency Ratio* (CR)  
*Consistency Ratio* (CR) merupakan rasio yang menentukan apakah pembobotan yang telah dilakukan konsisten atau tidak jika nilai CR lebih kecil dari 0,100 maka ketidakkonsistenan pendapat dari *decision maker* masih dapat diterima, jika tidak maka penilaian perlu diulang, dengan rumus : —  
dimana:  $CI = \text{Consistency Index}$   
 $RI = \text{Random Index}$   
(didapatkan dari suatu eksperimen oleh *Oak Ridge National Laboratory* kemudian dikembangkan oleh *Wharton School*) sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3.

**Tabel 3. Random index**

Ordo	RI	Ordo Matrik	RI	Ordo Matrik	RI
1	0	6	1,24	11	1,51
2	0	7	1,32	12	1,48
3	0,58	8	1,41	13	1,56
4	0,9	9	1,45	14	1,57
5	1,12	10	1,49	15	1,59

Sumber: Saaty, Thomas L., and Luis G. Vargas, 1994, *The Analytical Hierarchy Process* vol. VII: "Decision Making in Economic, Political, Social, Techonlogical Environments, 1<sup>st</sup> Edition, RWS Publikations, Pittsburgh.

## KERANGKA KONSEPTUAL



### Gambar 1. Kerangka pemikiran

#### METODE PENELITIAN

Pengumpulan data diperoleh dengan cara baik informasi numerik (melalui instrumen) maupun informasi teks (melalui interviu) sehingga *database* akhir mempresentasikan baik informasi kuantitatif maupun kualitatif (Emzir 2015:29). Data yang dikumpulkan adalah bersumber dari dokumen Badan Pemeriksa Keuangan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Efektivitas Kegiatan APIP Pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane TA 2013 dan Semester I TA 2014 (S.D. Bulan Juni). Menurut Nawawi (1992:84) dalam Susilowati (2010:49), angket atau kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang paling efektif untuk memperoleh informasi dari responden tentang dirinya atau keadaan di luar dirinya dengan jenis.

- a. Kuesioner dengan jawaban terbuka.
- b. Kuesioner tertutup dengan ditambahkan lembar tambahan (yang menyatu dengan kuesioner) untuk hambatan/permasalahan dan saran/masukan.

Dalam metode AHP data dikumpulkan dari para ahli atau pengambil keputusan (Bhushan, N. dan Rai, K 2004:16). Ahli atau pengambil keputusan dapat membandingkan sama pentingnya, sedikit lebih penting, lebih penting, sangat penting dan mutlak lebih penting dengan rancangan format sebagaimana diperlihatkan pada gambar 2.

Gambar 2 Format derajat kepentingan perbandingan berpasangan

Mutlak lebih penting	Sangat penting	Lebih penting	Sedikit lebih penting	Sama penting -nya	Sedikit lebih penting	Lebih penting	Sangat penting	Mutlak lebih penting

#### HASIL PENELITIAN

##### Pembobotan Kriteria Audit Kinerja atas Efektivitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud

Berdasarkan LHP atas efektivitas kegiatan APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud TA 2013 dan Semester I TA 2014 (S.D Bulan Juni) di Melonguane penarikan simpulan pemeriksaan dilakukan dengan metode kuantitatif (pembobotan). Unsur-unsur penilaian yang digunakan dalam penilaian dengan metode kuantitatif serta bobot dari masing-masing unsur penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas kegiatan pemeriksaan reguler, reuiu laporan keuangan dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan menurut pemberi tugas dan pimpinan organisasi yang diperiksa. Unsur ini diukur berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pemberi tugas dan pimpinan organisasi yang diperiksa. Bobot nilai untuk efektivitas kegiatan pemeriksaan reguler, reuiu laporan keuangan dan monitoring tindak lanjut menurut pemberi tugas dan pimpinan organisasi yang diperiksa adalah 25% dari jumlah nilai yang diperoleh; dan
2. Efektivitas kegiatan pemeriksaan reguler, reuiu laporan keuangan dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan berdasarkan kesesuaian dengan kriteria yang telah disepakati. Unsur ini diukur berdasarkan pembobotan kesesuaian masing-masing temuan

pemeriksaan terhadap kriteria yang telah disepakati. Bobot nilai untuk efektivitas kegiatan pemeriksaan reguler, revidi laporan keuangan dan monitoring tindak lanjut berdasarkan kesesuaian dengan kriteria adalah 75% dari jumlah nilai yang diperoleh.

### Pembobotan Kriteria Audit Kinerja menggunakan Metode AHP

Berdasarkan kriteria yang telah disepakati antara auditor BPK dan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud, maka pembobotan kriteria dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Menentukan nilai prioritas

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, dilakukan penilaian prioritas kepentingan antara kriteria dengan tabel konversi dari pernyataan prioritas ke dalam angka-angka sebagaimana diperlihatkan pada tabel 4.

**Tabel 4. Skala Dasar Perbandingan Berpasangan**

Tingkat Kepentingan	Definisi	Keterangan
1	Sama pentingnya	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama
3	Sedikit lebih penting	Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
5	Lebih penting	Satu elemen sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat nyata, dibandingkan dengan elemen pasangannya.
7	Sangat Penting	Satu elemen terbukti sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat nyata, dibandingkan dengan elemen pasangannya.
9	Mutlak lebih penting	Satu elemen terbukti mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada keyakinan tertinggi.
2,4,6,8	Nilai tengah	Diberikan bila terdapat keraguan penilaian di antara dua tingkat kepentingan yang berdekatan.

Untuk melakukan perbandingan antar kriteria maka dibagikan kuesioner kepada responden pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud yang dianggap mempunyai pemahaman yang memadai tentang kegiatan APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud. Kuesioner yang telah diisi oleh 5 (lima) orang responden yang terdiri atas: seorang Sekretaris sebagai pengendali teknis (Dalinis); dan 4 orang Inspektur Pembantu (Irban) pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud diolah dengan metode AHP secara manual menggunakan Microsoft Excell. 5 (lima) responden ini dianggap berkompeten (*expert*) untuk memberikan perbandingan atas kriteria, sub kriteria, sub-sub kriteria dan sub-sub-sub kriteria audit kinerja atas efektivitas APIP. Penghitungan didasarkan atas rata-rata tertinggi perbandingan yang di isi oleh responden. Dari 5 kuesioner yang dibagikan, 3 orang responden memberikan penilaian yang sama atas perbandingan kriteria, sub kriteria, sub-sub kriteria, dan sub-sub-sub kriteria. Dengan demikian penghitungan kembali bobot kriteria audit kinerja menggunakan AHP mengacu pada 3 kuesioner tersebut. Perbandingan prioritas setiap kriteria sebagaimana diperlihatkan pada tabel 5.

**Tabel 5 Perbandingan prioritas setiap kriteria**

Kriteria	1	2	3	4	5	6
1	1	3	0,33	3	3	3
2	0,33	1	0,33	3	3	3
3	3	3	1	3	3	3
4	0,33	0,33	0,33	1	1	1
5	0,33	0,33	0,33	1	1	1
6	0,33	0,33	0,33	1	1	1
Jumlah	5,33	8	2,67	12	12	12

Keterangan:

- Kriteria 1 : Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud telah memiliki struktur organisasi dan sumber daya pendukung yang memadai untuk mendukung kegiatan pemeriksaan reguler, revidi laporan keuangan dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- Kriteria 2 : Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan perencanaan yang memadai dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan reguler, revidi laporan keuangan dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- Kriteria 3 : Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan kegiatan pemeriksaan reguler dan revidi laporan keuangan secara memadai;
- Kriteria 4 : Pelaporan kegiatan pemeriksaan reguler dan revidi laporan keuangan telah dilakukan secara memadai;
- Kriteria 5 : Pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan reguler dan revidi laporan keuangan telah dilaksanakan secara memadai; dan
- Kriteria 6 : Monitoring dan evaluasi atas pemeriksaan kegiatan pemeriksaan reguler, revidi laporan keuangan serta monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dilaksanakan secara memadai.

## 2. Perhitungan Faktor Pembobotan

Selanjutnya adalah menentukan bobot pada tiap kriteria audit kinerja, nilai bobot ini berkisar antara 0 – 1 dan total bobot untuk setiap kolom adalah 1. Cara menghitung bobot adalah angka pada setiap kotak dibagi dengan penjumlahan semua angka dalam kolom yang sama sebagaimana diperlihatkan pada tabel 6. Sesuai kaidah pembobotan, semua jumlah total bobot semua kriteria=1 (100%)

**Tabel 6. Perhitungan faktor pembobotan hirarki**

Kriteria	1	2	3	4	5	6
1	0,1875	0,375	0,125	0,25	0,25	0,25
2	0,0625	0,125	0,125	0,25	0,25	0,25
3	0,5625	0,375	0,375	0,25	0,25	0,25
4	0,0625	0,04167	0,125	0,08333	0,08333	0,08333
5	0,0625	0,04167	0,125	0,08333	0,08333	0,08333
6	0,0625	0,04167	0,125	0,08333	0,08333	0,08333
<b>Jumlah</b>	1	1	1	1	1	1

Selanjutnya adalah mencari nilai bobot untuk masing-masing kriteria dengan melakukan penjumlahan setiap nilai bobot prioritas pada setiap baris tabel dibagi dengan jumlah kriteria (merujuk pada tabel 5.3) sehingga diperoleh bobot masing-masing kriteria sebagai berikut :

- 1) Kriteria 1 =  $(0,1875 + 0,125 + 0,125 + 0,25 + 0,25 + 0,25) / 6 = 0,23958$  (24%)
- 2) Kriteria 2 =  $(0,0625 + 0,125 + 0,125 + 0,25 + 0,25 + 0,25) / 6 = 0,17708$  (18%)
- 3) Kriteria 3 =  $(0,5625 + 0,375 + 0,375 + 0,25 + 0,25 + 0,25) / 6 = 0,34375$  (34%)
- 4) Kriteria 4 =  $(0,0625 + 0,04167 + 0,125 + 0,08333 + 0,08333 + 0,08333) / 6 = 0,0798$  (8%)
- 5) Kriteria 5 =  $(0,0625 + 0,04167 + 0,125 + 0,08333 + 0,08333 + 0,08333) / 6 = 0,0798$  (8%)
- 6) Kriteria 6 =  $(0,0625 + 0,04167 + 0,125 + 0,08333 + 0,08333 + 0,08333) / 6 = 0,0798$  (8%)

Berdasarkan Bobot nilai untuk efektivitas kegiatan pemeriksaan reguler, revidi laporan keuangan dan monitoring tindak lanjut berdasarkan kesesuaian dengan kriteria adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah yang diperoleh maka bobot masing-masing kriteria dihitung sebagaimana diperlihatkan pada tabel 7.

**Tabel 7 Bobot kriteria berdasarkan penghitungan menggunakan AHP**

Kriteria	Hasil Pembobotan dengan AHP	Bobot nilai Auditor	Total bobot kriteria (%)
----------	-----------------------------	---------------------	--------------------------

(a)	(%) (b)	BPK (c)	(b x c)
1	24	75%	18
2	18	75%	13
3	34	75%	26
4	8	75%	6
5	8	75%	6
6	8	75%	6
Total	100%	-	75%

3. Uji Konsistensi Indeks dan Rasio;

Langkah-langkah dalam penentuan uji konsistensi adalah sebagai berikut:

- Menentukan nilai eigen maksimum ( $\lambda_{\max}$ ) didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom pada tabel prioritas dengan bobot (*vector eigen*) sebagaimana diperlihatkan pada tabel 8.

**Tabel 8. Nilai Eigen Maksimum tiap kriteria**

Kriteria	Nilai Eigen maksimum ( $\lambda_{\max}$ )
1	1,27778
2	1,41667
3	0,91667
4	0,95833
5	0,95833
6	0,95833
<b>Total</b>	<b>6,48611</b>

- Menentukan *Consistency Index* (CI) dengan rumus : \_\_\_\_\_

Dimana n merupakan ordo matriks atau jumlah kriteria.

$$\frac{1,27778 - 6}{6} = 0,09722$$

- Menentukan *Consistency Ratio* (CR)

*Consistency Ratio* (CR) merupakan rasio yang menentukan apakah pembobotan yang telah dilakukan konsisten atau tidak jika nilai CR lebih kecil dari 0,100 maka ketidakkonsistenan pendapat dari responden masih dapat diterima, jika tidak maka penilaian perlu diulang, dengan rumus : —

dimana: CI = *Consistency Index*

RI = *Random Index* (Lihat tabel 5.6.)

(didapatkan dari suatu eksperimen oleh *Oak Ridge National Laboratory* kemudian dikembangkan oleh *Wharton School*)

**Tabel 9 Random Index**

Ordo	RI	Ordo Matrik	RI	Ordo Matrik	RI
1	0	6	1,24	11	1,51
2	0	7	1,32	12	1,48
3	0,58	8	1,41	13	1,56
4	0,9	9	1,45	14	1,57
5	1,12	10	1,49	15	1,59

Dengan demikian setelah CInya diketahui CRnya dihitung sebagai berikut:

—

$$\frac{0,09722}{1,51} = 0,07841.$$

Dari nilai CR yang diperoleh sebesar 0,07841 maka dapat disimpulkan bahwa pendapat responden dalam membandingkan kriteria konsisten.

### Efektivitas APIP Pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud

Dari hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud TA.2013 dan semester I TA. 2014 (S.D. Bulan Juni) nilai rata-rata untuk kegiatan pemeriksaan reguler, reviu laporan keuangan dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah sebesar 62,17% (sebesar 20,67% berasal dari pembobotan hasil wawancara pemberi tugas dan pimpinan organisasi yang diperiksa + 41,50% berasal dari pembobotan kesesuaian masing-masing temuan pemeriksaan terhadap kriteria yang telah disepakati). Dengan mengacu pada klasifikasi Simpulan sebagaimana diperlihatkan pada tabel 5.7., maka kategori kegiatan belum efektif.

**Tabel 10 Klasifikasi Simpulan Hasil Pemeriksaan**

No	Nilai (%)	Simpulan
1	0,00 - 40,00	Tidak Efektif
2	40,01 - 55,00	Kurang Efektif
3	55,01 - 65,00	Belum Efektif
4	65,01 - 80,00	Cukup Efektif
5	80,01 - 100,00	Efektif

Sumber: LHP BPK

Berdasarkan perhitungan kembali bobot kriteria, sub kriteria, sub-sub kriteria, dan sub-sub-sub kriteria audit kinerja atas efektivitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud TA.2013 dan semester I TA. 2014 (S.D. Bulan Juni) berasal dari pembobotan kesesuaian masing-masing temuan pemeriksaan terhadap kriteria yang disepakati adalah 43,53% + 20,67% maka nilai rata-rata kegiatan pemeriksaan reguler, reviu laporan keuangan dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah 64,2%. Dengan menggunakan kaidah klasifikasi simpulan hasil pemeriksaan yang sama maka kategori kegiatan belum efektif. Pembobotan Kriteria Audit Kinerja atas efektivitas kegiatan APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud TA 2013 dan Semester I TA 2014 (S.D Bulan Juni) oleh Auditor BPK menggunakan metode pembobotan tertentu. Dari hasil perbandingan dengan metode AHP tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Pembobotan kriteria secara langsung (*direct weighting*) cenderung subjektif karena derajat kepentingan masing-masing kriteria audit kinerja yang berbeda. Sedangkan pembobotan berdasarkan *judgment* dari auditor BPK akan sangat bergantung pada latar belakang pendidikan, pengalaman dan tingkat pemahaman atas entitas yang di audit. Pembobotan Kriteria Audit Kinerja menggunakan metode AHP oleh Auditor BPK masih terbatas pada pelaksanaan audit kinerja pada Bank Pembangunan Daerah (BPD). Metode AHP belum digunakan secara menyeluruh dalam pelaksanaan audit kinerja oleh BPK. Dari simpulan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud belum efektif. Dari simpulan ini terlihat bahwa Inspektorat selaku APIP belum bisa menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) yang handal dalam pelaksanaan program/kegiatan di daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah selaku agen kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku prinsipal sangat dipengaruhi oleh kinerja APIP.

Kinerja APIP yang kurang baik menyebabkan kualitas pertanggungjawaban yang kurang baik juga, dengan demikian akan menimbulkan masalah keagenan ketika Bupati memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD. Kelemahan ini menimbulkan ketidakpercayaan DPRD/legislatif bahwa pemerintah/eksekutif tidak melakukan program/kegiatan dengan baik. Legislatif bisa menggunakan kelemahan ini untuk menjadi peluang tawar-menawar (*bargaining*) dengan Eksekutif bagi kepentingan dewan itu sendiri. Pembobotan kriteria yang dilakukan dengan metode yang tepat akan menghasilkan simpulan yang akurat dan objektif. APIP yang melakukan tugas dan fungsinya secara efektif akan



sangat membantu Kepala Daerah dalam membuat kebijakan dan dalam membuat pertanggungjawaban dengan demikian akan mengurangi masalah keagenan. Pembobotan kriteria dengan menggunakan pembobotan secara langsung (*direct weight*) dan *judgment* auditor cenderung subjektif dan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan simpulan hasil pemeriksaan kinerja. Dengan metode AHP pembobotan kriteria audit kinerja relatif lebih objektif, namun demikian sepanjang tidak ada ketentuan tentang penggunaan metode ini, maka auditor BPK tetap menggunakan pembobotan secara langsung dan berdasarkan *judgmentsesuai* SPKN.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian di atas, maka bisa ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Dari hasil pembobotan kriteria audit kinerja atas efektivitas kegiatan APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud terlihat adanya perbedaan persentase hasil pembobotan kriteria, sub kriteria, sub-sub kriteria dan sub-sub-sub kriteria audit kinerja atas efektivitas kegiatan APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud dengan persentase hasil pembobotan oleh auditor BPK.
2. Dengan menggunakan kaidah klasifikasi simpulan hasil pemeriksaan yang sama dengan BPK, nilai rata-rata kegiatan pemeriksaan reguler, revidi laporan keuangan dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan menggunakan metode AHP adalah 64,2% tidak berbeda jauh dengan hasil pembobotan auditor BPK sebesar 62,17% dan keduanya di kategorikan belum efektif.
3. Berdasarkan Juknis Pemeriksaan Kinerja BPK, pembobotan kriteria audit kinerja bisa dilakukan secara langsung (*direct weight*) dan berdasarkan *judgment* auditor.
4. Kesalahan dalam pembobotan kriteria audit kinerja akan menyebabkan kesalahan dalam pengambilan simpulan dan rekomendasi.
5. BPK sudah menggunakan AHP namun masih terbatas pada pelaksanaan pemeriksaan kinerja di beberapa Bank Pembangunan Daerah. (BPD).

Berdasarkan beberapa kesimpulan dalam penelitian ini maka saran yang bisa di sampaikan adalah sebagai berikut.

1. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan APIP, BPK bisa menggunakan metode AHP agar pembobotan kriteria audit kinerja lebih obyektif dan mampu menghasilkan simpulan dan rekomendasi yang lebih akurat.
2. BPK bisa menggunakan AHP pada setiap pelaksanaan audit kinerja pada semua jenis entitas.
3. BPK perlu menetapkan standar baku pembobotan kriteria audit kinerja dan tidak hanya berdasarkan atas pembobotan secara langsung (*direct weight*) atau *judgement* auditor.

Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain:

- Penghitungan bobot audit kinerja dengan metode AHP masih dilakukan secara manual;
- Tidak berhasil mewawancarai ketua tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukry. 2004. *Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Palembang.
- Abdul Halim dan Syukriy Abdullah 2006, *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi.
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley, 2010, *Auditing Assurance Services L An Integrated Approach*, Edisi 13, Pearson Education, Inc., New Jersey.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud TA 2013 dan Semester I TA 2014 (S.D. Bulan Juni) di Melonguane* Desember 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara TA 2013 dan Semester I TA 2014 (S.D. Bulan Juni) di Airmadidi*. Desember 2014.
- Bhushan, N.; Rai, K 2004, *Strategic Decision Making Applying the Analytic Hierarchy Process*, Journal.
- B.N. Ahuya, Dictionary of Management 1996 (Singapura: S.S. Mubarak & Brothers Ltd.)
- Coleen G. Waring and Stephen L. Morgan 2007, *Public Sector Performance Auditing in Developing Countries*
- Djam'an Satori, M.A., Aan Komariah 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta Bandung.
- Eisenhardt, K.M., 1989, "Agency Theory: An Assessment and Review". Academy of Management Review, Vol. 14 (1).
- Eko Darmanto, Noor Latifah dan Nanik Susanti 2014, *Penerapan Metode AHP (Analythic Hierarchy Process) untuk Menentukan Kualitas Gula Tumbu*. Jurnal.
- Emzir 2015, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Garamfalvi, L. 1997. *Corruption in the public expenditures management process*. Paper presented at 8<sup>th</sup> International Anti-Corruption Conference, Lima, Peru.
- Government Accountability Office Government Audit Standards (GAGAS) 2012, *Supplemental Guidance: IIA International Standards For The Professional Practice Of Internal Auditing*, A Comparison 2<sup>nd</sup> Edition.
- Hendri, Ma'ruf, 2006, *Pemasaran Ritel*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- I Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja pada Sektor Publik, Konsep, Praktek dan Studi Kasus*, 2008, Jakarta Salemba Empat.
- INTOSAI, 2004. *Implementation Guidelines for Performance Auditing Standards and Guidelines for Performance Auditing based on INTOSA's Auditing Standards and Practical Experience*. Stockholm.
- ISSAI 3000-3100, *Performance Audit Guidelines*, 2004
- Jansen M.C. dan W. Meckling. 1976. *Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost, and ownership structure*. Journal of Finance Economics.
- Lane, 2003. *Management and public organization: The principal-agent framework*. University of Geneva and National University of Singapore. Working paper.
- Lupia, Arthur, 2001. *Delegation of Power: Agency Theory*, dipublikasikan di Neil J. Smelser; dan Paul B. Baltes, 2001, (eds), *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, Elsevier Science Limited, Oxford, UK.
- Mitnick, B. M. 1973. *Fiduciary Responsibility and Public Policy: The Theory Agency and Some Consequences*. Presented at Annual Meeting American Political Science Association, 69<sup>th</sup>. New Orleans, Los Angeles.
- Moe, T.M. 1984. *The new economics of organization*. American Journal of Political Science.
- Mulyono Sri, 2000, *Peramalan Bisnis dan Ekonometrika*, BPFE, Yogyakarta
- Omkarprasad S. Vaidya, sushil Kumar 2006, *Analytic hierarchy process: An overview of applications*, European Journal of Operational Research.
- Quade, E.S. 1977. *Analysis for Public Decisions*. New York: Elsevier.
- Rahmadi Murwanto, Adi Budiarto, Fajar Hasri Ramadhana, 2012. *Audit Sektor Publik, Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Lembaga

- Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI.
- Ratna Ayu Damayanti. 2009. *Hubungan Keagenan Pemerintahan Daerah Dalam Konteks Anggaran : Sebuah Agenda Rekonstruksi*, Fakultas Ekonomi Unhas. Jurnal.
- Roland M. Malan, James R. Fountain, Jr., Donald S. Arrowsmith, dan Robert L. Lockridge 1984, *Performance Auditing in Local Government* (Chicago, Illinois: Government Finance Officers Association).
- Shapiro S.P. 2005. *Agency theory*, Annual Review of Sociology.
- Shlomo Mizrahi and Idit Ness-Weisman 2007, *Evaluating the Effectiveness of Auditing in Local Municipalities using Analytic Hierarchy Process (AHP) : A General Model and the Israeli Example*, International Journal of Auditing.
- Solms Sibs Von 2015, *Comparability, Decision Making and the AHP*. International Journal of AHP Vol. 7 Issue 3 2015.
- Stephen P. Robins 1986, *Organizational Behavior: Concepts, Controversies, and Applications*, edisi ke-3 (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall)
- Sugiyono 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta Bandung.
- Sugiyono 2016, *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*, Alfabeta Bandung.
- Sutaryono Hadiwibowo, 2013, *Pembobotan Kriteria pada Pemeriksaan Kinerja dengan Analytic Hierarchy Process (AHP)*, Opini Warta BPK.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 *tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 *tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*.
- Sibs von Solms 2015, *Comparability, Decision Theory And The AHP*, International Journal of the Analytic Hierarchy Process.
- Thomas L. Saaty 1991, *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Thomas L. Saaty 2008, *Decision making with the analytic hierarchy process*. International Journal Services Sciences, Vol. 1, No. 1.

Sumber lain:

<http://penelitiandeskriptifkomparatifkausal.blogspot.co.id/2015/03/metodologi-penelitian-deskriptif.html>

<http://thesis.umsida.ac.id/datapublik/t26774.pdf>

<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1391661033-3-BAB%20II.pdf>

<http://vebryexa.com/kelebihan-dan-kekurangan-analytic-hierarchy-process-ahp.html>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30172/4/Chapter%20II.pdf>

[https://www.researchgate.net/.../273257684\\_Hubungan\\_dan\\_Masalah\\_K..](https://www.researchgate.net/.../273257684_Hubungan_dan_Masalah_K..)

<http://julianabloganda.blogspot.co.id/2014/09/normal-0-false-false-en-us-x-none.html>  
file.upi.edu/.../RANGKUMAN\_Review\_Mixed\_Metho....

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL, RISIKO DAN PENANGANAN  
PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP  
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
(STUDI KASUS: BANK SYARIAH MANDIRI KC MANADO)**

Kartika Soetopo, David Paul Elia Saerang, Lidia Mawikere  
(e-mail : tika\_doank88@ymail.com)

**ABSTRACT**

*The banking system in Indonesia is conducted by the dual banking system where the system is divided into conventional and Islamic. Presence of Islamic banks has provided investment alternatives without worrying about the risk the development of remuneration with an uncertain interest method. But on this implementation, Islamic banking requires special treatment different from conventional banks, especially in terms of handling the risks and challenges faced by Islamic banks. The problem is how to implement the profit sharing of principal and risks and how the handling Non Performing Finance of the implementation the profit sharing. To answer the problems of research using qualitative methods by analyzing primary and secondary data so as to produce the results of interviews. The result of this study show that in musyarakah principle not much different from the mudharabah, that both a system of partnership between the two sides or more to administer a particular business with profit sharing corresponding portion (ratio) were agreed at the beginning of the agreement. On this Implementation Mudharabah and Musyarakah have a some differences. While the risk in financing the Musyarakah and mudharabah, especially on this the financing application, high relatively, among other side streaming, negligence and misconduct willful, concealment of profits by customers when customers are not honest. The amount of financing risk is shown in the ratio of non-performing finance (NPF). The high of NPF indicates the large number of borrowers who can't repay their finance in accordance with the initial agreement that has been agreed between the bank and the customer, so financing becomes problematic. Funding problems can be caused by the bank itself, the customers or external parties. Bank Syariah Mandiri (BSM) Branch Office Manado has been anticipating the event of a dispute banking, especially in the provision of financing problems. On this theory of completion financing problems, be done with several measures including the rescue action by intensive bill, rescheduling, re-requirements and realignment. Rescue actions made by bank on this condition that the customer is still considered to have good faith to settle the payment. Keywords: Islamic Banking, Profit Sharing, Risk, and Financing Problems*

**PENDAHULUAN**

Perbankan merupakan suatu sarana yang strategis dalam rangka pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyalurkan dan mengembangkan unsur-unsur trilogi pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi bank sebagai perantara (*intermediary*) pihak-pihak kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). Sebagai agent of development, bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai financial intermediary (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara (Fachruddin, 2008). Sistem perbankan di Indonesia dilaksanakan dengan dual banking system dimana sistem ini terbagi atas dua yaitu konvensional dan

syariah. Sistem ini mulai ada setelah lahirnya UU No.10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Sistem ini menjadi pelopor lahirnya bank syariah di Indonesia.

Salah satu prinsip usaha Perbankan Syariah adalah akad Bagi Hasil dan risiko dimana bank dan nasabah membagi keuntungan berdasarkan rasio Bagi Hasil yang ditentukan sebelumnya. Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil syariah antara lain adalah Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah. Secara teoritis prinsip bagi hasil dan risiko merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan perbankan syaria'ah. Akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil dan risiko produk musyarakah dan mudharabah kurang diminati dalam kegiatan pembiayaan, hal ini bisa dilihat dari data diatas. Hal ini disebabkan oleh karena tingkat risiko pembiayaan mudharabah dan Musyarakah sangat tinggi (*high risk*) dan pengembaliannya tidak pasti, padahal bank merupakan lembaga bisnis, lembaga lembaga intermediasi dimana bank berfungsi sebagai perantara pihak yang kekurangan modal (*lack of fund*) dan pihak lain yang kelebihan modal (*surplus of fund*), disamping itu bank juga harus mengembalikan dana nasabah penabung setiap saat. Semestinya bank dengan nasabah harus memahami betul tentang filosofi pembiayaan dengan sistem mudharabah dan Musyarakah, karena Islam memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dengan prinsip pertanggung jawaban yang jelas, bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri sementara pihak yang lain mengalami kerugian.

Tingkat kesehatan bank menjadi salah satu indikator yang digunakan masyarakat dalam menilai kualitas suatu bank, dan Tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas pembiayaan suatu bank yang tidak sehat. Kualitas pembiayaan suatu bank dapat dibedakan menjadi 5 kolektibilitas pembiayaan yaitu Kolektibilitas 1 (Lancar), Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus), Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar), Kolektibilitas 4 (Diragukan), dan Kolektibilitas 5 (Macet). Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan atau bagaimana implementasi perhitungan bagi hasil atas pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah, risiko-risiko yang dihadapi dalam penerapan perhitungan bagi hasil, dan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap implementasi perhitungan bagi hasil atas pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Manado.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian Sahrudin (2006), bahwa praktik pelaksanaan akad pembiayaan proyek musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat, yang mencakup produk Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram, tahapan-tahapan dalam memasarkan produk pembiayaan proyek musyarakah pada BSM Cabang mataram dan hubungan hukum yang timbul dari akad pembiayaan proyek musyarakah pada BSM Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian ini menyebutkan, bahwa pembiayaan dengan prinsip musyarakah masih relatif kecil penggunaannya oleh masyarakat bila dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti qardh, mudharabah, dan murabahah. Masih rendahnya pelaksanaan pembiayaan proyek dengan prinsip musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, sulit mencari dan mendapatkan nasabah (mudharib) yang jujur, berakarakter baik, berintegritas tinggi, dan pekerja keras, tingginya risiko yang harus ditanggung oleh bank, dan kesulitan likuiditas. Selain faktor-faktor tersebut, terdapat hal-hal lain yang mempengaruhi rendahnya pelaksanaan pembiayaan proyek dengan prinsip musyarakah di perbankan syariah, yaitu standar moral, ketidakefektifan pembiayaan bagi hasil (*profit sharing*), berkaitan dengan para pengusaha, dari segi biaya, segi teknis, kurang menariknya sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dalam aktivitas bisnis, dan masalah efisiensi. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian saya memfokuskan pada cara

perhitungan bagi hasil atas pembiayaan musyarakah dengan mengevaluasi pada perlakuan akuntansi musyarakah meliputi pengukuran, pengakuan, pengungkapan, dan penyajian yang mengaju pada PSAK 106, juga pada penelitian saya, saya mengungkapkan tentang perbandingan antara perhitungan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah pada bank dengan perhitungan bagi hasil pada partnership studi kasus pada KAP.

Penelitian Fatahullah (2008), bahwa pengimplementasian prinsip bagi hasil dan risiko dalam penghimpunan dana di perbankan syariah Cabang Mataram. Isi penelitian tersebut menyatakan, bahwa di Perbankan syariah Cabang Mataram, penghimpunan dana di masyarakat dilakukan dengan prinsip wadi'ah dan mudharabah sedangkan penyaluran dana dalam kegiatan pembiayaan di Bank Syariah Mataram menggunakan akad seperti akad jual beli, akad bagi hasil, akad sewa, akan menjaminkan dan akad memberi kepercayaan. Akad bagi hasil, menggunakan mudharabah dan musyarakah. Dalam implementasi pembiayaan dengan prinsip ini masih rendah dibandingkan dengan prinsip pembiayaan lainnya seperti murabahah, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kesulitan mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, berkarakter baik, dan berintegritas tinggi, tingginya risiko yang harus ditanggung bank, masih kurangnya teknologi pembiayaan bagi hasil, masih kurangnya SDM di Bank syariah Cabang Mataram yang paham masalah pembiayaan bagi hasil, dan sebagainya. Dalam penerapan sistem bagi hasil ini tidak selamanya perjanjian itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang di sepakati dalam kontrak atau akad. Sering terjadi bahwa nasabah atau bank tidak melaksanakan apa yang di perjanjikan atau wanprestasi atau ingkar janji. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah, bahwa penelitian saya lebih memfokuskan pada pembahasan penerapan perhitungan bagi hasil atas akad musyarakah yang berdasarkan PSAK 106. Penelitian saya mengungkapkan apakah PSAK 106 tersebut telah diimplementasikan dengan baik oleh Bank Syariah, sedangkan penelitian dari Fatahullah ini membahas hanya tentang bagaimana penerapan dimulai dari tahap-tahap sebelum dimulainya akad.

Penelitian Fauzan Fahrul (2012), bahwa dalam praktik Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menunjukkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Banda Aceh. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah, bahwa penelitian saya lebih memfokuskan pada pembahasan penerapan atau implementasi perhitungan bagi hasil atas akad musyarakah dan murabahah dan tingkat risiko pembiayaan tersebut, sedangkan penelitian dari Fauzan Fahrul ini hanya membahas tentang Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah.

Penelitian Friyanto (2013), bahwa Risiko Pembiayaan Mudharabah antara lain: pertama, asimetri informasi problem yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur, kedua, side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak dan ketiga, lalai dan kesalahan yang disengaja. Pada akad pembiayaan mudharabah, bank sebagai shahib al-maal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola mudharib dengan suatu perjanjian yang disepakati. Pihak mudharib diberikan hak aktif atas usaha, dan sebaliknya pihak bank tidak. Untuk menghadapi kemungkinan risiko bank syariah diperkenankan untuk melakukan pengawasan baik secara aktif dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap operasional maupun berkas-berkas nasabah maupun secara pasif dengan menerima laporan dari nasabah. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah, bahwa penelitian saya menjelaskan implementasi perhitungan bagi hasil atas akad musyarakah dan murabahah dan tingkat risiko pembiayaan tersebut, sedangkan penelitian dari Friyanto ini hanya lebih memfokuskan Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya, tidak dengan Pembiayaan Musyarakah.

## **Pengertian Bank Syariah**

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, juga berperan sebagai lembaga intermediasi/perantara bagi masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Pengertian bank syariah menurut Muhammad (2005), dijelaskan bahwa “Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah.” Dalam fungsinya sebagai penerima amanah bank syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dengan prinsip wadiah dan mudharabah. Sebagai pengelola investasi bank syariah melaksanakan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan baik dengan menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. Sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah melakukan kegiatan jasa seperti wakalah, kafalah, sharf, qardh, hiwalah, rahn dan lainnya. Sebagai pelaksana kegiatan sosial, bank syariah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kebajikan bentuk qardhul hasan dan zakat, infak dan shadaqah.

## **Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P(Kasmir: 2008). Adapun penjelasan untuk 5 C sebagai berikut: *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (Modal Sendiri), *Colleteral* (Jaminan), dan *Condition* (Kondisi). Penilaian pembiayaan dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut : *Personality*, *Party*, *Purpose*, *Prospect*, *Payment*, *Profitability*, dan *Protection*.

## **Pembiayaan Mudharabah (PSAK 105)**

Pembiayaan mudharabah sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah sebagai instrumen perekonomian dalam Islam berdasarkan bagi hasil, dimana pada posisi ini mudharabah secara tepat dipahami sebagai salah satu instrumen pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah (Muhammad: 2005: 101). Produk mudharabah sendiri merupakan produk berakad kerjasama dan berorientasi bisnis yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat dimana dana-dana ini dapat berbentuk giro, tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi, dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan pendapatan aktiva (*earning asset*) dan keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik DP-3 (Karim:2006: 211).

## **Pembiayaan Musyarakah (PSAK 106)**

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Implementasi pembiayaan musyarakah diperbankan bisa diartikan bahwa pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha

untuk jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (shahibul Al-maal) dengan pengelola usaha (mudharib) sesuai dengan kesepakatan. Pada umumnya porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase kontribusi masing-masing. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank. Dalam pembiayaan musyarakah bank boleh ikut serta dalam manajemen proyek yang dibiayai. (Hendri Tanjung, 2007: 77). Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.

### **Pengertian Bagi Hasil**

Prinsip bagi hasil menurut Bank Indonesia adalah Suatu prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana porsi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai kesepakatan namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional. *Profit sharing* (bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu, pemilik modal (investor) dalam hal ini bank syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha.

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudharabah. Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Al-mudharabah berasal dari kata dharab, yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis, al-mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001).

Adapun metode penghitungan bagi hasil dibedakan menjadi tiga cara yaitu: 1) Menggunakan metode profit and loss sharing, yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan (profit) yang diperoleh oleh pengusaha (mudharib), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak. 2) Menggunakan metode profit sharing, artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha (mudharib), sedangkan apabila terjadi kerugian finansial akan ditanggung oleh pemilik dana (shahibul maal). 3) Menggunakan metode revenue sharing, yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (revenue) yang diperoleh oleh pemilik usaha. Dalam praktiknya metode profit and loss sharing dipakai untuk menghitung bagi hasil pada pembiayaan musyarakah, kemudian metode profit sharing dipakai untuk menghitung bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah, sedangkan metode revenue sharing dipakai untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah deposan yang menyimpan dananya di bank syariah dengan skema tabungan mudharabah atau deposito mudharabah. (Abul Gofur Ansori, 2007: 138).



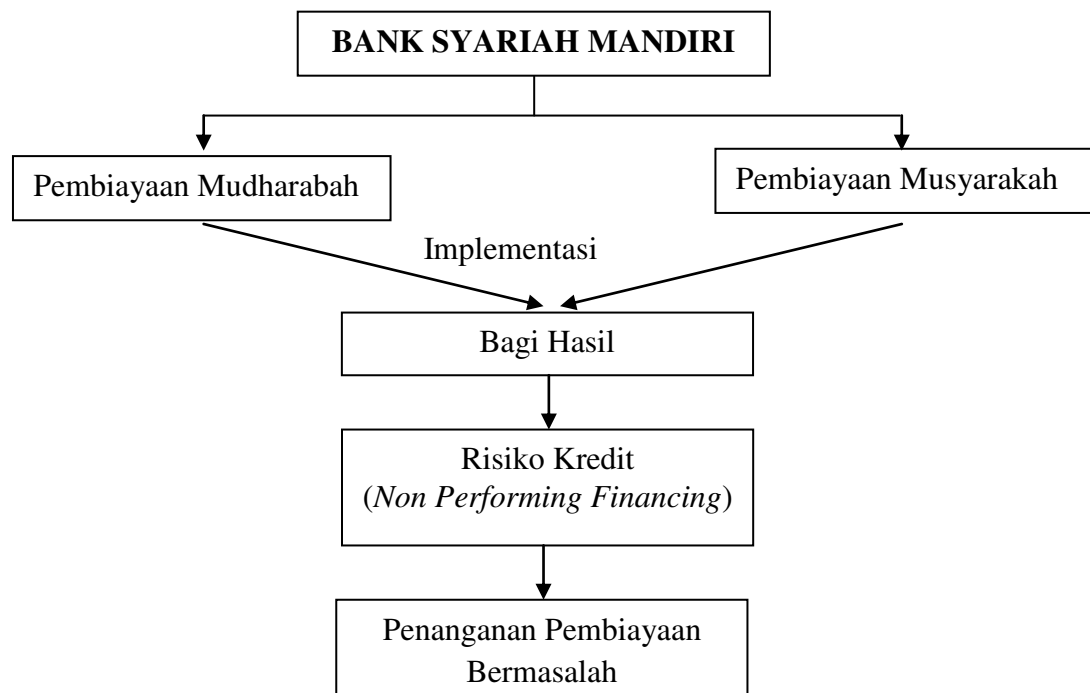
## **Risiko yang dihadapi dalam Implementasi Pembiayaan Syariah pada Perbankan Syariah**

Risiko dalam konteks perbankan syari'ah merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Besar-kecilnya risiko kredit dalam perbankan islam dibandingkan perbankan konvensional menurut Khan dan Habeeb Ahmad (2008 : 141) tergantung pada faktor berikut: Karakteristik risiko dalam pembiayaan, Karakteristik nasabah, Akurasi dalam menghitung potensi kerugian risiko kredit, dan Penerapan teknik pengurangan risiko. Risiko dalam pembiayaan musyarakah dan mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, *relative tinggi*, antara lain: *side streaming*, nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak, *lalai* dan kesalahan yang disengaja; menyembunyikan keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

## **Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah**

Penanganan Pembiayaan Bermasalah merupakan upaya yang dilakukan Bank dalam rangka menyelamatkan pembiayaan bermasalah baik melalui Peninjauan kembali Keputusan Pembiayaan, Restrukturisasi Pembiayaan atau Penyelesaian Pembiayaan sehingga pembiayaan dapat dilunasi nasabah. Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang diperkirakan tidak akan terbayar kembali baik sebagian atau seluruhnya, atau debitur tidak dapat membayar kembali kewajibannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Batasan pembiayaan bermasalah adalah apabila kolektibilitasnya telah menunjukkan tidak lancar, yakni: Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Menurut Trisadini P Usanti dan Abd. Shomad, Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh dua pihak, sebagai berikut Faktor Intern (berasal dari pihak Bank) yaitu 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, 3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*), 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah, 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis, 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhatikan aspek kompetitor, 7) Aspek Jaminan tidak memperhitungkan *marketable*, 8) Lemahnya supervise dan monitoring, 9) Terjadinya erosi mental; kondisi ini dipengaruhi timbale balik antara nasabah dan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat. Dan faktor ekstern, yaitu : 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya. 2) Melakukan *side streaming* penggunaan dana, 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah persaingan usaha, 4) Usaha yang dijalankan relatif baru, 5) Bidang usaha nasabah telah jenuh, 6) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis, 7) Meninggalnya *key person*, 8) Perselisihan sesama direksi, 9) Terjadi bencana alam, 10) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negative bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPbs Tanggal 20 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah hanya dapat direstrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*).

## KERANGKA KONSEPTUAL



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, untuk menunjang data yang faktual dan akurat digunakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan bersifat tematik analisis, yaitu hanya menggambarkan secara sistematis fakta-fakta terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dengan tujuan membatasi kerangka studi kepada analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori (Alvi, 2003). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dilakukan bersifat tematik analisis dimana dalam metode kualitatif sebagai prosedur untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati, yang menitikberatkan pada wawancara yang lebih mendalam. Analisis tematik merupakan proses mengkode informasi, yang dapat menghasilkan daftar tema, model tema atau indikator yang kompleks, kualifikasi yang biasanya terkait dengan tema itu, atau hal-hal diantara atau gabungan dari yang telah disebutkan. Tema tersebut secara minimal dapat mendeskripsikan fenomena, dan secara maksimal memungkinkan interpretasi fenomena. Suatu tema dapat diidentifikasi padatingkat termanifestasi (*manifest level*), yakni yang secara langsung dapat terlihat. Suatu tema juga dapat ditemukan pada tingkat laten (*Latent level*), tidak secara eksplisit terlihat, tetapi mendasari atau membayangi (*underlying the phenomenon*). Tema-tema dapat diperoleh secara induktif dari informasi mentah, atau diperoleh secara deduktif dari teori atau penelitian-penelitian sebelumnya. Secara umum penelitian tematik bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada rincinya menjadi variable-variabel yang saling terkait dan dilaksanakan secara sistematis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Perhitungan Sistem Bagi Hasil Atas Pembiayaan Perbankan Syariah Pengertian Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah merupakan salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri. Dalam pelaksanaan akuntansinya, PT Bank Syariah Mandiri merujuk pada PAPS 2003 dan PSAK No 59: Akuntansi Perbankan Syariah. Menurut informan 1 Pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh Bank sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah (bagi hasil) yang disepakati. Pihak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank untuk mendanai suatu proyek atau usaha dengan kesepakatan bagi hasil antara kedua belah pihak, apabila proyek usaha tersebut dibagi antara pihak nasabah dengan pihak bank sedangkan apabila terjadi kerugian dari proyek usaha tersebut maka pihak nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pembiayaan awal. Implementasi perhitungan sistem bagi hasil atas pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Manado merupakan sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara bank syariah dengan nasabah/mudharib sebagai pengelola dana, pembagian hasil usaha ini dapat dilihat dari dua faktor, yaitu faktor secara langsung berupa 1) *Investment rate*, 2) Jumlah dana pembiayaan yang tersedia, 3) ditentukannya nisbah sebagaimana yang telah disetujui dalam akad atau perjanjian, 4) nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah dapat berbeda-beda dari waktu ke waktu dalam satu pembiayaan, 5) Nisbah bagi hasil juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya dan faktor tidak langsung berupa 1) penentuan angka-angka pendapatan dan biaya pembiayaan mudharabah, 2) kebijakan Akuntansi.

Pada umumnya bank syariah melaksanakan sistem bagi hasil dengan cara membagi keuntungan dari hasil pendapatan dan hasil laba/keuntungan, tetapi sistem bagi hasil yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Manado ini adalah sistem bagi hasil dari hasil keuntungan bukan pendapatan dari keseluruhan bisnis nasabah/mudharib setelah itu baru dibagi sesuai porsi yang telah disepakati dalam akad kedua belah pihak. Penetapan nisbah bagi hasil keuntungan ditentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah/mudharib dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Maka tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut 1) Perkiraan penjualan yang meliputi dari volume penjualan setiap transaksi setiap bulan, fluktuasi hasil penjualan, rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan dan margin keuntungan setiap transaksi, 2) lama *cash to cash cycle* yang meliputi dari lama proses barang, lama persediaan dan lamanya piutang. 3) Perkiraan biaya-biaya langsung yaitu biaya langsung yang berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan dan lain-lain, 4) perkiraan biaya-biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa kantor, gaji karyawan.

Bagi Bank Syariah Mandiri yang menerapkan konsep bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah, dengan melihat kepada tujuan dari pembiayaan yang diminta oleh nasabah/mudharib, artinya penerapan bagi hasil atau keuntungan yang akan diperoleh sangat bervariasi tergantung kepada kesepakatan antara nasabah/mudharib dengan Bank Syariah Mandiri tersebut. Penentuan nisbah bagi hasil berdasarkan pendapatan ditentukan dengan perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Perkiraan tingkat pendapatan bisnis yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle* dan perkiraan biaya-biaya langsung. Nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah merupakan faktor penting bagi Bank maupun nasabah/mudharib, oleh karena itu, perlu diketahui pokok-pokok perhitungan mudharabah, yaitu 1) Jika diperhitungkan adalah hasil netto, ditentukan nisbah bagi hasil masing-masing, kemudian baru direncanakan tentang pembayaran kembali modal

mudharabah, 2) Jika yang diperhitungkan hasil, maka untuk mengetahui hasil yang diterima oleh Bank maupun nasabah, maka digunakan rumus sebagai berikut :  $S$  (setoran nasabah ke Bank Syariah) =  $P$  Profit (keuntungan yang diperhitungkan) dalam setoran ke Bank. Profit (keuntungan yang diperhitungkan) dalam setoran ke Bank +  $A$  (Angsuran atau cicilan pokok modal Mudharabah). Untuk menghitung hasil akhir dari permintaan, bahwa jika yang diperhitungkan adalah hasil dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, yaitu dengan sistem rata-rata dan sistem efektif.

### **Pengertian Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara bank (mitra) dan nasabah (mitra) dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi. Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti Pembiayaan Proyek, dan Modal Ventura. Keuntungan dari pembiayaan dengan akad ini harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, demikian juga kerugian harus dibagi diantara para mitra atau pihak secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal, sedangkan sistem pembagian keuntungan maupun kerugian tersebut harus tertuang dengan jelas dalam akad. dan ketika setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana bank dan bagi hasilnya sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya.

Selanjutnya musyarakah dapat berupa musyarakah permanen maupun menurun, musyarakah permanen jumlah modalnya tetap sampai akhir masa musyarakah tersebut berlangsung, sedangkan musyarakah menurun jumlah modalnya secara berangsur-angsur menurun karena dibeli oleh mitra musyarakah, dan setiap mitra musyarakah lainnya dapat meminta untuk menyediakan jaminan. Adapun manfaat yang bisa diperoleh bank dari pembiayaan ini, selain sebagai salah satu bentuk penyaluran dana, Bank juga akan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola. Sedangkan bagi nasabah, manfaat yang bisa diperoleh yaitu bisa memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank. Selain itu, Manfaat yang diperoleh dari akad musyarakah ini adalah sebagai berikut 1) Bank akan mengalami peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, 2) Bank tidak berkewajiban membayar pendanaan secara tetap dalam jumlah tertentu kepada nasabah, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*. 3) Pengembalian pokok pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah, 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagi, 5) Prinsip bagi hasil dalam musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Seperti dijelaskan sebelumnya, konsep mudharabah dan musyarakah itu pada dasarnya adalah *Profit Loss Sharing*. Artinya, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang sesuai (proporsional) dengan modal yang disetorkan, dan di lain pihak, juga menanggung kerugian (loss) yang sama besarnya. Namun, dalam praktiknya hal itu sangat sulit dijalankan. Karena prinsip kejujuran dan keterbukaan manajemen perusahaan dari nasabah belum dapat berjalan secara maksimal, bank selaku investor mengalami kesulitan untuk mengontrol pembukuan nasabah secara detail. Akibatnya, bank yang mengalami kendala mengontrol lalu lintas bisnis dan keuangan nasabah sulit untuk membuktikan bahwa

nasabah tersebut benar-benar memiliki keuntungan yang cukup besar untuk dibagi ataukah sebaliknya, mengalami kerugian yang sangat berat sehingga bank harus ikut menanggungnya.

### **Risiko-risiko yang dihadapi dalam penerapan bagi hasil atas pembiayaan Syariah**

Perjanjian mudharabah merupakan landasan dari perbankan Islam. Mudharabah merupakan kontrak *profit sharing* dan *loss bearing* yang dapat digunakan pada kedua sisi aset neraca dan kewajibannya. Tipe-tipe perjanjian atau kontrak mudharabah dapat menyebabkan bank syariah mengalami risiko, seperti 1) *displaced commercial risk*, yang merupakan risiko yang muncul ketika bank syariah mendorong investasi para pemegang rekening dengan meningkatkan tingkat keuntungan untuk menyimpan dana. Risiko ini sebagai hasil dari risiko *rate of return* yang terjadi ketika dana ditempatkan dalam aktiva dengan batas jangka panjang dan tingkat pengembalian tidak lagi kompetitif dengan investasi alternatif lain dan ketika bank kinerjanya buruk selama periode tertentu dan tidak dapat menghasilkan keuntungan yang cukup untuk dibagikan kepada para pemegang rekening; 2) *Operational Risk*, yang dalam hal ini, investor, seperti berbagi keuntungan dan menanggung semua kerugian tanpa kendali atau hak pemerintahan pengalihan manajemen.

Potensi risiko dalam model pembiayaan musyarakah diantaranya adalah *Credit Risk*, Risiko Pasar, *Operational Risk*. Selama masa kontrak tersebut berjalan, risiko yang mungkin timbul adalah bank syariah tidak mampu untuk melihat kinerja finansial dan kontrol manajemen yang terlalu berlebihan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menerima informasi keuangan yang memadai dan tepat waktu karena akan memungkinkan bagi bank syariah untuk dapat melakukan pengukuran perbaikan pada waktu yang tepat. Selain itu, Risiko Operasional yang disebabkan oleh internal fraud antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan, penyipuan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan mark up dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.

### **Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Implementasi Bagi Hasil Atas Pembiayaan**

Pembiayaan yang bermasalah adalah pembiayaan yang diperkirakan tidak terbayar kembali atau seluruhnya, atau nasabah tidak dapat membayar kembali kewajiban sesuai dengan waktu yang disepakati. Batas pembiayaan bermasalah adalah apabila kolektibilitasnya telah menunjukkan tidak lancar, yakni 1) Dalam perhatian khusus; 2) Kurang lancar ; 3) Diragukan; 4) Macet. Pedoman Penanganan Permasalahan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

<b>Kriteria</b>	<b>Waktu</b>	<b>Penanganan</b>
Lancar	1 s/d 30 hari	-
Diperhatikan	30 s/d 90 hari (3 bulan)	2 kali tidak mengangsur, dilakukan penagihan dengan pendekatan ukhuwah
Kurang Lancar	90 s/d 180 hari	Dilakukan <i>rescheduling</i> (perpanjangan)
Diragukan	180 s/d 270 hari	- SKMHT dinaikkan ke APHT (sertipikat tanah) - Dicarikan pembeli
Macet	> 270 hari (9 bulan)	- Penyitaan - Penghapusan (Qardhul Hasan)

Sumber: Surat Edaran Pembiayaan No.12/025/PEM BSM, September 2010

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah terdapat beberapa prinsip, yaitu antara lain 1) Mengawasi masing-masing portofolio pembiayaan untuk mendeteksi secara dini adanya pembiayaan bermasalah atau akan bermasalah; 2) Semua pembiayaan yang

digolongkan bermasalah harus di kelola secara obyektif dan profesional sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk kepada nasabah yang berafiliasi dengan Bank ataupun kepada nasabah besar tertentu atau nasabah group; 3) Pembiayaan bermasalah dengan kolektibilitas diragukan dan macet harus diupayakan di bawah 7,5 % dari jumlah pembiayaan yang diberikan Bank.

Sedangkan strategi yang diambil dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah adalah 1) Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah dengan cara penurunan imbalan/ bagi hasil, pengurangan tunggakan imbalan/ bagi hasil, Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan penyesuaian jadwal pelunasan pokok pembiayaan, penambahan fasilitas pembiayaan, pengambil-alihan asset nasabah untuk pelunasan pokok pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah; 2) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah; 3) Pemacetan Pembiayaan Bermasalah; 4) Penghapus bukuan Pembiayaan Macet; 5) Penghapusan Tagihan. Langkah-langkah lain yang dapat dilakukan Bank adalah menganjurkan nasabah melakukan *merger, join venture, dan take over*.

Adapun yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam penanganan pembiayaan bermasalah adalah 1) Penanganan pembiayaan bermasalah menjadi tanggung-jawab seluruh jajaran Unit/ Divisi yang terkait dengan pembiayaan; 2) Penanganan pembiayaan yang kolektibilitasnya menunjukkan Lancar, Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar dilakukan oleh Divisi pembiayaan (Kantor Pusat) dan Bagian Pemasaran (Kantor Cabang). Sedangkan yang kolektibilitasnya menunjukkan Diragukan dan Macet ditangani oleh Unit Kerja Penyelesaian pembiayaan Bermasalah. Dikecualikan untuk pembiayaan bermasalah yang masih dalam proses restrukturisasi, walaupun kolektibilitasnya menunjukkan Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet penanganannya dilakukan oleh pejabat/ Tim Restrukturisasi pembiayaan sesuai keputusan Direksi; 3) Pembiayaan yang kolektibilitasnya telah menunjukkan diragukan atau macet harus segera dialihkan penanganannya ke Unit Kerja Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, kecuali apabila pembiayaan tersebut masih dalam proses restrukturisasi oleh Tim Restrukturisasi pembiayaan. Setiap bulan Unit Kerja Pembiayaan baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang membuat laporan pembiayaan bermasalah yang meliputi semua pembiayaan bermasalah yang kolektibilitasnya menunjukkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, termasuk pembiayaan lancar yang karena alasan tertentu oleh manajemen digolongkan dalam pembiayaan bermasalah, disertai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Unit Kerja Pembiayaan kepada Divisi Manajemen Risiko paling lambat tanggal 5 (lima) setelah berakhirnya bulan laporan. Atas dasar laporan Unit Kerja Pembiayaan, Divisi Manajemen risiko setiap bulan melaporkan Pembiayaan bermasalah kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah penanganannya.

### **Implementasi perhitungan bagi hasil atas pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Manado**

Menurut informan 1, Pada prinsipnya musyarakah tidak jauh berbeda dengan mudharabah karena keduanya merupakan sistem perkongsian (kemitraan) antara dua belah pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama pada awal perjanjian (akad). Mudharabah dan musyarakah berbeda dalam hal aqad mudharabah, shahib al-mal menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan mudharib, dan dalam manajemen shahib al-mal tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan. Bagi hasil diberikan setelah proyek atau usaha yang dijalankan mudharib selesai dijalankan. Sedangkan dalam musyarakah, kedua belah pihak ikut andil dalam pemodalan (equity participation) dan masing-masing pihak dapat turut dalam

manajemen, sehingga porsi nisbah bagi hasil yang diperoleh sangat ditentukan oleh besar kecilnya modal yang dikeluarkan dan frekuensi keikutsertaan dalam proses manajemen ini. Sedang bila usaha merugi, maka kedua pihak sama-sama menanggung kerugian tersebut karena musyarakah menganut asas *profit and loss sharing contract*.

Pada umumnya bank syariah melaksanakan sistem bagi hasil dengan cara membagi keuntungan dari hasil pendapatan dan hasil laba/keuntungan, tetapi sistem bagi hasil yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Manado ini, menurut informan 2 adalah sistem bagi hasil dari hasil keuntungan bukan pendapatan dari keseluruhan bisnis nasabah/mudharib setelah itu baru di bagi sesuai porsi yang telah disepakati dalam akad kedua belah pihak. Menurut Karim (2004), Penetapan nisbah bagi hasil keuntungan ditentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah/mudharib dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Sedangkan penentuan nisbah bagi hasil berdasarkan pendapatan ditentukan dengan perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Perkiraan tingkat pendapatan bisnis yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama cash to cash cycle dan perkiraan biaya-biaya langsung. Maka tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut : 1). Perkiraan penjualan yang meliputi dari volume penjualan setiap transaksi setiap bulan, fluktuasi hasil penjualan, rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan dan margin keuntungan setiap transaksi. 2). Lama *cash to cash cycle* yang meliputi dari lama proses barang, lama persediaan dan lamanya piutang. 3). Perkiraan biaya-biaya langsung yaitu biaya langsung yang berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan dan lain-lain. 4). Perkiraan biaya-biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa kantor, gaji karyawan.

Dari pemaparan di atas, baik mengenai mudharabah maupun musyarakah bahwasanya perbedaan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada hubungan antara bank dengan nasabahnya. Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (shahib al-mal) dengan pengelola dana (mudharib). Sedangkan pada bank konvensional, para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan. Demikian pula bank memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang memerlukan dana berdasarkan kemampuan mereka membayar tingkat bunga tertentu.

### **Risiko-risiko yang dihadapi dalam penerapan perhitungan bagi hasil atas pembiayaan syariah pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Manado**

Secara umum perbankan akan menghadapi beberapa risiko yaitu risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan (Antonio, 2001). Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing*). Dengan berbagai macam risiko tersebut, maka bank syariah dituntut untuk melakukan manajemen risiko pembiayaan seefektif mungkin agar likuiditas bank tetap terjaga sehingga bank tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Mengingat bahwa sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari bisnis pembiayaan. Dengan memperhatikan fenomena tersebut, kajian mengenai perbankan syariah khususnya mengenai aspek manajemen risikonya menjadi hal baru yang layak untuk dikaji secara mendalam.

Menurut Antonio (2003), risiko pembiayaan mudharabah antara lain adalah: (1) asymmetric information problem yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur. Oleh karena itu penetapan pembiayaan

bagi hasil haruslah dilakukan dengan memperhatikan incentive compatible constraints (batasan-batasan untuk memberikan insentif bagi nasabah untuk berlaku jujur), (2) side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak dan (3) lalai dan kesalahan yang disengaja. Secara garis besar, menurut beberapa informan, risiko yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado adalah risiko pembiayaan yang terdapat pada penerapan dalam pembiayaan yang relatif tinggi, yaitu *Side Streaming*, Lalai dan kesalahan yang disengaja, Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur (adverse selection), Tingkat risiko pembiayaan. Keempat risiko tersebut sering kali menyebabkan ketidakmampuan peminjam untuk melunasi kewajibannya kepada pihak bank. Besarnya risiko pembiayaan ditunjukkan dalam rasio Non Performing Finance (NPF). Tingginya NPF menunjukkan banyaknya jumlah peminjam yang tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama antara bank dengan peminjam, sehingga pembiayaan menjadi bermasalah. Untuk penilaian risiko pembiayaan ini mencakup tentang risiko bisnis yang dibiayai yakni risiko yang terjadi pada karakteristik masing-masing jenis usaha nasabah/mudharib dan kinerja keuangan jenis usaha nasabah/mudharib, risiko berkurangnya nilai pembiayaan yaitu risiko yang dipengaruhi oleh penurunan yang drastis dari tingkat penjualan, harga jual barang/jasa dari bisnis nasabah/mudharib dan risiko karakter buruk mudharib yaitu risiko pembiayaan yang dipengaruhi oleh kelalaian, pelanggaran nasabah/mudharib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai serta pengelolaan perusahaan yang tidak profesional sesuai standar pengelolaan yang di sepakati antara bank dan nasabah/mudharib (Adiwarman, 2004).

### **Penanganan pembiayaan bermasalah terhadap implementasi bagi hasil atas pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Manado**

Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan oleh Unit Bisnis sesuai dengan batas wewenangnya. Pengalihan pembiayaan bermasalah dari Unit Bisnis kepada Divisi Restrukturisasi (DRS) atau Divisi Penyelesaian Pembiayaan (DPB) dilakukan pada saat kualitas pembiayaan telah turun (down grade) menjadi NPF. Namun dengan pertimbangan tertentu, antara lain untuk optimalisasi dalam penanganan, maka sebelum pembiayaan bermasalah menjadi NPF, Desk Sisdur dan Pengawasan Pembiayaan (DSP) dapat meminta kepada Unit Bisnis untuk melimpahkan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut kepada DRS atau DPB melalui DSP. Penanganan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi harus didasarkan pada kelayakan pembiayaan dengan memperhatikan risiko dan pendapatan pembiayaan yang akan diterima melalui penyelamatan pembiayaan (*rescue*). Penyelamatan pembiayaan bermasalah yang masih memiliki prospek usaha dilakukan melalui restrukturisasi dengan mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/12/UPPB tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Pembiayaan, yakni melalui Penurunan imbalan/ bagi hasil, Pengurangan tunggakan imbalan/ bagi hasil, Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, Perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan penyesuaian jadual pelunasan pokok pembiayaan, Penambahan fasilitas pembiayaan ; Pengambil-alihan asset nasabah, Konversi pembiayaan.

Penyelesaian sengketa pada pembiayaan dilakukan dengan beberapa tindakan sebagai berikut 1) tindakan penyelamatan seperti penjadualan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), panataan kembali (*restructuring*), dan penyelesaian; 2) melalui pengadilan, seperti gugatan, eksekusi grosse akta pengakuan hutang, somasi, permohonan eksekusi hak tanggungan, dan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh pihak bank sendiri, pihak nasabah maupun pihak luar (ekstern). Berdasarkan hasil penelitian, pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Manado telah mengantisipasi apabila terjadi sengketa perbankan khususnya dalam masalah pemberian



pembiayaan mudharabah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara teori, dilakukan dengan beberapa tindakan diantaranya adalah tindakan penyelamatan dengan melakukan tagihan secara intensif, penjadualan kembali, persyaratan kembali serta penataan kembali. Tindakan penyelamatan yang dilakukan pihak bank dengan syarat bahwa pihak nasabah dinilai masih punya itikad baik untuk melunasi pembayaran. Apabila dengan keempat cara tersebut nasabah belum dapat melunasi pembayaran maka tindakan yang paling terakhir adalah melalui Pengadilan, Tindakan lewat pengadilan ini dilakukan dengan beberapa cara Mengajukan gugatan lewat Pengadilan Negeri; Eksekusi grosse akta pengakuan hutang; Melakukan somasi; Permohonan eksekusi hak tanggungan; Eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Penulis berpendapat bahwa cara penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) sudah tepat yaitu dengan mengedepankan musyawarah terlebih dahulu lewat tindakan-tindakan penyelamatan secara maksimal walaupun berdasarkan penelitian sudah pernah terjadi sengketa pembiayaan antara nasabah, tetapi pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Manado segera mengantisipasinya dengan tindakan-tindakan penyelamatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tulisan tesis ini dapat ditarik beberapa simpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip mudharabah dan musyarakah di Bank Syariah Mandiri KC Manado sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan uraian-uraian tentang mudharabah dan musyarakah serta implementasinya dalam perbankan syariah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya musyarakah tidak jauh berbeda dengan mudharabah karena keduanya merupakan sistem perkongsian (kemitraan) antara dua belah pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama pada awal perjanjian (akad). Dan kedua jenis perkongsian ini menerapkan sistem bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing*). Mudharabah dan musyarakah memiliki perbedaan pada beberapa hal : pertama, dalam aqad mudharabah, *shahib al-mal* menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan *mudharib*, sedang dalam musyarakah kedua belah pihak ikut andil dalam pemodalan (*equity participation*); kedua, dalam manajemen mudharabah, *shahib al-mal* tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan, sedang dalam musyarakah masing-masing pihak dapat turut dalam manajemen; ketiga, dalam mudharabah bagi hasil (porsi nisbah) ditentukan pada awal akad yang diberikan setelah proyek atau usaha yang dijalankan *mudharib* selesai dijalankan, sedang dalam musyarakah porsi nisbah bagi hasil yang diperoleh sangat ditentukan oleh besar kecilnya modal yang dikeluarkan dan frekuensi keikutsertaan dalam proses manajemen; keempat, dalam mudharabah kerugian ditanggung oleh *shahib al-mal* selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak *mudharib*, sedang dalam musyarakah kedua pihak sama-sama menanggung kerugian tersebut.
2. Sedangkan risiko dalam pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, antara lain :
  - a. *side streaming*, nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
  - b. lalai dan kesalahan yang disengaja;
  - c. menyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

3. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KC Manado, antara lain:
  - a. Sulit mencari dan mendapatkan nasabah (*mudharib*) yang jujur, berakarakter, baik, berintegritas tinggi, dan pekerja keras.
  - b. Tingginya risiko yang nantinya ditanggung oleh Bank.
4. Risiko-risiko tersebut sering kali menyebabkan ketidakmampuan peminjam untuk melunasi kewajibannya kepada pihak bank. Besarnya risiko pembiayaan ditunjukkan dalam rasio *Non Performing Finance* (NPF). Tingginya NPF menunjukkan banyaknya jumlah peminjam yang tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama antara bank dengan peminjam, sehingga pembiayaan menjadi bermasalah.
5. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh pihak bank sendiri, pihak nasabah maupun pihak luar (*ekstern*). Berdasarkan hasil penelitian, pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Manado telah mengantisipasi apabila terjadi sengketa perbankan khususnya dalam masalah pemberian pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara teori, dilakukan dengan beberapa tindakan diantaranya adalah tindakan penyelamatan dengan melakukan tagihan secara intensif, penjadualan kembali, persyaratan kembali serta penataan kembali. Tindakan penyelamatan yang dilakukan pihak bank dengan syarat bahwa pihak nasabah dinilai masih punya itikad baik untuk melunasi pembayaran.

#### Saran

1. Pihak-pihak yang terkait dalam masalah perbankan khususnya Bank berdasarkan syariah lebih mensosialisasikan keberadaan Bank Syariah kepada masyarakat secara umum dan calon nasabah pada khususnya terkait pemahaman menyangkut produk-produk yang ada pada perbankan syariah serta terhadap keunggulan konsep perbankan syariah yang berdasarkan prinsip kemitraan, sehingga berperan optimal dalam meningkatkan dan memajukan usaha nasabah khususnya dan perekonomian Indonesia umumnya.
2. Peran pihak Bank Syariah Mandiri dalam memberdayakan pengusaha kecil/golongan ekonomi lemah digiatkan terutama dalam penyediaan pembiayaan/modal serta persyaratan jaminan dipermudah, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, guna menghindarkan risiko kerugian bagi pihak Bank.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abid, dkk., 2014. *Critical analysis of some of the major internal hindrance factors in the application of Musharakah financing by the Islamic Banks. International Journal of Education and Research Vol. 2 No. 9*
- Alvi Syahrin. 2003. *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm. 17
- Arifin, Z., 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Al Vabeth.
- Alhojailan, dkk. 2012. *Thematic Analysis: A Critical Review Of Its Process and Evaluation. West East Journal Of Social Science Vol.1 No.1. Saudi Arabia*
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- \_\_\_\_\_. 2003, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash Shiddieqy., 2004. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007
- Bank Indonesia. (2002) .*Panduan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia

- Dahrani, dkk. 2014. *Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan*. Sumatera Utara:UNMU
- Direktorat Perbankan Syariah. 2014 *Statistik Perbankan Syariah Desember 2014*. Jakarta : Bank Indonesia
- Erike Anggaraini. 2012. *Implementasi Referensi Rate Of Return Terhadap Reputasi Pembiayaan Perbankan Syariah*. IAIN Lampung
- Fahrul, dkk. 2012. *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah*. Jurnal Akuntansi ISSN 2302-0164. Banda Aceh
- Farooq, dkk. 2013. *Mudarabah In Islamic Finance: A Critical Analysis Of Interpretation & Implications*. *International Journal of Asian Social Science*. Karachi
- Fatahullah. 2008. Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko Di Perbankan Syariah Cabang Mataram. UNDIP Semarang
- Jelita. 2013. *Aplikasi Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah*. Yogyakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 106, Akuntansi Musyarakah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Karim A, Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mahmood, dkk. 2015. *The Practices of Musharakah Mutanaqisah in Islamic Financial Institutions*. *International Journal of Education and Social Science Vol. 2 No. 3*. Malaysia.
- Majelis Ulama Indonesia, 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah*. Dewan Syariah Nasional.Jakarta
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1999. *Analisis, Data Kualitatif, Buku Tentang Sumber Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta.
- Muhammad. 2001, *Teknik dan Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. 2005, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press,
- \_\_\_\_\_. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Moelong, Lexi J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Noraziah, dkk. 2010. *Shariah parameters for Musharakah Contract*. *International Journal of Business and Social Science Vol. 1 No. 1*. Malaysia
- Nuraddin, dkk. 2012. *The Implications of Agency Theory on Mudarabah and Musharakah Agreements*. *Stockholm School of Economics Department of Finance Thesis in Finance Spring 2012*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 *Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan unit usaha syariah*
- Poerwandari, E.K. 2005. *Pendekatan Kualitatif untuk penelitian perilaku manusia*. Jakarta : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

- Saeed, Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga, Suatu Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer*,  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Salman A Shaikh. 2011. *A Critical Analysis of Mudharabah & A New Approach to Equity Financing in Islamic Finance. Journal of Islamic Banking & Finance*, ISSN 1814-8042
- Sahrudin. 2006. *Pelaksanaan Pembiayaan Proyek Dengan Prinsip Musyarakah Pada Perbankan Syariah Di Nusa Tenggara Barat*. UNDIP Semarang.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syari'ah Di Indonesia, Edisi 2 Revisi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono,.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Surat Edaran Bank Syariah Mandiri Nomor : No.12/025/PEM BSM Tahun 2010, *Tentang Revisi Ketentuan Penanganan Pembiayaan Bermasalah*.
- Susiana. 2010. *Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Kantor Cabang Syariah Malang*. UIN Malang.

## **ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BITUNG**

Gebriany Pirade Wenur, Herman Karamoy, Jessy Warongan  
(email: [gebrianyw@yahoo.com](mailto:gebrianyw@yahoo.com))

### **ABSTRACT**

*Economic development requires government and the community to develop and explore the potentials of the region to supporting the better economy in the future. Local Tax is one of regional revenues that has an important role in supporting the implementation of regional development of Bitung. High earnings of local taxes will increase revenue (PAD) so the local government are expected to explore the revenue sources (PAD) in improving Local Revenue (PAD) as to reduce dependence on the central government. This study is aimed to quantify and determine the potential of local taxes in the realization of the projected increase regional revenue in Bitung City. This research uses qualitative method with descriptive approach. Based on research and survey, Bitung City has unexplored local taxes potential by the local government (DIPENDA) to be explore. In 2016 to 2020 local taxes potential revenue has been projected to rising of 25 percent.*

*Keywords: Potential, Local Taxes, Local Revenue (PAD)*

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi saat ini menuntut pemerintah maupun masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dalam rangka menunjang perekonomian kearah yang lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada kabupaten/kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan atau urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Dengan demikian guna mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri suatu daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif serta kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Kota Bitung merupakan salah satu Kota di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan Kota Pelabuhan Industri terbesar di Sulawesi serta termasuk kota pelabuhan terkemuka di Indonesia bagi pertumbuhan ekonomi yang sangat berperan dalam menunjang kegiatan perekonomian dan pembangunan di Sulawesi Utara, sehingga memiliki berbagai macam potensi - potensi yang berasal dari jenis pajak daerah yang harus digali guna menunjang pembangunan daerah. Potensi pajak berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi sektoral dan sistem serta kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pajak potensial yang dapat dijadikan sebagai basis utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bitung. Banyaknya kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi tingkat kualitas otonomi daerah dan semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka yang jadi masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana potensi pajak daerah untuk proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bitung.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Peacock dan Wiseman**

Peacock dan Wiseman mendasarkannya pada suatu analisis dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang kian besar. Mengacu pada teori pemungutan suara (voting), mereka berpendapat bahwa masyarakat mempunyai batas toleransi pajak, yakni suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala yang membatasi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak secara tidak semena-mena atau sewenang-wenang. (Mangkoesoebroto, 2001). Teori Peacock dan Wiseman Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. (Sumual, 2016).

### **Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan hubungan dengan kenyataan adanya penambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhan pangan, sandang dan pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merupakan sumber pembelanjaan daerah, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi – potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdampak pada perekonomian daerah. Oleh karena itu daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah;
2. Hasil Retribusi Daerah;
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

### **Definisi Pajak**

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Adriani dalam buku Sumarsan, 2013 : 3). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur : (1) iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang); (2) berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; (3) tanpa jasa timbal atau kotraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kotraprestasi individual oleh pemerintah; (4) digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, (Mardiasmo, 2009 : 12).

### **Potensi Penerimaan Pajak**

Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. (Mardiasmo dan Makhfathih). Potensi pajak didefinisikan sebagai rasio pajak yang akan terjadi jika ekonomi menggunakan semua sumber daya dan kemampuan untuk mengumpulkan semua yang diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang diberikan daerah tersebut. (Alfirman, 2003:9)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Waktu penelitian dilakukan selama dua bulan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2016.

### **Analisis Data**

#### **1. Analisis Komparatif**

Untuk mengukur rasio penerimaan pajak daerah dengan rumus sebagai berikut: (Mahsun, 2009 : 153)

Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD =  $\frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$

#### **2. Analisis Matriks Pertumbuhan dan Kontribusi**

a. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masing – masing pajak atau jenis pajak daerah di gunakan rumus:

$$gXi = \frac{Xi - Xi-1}{Xi-1} \times 100\%$$

b. Untuk mengetahui kontribusi masing – masing pajak atau jenis pajak daerah digunakan rumus:

$$wXi = \frac{Xi}{\sum Xi} \times 100\%$$

### 3. Analisis Potensi Pajak Daerah

#### a. Pajak Hotel

Perhitungan potensi pajak hotel menggunakan rumus sebagai berikut: (Jamli dan Rahayu dalam Komalig, 2014)

$$PH = Jhtl \times Rth \times RJk \times Jh$$
$$NPPH = PH \times Tp$$

Keterangan :

PH = Pendapatan Hotel (Rupiah)

NPPH = Nilai Potensi Pajak Hotel (Rupiah)

Jhtl = Jumlah Hotel (Unit) Rth = Rata-Rata Pengeluaran Tamu (Rupiah/Unit)

RJk = Rata-rata Jumlah Kamar Terhuni (Unit/Hari) Jh = Jumlah Hari (hari)

Tp = Tarif Pajak (%)

#### b. Pajak Restoran

Perhitungan potensi pajak restoran menggunakan rumus sebagai berikut: (Jamli dan Rahayu dalam Komalig, 2014)

$$PR = (JR \times Rt \times Rpt \times Jh)$$
$$NPPR = PR \times Tp$$

Keterangan :

PR = Pendapatan Restoran (Rupiah)

NPPR = Nilai Potensi Pajak Restoran (Rupiah)

JR = Jumlah Restoran (Unit)

Rt = Rata-rata tamu yang datang (Orang/hari)

Tp = Tarif Pajak (%)

Rpt = Rata-rata pembayaran per tamu (Rupiah/orang)

Jh = Jumlah hari (hari)

#### c. Pajak Hiburan

Perhitungan potensi pajak hiburan menggunakan rumus menurut (Jamli dan Rahayu dalam Komalig 2014).

$$PHb = JHb \times Rt \times Rpt$$
$$NPPHb = PHb \times Tp$$

Keterangan :

PHb = Pendapatan Hiburan (Rupiah)

NPPH = Nilai Potensi Pajak Hiburan (Rupiah)

JHb = Jumlah Hiburan (Unit)

Rt = Rata-rata tamu yang datang (Orang/tahun)

Rpt = Rata-rata pembayaran per tamu (Rupiah/tahun/orang)

Tp = Tarif Pajak (%)

#### d. Pajak Reklame

Perhitungan potensi pajak Reklame menggunakan rumus menurut (Jamli dan Rahayu dalam Komalig 2014).

$$PRk = JR \times Rt \times Rpt \times Jh$$
$$NPPRk = PR \times Tp$$

Keterangan :

PRk = Pendapatan Reklame (Rupiah)



NPPRk = Nilai Potensi Pajak Reklame (Rupiah)

Tp = Tarif Pajak (%)

JR = Jumlah reklame yang terpasang selama satu tahun (Unit)

Rpt = Rata-rata pembayaran per reklame (Rupiah/unit)

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Perhitungan potensi pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan rumus yang digunakan oleh pemerintah Kota Bitung berdasarkan peraturan walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

$$NPPG = NJ \times Tp$$

Keterangan :

NPPG = Nilai Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

NJ = Nilai Produksi mineral bukan logam dan batuan

Tp = Tarif Pajak (%)

f. Pajak Penerangan Jalan

Perhitungan potensi pajak penerangan jalan menggunakan rumus menurut (Jamli dan Rahayu dalam Komalig 2014).

$$PPJ = (JP \times JT \times JB) \times Tp$$

$$NPPPJ = PPJ \times Tp$$

Keterangan :

PPJ = Pendapatan Penerangan Jalan (Rupiah)

NPPPJ = Nilai Potensi Pajak Penerangan Jalan (Rupiah)

JP = Jumlah Pelanggan (Orang)

JT = Jumlah Tagihan (Rupiah/Orang/Bulan)

JB = Jumlah Bulan (bulan) Tp = Tarif Pajak (%)

g. Pajak Sarang Burung Walet

Perhitungan potensi pajak sarang burung walet menggunakan rumus menurut (Jamli dan Rahayu dalam Komalig 2014).

$$PSW = JSW \times JsPH \times HSW$$

$$NPPSW = PSW \times Tp$$

Keterangan :

PSW = Pendapatan Sarang Burung Walet (Rupiah)

NPPSW = Nilai Potensi Pajak Sarang Burung Walet (Rupiah)

HSW = Harga Sarang Burung Walet (Rupiah/Kg)

JSW = Jumlah Sarang Burung Walet (Unit)

Tp = Tarif Pajak (%)

JsPH = Jumlah Pengambilan Sarang per hari (Kg/Unit)

#### 4. Menghitung Proyeksi Pajak Daerah

$$Pr(t) =$$

Keterangan :

Pr(t) = Proyeksi penerimaan pajak daerah pada tahun bersangkutan

N(t-1) = Penerimaan atau realisasi pajak daerah satu tahun sebelumnya

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Bitung merupakan salah satu dari lima belas Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis Kota Bitung terletak pada posisi 1°23'23" - 1°35'39" Lintang Utara, dan 125°1'43" - 125°18'13" Bujur Timur. Wilayah daratan Kota Bitung mempunyai luas 31.350,35 ha, sedangkan luas wilayah perairan 43.980 ha, yang terbagi dalam 8 (delapan) wilayah Kecamatan serta 69 Kelurahan, yaitu sebagai berikut :

1. Kecamatan Madidir, yang memiliki 8 Kelurahan.
2. Kecamatan Matuari, yang memiliki 8 Kelurahan.
3. Kecamatan Girian, yang memiliki 7 Kelurahan.
4. Kecamatan Lembeh Selatan, yang memiliki 7 Kelurahan.
5. Kecamatan Lembeh Utara, yang memiliki 10 Kelurahan.
6. Kecamatan Aertembaga, yang memiliki 10 Kelurahan.
7. Kecamatan Maesa, yang memiliki 8 Kelurahan.
8. Kecamatan Ranowulu, yang memiliki 11 Kelurahan.

Berdasarkan data jumlah Penduduk Kota Bitung yaitu berjumlah 214.932 jiwa. Dan setiap tahun rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai tiga persen, dan jika di hubungkan dengan luas wilayah Kota Bitung yang 31.350,35 ha atau 313 km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk mencapai 686,7 jiwa per km<sup>2</sup>. Dilihat dari sebaran penduduk per Kecamatan, sebagian besar penduduk Bitung terkonsentrasi di Kecamatan Maesa, dimana 19,97 persen penduduk Bitung tinggal di kecamatan ini, selebihnya tersebar bervariasi di setiap kecamatan. Kecamatan Madidir 18,66 persen, Kecamatan Girian 14,48 persen, Kecamatan Aertembaga 14,71 persen, Kecamatan Matuari 13,05 persen, Kecamatan Ranowulu 8,75 persen, Kecamatan Lembeh Selatan 5,72 persen dan paling sedikit yaitu di Kecamatan Lembeh Utara yang hanya 4,67 persen.

### Hasil Penelitian

Kota Bitung memiliki potensi - potensi yang bersumber dari perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran utama yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Kota Bitung. Sejalan dengan meningkatnya dana untuk pembangunan, maka pemerintah daerah Kota Bitung terus berupaya dalam menggali potensi - potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan pendapatan daerah.

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bitung Tahun 2011-2015**

No	Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Presentase (%)
1	2011	11.277.205.000	15.419.397.097	136,73
2	2012	14.460.500.000	17.723.643.955	122,57
3	2013	16.888.970.257	26.162.693.540	154,91
4	2014	29.370.000.000	33.493.759.019	114,04
5	2015	31.500.000.000	37.360.100.376	118,60

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, Data Olahan (2016)

**Tabel 2**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung**

No	Tahun Anggaran	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Prosentase (%)
1	2011	23.225.000.000	25.394.063.796	109,34
2	2012	30.453.039.269	38.435.120.911	126,22
3	2013	44.000.000.000	55.173.113.990	125,40
4	2014	71.654.094.447	83.520.151.103	116,56
5	2015	75.000.000.000	106.133.530.064	141,51

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, Data Olahan (2016)

**Tabel 3**  
**Realisasi Pajak Daerah Kota Bitung Tahun 2011 - 2015**

Jenis Pajak	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Pajak Daerah</b>	<b>15.419.397.097</b>	<b>17.723.643.955</b>	<b>26.162.693.540</b>	<b>33.493.759.019</b>	<b>37.360.100.376</b>
Pajak Hotel	1.375.080.887	1.457.025.208	1.800.124.842	2.079.360.152	1.695.607.242
Pajak Restoran	1.200.635.664	1.805.123.000	2.307.701.798	2.584.314.625	2.606.105.374
Pajak Hiburan	91.473.739	198.637.081	350.017.975	345.389.741	286.354.760
Pajak Reklame	627.220.101	756.234.975	809.534.178	838.162.296	836.869.454
Pajak Penerangan Jalan	6.226.738.438	8.089.693.620	9.879.134.934	12.776.439.417	12.829.757.492
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	197.871.682	556.225.775	640.789.991	317.167.164	671.637.571
Pajak Parkir	-	-	-	2.610.000	22.932.900
Pajak Air Tanah	291.096.589	639.219.514	789.506.559	907.651.894	1.315.038.395
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	5.300.000	4.100.000
Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan & Perkotaan	-	-	-	9.537.670.447	10.837.187.754
Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	5.409.279.997	4.221.484.782	9.585.883.263	4.099.693.283	6.254.509.434

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, Data Olahan (2016)

**Analisis Data dan Pembahasan**  
**Analisis Matriks Pertumbuhan dan Kontribusi.**

**Tabel 4**  
**Pertumbuhan Kenaikan Pajak Daerah Kota Bitung Tahun 2011 - 2015**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah</b>	<b>Growth/ Pertumbuhan</b>	<b>Prosentase (%)</b>
2011	Rp. 15.419.397.097,-	-	-
2012	Rp. 17.723.643.955,-	Rp. 2.304.246.858,-	14 %
2013	Rp. 26.162.693.540,-	Rp. 8.439.049.585,-	47 %
2014	Rp. 33.493.759.019,-	Rp. 7.331.065.479,-	28 %
2015	Rp. 37.360.100.376,-	Rp. 3.866.341.357,-	11 %

Sumber : Data Olahan (2016)

Berdasarkan tabel 5.10 menunjukkan bahwa setiap tahun dari 2011 sampai dengan 2015 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan yaitu 14 persen pada tahun 2012, kemudian mengalami kenaikan 47 persen pada tahun 2013, tahun 2014 mengalami penurunan 28 persen, sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan 11 persen. Hal ini harus terus diperhatikan baik dari pemungutan pajak yang berlaku maupun target yang ditetapkan.

**Analisis Potensi Pajak Daerah**

**a. Pajak Hotel**

**Tabel 5**  
**Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Bitung**

<b>Klasifikasi Hotel</b>	<b>Jumlah Kamar</b>	<b>Tarif Rata- rata (Rp)</b>	<b>Jumlah Hari/Bulan</b>	<b>Tingkat Hunian Kamar</b>	<b>Tarif Pajak</b>	<b>Potensi Pajak (Rp)</b>
Hotel Bintang	113	550.000	365	0,70	10%	1.587.932.500
Melati	332	350.000	365	0,45	10%	1.908.585.000
Cottage	84	1.850.000	365	0,80	10%	4.537.680.000
Rumah Kost	490	400.000	12	0,89	10%	209.328.000
<b>Total</b>	<b>1.019</b>					<b>8.243.525.500</b>

Sumber: Data Olahan (2016)

**b. Pajak Restoran**

**Tabel 6**  
**Perhitungan Potensi Pajak Restoran Kota Bitung**

<b>Klasifikasi Restoran</b>	<b>Jumlah Restoran</b>	<b>Estimasi Pengunjung Rata-rata Perhari</b>	<b>Tarif Rata- rata (Rp)</b>	<b>Jumlah Hari</b>	<b>Tarif Pajak</b>	<b>Potensi Pajak (Rp)</b>
Restoran Besar	5	45	35.000	365	10%	287.437.500
Restoran	23	163	25.000	365	10%	3.420.962.500

Sedang						
Restoran	153	224	15.000	365	10%	18.763.920.000
Kecil						
<b>Total</b>	<b>181</b>					<b>22.472.320.000</b>

Sumber: Data Olahan (2016)

**c. Pajak Hiburan**

**Tabel 7**  
**Perhitungan Potensi Pajak Hiburan Kota Bitung**

<b>Jumlah Hiburan</b>	<b>Rata-rata tamu yang datang</b>	<b>Rata-rata pembayaran per tamu</b>	<b>Jumlah Bulan</b>	<b>Tarif Pajak</b>	<b>Potensi Pajak</b>
53	150	35.000	12	20%	667.800.000
<b>Total</b>					<b>667.800.000</b>

Sumber: Data Olahan (2016)

**d. Pajak Reklame**

**Tabel 8**  
**Perhitungan Potensi Pajak Reklame Kota Bitung**

<b>Klasifikasi Reklame</b>	<b>Jumlah Reklame</b>	<b>Tarif Rata-rata (Rp)</b>	<b>Jumlah per triwulan / Tahun</b>	<b>Tarif Pajak</b>	<b>Potensi Pajak (Rp)</b>
Papan, Baliho & Billboard	497	800.000	4	25%	397.600.000
Kain/Spanduk	568	500.000	4	25%	340.800.000
Melekat/Stiker, Berjalan	281	350.454	4	25%	98.477.574
<b>Total</b>	<b>1346</b>				<b>836.877.574</b>

Sumber: Data Olahan (2016)

**e. Pajak Penerangan Jalan**

**Tabel 9**  
**Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Kota Bitung**

<b>Jumlah Pelanggan</b>	<b>Jumlah Tagihan (Rp)</b>	<b>Jumlah Bulan</b>	<b>Tarif Pajak</b>	<b>Potensi Pajak (Rp)</b>
38.226	350.000	12	10%	16.054.920.000
<b>Total</b>				<b>16.054.920.000</b>

Sumber: Data Olahan (2016)

**f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

**Tabel 10**  
**Perhitungan Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Bitung**

<b>Nilai Produksi</b>	<b>Jumlah Bulan</b>	<b>Tarif Pajak (Rp)</b>	<b>Potensi Pajak (Rp)</b>
671.637.571	12	25%	2.014.912.713
<b>Total</b>			<b>2.014.912.713</b>

Sumber: Data Olahan (2016)

#### g. Pajak Parkir

**Tabel 11**  
**Perhitungan Potensi Pajak Parkir Kota Bitung**

Tempat Lahan Parkir	Rata-rata Kendaraan Parkir Perbulan		Jumlah Bulan	Jumlah Tagihan	Tarif Pajak	Potensi Pajak (Rp)
	Mobil	Motor				
Rs.Budi Mulia	120	250	12	2.000	30%	2.664.000
Citymart 1	300	800	12	2.000	30%	7.920.000
Citymart 2	200	360	12	2.000	30%	4.032.000
Rs.Manembo-nembo	150	200	12	2.000	30%	2.520.000
Rs.Angkatan Laut	70	100	12	2.000	30%	1.224.000
<b>Total</b>						<b>18.360.000</b>

Sumber: Data Olahan (2016)

#### h. Pajak Air Tanah

Berdasarkan observasi dilapangan dengan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung target Pajak Air Tanah tahun 2015 sebesar Rp.900.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.315.038.395,- Objek Pajak yang terdata di Dinas Pendapatan Daerah hanya sebesar 94 objek pajak sedangkan yang belum terdata masih banyak. Kemudian jumlah pemakaian air tanah yang di laporkan wajib pajak masih ada sebagian yang jumlahnya yang belum sesuai dengan yang sebenarnya karena banyak wajib pajak yang tidak menggunakan meteran. Sehingga mengalami kendala dalam penetapan Pajak terutang, hal ini menjadi potensi yang bisa di garap oleh Pemerintah Daerah Kota Bitung dalam meningkatkan penerimaan Pajak Air Tanah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Bitung.

#### i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak PBB-P2 baru mulai dipungut atau dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung tahun 2014. Realisasi Pajak PBB-P2 tahun 2015 sebesar Rp. 10.837.187.754 melebihi target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung sebesar Rp. 9.000.000.000. meningkat dari tahun 2014 realisasinya sebesar Rp 9.537.670.447. Pada tahun 2015 terdapat 455 Permohonan PBB-P2. NJOP yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung masih jauh dari nilai pasaran terutama jalan – jalan utama hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah untuk menaikkan standar nilai pasaran mengingat potensi Kota Bitung cukup besar disebabkan adanya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang berdampak pada perkembangan wilayah dan perkembangan ekonomi daerah.

#### j. Pajak Sarang Burung Walet

**Tabel 11**  
**Perhitungan Potensi Pajak Sarang Burung Walet Kota Bitung**

<b>Jumlah Sarang Burung Walet</b>	<b>Jumlah Penghasilan Per tahun (Kg)</b>	<b>Harga Sarang Burung Walet /Kg (Rp)</b>	<b>Tarif Pajak</b>	<b>Potensi Pajak (Rp)</b>
9	7	4.000.000	5%	12.600.000
<b>Total</b>				<b>12.600.000</b>

Sumber: Data Olahan (2016)

#### Menghitung Proyeksi Penerimaan Potensi Pajak Daerah 5 tahun ke depan

**Tabel 12**  
**Potensi Penerimaan Pajak Daerah**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Pertumbuhan</b>	<b>(%)</b>
2011	Rp. 15.419.397.097,-	-	-
2012	Rp. 17.723.643.955,-	Rp. 2.304.246.858,-	14 %
2013	Rp. 26.162.693.540,-	Rp. 8.439.049.585,-	47 %
2014	Rp. 33.493.759.019,-	Rp. 7.331.065.479,-	28 %
2015	Rp. 37.360.100.376,-	Rp. 3.866.341.357,-	11 %
2016	Rp. 46.700.125.470,-	Rp. 9.340.025.094,-	25 %
2017	Rp. 58.375.156.837,-	Rp. 11.675.031.367,-	25 %
2018	Rp. 72.968.946.046,-	Rp. 14.593.789.209,-	25 %
2019	Rp. 91.211.182.557,-	Rp. 18.242.236.511,-	25 %
2020	Rp. 114.013.978.196,-	Rp. 22.802.795.639,-	25 %

Sumber: Data Olahan (2016)

Dari tabel 5.23 menunjukkan bahwa potensi penerimaan Pajak Daerah di Kota Bitung untuk 5 tahun mendatang dapat diproyeksikan. Dari perhitungan rata-rata tingkat pertumbuhan tahun 2011 sampai dengan 2015 terjadi kenaikan 25 persen sehingga hasil Pajak Daerah tahun 2016 sampai dengan 2020 yaitu pada tahun 2016 Rp.46.700.125.470,- tahun 2017 Rp.58.375.156.837,- tahun 2018 Rp.72.968.946.046,- tahun 2019 Rp.91.211.182.557,- dan tahun 2020 Rp.114.013.978.196.-

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penerimaan Pajak Daerah Kota Bitung tahun 2011 – 2015 mengalami peningkatan dengan realisasi yang diperoleh mampu mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Namun presentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.
2. Penerimaan pajak daerah Kota Bitung dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2015 yaitu pada tahun 2011 Rp. 15.419.397.097, tahun 2012 Rp. 17.723.643.955,

tahun 2013 Rp. 26.162.693.540, tahun 2014 Rp. 33.493.759.019, dan pada tahun 2015 Rp. 37.360.100.376. Pertumbuhan dan Kontribusi dari setiap jenis pajak daerah dari tahun ke tahun sangat bervariasi, jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan sebesar 39,26 persen, jenis pajak yang mengalami pertumbuhan terbesar yaitu pajak parkir sebesar 194,66 persen.

3. Berdasarkan hasil survei potensi terhadap pajak daerah, Kota Bitung memiliki potensi yang belum digali oleh pemerintah dalam hal ini DISPENDA yang memiliki potensi untuk dikembangkan yaitu pajak restoran dan pajak hotel maka perhitungan yang dilakukan terhadap potensi sebenarnya diketahui bahwa pajak daerah memiliki potensi yang besar, karena target yang ditetapkan pemerintah masih di bawah potensi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yang ada di Kota Bitung
4. Klasifikasi potensi pajak sesuai dengan hasil analisis, jika termasuk dalam kategori prima, maka harus dipertahankan, jika termasuk dalam kategori potensial yang dilakukan adalah mengintensifkan yang sudah ada biar tercapai pertumbuhan, tetapi jika termasuk penerimaan berkembang, maka harus dilakukan langkah ekstensifikasi, dan yang tergolong terbelakang, maka justru perlu adanya evaluasi, apakah sumber penerimaan yang menguntungkan atau jenis akan merugikan.
5. Proyeksi potensi penerimaan pajak daerah Kota Bitung pada tahun 2016 sampai dengan 2020 akan terjadi kenaikan sebesar 25 persen.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah mengalami fluktuasi di Kota Bitung, maka perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari setiap jenis pajak daerah agar mengalami peningkatan yaitu dengan melakukan perhitungan potensi setiap jenis pajak daerah, karena berdasarkan pengamatan di lapangan penetapan target pendapatan setiap jenis pajak daerah masih dilakukan secara incremental sehingga belum menggambarkan potensi yang sebenarnya.
2. Klasifikasi potensi pajak sesuai dengan hasil analisis dapat diketahui pertumbuhan dan kontribusi jenis pajak daerah di Kota Bitung terdapat empat jenis pajak yang teridentifikasi terbelakang yaitu pajak hotel, pajak restoran, reklame dan pajak sarang burung walet. Hal ini perlu dilakukan peningkatan pertumbuhan dan kontribusi seiring dengan peningkatan total pendapatan masing-masing jenis pajak daerah.
3. Pengelolaan sumber pendapatan daerah seperti Pajak Daerah perlu diidentifikasi karena banyak sumber-sumber pendapatan yang belum dikelola secara tepat, serta pengawasan yang belum efektif oleh pemerintah sehingga dalam pemungutan pajak belum maksimal.
4. Kontrol Pemerintah terhadap instansi terkait lebih ditingkatkan lagi agar tercipta kinerja yang baik sehingga tahun-tahun selanjutnya dapat memberikan hasil yang memuaskan dari penerimaan pajak daerah dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif lagi kepada Wajib pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk membangun kesadaran dalam membayar pajak. Dan memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
5. Pemerintah Kota Bitung perlu meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana untuk menunjang pertumbuhan pendapatan daerah dan perlu adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat, seperti pengenalan objek wisata, pameran-pameran budaya, membuat tempat kuliner, perkembangan kegiatan – kegiatan ekonomi sehingga



mempengaruhi pertumbuhan pajak sehingga bisa meningkatkan PAD khususnya sektor pajak daerah

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*, Yogyakarta: BPFE.
- Sumual, R, Juliana. 2016. Pengaruh Realisasi Belanja Daerah dan Angkatan Kerja Terhadap Perkembangan PDRB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2013. Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol 16 No 01.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*.: Pedoman Perpajakan Indonesia Lengkap Berdasarkan Undang – Undang Terbaru. Jakarta.
- Laksmiana, A Putratama. 2016. Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bitung dari Sektor Pajak Daerah. Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta.
- Muklis, Imam. 2010. Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Disertasi*. Universitas Negeri Malang.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Alfirman, Luky. 2003. Estimating Stochastic Frontier Tax Potential: Can Indonesian Local Governments Increase Tax Revenues Under Decentralization. University of Colorado at Boulder Boulder, Colorado. Hal 03 -19.
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Penerbit ANDI Yogyakarta. Fakultas Ekonomi UGM.
- Komalig, Norma. 2014. Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Tesis*. Universitas Sam Ratulangi Manado.

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN KONSERVATISME AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, BURSA MALAYSIA DAN SINGAPORE STOCK EXCHANGE TAHUN 2010-2014

Melisa Mamesah, David Paul Elia Saerang, Linda Lambey  
(email: melisamamesah@gmail.com)

## ABSTRACT

*Conservatism is the precautionary principle in uncertainty. There are many cases of accounting frauds occurred due to lack of conservatism implementation resulting financial statements are overstated. This study aims to analyze the affect of firm size, leverage, institutional ownership and audit committee to the implementation of conservatism in the insurance companies listed on Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia and Singapore Stock Exchange. In this study, conservatism measured by market to book ratio. Used as sample of 11 companies. The analytical method used in this research is multiple regression. The results of this study are firm size and audit committee positively affect the implementation of conservatism. On the other hand, leverage and institutional ownership negatively affect the implementation of conservatism.*

*Keywords: conservatism, firm size, leverage, institutional ownership, audit committee*

## PENDAHULUAN

Terbukanya ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2016 dengan lima elemen kunci diantaranya aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran bebas tenaga kerja terampil dan aliran bebas perpindahan barang modal membuat perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia dan *Singapore Stock Exchange* yang di dalamnya terdapat sub sektor asuransi harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang ada dengan memaksimalkan nilai perusahaan untuk menarik minat para investor salah satunya dengan menyajikan informasi keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan dan dapat dibandingkan.

Terdapat berbagai kasus kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik didalam negeri maupun luar negeri yang kurang menerapkan akuntansi konservatif. Kasus yang terjadi di Indonesia yaitu terungkapnya kasus *mark-up* laporan keuangan PT Kimia Farma yang *overstated*, yaitu adanya penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32.700.000.000 yang merupakan 2,3 persen dari penjualan dan 24,7 persen dari laba bersih PT Kimia Farma (Harian Pelita, 2003).

Selain itu, PT Indofarma tersangkut kasus skandal *overstated* dalam penyajian laporan keuangan. Dari hasil penelitian, BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) menemukan bukti-bukti di antaranya, barang dalam proses dinilai lebih tinggi dari nilai yang seharusnya dalam penyajian nilai persediaan barang dalam proses sebesar Rp 28.870.000.000. Akibatnya harga pokok penjualan mengalami *understated* dan laba bersih mengalami *overstated* dengan nilai yang sama (Qamariyah, 2004).

PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp 6.900.000.000. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar Rp. 63.000.000.000 (Maullana, 2015). Selain itu PT Great River International berdasarkan hasil pemeriksaan BAPEPAM menemukan kelebihan pencatatan atau *overstatement* penyajian akun penjualan dan piutang. Kelebihan itu berupa penambahan aktiva tetap dan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tanpa pembuktian (Asifa, 2015). Selain itu, masih banyak kasus-kasus lainnya seperti dijatuhkannya sanksi kepada PT Bakrie and Brothers Tbk., PT Bakrie Sumatra Plantation Tbk., PT Energi Mega Persada Tbk. dan PT Benakat Petroleum Energy Tbk., karena terbukti memoles laporan keuangannya melalui penyajian laba supaya tampak menguntungkan dan berharap publik tertarik membeli saham mereka untuk meningkatkan harga saham (Purnomo, 2010).

Kasus di Malaysia yaitu pada tahun 2004, United U-Li Corporation Berhad menyatakan informasi palsu dimana dalam laporan tahunan dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2004, perusahaan menyatakan bahwa laba sebelum pajak perusahaan dalam laporan itu meningkat (Securities Commision Malaysia, 2009). Kasus lainnya yaitu Megan Media Berhad yang menyajikan pernyataan palsu berkaitan dengan angka pendapatan sebesar RM 306.150.000 di laporan hasil konsolidasi kuartalan untuk periode keuangan yang berakhir 31 Januari 2007 (Securities Commision Malaysia, 2007).

Pada bulan Juli 2007, Transmile Group Berhad diketahui membuat pernyataan menyesatkan dalam laporan kuartalannya. Pada tahun 2006, perusahaan mengalami kerugian sebesar RM 126.300.000 namun dalam laporannya perusahaan mengakui keuntungan sebesar RM 157.500.000 dan pada tahun 2005, perusahaan mengalami kerugian sebesar RM 369.600.000 namun dalam laporannya perusahaan mengakui keuntungan sebesar RM 84.400.000 (The Sun Daily, 2014).

Kasus perusahaan di Singapura yaitu S Chips (Perusahaan-perusahaan Cina yang terdaftar di *Singapore Stock Exchange*) diantaranya China Hongxing, produsen serat polyester Hongwei Technologies dan China Gaoxian Fibrefab Holdings Ltd telah ditangguhkan dari perdagangan karena penyimpangan akuntansi (Nexia Pulse, 2011). Kasus lainnya yaitu Noble Group. Berdasarkan penelitian Iceberg, diketahui bahwa terdapat kesenjangan sebesar \$ 603.000.000 di antara *carrying value* dan *market value* yang tercatat atas nilai bunga dari anak perusahaannya yang dicatat dalam laporan tahunannya pada tahun 2013 dan 2014 (Singapore Business Review, 2015). Lo (2005) mendefinisikan konservatisme sebagai suatu pandangan pesimistik dalam akuntansi. Konservatisme dilatarbelakangi oleh pencatatan laporan keuangan perusahaan berbasis akrual. Pencatatan berbasis akrual mengandung berbagai kemungkinan yang menyebabkan pendapatan dicatat meskipun sebenarnya kas belum diterima dan beban dicatat meskipun kas belum dikeluarkan. Ketidakpastian di masa datang ini membuat suatu kondisi yang menyebabkan munculnya konservatisme akuntansi yang secara sederhana dapat diartikan sebagai tindakan kehati-hatian atau sikap pesimis dalam pencatatan laporan keuangan. Kehati-hatian ini menyebabkan angka dalam laporan keuangan dicatat lebih rendah atau lebih tinggi daripada nilai yang sebenarnya.

Sampai saat ini masih terjadi pertentangan mengenai manfaat konservatisme dalam laporan keuangan. Sebagian peneliti berpendapat bahwa laba yang dihasilkan dari metode yang konservatif kurang berkualitas, tidak relevan, dan tidak bermanfaat, sedangkan sebagian lainnya berpendapat sebaliknya. Peneliti yang memiliki pandangan kedua menganggap bahwa laba konservatif, yang disusun menggunakan prinsip akuntansi yang konservatif mencerminkan laba minimal yang dapat diperoleh oleh perusahaan sehingga laba yang disusun dengan metode yang konservatif tidak merupakan laba yang “dibesar-besarkan” nilainya, sehingga dapat dianggap sebagai laba yang berkualitas (Dewi, 2003; Sari, 2004).

Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangannya. Hal ini disebabkan oleh risiko perusahaan yang juga semakin tinggi (Agustina, Rice & Stephen, 2015). Risiko tersebut terkait dengan biaya politis yang mungkin harus dikeluarkan perusahaan. Perusahaan akan berhati-hati dalam menyajikan angka dalam laporan keuangannya untuk menghindari biaya politis seperti pajak. Semakin rendah angka *debt to equity ratio* maka akan semakin baik, karena akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya (Suprihastini, 2007). *Debt/equity hypothesis* dalam teori akuntansi positif menyatakan perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan meningkatkan laba perusahaan agar laporan keuangan terlihat baik dimata *stakeholders* (Watts & Zimmerman, 1990:139-140), namun dengan keadaan tersebut kreditor dan mekanisme *good corporate governance* akan mengawasi tindakan manajer agar berhati-hati dalam menyajikan angka-angka dalam laporan keuangan.

Dengan adanya kepemilikan saham oleh institusional yang tinggi ini maka pemegang saham dapat menggantikan atau memperkuat fungsi monitoring dari dewan dalam perusahaan (Ahmed & Duellman, 2007). Kepemilikan institusional akan mempengaruhi penggunaan prinsip akuntansi yang konservatif untuk mencegah manajer melakukan tindakan oportunistiknya. Komite audit merupakan pihak akhir yang memonitor proses pelaporan keuangan perusahaan dan mereka akan mempengaruhi kebijakan yang diambil perusahaan berkaitan dengan prinsip yang digunakan dalam pelaporan keuangan (Wardhani, 2008). Komite audit akan mendorong manajer untuk menggunakan prinsip akuntansi yang konservatif untuk mencegah manajer melakukan tindakan oportunistiknya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap konservatisme akuntansi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penelitian Terdahulu**

Almilia (2003) meneliti Pengujian *Size Hypothesis* dan *Debt/Equity Hypothesis* yang Mempengaruhi Tingkat Konservatisme Laporan Keuangan Perusahaan Dengan Teknik Analisis Multinomial Logit membuktikan semakin kecil *size* perusahaan maka semakin besar probabilitas perusahaan akan menyajikan laporan keuangan yang cenderung konservatif. Penelitian ini juga memberikan bukti bahwa semakin tinggi *debt to total assets ratio* maka semakin besar probabilitas perusahaan akan menyajikan laporan keuangan yang cenderung tidak konservatif atau optimis.

Lo (2005) meneliti tentang Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan terhadap Konservatisme Akuntansi yang berhasil membuktikan perusahaan yang memiliki biaya politik yang tinggi akan semakin konservatif dalam laporan keuangannya dan perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi akan cenderung meningkatkan pendapatannya sehingga pihak kreditor akan meningkatkan pengawasan atas tindakan manajer dengan meminta manajer untuk menerapkan konservatisme akuntansi.

Ahmed dan Duellman (2007) meneliti tentang *Accounting Conservatism and Board of Director Characteristics: An Empirical Analysis* membuktikan persentase direksi internal perusahaan berhubungan negatif dengan konservatisme, persentase kepemilikan direksi eksternal berhubungan positif dengan konservatisme. Variabel kontrol industri, ukuran perusahaan, *leverage*, kesempatan tumbuh, kepemilikan institusional, kepemilikan direksi internal dan karakteristik perusahaan cenderung stabil.

Krishnan dan Visvanathan (2008) meneliti tentang *Definition of Accounting Expert Matter? The Association Between Audit Committee Directors' Accounting Expertise and Accounting Conservatism* membuktikan latar belakang keahlian komite audit dari perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik, memberikan kontribusi terhadap tingkat monitoring yang lebih besar.

Wardhani (2008) yang meneliti tentang Tingkat Konservatisme Akuntansi di Indonesia dan Hubungannya dengan Karakteristik Dewan Sebagai Salah Satu Mekanisme *Corporate Governance* membuktikan komite audit dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap konservatisme dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap konservatisme.

Fanani (2009) meneliti tentang Kualitas Pelaporan Keuangan: Berbagai Faktor Penentu dan Konsekuensi Ekonomis membuktikan terdapat perbedaan diantara atribut-atribut kualitas pelaporan keuangan dan tidak terjadi tumpang tindih (*overlap*) antar ketiga atribut kualitas pelaporan keuangan. Hasil pengujian faktor-faktor penentu kualitas laba menunjukkan bahwa faktor-faktor volatilitas penjualan, kinerja perusahaan, dan klasifikasi industri berhubungan positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sebaliknya, siklus operasi, ukuran perusahaan, umur perusahaan, likuiditas dan *leverage* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Sari dan Adhariani (2009) meneliti tentang Konservatisme Perusahaan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya membuktikan rasio konsentrasi, intensitas modal dan ukuran perusahaan merupakan faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap konservatisme.

Xia dan Zhu (2009) meneliti tentang *Corporate Governance and Accounting Conservatism in China* membuktikan semakin tinggi *leverage* semakin konservatif pelaporan keuangan perusahaan.

Hamdan, Abzakh dan Al-Ataibi (2011) yang meneliti tentang *Factors Influencing the Level of Accounting Conservatism in the Financial Statements* membuktikan standar akuntansi sektor publik berhasil mendorong perusahaan untuk menerapkan akuntansi konservatif, perusahaan kecil lebih konservatif dibandingkan perusahaan besar dan perusahaan dengan tingkat utang yang rendah lebih konservatif dibandingkan perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi.

Putra (2011) yang meneliti tentang Tingkat Konservatisme Akuntansi: Kajian Berdasarkan Karakteristik Dewan Komisaris, Kepemilikan Modal Manajerial dan Keberadaan Komite Audit Sebagai Pendukung Mekanisme *Good Corporate Governance* membuktikan komisaris independen, kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi, jumlah komite audit, jumlah dewan komisaris berpengaruh positif pada tingkat konservatisme akuntansi.

Mutmainnah dan Wardhani (2013) yang meneliti tentang Analisis Dampak Kualitas Komite Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi membuktikan keahlian komite audit terbukti meningkatkan kualitas laporan keuangan berdasarkan dua dari tiga pengukuran yang digunakan yaitu persistensi laba dan prediktabilitas laba. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan akan berdampak kepada kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

Yustina (2013) yang meneliti tentang Pengaruh Konvergensi IFRS dan Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Tingkat Konservatisme membuktikan ukuran dewan, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Sedangkan variabel konvergensi IFRS, proporsi komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi.

Sari (2013) meneliti tentang Pengaruh Struktur Kepemilikan Institutional, Struktur Kepemilikan Manajerial, Struktur Kepemilikan Publik, *Debt covenant* dan *Growth Opportunities* membuktikan komisaris independen, kepemilikan institusional dan *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik konservatisme akuntansi sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap praktik konservatisme akuntansi.

Chen, Li, Wang dan Wang (2015) meneliti tentang *Institutional Investors and Conservative Financial Reporting: Evidence from China* membuktikan kepemilikan institusional berhubungan dengan konservatisme perusahaan. Semakin lama jangka waktu kepemilikan saham oleh institusional, semakin mendorong kurangnya penerapan konservatisme.

Agustina (2015) meneliti tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia membuktikan ukuran perusahaan, risiko perusahaan, struktur kepemilikan dan *growth opportunity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan konservatisme akuntansi. Intensitas modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerapan konservatisme akuntansi, sedangkan *leverage*, pajak dan litigasi secara negatif tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan prinsip konservatisme akuntansi.

Sumiari dan Wirama (2016) meneliti Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi dengan *Leverage* sebagai Variabel Pemoderasi membuktikan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap konservatisme. Sedangkan *leverage* merupakan variabel yang dapat memperlemah pengaruh antara ukuran perusahaan dengan konservatisme akuntansi.

### **Teori Keagenan**

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul saat satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Terdapat kemungkinan bahwa manajer akan memaksimalkan kepentingannya sendiri dimana kepentingan tersebut bertentangan dengan keinginan *principal*. Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Keberadaan struktur *good corporate governance* dalam perusahaan dalam hal ini kepemilikan institusional dan komite audit diharapkan dapat melakukan monitoring, sehingga kepentingan antara *agent* dengan *principal* dapat disetarakan, dalam hal ini dapat mendorong manajer untuk menerapkan konservatisme akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan.

### **Teori Akuntansi Positif**

Teori akuntansi positif didasarkan pada premis bahwa individu selalu bertindak atas motivasi pribadi dan berusaha memaksimalkan kepentingan pribadi (Ghozali dan Chariri, 2014:69). Watts dan Zimmerman (1990) menyatakan ada 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif yaitu: (1) Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*) menyatakan bahwa manajer perusahaan dengan rencana bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan; (2) hipotesis Hutang/Ekuitas (*Debt/Equity Hypothesis*) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio utang/ekuitas perusahaan, makin besar kemungkinan manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Makin tinggi rasio hutang/ekuitas, makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian/peraturan kredit (Kalay, 1982); (3) hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*) menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibandingkan perusahaan kecil.

Berdasarkan *political cost hypothesis*, manajer ingin mengecilkan laba untuk mengurangi biaya politik yang potensial. Ukuran perusahaan yang besar mendorong perusahaan untuk menerapkan konservatisme akuntansi dengan menyajikan angka laba yang lebih rendah disebabkan oleh biaya politik yang mungkin akan timbul di masa depan atas tuntutan pemerintah. Sedangkan menurut *debt/equity hypothesis*, perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi akan cenderung menyajikan labanya lebih tinggi pada tahun berjalan untuk menghindari keraguan kreditor dalam pelunasan kewajiban perusahaan, namun kreditor akan ikut melibatkan diri dalam mengawasi tindakan manajer dengan mendorong penerapan konservatisme.

### **Konservatisme Akuntansi**

Secara tradisional, konservatisme dalam akuntansi dapat diterjemahkan melalui pernyataan tidak mengantisipasi keuntungan, tetapi mengantisipasi semua kerugian (J. H. Bliss, 1924, dikutip oleh Watts, 2003; Holthausen & Watts, 2001). Basu (1997) dan Lara *et al.* (2005) mendefinisikan konservatisme sebagai pengakuan laba yang mencerminkan berita buruk dibandingkan berita baik dalam laporan keuangan.

Juanda (2007) mendefinisikan konservatisme sebagai prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan aset cenderung rendah, serta angka-angka biaya dan utang cenderung tinggi. Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya, laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi adalah prinsip kehati-hatian dalam menyajikan angka-angka dalam laporan keuangan dengan tidak mengantisipasi keuntungan sebagai berita baik melainkan mengantisipasi semua kerugian sebagai berita buruk sehingga angka-angka laba dan aset cenderung rendah, serta angka-angka biaya dan utang cenderung tinggi.

Terdapat pro dan kontra dalam penerapan konservatisme dalam laporan keuangan. Penelitian yang membuktikan bahwa akuntansi konservatif tidak berguna bagi pengguna laporan keuangan seperti investor antara lain dilakukan oleh Penman dan Zhang (1999). Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya, laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*) (Hati, 2011). Penelitian yang membuktikan bahwa konservatisme bermanfaat antara lain dilakukan oleh Feltham dan Ohlson (1995) dan Ahmed, Billings, Harris dan Morton (2000). Feltham dan Ohlson (1995) membuktikan bahwa penggunaan akuntansi konservatif dapat digunakan untuk menilai relevansi aktivitas operasi perusahaan. Ahmed *et al.* (2000) membuktikan bahwa konservatisme memainkan peran penting dalam kontrak efisien. Konservatisme akuntansi juga dianggap mengurangi asimetri informasi dengan membatasi tindakan manajer dalam memanipulasi laporan keuangan (LaFond & Watts, 2007).

André, Filip dan Paugam (2013), Lu dan Trabelsi (2013) dan Rosdini (2014) berhasil membuktikan bahwa penerapan IFRS mengurangi konservatisme akuntansi dalam perusahaan. Berbeda dengan Yustina (2013) yang tidak berhasil membuktikan bahwa penerapan IFRS dapat mengurangi konservatisme akuntansi. Konservatisme bukan bagian dari kerangka teori tapi masih menjadi bagian dalam praktik akuntansi (W. Paton dan A. C. Littleton, 1940, dikutip oleh Hellman, 2007; Juanda, 2012).

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Akuntansi Ukuran Perusahaan**

Aset merupakan tolok ukur besaran atau skala suatu perusahaan. Biasanya perusahaan besar mempunyai aktiva yang besar pula nilainya (Sofyaningsih & Hardiningsih, 2011). Perusahaan yang semakin besar otomatis pemerintah akan mengalokasikan biaya politis yang besar juga terhadap perusahaan tersebut. Biaya politis bisa disebabkan oleh penetapan pajak oleh pemerintah, dengan jumlah aset yang besar pemerintah akan menetapkan tarif pajak yang semakin besar juga kepada perusahaan tersebut. Semakin besar penetapan biaya pajak pada suatu perusahaan tersebut berarti penambahan pemasukan untuk pemerintah, dan perusahaan dengan total aset yang besar diasumsikan dapat membayar pajak lebih. Karena itulah semakin besar ukuran perusahaan semakin besar juga penetapan pajak untuk perusahaan tersebut (Daljono, 2013). *Political costs hypothesis* mengenalkan dimensi politis ke dalam konservatisme akuntansi. Ukuran perusahaan juga dapat menimbulkan biaya politis. Perusahaan yang sangat besar didirikan dengan standar kinerja dan profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan juga biaya politis. Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan berskala besar untuk menerapkan konservatisme akuntansi (Lasdi, 2009).

### **Leverage**

Rasio solvabilitas terdiri dari rasio utang (*debt ratio*) yaitu rasio total utang terhadap total aset dan rasio solvabilitas yang lain adalah dalam bentuk *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu suatu perbandingan antara nilai seluruh hutang (*total debt*) dengan total modal. Keseimbangan proporsi antara aset yang didanai oleh kreditor dan yang didanai oleh pemilik perusahaan diukur dengan *debt-to-equity* (Prastowo, 2015:79). Pada perusahaan yang mempunyai utang relatif tinggi, kreditor mempunyai hak lebih besar untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan operasi dan akuntansi perusahaan. Hak lebih besar yang dimiliki kreditor akan mengurangi asimetri informasi di antara kreditor dengan manajer perusahaan. Manajer mengalami kesulitan untuk menyembunyikan informasi dari kreditor. Kreditor berkepentingan terhadap distribusi aktiva bersih dan laba yang lebih rendah kepada manajer dan pemegang saham sehingga kreditor cenderung meminta manajer untuk menyelenggarakan akuntansi konservatif (Lo, 2005).

### **Kepemilikan Institusional**

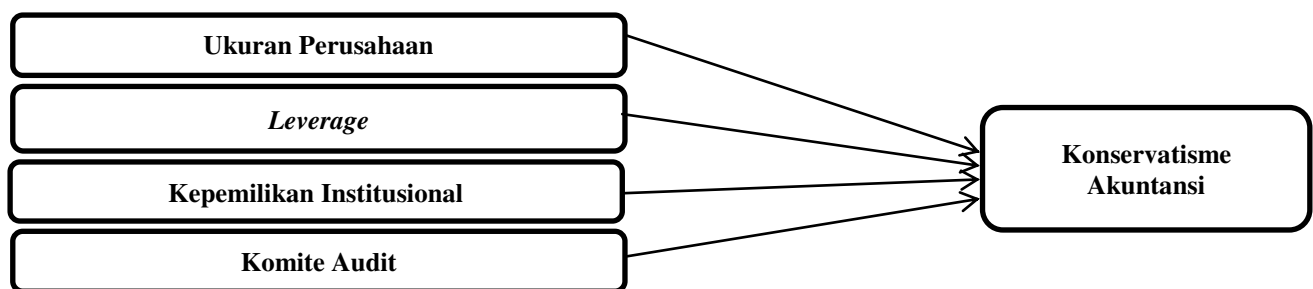
Kepemilikan institusional merupakan salah satu elemen dari mekanisme eksternal *Good Corporate Governance* dalam mengendalikan perilaku manajemen. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antar manajer dan pemegang saham (Cornett, Marcus, Saunders, Hassan & Tehranian, 2006). Dengan adanya kepemilikan institusional yang tinggi maka pemegang saham institusional ini dapat menggantikan atau memperkuat fungsi monitoring dari dewan dalam perusahaan (Ahmed & Duellman, 2007).

## Komite Audit

Komite audit adalah komite dewan yang didasari dengan tujuan berkontribusi terhadap tata kelola perusahaan yang efektif, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab dewan untuk keandalan pengungkapan keuangan dan pengawasannya terhadap efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan audit (Haron, Jantan & Pheng, 2005).

Dechow, Sloan dan Sweeney (1996) dan Beasley, Carcello dan Hermanson (2000) menyatakan bahwa adanya komite audit berhubungan dengan tingkat kecurangan yang lebih rendah. Menurut Dechow *et al.* (1996), perusahaan yang terkena skandal kasus kecurangan laporan keuangan kemungkinan besar tidak mempunyai komite audit atau komite auditnya tidak bekerja secara efektif dan efisien dalam setiap rapat yang dilaksanakan. Selain itu, Putra (2011) dan Krishnan dan Visvanathan (2008) membuktikan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme laporan keuangan dan latar belakang keahlian dari komite audit dari perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik, memberikan kontribusi terhadap tingkat monitoring yang lebih besar oleh anggota komite audit. Dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan, akan mendorong penerapan konservatisme.

## KERANGKA KONSEPTUAL



## Perumusan Hipotesis

H<sub>1</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi

H<sub>2</sub>: *Leverage* berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi

H<sub>3</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi

H<sub>4</sub>: Komite audit berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi

## METODE PENELITIAN

### Klasifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel

#### Variabel Dependen

##### Konservatisme

H. I. Wolk, M. G. Tearney dan J. L. Dodd (2001) dikutip oleh Lo (2005) mendefinisikan konservatisme akuntansi sebagai usaha untuk memilih metoda akuntansi berterima umum yang (a) memperlambat pengakuan pendapatan (b) mempercepat pengakuan beban, (c) merendahkan penilaian aktiva, dan (d) meninggikan penilaian utang. Konservatisme diproksikan dengan *market to book ratio* (Beaver dan Ryan, 2000). Persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut.

$$\text{Market to Book} = \frac{\text{Nilai Buku per Saham}}{\text{Kurs Saham}}$$

$$\text{Nilai Buku per Saham} = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Jumlah Saham}}$$

#### Variabel Independen

##### Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Alfian & Sabeni, 2013). Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural total aset perusahaan (Sari dan Adhariani, 2009). Untuk perusahaan asuransi Bursa Malaysia dan *Singapore Stock Exchange* total aset perusahaan dikalikan dengan kurs tengah akhir tahun Bank Indonesia terlebih dahulu kemudian dilogaritmanaturalkan untuk menyamakan nilai ukuran perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **Leverage**

Rasio *leverage* yaitu suatu perbandingan antara nilai seluruh hutang (*total debt*) dengan total modal (Prastowo, 2015:79). *Leverage* diukur dengan menggunakan rasio perbandingan antara total kewajiban terhadap total ekuitas (Agustina *et al.*, 2015).

### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, atau perusahaan lain (Febiani, 2012). Kepemilikan institusional diukur dengan perbandingan antara jumlah kepemilikan saham oleh institusional dengan total saham (Yustina, 2013:8).

### **Komite Audit**

Komite audit merupakan badan yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertanggung jawab untuk menelaah kualitas dan integritas dari pencatatan akuntansi perusahaan dan sistem pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal serta ketaatan terhadap hukum, peraturan dan regulasi (Adhikary & Mitra, 2016). Komite audit diukur dengan presentase dari jumlah anggota komite audit yang mempunyai keahlian akuntansi dan/atau keuangan terhadap jumlah anggota komite audit keseluruhan (Krishnan dan Visvanathan, 2008).

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Pertimbangan pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi yang memenuhi kriteria tertentu yaitu perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia dan *Singapore Stock Exchange* tahun 2010-2014, perusahaan asuransi yang laporan keuangannya berakhir pada 31 Desember, perusahaan asuransi yang memiliki kelengkapan data penelitian dan perusahaan asuransi yang konsisten menerbitkan laporan keuangan auditan dan laporan tahunan tahun 2010-2014. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 11 perusahaan.

### **Metode Analisis**

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan analisis regresi linier berganda yaitu studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2004:18).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Asumsi Klasik**

Uji multikorelasi dilakukan untuk mengetahui adanya keterikatan antara variabel independen, dengan kata lain bahwa setiap variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Berdasarkan hasil uji multikorelasi, keseluruhan variabel pada model regresi memperoleh nilai VIF yang tidak melebihi angka 10, dengan nilai *tolerance* di atas 0,1 sehingga keseluruhan variabel pada model regresi tidak terdapat masalah multikorelasi. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi kesamaan *value* dan residual dari suatu pengamatan yang lain. Dari hasil uji glejser, nilai signifikansi seluruh variabel independen > 0,05 sehingga dalam persamaan regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

### **Uji F**

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, kepemilikan institusional dan komite audit secara bersama-sama terhadap konservatisme. Berdasarkan hasil uji F, nilai  $F_{hitung} 6,692 > F_{tabel} 2,55$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  dan  $X_4$  berpengaruh terhadap  $Y$ . Dengan demikian secara bersama-sama ukuran perusahaan, *leverage*, kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh terhadap konservatisme.

### **Uji t**

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh secara parsial atau masing-masing variabel terhadap konservatisme, maka dilakukan uji t dengan tingkat kepercayaan 95% dengan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Berdasarkan hasil olahan data regresi berganda, persamaan regresinya dapat dijabarkan sebagai berikut.

$$Y = -6,268 + 0,238 \text{ FIRM\_SIZE} - 0,034 \text{ LEV} - 0,166 \text{ INS\_OWN} + 1,257 \text{ COM\_AUD}$$

Berdasarkan hasil uji t, maka hasil uji t pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.



1. Tingkat signifikansi pada variabel ukuran perusahaan adalah  $0,004 < 0,05$ . Nilai  $t_{hitung} 2,994 > t_{tabel} 2,00856$ , sehingga dapat diartikan bahwa secara individual  $X_1$  berpengaruh positif terhadap Y, maka berarti ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap konservatisme.
2. Tingkat signifikansi pada variabel *leverage* sebesar  $0,262 > 0,05$ . Nilai  $t_{hitung} -1,134 < t_{tabel} 2,00856$ , sehingga dapat diartikan bahwa secara individual  $X_2$  berpengaruh negatif terhadap Y, maka berarti *leverage* berpengaruh negatif terhadap konservatisme.
3. Tingkat signifikansi pada kepemilikan institusional sebesar  $0,742 > 0,05$ . Nilai  $t_{hitung} -0,332 < t_{tabel} 2,00856$ , sehingga berarti secara parsial  $X_3$  berpengaruh negatif terhadap Y, maka berarti kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap konservatisme.
4. Tingkat signifikansi pada komite audit sebesar  $0,012 < 0,05$ . Nilai  $t_{hitung} 2,607 > t_{tabel} 2,00856$ , sehingga berarti secara parsial  $X_4$  berpengaruh positif terhadap Y, maka berarti komite audit berpengaruh positif terhadap konservatisme.

### Koefisien Determinasi

Nilai *adjusted R square* sebesar 0,297 atau 29,7 % menunjukkan besarnya kontribusi dari ukuran perusahaan, *leverage*, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap konservatisme sebesar 29,7 % sedangkan sisanya 70,3 % merupakan kontribusi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Pembahasan

#### Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Konservatisme Akuntansi

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori akuntansi positif dalam *political cost hypothesis* yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1990:139-140), ukuran perusahaan berhubungan dengan biaya politik. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar biaya politik yang akan ditanggung perusahaan tersebut. Perusahaan yang berukuran besar biasanya lebih diawasi oleh pemerintah dan masyarakat (Lo: 2005). Perusahaan yang semakin besar otomatis pemerintah akan mengalokasikan biaya politis yang besar juga terhadap perusahaan tersebut. Biaya politis bisa disebabkan oleh penetapan pajak oleh pemerintah, dengan jumlah aset yang besar pemerintah akan menetapkan tarif pajak yang semakin besar juga kepada perusahaan tersebut. Semakin besar penetapan biaya pajak pada suatu perusahaan tersebut berarti penambahan pemasukan untuk pemerintah, dan perusahaan dengan total aset yang besar diasumsikan dapat membayar pajak lebih. Karena itulah semakin besar ukuran perusahaan semakin besar juga penetapan pajak untuk perusahaan tersebut (Daljono, 2013). Hal tersebut membuat manajer pada perusahaan besar lebih menyukai untuk memilih pengurangan laba portofolio pada prosedur akuntansinya (lebih konservatif) (Sari & Adhariani, 2009). Berbeda dengan perusahaan yang termasuk dalam kategori perusahaan kecil. Perusahaan kecil lebih memilih meningkatkan nilai laba dalam laporan keuangannya. Hal ini didasari dari jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan kecil tidak sebesar perusahaan besar dan perusahaan kecil juga tidak terlalu menjadi sorotan pemerintah. Persaingan yang semakin ketat dan daya *supply* yang rendah ditambah dengan sikap konsumen yang semakin kritis dan preferensi dapat memberikan dampak terhadap perusahaan. Sehingga menyebabkan perusahaan cenderung bersikap lebih konservatif di dalam pelaporan keuangannya untuk tetap bertahan di dalam persaingan. Perusahaan tentunya menginginkan kelangsungan siklus hidup yang berjalan terus, situasi perekonomian yang semakin berkembang dapat membuat perusahaan lebih konservatif dalam penyajian laporan keuangannya (Agustina *et al.*, 2015). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Agustina *et al.*, (2015), Sari (2013), Yustina (2013), Sari dan Adhariani (2009), Xia dan Zhu (2009) dan Lo (2005).

#### Pengaruh *Leverage* terhadap Konservatisme Akuntansi

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi akan cenderung memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba perusahaan atau laporan keuangan yang disajikan cenderung tidak konservatif atau optimis (Almilia, 2003:20). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan *debt/equity hypothesis* dalam teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa perusahaan dengan rasio *debt/equity* yang tinggi cenderung akan meningkatkan pendapatannya (Watts & Zimmerman, 1990). Besarnya *leverage* perusahaan akan menyebabkan perusahaan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja yang baik di mata investor dan kreditor, sehingga kreditor akan terus menyediakan dana pinjaman bagi perusahaan serta mengundang investor untuk membeli saham perusahaan. Namun tidak semua perusahaan mampu melakukan aktivitas ini karena sangat tergantung pada kredibilitas perusahaan (Fanani, 2009). Hal tersebut juga terkait dengan perilaku oportunistik manajer dalam memaksimalkan kepentingannya seperti yang dinyatakan dalam teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976), dalam hal ini

membuat kinerja manajer terlihat baik di mata pemegang saham sehingga manajer terhindar dari penggantian manajer. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sari (2013), Fanani (2009), Sari dan Adhariani (2009) dan Almilia (2003) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Konservatisme Akuntansi**

Investor institusional sebagai bagian dari mekanisme *good corporate governance* dapat turut melakukan pengawasan dalam kegiatan maupun pengambilan keputusan dalam perusahaan. Namun dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi perusahaan untuk menerapkan konservatisme. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengawasan investor institusional tergantung pada waktu kepemilikan. Chen *et al.*, (2015) menyatakan institusi-institusi yang mempunyai kepemilikan terhadap perusahaan dalam jangka waktu yang panjang ikut terlibat dalam kebijakan pelaporan keuangan yang kurang konservatif. Perusahaan yang memiliki investor institusional dalam jangka waktu yang lama akan lebih memilih menyajikan angka-angka dalam laporan keuangan secara lebih agresif untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Chen *et al.*, (2015) dan Sari *et al.*, (2013) yang menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap praktik konservatisme akuntansi.

### **Pengaruh Komite Audit terhadap Konservatisme Akuntansi**

Keberadaan komite audit yang pada umumnya berasal dari pihak eksternal, yang bertugas mengkaji perencanaan audit, membuat telaahan atas berbagai hal yang relevan dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya baik menyangkut penerapan tata kelola perusahaan, etika bisnis, informasi laporan perseroan ketaatan terhadap undang-undang serta permasalahan yang lainnya, akan berpengaruh pada tingkat konservatisme akuntansi dan pencapaian *good corporate governance* (Putra, 2011). Sebagai komite yang dibentuk oleh komite dewan, komite audit pada hakekatnya dapat mengurangi masalah keagenan dengan cara mengurangi asimetri informasi di antara pihak internal dan pihak eksternal perusahaan serta pihak lainnya yang berkepentingan terhadap pembuatan keputusan keuangan perusahaan (Adhikary & Mitra, 2016). Dengan demikian komite audit dapat berperan dalam menyelaraskan kepentingan antara *principal* dan *agent* dengan mendorong penerapan konservatisme dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan, maka proses pelaporan keuangan perusahaan akan termonitor dengan baik. Oleh karena itu, keberadaan komite audit ini akan mendorong penerapan konservatisme yang lebih tinggi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit ini akan meningkatkan kualitas keseluruhan dari proses pelaporan keuangan perusahaan dengan penggunaan prinsip konservatisme (Wardhani, 2008). Latar belakang keahlian komite audit dari perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik, memberikan kontribusi terhadap tingkat monitoring yang lebih besar oleh anggota komite audit (Krishnan & Visvanathan, 2008). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Krishnan dan Visvanathan (2008), Wardhani (2008) dan Putra (2011) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penerapan konservatisme akuntansi. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia dan *Singapore Stock Exchange* ingin terhindar dari risiko biaya politik yang tinggi dan berusaha untuk tetap bertahan dalam persaingan pasar yang penuh dengan ketidakpastian. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penerapan konservatisme akuntansi. Hal tersebut disebabkan oleh perusahaan ingin membuat laporan keuangan terlihat baik di mata investor dan kreditor sehingga kreditor akan terus menyediakan dana pinjaman bagi perusahaan serta mengundang investor untuk membeli saham perusahaan. Hal tersebut juga terkait dengan perilaku oportunistik manajer dalam memaksimalkan kepentingannya, dalam hal ini membuat kinerja manajer terlihat baik di mata pemegang saham sehingga manajer terhindar dari penggantian manajer.

Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penerapan konservatisme akuntansi. Hal ini mungkin disebabkan institusi-institusi yang mempunyai kepemilikan terhadap perusahaan dalam jangka waktu yang panjang ikut terlibat dalam kebijakan pelaporan keuangan yang kurang konservatif. Komite audit berpengaruh positif terhadap penerapan konservatisme akuntansi. Dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan, maka proses pelaporan keuangan perusahaan akan termonitor dengan baik. Oleh karena itu, keberadaan komite audit ini akan mendorong penggunaan konservatisme yang lebih tinggi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan.

## Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini menggunakan jumlah sampel yang relatif sedikit dan periode yang relatif singkat. Berdasarkan keterbatasan tersebut disarankan untuk menambah jumlah sampel penelitian dari perusahaan sektor keuangan lainnya seperti bank atau perusahaan sektor pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, properti dan *real estate*, transportasi dan infrastruktur serta perdagangan, jasa dan investasi dan menambah periode pengamatan yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh. Kontribusi variabel penelitian terhadap penerapan konservatisme berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerapan konservatisme yang belum diteliti dalam penelitian ini seperti struktur *corporate governance* yaitu komisaris independen dan tingkat kesulitan keuangan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhikary, Bishnu Kumar dan Ranjan Kumar Mitra. 2016. Determinants of Audit Committee Independence in the Financial Sector of Bangladesh. *Applied Finance and Accounting Vol. 2, No. 2, August 2016 ISSN 2374-2410 E-ISSN 2374-2429 Published by Redfame Publishing*.
- Agustina, Rice dan Stephen. 2015. Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara, Medan 16-19 September 2015*.
- Ahmed, Anwer S., Bruce Billings, Mary S. Harris dan Richard M. Morton. 2000. Accounting Conservatism and Cost of Debt: An Empirical Test of Efficient Contracting. *SSRN Electronic Journal March 2000*.
- Ahmed, Anwer S. dan Scott Duellman. 2007. Accounting Conservatism and Board of Director Characteristics: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Economics*.
- Alfian, A., dan Arifin Sabeni. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pemilihan Konservatisme Akuntansi. *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013, ISSN (Online): 2337-3806 Halaman 1-10*.
- Almilia, Luciana Spica. 2003. Teknik Pengujian Size Hypothesis dan Debt/Equity Hypothesis yang Mempengaruhi Tingkat Konservatisme Laporan Keuangan Perusahaan dengan Teknik Analisis Multinomial Logit. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi STIE Perbanas Surabaya*.
- André, P., Andrei Filip dan Luc Paugam. 2013. Impact of Mandatory IFRS Adoption on Conditional Conservatism in Europe. *Research Center ESSEC Working Paper 1311*.
- Asifa, A., L., 2015. <http://astamiact.blogspot.co.id/2015/12/kasus-pt-great-river-international-tbk.html>. Diakses: 3 Juli 2016.
- Basu, Sudipta. 1997. The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. *Journal of Accounting and Economics 24 (1997) 3-37*.
- Beasley, M., S., Joseph V. Cercello dan Dana R. Hermanson. 1999. Fraudulent Financial Reporting: 1987-1997 An Analysis of U.S. Public Companies. *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*.
- Beaver, William H. dan Stephen G. Ryan. 2000. Biases and lags in book value and their effects on the ability of the book-to-market ratio to predict book return on equity. *Journal of Accounting Research Vol. 38 No. 1 Spring 2000 Printed in USA*.
- Chen, Yue, Lingxiang Li, Haizhi Wang dan Peng Wang. 2015. Institutional Investors and Conservative Financial Reporting: Evidence from China. *Eurasian Economic Review June 2015, Volume 5, Issue 1, pp 161-178*.
- Cornett, Marcia Millon, Alan J. Marcus, Anthony Saunders dan Hassan Tehranian. 2006. Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance. *SSRN Electronic Journal January 2006*.
- Daljono, W., P., H. 2013. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Rasio *Leverage*, Intensitas Modal, dan Likuiditas Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi Perusahaan (Studi pada Perusahaan yang Belum Menggunakan IFRS). *Diponegoro Journal of Accounting Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013, Halaman 1 ISSN (Online): 2337-3806*.
- Dechow, Patricia M., Richard G. Sloan dan Amy P. Sweeney. 1996. Causes and Consequences of Earnings Manipulation: An Analysis of Firms Subject to Enforcement Actions by the SEC. *Contemporary Accounting Research Vol.13 No.1 (Spring 1996) pp. 1-36*.
- Dewi, A., A., A., R. 2003. Pengaruh Konservatisme Laporan Keuangan terhadap Earnings Response Coefficient. *Simposium Nasional Akuntansi VI Surabaya*.

- Fanani, Z. Kualitas Pelaporan Keuangan: Berbagai Faktor Penentu dan Konsekuensi Ekonomis. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Juni 2009, Vol. 6, No. 1, hal 20 – 45.
- Feltham, Gerald A. dan James A. Ohlson. 1995. Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities. *Contemporary Accounting Research* Vol. 11 No. 2 (Spring 1995) pp 689-731.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2014. Teori Akuntansi International Financial Reporting Standard (IFRS) Edisi 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gujarati, Damodar N. 2004. *Basic Econometrics Fourth Edition*. McGrawHill Higher Education.
- Hamdan, Allam Mohammed Mousa, Mohammed Hasan Abzakh dan Mahmud Hosni Al-Ataibi. 2011. Factors Influencing the Level of Accounting Conservatism in the Financial Statements. *International Business Research* Vol. 4, No. 3; July 2011.
- Harian Pelita. 2003. Bapepam Denda Direksi Kimia Farma Rp 1 Miliar. <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=5681>. Diakses: 2 September 2016.
- Haron, H., Muhamad Jantan dan Eow Gaik Pheng. 2005. Audit Committee Compliance with Kuala Lumpur Stock Exchange Listing Requirements. *International Journal of Auditing Int. J. Audit.* 9: 187–200 (2005).
- Hati, L., A., D. 2011. Telaah Literatur tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 8 Nomor 2, November 2011*.
- Hellman, N. 2007. Accounting Conservatism Under IFRS. *Stockholm School of Economics Department of Accounting and Managerial Finance. Stockholm, Sweden*.
- Jensen, M., dan William Meckling, 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Juanda, A. 2012. Kandungan Prinsip Konservatisme dalam Standar Akuntansi Keuangan Berbasis IFRS (International Financial Reporting Standard). *Jurnal Humanity, ISSN: 0216-8995 Volume 7, Nomor 2, Juli 2012 : 24 – 34*.
- Krishnan, Gopal V. dan Gnanakumar Visvanathan. 2008. Does the SOX Definition of an Accounting Expert Matter? The Association between Audit Committee Directors' Accounting Expertise and Accounting Conservatism. *Contemporary Accounting Research* Vol. 25 No. 3 (Fall 2008) pp. 827-57.
- LaFond, Ryan dan Ross L. Watts. 2007. The Information Role of Conservatism. *The Accounting Review: March 2008, Vol. 83, No. 2, pp. 447-478*.
- Lasdi, L. 2009 Pengujian Determinan Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Kontemporer, Vol. 1 no. 1 Januari 2009 Hal. 1-20*.
- Lo, E., W. 2005. Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan terhadap Konservatisme Akuntansi. *SNA VIII Solo, 15 – 16 September 2005*.
- Lu, C. dan Samir Trabelsi. 2013. Information Asymmetry and Accounting Conservatism Under IFRS Adoption. *Social Science Research Network CAAA Annual Conference 2013*.
- Mutmainnah, N. dan Ratna Wardhani. 2013. Analisis Dampak Kualitas Komite Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 10 Nomor 2, Desember 2013*.
- Nexia Pulse 1 May 2011 Associated with Smith & Wflliamson. 2011. *SGX Latest Initiatives Following Recent Scandals Over S-Chips Companies*. [http://www.nexiats.com.sg/uploads/publication/Articles/May%202011%20Nexia%20Pulse\\_SGX-S%20Chip.pdf](http://www.nexiats.com.sg/uploads/publication/Articles/May%202011%20Nexia%20Pulse_SGX-S%20Chip.pdf).
- Penman, Stephen H. dan Xiao-Jun Zhang. 1999. Accounting Conservatism, the Quality of Earnings, and Stock Returns. *The Accounting Review* 77(2) December 1999.
- Prastowo, D. 2015. *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi Edisi Ketiga*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Purnomo, H. 2010. *Bank Capital Bantah Ada Rush*. <http://finance.detik.com/read/2010/07/26/080108/1406306/5/bank-capital-bantah-ada-rush>. Diakses: 19 Agustus 2016.
- Putra, I., W. 2011. Tingkat Konservatisme Akuntansi: Kajian Berdasarkan Karakteristik Dewan Komisaris, Kepemilikan Modal Manajerial dan Keberadaan Komite Audit Sebagai Pendukung Mekanisme Good Corporate Governance. *Tesis*. Universitas Udayana. Denpasar.
- Qamariyah, N. 2004. *Bapepam Denda Mantan Direksi Indofarma Rp 500 Juta*. <http://finance.detik.com/read/2004/11/08/165712/238077/6/bapepam-denda-mantan-direksi-indofarma-rp-500-juta>. Diakses: 7 Maret 2016.

- Rosdini, D. 2014. Dampak Penerapan IFRS 6 terhadap Konservatisme pada Perusahaan Pertambangan dan Energi di Australia. *SNA 17 Mataram, Lombok Universitas Mataram 24-27 Sept 2014*.
- Sari, C. dan Desi Adhariani. 2009. Konservatisme Perusahaan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *SNA 12 Palembang Universitas Sriwijaya 3-9 Nov 2009*.
- Sari, Dahlia. 2004. Hubungan antara Konservatisme Akuntansi Dengan Konflik Bondholder-Shareholder seputar Kebijakan Dividen dan Peringkat Obligasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 1, No. 2, Desember 2004 pp.63 – 88*.
- Sari, V., M. 2013. Pengaruh *Corporate Governance*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Praktik Konservatisme Akuntansi. *Jurnal akuntansi Universitas Lampung*.
- Securities Commision Malaysia. 2007. *SC charges Megan Media financial controller and executive chairman – Seeking Interpol help to arrest Megan Media executive director*. [http://www.sc.com.my/post\\_archive/sc-charges-megan-media-financial-controller-and-executive-chairman-seeking-interpol-help-to-arrest-megan-media-executive-director/](http://www.sc.com.my/post_archive/sc-charges-megan-media-financial-controller-and-executive-chairman-seeking-interpol-help-to-arrest-megan-media-executive-director/). Diakses: 19 Agustus 2016.
- Securities Commision Malaysia. 2009. *SC charges United U-Li Corporation Berhad's external auditor for inflated profit*. [http://www.sc.com.my/post\\_archive/sc-charges-united-u-li-corporation-berhads-external-auditor-for-inflated-profit/](http://www.sc.com.my/post_archive/sc-charges-united-u-li-corporation-berhads-external-auditor-for-inflated-profit/). Diakses: 19 Agustus 2016.
- Singapore Business Review. 2015. *Noble Group's share price tumbles on alleged accounting fraud*. <http://sbr.com.sg/agribusiness/news/noble-group%E2%80%99s-share-price-tumbles-alleged-accounting-fraud>. Diakses: 20 Agustus 2016.
- Sofyaningsih, S. dan Pancawati Hardiningsih. 2011. Struktur Kepemilikan, Kebijakan Dividen, Kebijakan Utang dan Nilai Perusahaan. *Dinamika Keuangan dan Perbankan, Mei 2011, Vol. 3, No. 1 ISSN :1979-4878 Hal: 68 – 87*.
- Sumiari, Kadek Nita dan Dewa Gede Wirama. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi dengan Leverage Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.4 (2016): 749-774*.
- Suprihastini, Eka dan Herlina Pusparini. 2007. Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan dan Tingkat Hutang Terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta 2001-2005. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma Volume 6. Nomor 1 Juni 2007*.
- The Sun Daily. 2014. *Transmile - the fall of a national cargo carrier*. <http://www.thesundaily.my/news/1157215>. Diakses: 19 Agustus 2016.
- Wardhani, R. 2008. Tingkat Konservatisme Akuntansi di Indonesia dan Hubungannya dengan Karakteristik Dewan Sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance. *Simposium Nasional Akuntansi XI Pontianak*.
- Watts, Ross L. 2003. Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications. *Accounting Horizons Vol. 17, No. 3 September 2003 pp. 207-221*.
- \_\_\_\_\_. 2003. Conservatism in Accounting Part II: Evidence and Research Opportunities. *The Bradley Policy Research Center Financial Research and Policy Working Paper No. FR 03-25*.
- Watts, Ross L. dan Jerold L. Zimmerman. 1990. Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review Vol. 66 No. 1 January 1990 pp. 131-156*.
- Yustina, R. 2013. Pengaruh Konvergensi IFRS dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Tingkat Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Vol 1, No 2*.

# **PENGARUH JUMLAH PENDUDUK MUSLIM, PEMBIAYAAN, DAN BAGI HASIL TERHADAP JUMLAH NOMINAL TABUNGAN NASABAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA**

Sudarmin Amdar, Ventje Ilat, Agus Tony Poputra  
(mamink.amdar@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*Banking world to be part of a country's economic success. More and more financial institutions that exist in a country, the better the economic turnaround that is therein. The reason the economy was good for people who have more funds can save their money to the bank. While people who need funds to start a business or to add funds to enlarge the business can borrow directly in the bank nearest to the given requirements. The purpose of this study was to determine the Impact of the Muslim population, financing, and for the results of the nominal amount of savings in Islamic Banking in Indonesia. Data collection method used is through surveys and data analysis. Techniques to test the hypothesis by using multiple linear regression analysis processed SPSS version 21. Location research done that is through internet websites and annual financial statements on Islamic Banking in Indonesia, which consists of: PT Bank BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank Panin Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia during the year 2009-2013. Muslim population (X1) not significant effect on the nominal amount of savings (Y). Financing (X2) significantly affects nominal amount of savings (Y). For results (X3) no significant effect on the nominal amount of savings (Y).*

*Keywords: impact of the muslim population, financing, and profit sharing the number nominal customer savings*

## **PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan perbankan menjadi salah satu lembaga yang membantu masyarakat dalam melakukan transaksi simpanan uang dan pinjaman uang. Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan memegang peranan sangat penting dalam memenuhi akan kebutuhan dana. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan memang bidang utama usahanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi perusahaan lainnya. Dana merupakan masalah pokok yang selalu ada dan selalu muncul dalam setiap usaha. Lembaga keuangan perbankan secara umum yang diterapkan di Indonesia ada dua yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Pada dasarnya lembaga keuangan ini menjalankan kegiatan perbankan sama yang membedakan adalah sistem pengelolaannya. Bank Konvensional menerapkan sistem bunga sedangkan Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil. Lincoln Arsyad (1999:1) menyatakan bahwa pembahasan tentang masalah pembangunan ekonomi bukanlah suatu perkembangan baru dalam ilmu ekonomi, karena studi tentang pembangunan ekonomi tersebut telah menarik perhatian para pakar ekonomi sejak zaman kaum Merkantilis, kaum klasik, sampai Marx dan Keynes. Ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu sendiri, kebudayaan, agama, sosial, dan adat istiadat. Perekonomian akan berjalan dengan baik dan berkembang dengan lancar apabila lembaga keuangan yang ada di daerah berjalan dengan baik. Bank syariah salah satunya lembaga keuangan yang menawarkan berbagai macam produk tabungan dan juga pembiayaan yang mampu membantu kelancaran perekonomian penduduk sehingga berdampak pada kesejahteraan yang secara tidak langsung memberikan kontribusi yang positif.

Umat Islam di Indonesia adalah mayoritas muslim. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Angka statistik pertumbuhan umat Islam Indonesia pada sensus penduduk tahun 1990 jumlah umat Islam mencapai 87,6 persen, dan angka ini kemudian meningkat menjadi 88,2 persen pada sensus penduduk tahun 2000 dan hingga sekarang mencapai 91,03 %. Antonio (2001:95) menyatakan bahwa praktik Bank Syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan Bank Konvensional, yaitu pertama adalah mendorong adanya kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara adil. Simpanan mudharabah adalah simpanan berdasarkan kaidah syariah mudharabah al-muthlaqah, dimana mudharib memberikan kepercayaan kepada Bank untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif, dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain secara halal dan profesional. Pembiayaan menjadi salah satu bentuk solusi bagi para nasabah yang membutuhkan dana dalam jumlah besar, dengan syarat dan jaminan tertentu proses pembiayaan dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Pembiayaan pada bank syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan serta mekanisme proses pembiayaan.

Jumlah nominal tabungan nasabah merupakan seluruh dana yang dimiliki dan disimpan di bank oleh nasabah. Nasabah merupakan item paling penting dan sangat menentukan maju mundurnya suatu bank. Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah atau Unit usaha Syariah. Hasil analisis dan pengujian mengenai pengaruh jumlah penduduk muslim, pembiayaan dan bagi hasil terhadap jumlah nominal tabungan nasabah pada PT Bank BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Panin Bank Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia. Dengan alat analisa paradigma jalur maka diperoleh hasil perhitungan yang menjawab dugaan dalam penelitian. Jumlah penduduk muslim tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah nominal tabungan nasabah disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang mendorong penduduk muslim menabung di bank syariah antara lain adalah faktor perilaku, ekonomi, keluarga, keuntungan, lokasi bank yang bersangkutan. Hasil penelitian ini didukung oleh peneliti Metawa dan Almossawi (1998), Khairunnisa (2000), Halim Alamsyah (2015), Veni Rahmi Yusni (2011) serta teori Lincoln Arsyad (1999).

Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap jumlah nominal tabungan nasabah disebabkan oleh kebutuhan masyarakat akan peningkatan kesejahteraan untuk pembiayaan yang sifatnya produktif dan pembiayaan konsumtif sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya produk penyaluran dana (pembiayaan), produk penghimpunan dana (menabung) dan produk yang berkaitan dengan jasa lain. Hasil penelitian ini didukung oleh peneliti Sutiani (2012) serta teori Antonio (2001) dan Kasmir (2013). Bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah nominal tabungan nasabah disebabkan oleh adanya inovasi baru Bank Konvensional yang memberikan kredit dengan sistem pembebanan bunga dengan *flat rate*, dan juga *sliding rate*. Hasil penelitian ini didukung oleh peneliti Ghafur (2003), Fadhila (2004) serta teori Ismail (2010), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kasmir (2013).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Bank Syariah**

Pengertian Bank Syariah menurut UU. Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian Bank Syariah dalam pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya sendiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan kredit syariah. Di dalam pasal 1 ayat 3 dan 4 UU. Nomor 10 Tahun 1998 bahwa Bank Syariah adalah bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat di dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau sesuai aturan dalam hukum Islam yang berdasarkan pada Alquran dan Al-Hadits, ijma para sahabat dan Qias Ulama.

Jenis simpanan yang ditawarkan oleh bank beraneka ragam, diantaranya deposito berjangka atau deposito berjangka untuk pembangunan yang mulai diperkenalkan oleh pemerintah secara serentak pada tanggal 15 september 1968. Latar belakang dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 28 Tahun 1968 adalah untuk lebih memanfaatkan perkreditan serta dana-dana dari kalangan masyarakat untuk mensukseskan stabilitas dan pembangunan ekonomi. Pengertian deposito menurut pasal 1 angka 7 undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, artinya jika nasabah atau deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo (Kasmir, 2013:75).

## **2. Perkembangan Akuntansi Syariah dan jumlah penduduk muslim di Indonesia**

Sri Nurhayati (2009:50) menyatakan pada awalnya akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolute. Sebagai bagian ilmu pasti yang perkembangannya bersifat akumulatif, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Bahkan pemikir akuntansi pada awal perkembangannya adalah seorang ahli matematika seperti Luca Pacioli dan Musa Al-Khawarizmy. Lincoln Arsyad (1999:1), menyatakan pembahasan tentang masalah pembangunan ekonomi bukanlah suatu perkembangan baru dalam ilmu ekonomi, karena studi tentang pembangunan ekonomi tersebut telah menarik perhatian para pakar ekonomi sejak zaman kaum Merkantilis, kaum klasik, sampai Marx dan Keynes.

## **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perbankan syariah di Indonesia**

1. Efisiensi.
2. Pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah dan bunga.
3. Regulasi.
4. Fatwa bahwa bunga bank adalah haram dan riba.
5. Terbukti unggul menghadapi kritis.
6. Integrasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
7. Daya saing perbankan syariah di Indonesia.
8. Dari laporan Karim Consulting terhadap kajian atas 130 bank syariah diseluruh dunia dalam rangka International Islamic Banking Award (IIBA) 2005, memberikan hasil yang menarik tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik didunia diukur dari rasio laba terhadap asset (ROA), baik untuk kategori bank yang full fledge maupun untuk kategori unit usaha syariah.
9. Meningkatnya kesadaran keislaman masyarakat.
10. Masyarakat muslim terbesar didunia ada di Indonesia. Ini merupakan pasar potensial yang sangat menggiurkan para pelaku bank syariah, apalagi diiringi dengan semakin baiknya



kesejahteraan masyarakat, seharusnya di Indonesialah pasar perbankan syariah terbesar didunia.

#### 4. Pembiayaan

Untuk kelancaran menjalankan usaha setiap perusahaan membutuhkan dana untuk peningkatan pengelolaannya. Bank memberikan pinjaman dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperbankan. Antonio (2001:160), mengemukakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit* menurut sifat penggunaannya, pembiayaannya dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua hal sebagaimana berikut :

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi: dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu secara umum.

Secara nasional, Perbankan Syariah di Indonesia saat ini menggunakan akad *Murabahah* sebagai salah satu produk utama pembiayaannya. Hal ini dikarenakan oleh sistem dan teknik penghitungannya yang lebih mudah dicerna baik oleh nasabah maupun oleh pihak bank, sehingga aspek kejelasan lebih mengedepan (Antonio, 2001:161). Melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, Dewan Syariah Nasional telah memberikan izin operasional sesuai syariah terhadap produk pembiayaan *murabahah*. Dengan spirit Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta beberapa ayat lainnya yang terdapat dalam Al-Quran, *Murabahah* ini di daulat menjadi kunci dari seluruh kebutuhan nasabah akan produk pembiayaan syariah. *Murabahah* merupakan pembiayaan yang memposisikan nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dan operasional *murabahah* ini murni menggunakan rukun dan syarat jual beli, dimana terdapat beberapa hal yang harus ada dalam transaksi jual beli tersebut. Harus ada penjual, pembeli, objek yang diperjual belikan, ada ijab dan qabul serta ada akad yang menyertai perjanjian jual beli ini. Berdasarkan jenis akadnya, pembiayaan syariah dibedakan menjadi :

1. Pembiayaan Murabahah.
2. Pembiayaan Salam
3. Pembiayaan Istishna'
4. Pembiayaan Musyarakah
5. Pembiayaan Mudharabah
6. Pembiayaan Ijarah
7. Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

## 5. Bagi Hasil

Bagi Hasil Menurut Terminologi asing (Inggris) dikenal dengan “*profit sharing*”. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, (2009:105.1) Bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Sebagaimana diketahui, bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam menawarkan sistem bagi hasil kepada nasabahnya.

Perhitungan bagi hasil di bank syariah ada dua jenis; pertama *Profit/Loss Sharing*. Dalam sistem ini, besar-kecil pendapatan bagi hasil yang diterima nasabah tergantung keuntungan bank. Kedua *Revenue Sharing* dalam sistem ini, penentuan bagi hasil akan tergantung pada pendapatan kotor bank. Bank-bank syariah di Indonesia umumnya menerapkan sistem *Revenue Sharing*. Pola ini dapat memperkecil kerugian bagi nasabah, hanya saja jika bagi hasil didasarkan pada *profit sharing*, maka presentase bagi hasil untuk nasabah akan jauh lebih tinggi.

## 6. Teori tentang Menabung

Kasmir (2013:69-70), mengemukakan seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang diinginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah : Buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, kartu yang terbuat dari plastik. Pengertian tabungan menurut UU perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Kasmir, 2010:57). Semakin tinggi tingkat bunga (tingkat bunga kredit), maka keinginan untuk melakukan investasi juga semakin kecil. Alasannya, seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut lebih besar dari tingkat bunga yang harus dibayarkan untuk dana investasi tersebut sebagai ongkos untuk penggunaan dana (*cost of capital*).

## 7. Menabung Yang Islami

Ismail, (2010:29) menyatakan bahwa pemikiran ekonomi Islam sebenarnya selalu terinspirasi oleh maksud-maksud moral. Hal ini diikuti oleh perintah-perintahnya yang meletakkan tujuan sosial dan norma-norma individu pada pelaku yang relevan terhadap tata kehidupan ekonomi manusia. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa depan sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Menabung adalah salah satu langkah dari persiapan tersebut. (Antonio, 2000:205-206).

## 8. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian tentang pembiayaan, bagi hasil, dan suku bunga yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ghafur (2003), melihat hubungan antara bagi hasil, suku bunga serta pendapatan terhadap simpanan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. Kesimpulan dari penelitian tersebut

adalah bahwa bagi hasil dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan di Bank Muamalat Indonesia.

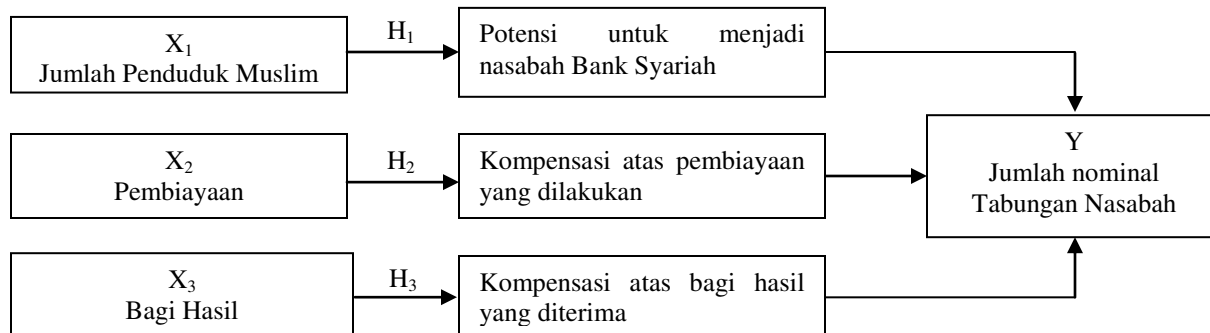
2. Fadhila (2004), meneliti tentang tingkat bagi hasil dan suku bunga terhadap simpanan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri, disimpulkan bahwa variabel tingkat bagi hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap simpanan mudharabah di Bank Syariah Mandiri, sedangkan variabel suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap simpanan mudharabah di Bank Syariah Mandiri.
3. Khairunnisa (2000), meneliti faktor-faktor apa saja yang mendorong nasabah dalam memilih bank syariah. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa faktor ekonomi adalah faktor pendorong nasabah dalam memilih bank syariah.
4. Haroon dan Ahmad (2000), meneliti apakah tingkat bunga bank konvensional mempunyai hubungan langsung dengan simpanan di bank syariah. Hasil penelitian ini adalah bahwa tingkat keuntungan di bank syariah dengan total jumlah simpanan adalah positif, dimana dengan terjadinya peningkatan tingkat keuntungan di bank syariah akan mendorong peningkatan total simpanannya.
5. Metawa dan Almossawi (1998), melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku nasabah bank syariah dalam memilih bank syariah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keputusan nasabah dalam memilih bank syariah adalah karena didorong oleh faktor keuntungan, dorongan keluarga dan teman serta lokasi bank yang bersangkutan.
6. Widiastama (2006), mencoba menguji pengaruh variabel total bagi hasil, tingkat suku bunga deposito, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan haramnya bunga bank terhadap simpanan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia.
7. Sutiani (2012) menguji hubungan imbalan bagi hasil, pembiayaan dan suku bunga terhadap jumlah nominal tabungan nasabah pada Bank Syariah di Indonesia. Hasil penelitian imbalan bagi hasil terdapat hubungan positif terhadap jumlah nominal tabungan nasabah, pembiayaan terdapat hubungan positif terhadap jumlah nominal tabungan nasabah, dan suku bunga terdapat hubungan negatif terhadap jumlah nominal tabungan nasabah.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

Berdasarkan beberapa konsep penelitian terdahulu dan landasan teori, maka peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh jumlah penduduk muslim, pembiayaan, bagi hasil terhadap jumlah nominal tabungan nasabah pada Bank Syariah Di Indonesia periode tahun 2009 - 2013. Jumlah penduduk muslim mempunyai potensi untuk menambah nasabah Bank Syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor perilaku nasabah, keputusan nasabah di dalam menentukan pilihan bank, ekonomi, dan kepercayaan nasabah terhadap bank yang mengakibatkan adanya pengaruh pada jumlah nominal tabungan nasabah. Sehingga dengan adanya faktor-faktor tersebut maka akan mempengaruhi aktivitas bank dalam menerima simpanan nasabah sebagai tabungan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Pembiayaan mempunyai pengaruh sangat besar dalam perbankan, karena sumber dana yang disalurkan kepada nasabah akan memberikan umpan balik berupa pengembalian dalam bentuk bagi hasil atau bunga untuk bank konvensional. Kompensasi atas pembiayaan yang dilakukan memberikan respon positif sebagai investasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sehingga dengan adanya transaksi pembiayaan ini nasabah wajib membuka rekening di bank dan hal tersebut akan mempengaruhi jumlah nominal tabungan nasabah. Bagi hasil menjadi bagian terpenting bagi nasabah hal ini dikarenakan bagi hasil merupakan imbalan yang diberikan kepada nasabah atas simpanan atau pinjaman yang dilakukan. Kompensasi atas bagi hasil yang

diterima merupakan hasil dari pengelolaan dana yang disimpan nasabah atau yang dipinjam nasabah, mempunyai dampak pada jumlah nominal tabungan nasabah. Ringkasan dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H<sub>1</sub> Diduga jumlah penduduk muslim berpengaruh terhadap jumlah nominal tabungan nasabah.

H<sub>2</sub> Diduga pembiayaan berpengaruh terhadap jumlah nominal tabungan nasabah.

H<sub>3</sub> Diduga bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah nominal tabungan nasabah.

Untuk penelitian ini penulis melakukan pengujian model analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda, menurut Sugiyono, (2011:250) analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik/turunnya) variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen. Uji regresi linier dengan dua atau lebih variabel independen digunakan untuk meramalkan suatu variabel dependen Y berdasarkan dua atau lebih variabel independen dalam suatu persamaan linier (Trihendradi, 2010:139).

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

Keterangan :

X<sub>1</sub> : Variabel X<sub>1</sub> jumlah penduduk muslim

X<sub>2</sub> : Variabel X<sub>2</sub> pembiayaan

X<sub>3</sub> : Variabel X<sub>3</sub> bagi hasil

a : Konstanta, perpotongan garis pada sumbu X<sub>1</sub>

b<sub>1</sub> : Koefisien regresi untuk X<sub>1</sub> jumlah penduduk muslim

b<sub>2</sub> : Koefisien regresi untuk X<sub>2</sub> pembiayaan

b<sub>3</sub> : Koefisien regresi untuk X<sub>3</sub> bagi hasil

Y : Variabel Y jumlah nominal tabungan nasabah

## METODE PENELITIAN

Jenis data-data yang digunakan dan sumber data yang akan diolah merupakan serangkaian data yang menjadi pendukung dalam melakukan penelitian. Sumber informasi pada pelaksanaan penelitian diperlukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat sesuai realita yang terjadi. Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan (Kuncoro, 2003:124). Data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam

sampel (atau populasi). Data dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu : data kualitatif dan data kuantitatif.

### **1. Klasifikasi Variabel dan definisi Operasional**

Klasifikasi variabel terdiri dari dua variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat yang menjadi fokus penelitian ini adalah jumlah nominal tabungan nasabah (Y), dan variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk muslim ( $X_1$ ), pembiayaan ( $X_2$ ), dan bagi hasil ( $X_3$ ). Variabel terikat (dependent variable). Sedangkan definisi dan pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk muslim adalah jumlah masyarakat yang beragama islam dan bertempat tinggal menetap di Indonesia.
2. Pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan kepada umat untuk tujuan pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja, investasi maupun konsumtif. Dan dalam penelitian ini pengukuran variabel akan digunakan jumlah rupiah pembiayaan yang diberlakukan.
3. Bagi hasil adalah suatu prinsip pembagian keuntungan dan diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana porsi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama. Variabel ini diukur melalui jumlah rupiah bagi hasil yang dilakukan.
4. Jumlah nominal tabungan nasabah adalah jumlah nominal yang ada pada tabungan nasabah dalam transaksi penyimpanan dana tunai kepada pihak bank.

Lokasi penelitian yang dilakukan melalui website internet dan laporan keuangan tahunan pada Bank Syariah Di Indonesia selama Tahun 2009-2013.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **1. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka diperoleh data-data laporan keuangan tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 yang bersumber dari PT Bank BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Panin Bank Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia. Dan masing-masing Bank diambil laporan keuangan selama 5 tahun terakhir sehingga total keseluruhan 25 tahun. Untuk proses pengolahan data laporan keuangan data utama yang diteliti adalah simpanan mudharabah, deposito, pembiayaan, bagi hasil dan jumlah nominal tabungan nasabah yang nilainya telah diuraikan kedalam tabulasi data ordinal.

### **2. Uji asumsi klasik**

Untuk menguji keandalan dari persamaan yang akan digunakan dalam menganalisis pengaruh jumlah penduduk muslim ( $X_1$ ), pembiayaan ( $X_2$ ), dan bagi hasil ( $X_3$ ) terhadap jumlah tabungan nasabah (Y) maka dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terkait dengan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui dan berdistribusi secara normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dalam pengujian ini, uji normalitas dideteksi dengan analisis grafik *Partial Regression Plot*. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat diantara variabel-variabel independen yang diikuti sertakan dalam pembentukan model. Hasil *coefficients* pada *out put* model, dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas jika mempunyai nilai tolerance diatas 0.1 atau VIF < 10.

Tujuan dari pengujian heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika varians berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas.

### **3. Pengujian hipotesis (Uji t)**

Uji parsial (Uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Dengan demikian  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, hal ini berarti jumlah penduduk muslim ( $X_1$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah nominal tabungan nasabah ( $Y$ ). Pada kolom signifikansi untuk variabel pembiayaan adalah 0,000 angka ini lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, hal ini berarti pembiayaan ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap jumlah nominal tabungan nasabah ( $Y$ ). Pada kolom signifikansi untuk variabel bagi hasil adalah 0,30 angka ini lebih besar dari 0,05. Dengan demikian  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, hal ini berarti bagi hasil ( $X_3$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah nominal tabungan nasabah ( $Y$ ).

### **4. Pembahasan**

#### **4.1. Jumlah penduduk muslim terhadap jumlah nominal tabungan nasabah**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah penduduk muslim tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap jumlah nominal tabungan nasabah. Dengan demikian hipotesis 1 tidak terdukung karena secara empirik tidak terbukti. Interpretasi dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara jumlah penduduk muslim dan jumlah nominal tabungan nasabah. Hal ini menandakan bahwa jumlah nominal tabungan nasabah tidak didukung oleh jumlah penduduk muslim. Artinya jumlah penduduk muslim tidak mendukung jumlah nominal nasabah.

#### **4.2. Pembiayaan terhadap jumlah nominal tabungan nasabah**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap jumlah nominal tabungan nasabah. Dengan demikian hipotesis 2 terdukung karena secara empirik terbukti. Interpretasi dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pembiayaan dan jumlah nominal tabungan nasabah. Hal ini menandakan bahwa jumlah nominal tabungan nasabah didukung oleh pembiayaan. Artinya pembiayaan mendukung jumlah nominal nasabah.

#### **4.3. Bagi hasil terhadap jumlah nominal tabungan nasabah**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah bagi hasil tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap jumlah nominal tabungan nasabah. Dengan demikian hipotesis 3 tidak terdukung karena secara empirik tidak terbukti. Interpretasi dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara bagi hasil dan jumlah nominal tabungan nasabah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

1. Jumlah penduduk muslim tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah nominal tabungan nasabah.
2. Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap jumlah nominal tabungan nasabah.
3. Bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah nominal tabungan nasabah.

Saran untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dapat memperbanyak sampel lebih dari 25 tahun laporan keuangan dari 5 Bank Syariah di Indonesia atau objek penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu Yoopi, 2004, Memahami Kurs Valuta Asing, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia – Jakarta
- Amin A. Riawan, Bunga, Imbalan dan Bagi Hasil, Dalam Majalah Hukum Nasional No.1 Tahun 2000, Jakarta.
- Almossawi, 1991, Pengaruh Ketersediaan ATM, Pelayanan Cepat, Respon Petugas Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Bank, Kerja sama antara Bank Indonesia dan *Center For Banking Research* (CBR) Andalas University
- Antonio Muhammad Syafi'i, 2001, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, Gema Insani – Jakarta
- Budiono (1998), *Bunga adalah "harga" dari (penggunaan) Loanable Funds, landasan teori bunga bank*, skripsi.Yogyakarta.
- Bank Idonesia (2006), *Statistik Perbankan Syariah: Jaringan Kantor Perbankan Syariah 2006*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Bank Indonesia (2006), *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia 2006*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Bank Indonesia. 2003. Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan, dan Organisasi. Jakarta: Pusat Pendidikan dan studi.
- Danang Sunyoto, 2013, Metodologi Penelitian Akuntansi, PT. Refika Aditama
- Duwi Priyatno, 2012, Belajar Praktis Analisis Parametrik Dan Non Parametrik Dengan SPSS Dan Prediksi Pertanyaan Pendadaran Skripsi Dan Tesis, Gava Media-Yogyakarta
- Fadhila Dewi Rahma, 2004, Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan Suku Bunga Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri,  
<http://wordskripsi.blogspot.com/2010/05/bagi-hasil-bank-syariah.html>
- Fatahullah (2008) Implementasi prinsip bagi hasil dan resiko di Perbankan Syariah.
- Ghafur Muhammad W, 2003, Pengaruh Bagi Hasil Suku Bunga Serta Pendapatan Terhadap Simpanan Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia (BMI),  
<http://wordskripsi.blogspot.com/2010/05/bagi-hasil-bank-syariah.html>
- Haroon dan Ahmad, 2000, Pengaruh Tingkat Bunga Bank Konvensional Terhadap Simpanan Di Bank Syariah, <http://www.infoskripsi.com/Proposal/Proposal-Tingkat-Suku-Bunga.html>
- Halim Alamsyah (2015) Perkembangan dan prospek perbankan syariah di Indonesia.Tantangan dalam menyongsong MEA 2015.
- Hendrie Anto. M.B. (2003), *Pengantar Ekonomika Islami*, Yogyakarta : Ekonisia
- Imam Ghozali, 2013, Aplikasi Analisis Multivariatif Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi, Universitas Diponegoro
- Ismail, 2010, Keuangan Dan Investasi Syariah, Sketsa
- JusufJopie, 2007, Panduan Dasar Untuk Account Officer, YKPN – Yogyakarta
- Kasmir, 2010, Manajemen Perbankan, PT Raja Grafindo Persada - Jakarta

- Kasmir. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Keenam, PT Raja Grafindo Persada – Jakarta
- Kasmir, 2002, Dasar-Dasar Perbankan, PT Raja Grafindo Persada– Jakarta
- Khairunnisa, 2000, Faktor-Faktor Yang Mendorong Nasabah Dalam Memilih Bank Syariah, <http://downloads.ziddu.com/downloadfile/8931466/Skripsi-Akuntansi-23.zip.html>
- Kotler, 2002, *Manajemen Pemasaran: Perencanaan, implementasi dan pengendalian*, Edisi kesembilan, Jilid 1 dan Jilid 2, Penerbit: PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Kasmir, 2013, Bank Dan Lembaga keuangan Lainnya, PT RajaGrafindo Persada - Jakarta
- Lincoln Arsyad, 1999, Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Fakultas UGM-Yogyakarta
- Miranti Kartika Dewi dan Rahmatina Awaliah Kasri, 2011, Perbankan dan keuangan Islam inovasi pembiayaan UKM, penerapan hawalah dikoperasi islam, Universitas Indonesia
- Muhammad, 2005, Bank Syariah, Problem dan prospek perkembangan di Indonesia
- Muhammad Afdi Nizar (2007) Analisis pengaruh imbalan hasil dan suku bunga terhadap tabungan (saving deposits) bank syariah dan bank konvensional di Indonesia
- Metawa Dan Almossawi, 1998, Pengaruh Perilaku Nasabah Bank Syariah Terhadap Keputusan Memilih Bank Syariah, <http://downloads.ziddu.com/downloadfile/8931466/Skripsi-Akuntansi-23.zip.html>
- Rachbini, D.J. dan Tono, Suwidi. 2000. Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral. Jakarta: PT Mardi Mulya.
- Simorangkir, 2004, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Ghalia Indonesia-Jakarta
- Sihombing Jonker, 2010, Penjamin Simpanan Nasabah Perbankan, PT Alumni – Bandung
- Singgih Santoso, 2012, Panduan Lengkap SPSS Versi 20, PT elex Komputindo-Jakarta
- Sony Warsono Bin Hardono, 2011, Akuntansi Transaksi Syari'ah, Asgard Chapter – Yogyakarta
- Sri Nurhayati, 2009, Akuntansi Syariah Di Indonesia, Salemba Empat – Jakarta
- Sugiono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Alfabeta – Bandung
- Suharsimi Arikunto, 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Standar Akuntansi Keuangan, per 1 Juli 2009, Salemba Empat, Jakarta
- Sutiani, 2012, Hubungan Imbalan bagi hasil, pembiayaan, dan suku bunga terhadap jumlah nominal tabungan Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia, Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi-Manado
- Trihendradi, 2010, Step by Step SPSS 18 Analisis Data Statistik, Andi-Yogyakarta
- Ulfatuz Zaqiyyah (2011-2013) Pengaruh besar kecilnya dana pihak ketiga mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah di BPRS Amanah Sejahtera Gresik
- Veni Rahmi Yusni (2011), Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah tabungan masyarakat pada BPR Syariah Puduarta Insani.
- Widarjono Agus, (2005), *“Ekonometrika Teori dan Aplikasi”*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Widiastama Siffa, 2006, Pengaruh Total Bagi Hasil Tingkat Suku Bunga Deposito Dan Fatwa MUI Yang Terkait Dengan Haramnya Bunga Bank Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia,
- Jaharudin, 2004, Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.



# **ANALISIS PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI DAN INFORMASI NON AKUNTANSI DALAM KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk AREA MANADO**

Marshella Patricia Niode, David Paul Elia Saerang, Ventje Ilat  
(Email : tricella\_mn@yahoo.com)

## **ABSTRACT**

*One of the efforts that the bank made to anticipate and minimize the credit risk is already started since the applicant proposed the loan. This thing is done by analyze all sort of the information from the applicant. Loan giver must do a deep analyze to sorts of information due to the giving of the right decision of loan, and by that for, to analyze the loan proposal of the applicant, the bank needs the accounting information in the form of financial statement or in the other form along with non-accounting information from the applicant that's both historical as well as contemporary, or future. The purpose of this study was to analyze the use of accounting information in the decision to grant credit facilities and to analyze the use of non-accounting information in the decision to grant credit facilities. The object of this research is PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Manado. The instrument in this research is questionnaires and interview. Analysis method that used is the deskriptive analysis. The result of the research is that the accounting information and non-accounting information is needed to determine the distribution of loan properly given to debtor in the concerned to reduced the non performing loan (NPL) in the PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Keywords: Accounting Information, Non-Accounting Information, Decision of Loan Facilities.*

## **PENDAHULUAN**

Kegiatan perekonomian di Indonesia didukung dengan adanya kegiatan perbankan. Banyak dari para debitur memanfaatkan perbankan untuk menambah modal usahanya supaya usahanya berkembang dan maju. Terdapat banyak bank di Indonesia yang bisa dipilih debitur untuk menambah modal usahanya. Keberadaan Bank di suatu daerah akan memberikan dampak positif membantu perkembangan ekonomi suatu daerah. Apabila keberadaan bank secara merata ada di setiap daerah dan terintegrasi dengan baik, maka akan mempunyai dampak pada perkembangan positif ekonomi suatu negara. Bank merupakan bisnis kepercayaan yang bergerak di sektor usaha jasa keuangan, sarat dengan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter. Tujuan dikeluarkannya peraturan dan ketentuan tersebut yaitu untuk mengatur sistem operasional perbankan sehingga dana masyarakat yang dikelola akan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Bisnis dari perbankan ini di antaranya adalah menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, deposito dan giro kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang merupakan fungsi intermediasi bank, dengan demikian bisa dikatakan bahwasanya bank adalah tempat yang mempertemukan pihak yang minus dana dan pihak yang memiliki dana, artinya pihak yang memiliki dana ini akan menempatkan dananya di bank sedangkan pihak yang membutuhkan dana di bank dapat memohonkan kreditnya di bank tersebut, sesuai dengan UU No. 19 tahun 1998 pasal 1, huruf 2 menyebutkan bahwa bank adalah suatu bentuk badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sampai sekarang terutama di negara-negara yang sedang berkembang, penyaluran dana bank yang terbesar adalah melalui kredit. Hal ini terjadi karena volume permintaan dana (kredit) jauh lebih besar dari volume penawaran dana masyarakat (simpanan). Data Bank

Indonesia tahun 2014 mencantumkan bahwa jumlah volume permintaan kredit pada industri perbankan dari tahun 2011 hingga akhir tahun 2013 terus mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari Tabel 1 seperti di bawah ini.

**Tabel 1. Perkembangan Baki Debet (Sisa Pokok Pinjaman) Kredit UMKM menurut Klasifikasi Usaha**

<b>Baki Debet</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Kredit Usaha Mikro	137,797.7	179,748.3	199,123.4
Kredit Usaha Kecil	193,060.3	224,348.3	239,194.5
Kredit Usaha Menengah	308,613.5	363,481.1	392,338.3
<b>Total</b>	<b>639,471.5</b>	<b>767,577.6</b>	<b>830,656.2</b>

Sumber : Bank Indonesia (2016)

Peningkatan ini tercermin pula pada pendapatan bunga yang berasal dari penyaluran kredit yang merupakan komponen yang dominan dibandingkan pendapatan yang berasal dari kegiatan-kegiatan atau jasa-jasa bank yang lainnya sehingga kredit merupakan sumber penghasilan yang menentukan kelangsungan hidup suatu bank, bahkan dapat dikatakan kredit adalah jantung bagi bank. Setiap usaha selalu dihadapkan pada risiko, demikian pula dengan penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank, yaitu risiko apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan akan dapat kembali sesuai dengan akad yang dibuat oleh pihak bank maupun debitur atau calon nasabah. Berdasarkan ketentuan perbankan seperti dikutip dalam Simanjuntak (1999), tidak terbayarnya sebagian atau seluruh bunga dan atau pokok pinjaman, mewajibkan bank menggolongkan kredit tersebut sebagai kredit yang tidak sehat atau kredit bermasalah atau dikenal sebagai *Non Performing Loan* (NPL) dan dikolektibilitaskan sesuai keadaan masing-masing: Kredit Lancar, Kredit Kurang Lancar, Kredit Dalam Perhatian khusus, Kredit Diragukan, dan Kredit Macet, selanjutnya bank wajib mencadangkan sejumlah dana Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) untuk menutupi kerugian akibat kredit bermasalah tersebut. Penyisihan dana akan mengurangi laba bank, sehingga semakin besar kredit bermasalah atau yang berpotensi untuk bermasalah akan sangat membebani atau bahkan menghancurkan bank yang bersangkutan.

Kredit bermasalah sama sekali tidak bisa ditiadakan. Hal yang dapat dilakukan oleh bank adalah meminimalkan risiko dengan cara melakukan evaluasi atau analisis kredit, baik sejak awal pemberian kredit maupun ketika kredit sudah berjalan. Salah satu upaya yang dilakukan bank untuk mengantisipasi atau untuk meminimalisir risiko kredit dimulai sejak nasabah mengajukan permohonan kredit, yaitu pada tahap awal pengambilan keputusan pemberian kredit. Hal ini dilakukan dengan cara menganalisa berbagai informasi yang diperoleh dari calon debitur sesuai dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Colateral, Condition of Economy*) yang pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam dua jenis informasi yaitu informasi kuantitatif dan informasi kualitatif pada saat calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada pihak bank.

Informasi kuantitatif atau yang disebut informasi akuntansi adalah informasi yang bersifat keuangan seperti laporan keuangan, kapasitas produksi dan lain-lain, yang selanjutnya disebut sebagai informasi akuntansi. Kreditur atau pihak bank menggunakan informasi akuntansi dari calon debitur untuk pengambilan keputusan kredit, sedangkan untuk investor digunakan untuk keputusan investasi. Bagi kreditur, informasi akuntansi merupakan dasar untuk memprediksi prospek usaha dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan aliran kas dimasa yang akan datang, yang akan digunakan sebagai pedoman antara lain untuk menentukan kebijakan pemberian kredit. Bagi investor, informasi akuntansi merupakan titik awal untuk memprediksi prospek aliran kas. Informasi akuntansi di dalamnya terdapat beberapa indikator di antaranya profit margin, *Return of Investment* (ROI), *Return of Equity*

(ROE), *Return of Assets* (ROA), *Debt Service Ratio* (DSR), dan *Cash Flow*. Sedangkan informasi kualitatif atau informasi non akuntansi adalah informasi yang bersifat non keuangan, seperti karakter dari calon debitur, histori pinjaman dari calon nasabah, jenis agunan dari calon debitur, lokasi usaha, lokasi agunan, jenis usaha calon debitur, legalitas usaha calon debitur dan informasi lain yang relevan dalam rangka keputusan pengambilan kredit bagi calon debitur. Pemberi kredit harus melakukan analisis mendalam terhadap berbagai informasi dari calon debitur, dalam rangka pengambilan keputusan kredit yang tepat, sehingga untuk menganalisa permohonan kredit calon debitur, bank memerlukan informasi akuntansi baik yang berupa laporan keuangan formal (*financial statement*), maupun dalam bentuk lain serta informasi bukan akuntansi dari calon debitur baik yang bersifat masa lalu (historis), masa sekarang (*contemporary*), atau masa depan (*future*). Tujuan analisis adalah memberikan gambaran yang selengkap mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kondisi keuangan maupun kondisi bukan keuangan calon debitur. Keputusan pemberian kredit ini dilihat dari apakah permohonan kredit tersebut bisa direkomendasikan atau tidak oleh pihak yang berwenang dalam memutuskan kredit.

Alasan peneliti menggunakan Bank Mandiri sebagai sampel dalam penelitian ini adalah karena Bank Mandiri merupakan salah satu bank pemerintah di Indonesia dengan asset terbesar dan tergolong dalam bank sehat. Sebagai bank yang baru berkecimpung di dunia perkreditan, Bank Mandiri sudah dapat dikatakan sebagai bank yang cukup berkembang dan menjadi saingan yang berat bagi bank-bank besar lainnya. Bank Mandiri juga memiliki laba terbanyak kedua setelah Bank BRI sehingga lebih menambah ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di bank tersebut. Berdasarkan pengamatan terhadap *Annual Report* PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2016, perkembangan *Non Performing Loan (NPL)* Bank Mandiri mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Perkembangan *Non Performing Loan (NPL)* dari tahun 2013 sampai dengan 2015 yaitu tahun 2013 sebesar 0.37% meningkat pada tahun 2014 menjadi 0.44% dan bertambah pada tahun 2015 menjadi 0.60%, hal ini menyebabkan perusahaan harus menyisihkan laba yang diperolehnya untuk pembentukan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) yang berimbas pada kerugian perusahaan dikarenakan laba yang diperolehnya berkurang. Untuk mengurangi peningkatan *Non Performing Loan (NPL)*, maka perusahaan perlu untuk lebih memperhatikan penyaluran kreditnya dengan meminimalisir resiko yang ada.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Teori Keputusan**

Menurut Ralp C. Davis menyatakan bahwa Keputusan ialah suatu hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan adalah suatu jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus menjawab sebuah pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan suatu perencanaan. Keputusan bisa pula berupa suatu tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula.

### **2. Informasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi diartikan sebagai penerangan; pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu. Informasi merupakan keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dibagian-bagian amanat itu.

### **3. Akuntansi**

Definisi yang dapat dipakai untuk memahami akuntansi dijelaskan dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) dalam Harahap (2007), dijelaskan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi

ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.

#### **4. Informasi Akuntansi**

Belkaoui (2000) mendefinisikan informasi akuntansi sebagai informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif tindakan. Penggunaan informasi akuntansi itu untuk perencanaan strategis, pengawasan manajemen dan pengawasan operasional (Anthony, 1965; Simons, 1991).

#### **5. Pengertian Informasi Non Akuntansi**

Selain informasi akuntansi yang mempengaruhi keputusan pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada calon debitur, informasi non akuntansi juga dapat mempengaruhi jadi tidaknya pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada calon debitur. Informasi non akuntansi menurut Mintarti (1994) dalam Hasibuan (2003), meliputi :

- 1) Jaminan kredit
- 2) Reputasi karakter debitur
- 3) Pendidikan manajemen
- 4) Pengalaman manajemen
- 5) Diversifikasi usaha
- 6) Sektor ekonomi yang dibiayai

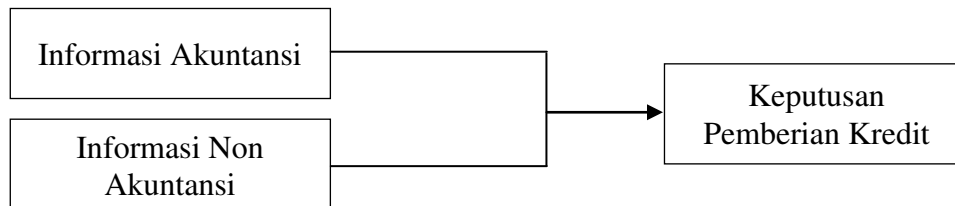
#### **6. Penelitian Terdahulu**

Hasibuan (2003) meneliti tentang pengaruh informasi akuntansi dan non akuntansi terhadap keputusan pemberian kredit modal kerja pada Bank Bumiputera cabang Medan. Data diperoleh dengan mendatangi kantor bank Bumiputera Cabang Medan, dan dilakukan dengan metode survei dengan memberikan pertanyaan kepada pejabat bank yang berkompeten untuk diisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi akuntansi dan non akuntansi secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit modal kerja, sedangkan secara parsial, informasi akuntansi yang berpengaruh terhadap kolektabilitas kredit modal kerja adalah likuiditas, struktur modal, dan skala usaha, sedangkan yang tidak berpengaruh adalah kelayakan usaha, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Informasi non akuntansi yang tidak berpengaruh terhadap kolektabilitas kredit modal kerja adalah jaminan kredit, reputasi bisnis, diversifikasi usaha dan sektor ekonomi yang dibiayai, dan yang berpengaruh adalah pengalaman debitur. Sudaryono (2005), meneliti tentang persepsi analis kredit tentang informasi akuntansi dan non akuntansi pengaruhnya terhadap keputusan kredit. Data diperoleh dengan metode survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk BNI informasi akuntansi lebih berpengaruh dibandingkan dengan informasi non akuntansi, tetapi untuk Bank Mandiri informasi non akuntansi lebih berpengaruh terhadap keputusan kredit daripada informasi akuntansi.

### **KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **1. Kerangka Konseptual Penelitian**

Kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan hubungan antar variabel berdasarkan telaah pustaka dapat diilustrasikan sebagai berikut :



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

## 2. Model Analisis

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Maksudnya data yang akan dikumpulkan adalah dari hasil observasi/pengamatan lapangan, wawancara, serta data-data pendukung lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan informasi akuntansi dan informasi non akuntansi dalam pengambilan keputusan pemberian fasilitas kredit.

## METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2012) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena permasalahan yang akan diteliti merupakan proses suatu langkah kerja yang kompleks dan penuh makna. Pendekatan kualitatif dipandang sesuai untuk penelitian ini karena untuk memperoleh gambaran mengenai prinsip-prinsip umum atau pola-pola yang berlaku umum dengan kenyataan yang terjadi dalam lokasi penelitian.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan :

#### 1. Wawancara/Kuesioner

Pada tahap ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada para informan penelitian yaitu para analis kredit dan pemutus kredit yang telah bekerja di atas 1 tahun. Wawancara dilakukan dengan melontarkan pertanyaan secara langsung dan juga membagikan angket/kuesioner kepada para analis dan pemutus kredit. Jumlah informan yang akan diwawancara adalah 50 (lima puluh) orang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing informan yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### 2. Observasi

Menurut Burhan Bungin (2011) Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti.

#### 3. Studi Pustaka

Pada tahap studi pustaka ini, peneliti mempelajari jurnal-jurnal penelitian terdahulu, buku, artikel serta berbagai sumber yang berhubungan dengan

penelitian yang akan diteliti dengan tujuan untuk lebih memperdalam pengetahuan dan daya paham atas objek penelitian.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### 1. Hasil Penelitian

Jenis kredit yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis kredit mikro yang fasilitas pembiayaannya diberikan kepada semua usaha mikro dan usaha rumah tangga baik berbentuk perusahaan, kelompok usaha dan perorangan (seperti pedagang, petani, peternak dan nelayan). Kredit Mikro yang diberikan oleh Bank Mandiri meliputi Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Kredit Serbaguna Mikro (KSM). Kredit Usaha Mikro (KUM) yang diberikan berupa Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK) untuk pengembangan usaha produktif skala mikro. Kredit Usaha Mikro adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja. Kredit Usaha Mikro (KUM) khusus diberikan kepada Usaha Mikro dengan maksimum limit kredit sebesar Rp 100 juta dan khusus untuk fasilitas *top up* diperkenankan sampai dengan limit Rp 200 juta.

Kredit Serbaguna Mikro (KSM) adalah kredit yang diberikan kepada pegawai yang memiliki penghasilan tetap atau profesi tetap, pensiunan atau kepada *target market* tertentu untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya. Untuk suku bunga kredit yang diberikan Bank Mandiri khususnya kredit mikro memiliki standar suku bunga berbeda antara Kredit Usaha Mikro dan Kredit Serbaguna Mikro. Suku bunga standar yang diberikan untuk kredit Usaha Mikro diberikan Maksimal 2% dan dapat berubah sesuai keputusan pemegang kewenangan, sedangkan Kredit Serbaguna Mikro yang biasa diberikan untuk pegawai diberikan suku bunga maksimal 1.5% untuk pegawai yang statusnya masih kontrak dan 0.975% untuk pegawai yang statusnya sudah merupakan pegawai tetap.

**Tabel 2 Tabel Perkembangan Aset Produktif dan NPL Bank Mandiri**

Uraian	2013	2014	2015
Aset Produktif			
Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1.17%	1.15%	1.56%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1.43%	1.42%	1.96%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	2.86%	2.61%	3.10%
Kredit Bermasalah (NPL Bruto)	1.60%	1.66%	2.29%
NPL Netto	0.37%	0.44%	0.60%

Sumber : Annual Report PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2016

Berdasarkan tabel 5.4 di atas terlihat perkembangan *Non performing loan (NPL)* Bank Mandiri dari tahun 2013 sebesar 0.37%, 2014 sebesar 0.44% dan 2015 sebesar 0.60% mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri harus lebih memperhatikan *Non performing loan*. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa para pemberi kredit belum terlalu memperhatikan syarat kredit yang diberikan kepada nasabah dalam hal ini informasi akuntansi dan non akuntansi. Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kredit mikro, menurunkan portofolio Non Performing Loan (NPL) dan melakukan penghematan CKPN, Bank Mandiri membuat sebuah program yaitu Rezeki Lunas NPL khusus di bulan Desember 2015. Pesertanya adalah Mikro Kredit Sales (MKS) dengan skema program yaitu jika MKS bisa membantu penagihan untuk pelunasan debitur di kolektibilitas 3, 4 dan 5 maka akan diberikan insentif khusus.

Visi *Micro Banking* sebagai bagian dari *Retail Strategy Corporate Plan* Bank Mandiri untuk menjadi bank pesaing utama untuk segmen pembiayaan mikro di Indonesia dengan

Strategi Utama “*the Strongest Challenger in Micro Banking*”. Beberapa inisiatif strategis yang akan dilaksanakan oleh *Micro Banking* adalah :

1. Pembukaan 436 jaringan MMU yang terdiri dari 100 cabang MMU, 300 Unit MMU dan 36 Cluster di tahun 2016 yang berpotensi mengdongkrak ekspansi kredit segmen mikro dan dana TabunganMU.
2. Perekrutan 17.715 *Agent Branchless Banking* untuk mendukung dan meningkatkan *financial inclusion* dan dana tabungan.
3. Implementasi RTTA dengan menggunakan WEB *base* sampai ke level *Cluster* untuk dapat meningkatkan kinerja baik kredit maupun tabungan dan juga dapat meminimalisir risiko-risiko yang akan timbul.
4. Optimalisasi KUM Transaksional untuk dapat mendukung kinerja portofolio kredit mikro melalui *value-chain* dari nasabah segmen Corporate Banking maupun Commercial Banking.
5. Penggunaan teknologi *finger print* sebagai alat untuk meningkatkan keamanan dalam proses pemberian kredit segmen mikro.
6. Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka mendukung program pemerintah Republik Indonesia.

## 2. Pembahasan

### 1. Peran Informasi Akuntansi dalam pengambilan keputusan pemberian kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasibuan (2003), informasi akuntansi yang berpengaruh terhadap tingkat kolektibilitas kredit modal kerja adalah likuiditas, struktur modal dan skala usaha, sedangkan yang tidak berpengaruh adalah kelayakan usaha, perputaran piutang dan perputaran persediaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah pada penelitian ini hasilnya informasi akuntansi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kredit.

### 2. Peran Informasi Non Akuntansi dalam pengambilan keputusan pemberian kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Septriawan (2011), informasi non akuntansi tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan kredit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah pada penelitian ini hasilnya informasi non akuntansi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kredit.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Informasi Akuntansi berupa Pertumbuhan Penjualan, *Profit margin*, Modal sendiri, Kemampuan Membayar, Modal Usaha, Perputaran Persediaan, *cash flow* memiliki peran dalam pengambilan keputusan pemberian kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk karena Informasi Akuntansi dibutuhkan oleh pihak kreditur untuk penilaian. Informasi Akuntansi untuk pihak luar menyajikan suatu gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi. Indikator-indikator informasi akuntansi tersebut dibutuhkan oleh pihak kreditur untuk memutuskan apakah kredit kepada debitur akan diberikan atau tidak.
2. Informasi non Akuntansi berupa Karakter calon debitur, laporan BI Checking, jenis agunan, lokasi usaha, lokasi agunan, jenis usaha, legalitas usaha juga memiliki peran dalam pengambilan keputusan pemberian kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Indikator-indikator ini menjadi penilaian tambahan bagi kreditur untuk memperkuat keputusan mereka atas kredit yang diberikan kepada debitur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit : Alfabeta. Bandung.
- Agusthia, Hervika. 2012. Analisis Pengaruh Informasi Akuntansi dan Informasi Non Akuntansi terhadap Keputusan Kredit. *Accounting Analysis Journal* 1. Semarang.
- Anthony, A.N. and Reece, J.S. 1989. *Accounting : Text and Cases*. 8th Ed. Illinois.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bank Indonesia dan Biro Riset Infobank. *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*. Vol. XXXII Nomor 01 Januari 2014.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2000. *Teori Akuntansi*. Edisi Pertama. Alih Bahasa Marwata S.E., Akt. Salemba Empat. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Penerbit : Kencana Predana Media Group. Jakarta.
- Davis, C. Ralph. 1951. *The Fundamentals of Top Management*. Harper & Brother. NewYork.
- Dwi, Martani., dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Buku 1. Penerbit : Salemba Empat. Jakarta.
- Fitriyah, Hadiah. 2006. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Menengah Kabupaten Sidoarjo. Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya.
- Hansen dan Mowen. 2005. *Akuntansi Manajemen*. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *Teori Akuntansi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasan, I. 2002. *Pokok-pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Hasibuan. 2003. Pengaruh Informasi Akuntansi terhadap Keputusan Pemberian Fasilitas Modal Kerja pada Bank Bumiputera Cabang Medan. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Holmes, S., and D. Nicholls. 1988. *An Analysis of The Use of Accounting Information by Australian Small Business*. *Journal of Small Business Management*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*.
- Kasmir. 2012. *Dasar-dasar Perbankan*. Ed. Revisi. Cet 11. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lisdiani, Fenny. 2013. Analisis Informasi Akuntansi dan Non Akuntansi Dalam Pengambilan Keputusan Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Bengkulu. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bengkulu.
- Mintarti, Sri. 1994. Pengaruh Informasi Askuntansi dalam Pengambilan Keputusan Kredit pada Perbankan di Propinsi Kalimantan Timur. Thesis S2. Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Mulyadi. 1995. *Auditing*. Edisi kelima, Buku Dua. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Priyatno, Dwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Mediakom: Yogyakarta.
- Sarjono Haryadi, dan Julianita Winda. 2011. *SPSS vs LISREL*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Sarwono, Jonathan. (2012). *Path Analysis*. Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Method for Business A Skill Building Approach*. John Wiley and Sons, Inc. 4th edition. New York.



- Septriawan, Mohammad R. 2010. Pengaruh Informasi Akuntansi dan Informasi Non Akuntansi terhadap Pengambilan Keputusan Kredit pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Medan Petisah. Tesis S2. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Siagian, P. Sondang. 2003. Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Administrasi. Gunung Agung. Jakarta.
- Simanjuntak, A. Tiurma. 1999. Analisis Kebutuhan Informasi Akuntansi dan Informasi Bukan Akuntansi Dalam Pengambilan Keputusan Kredit. Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro. Semarang.
- Stoner, A. F. Stoner. 2003. Manajemen Keputusan. Penerbit : Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudaryono. 2005. Persepsi Analisa Kredit Tentang Informasi Akuntansi dan informasi Non Akuntansi Pengaruhnya terhadap Keputusan Kredit. Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sugiyono. 2007. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D". Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Takoudjou, N.A., D.W. Leopold., and S.K. Boniface. 2013. The Implications of the Accounting Data Management on the Exercise of Loans Discretion by Banks in Cameroon: The Case of Small and Medium Size Enterprises. African Journal of Social Sciences. (Vol. 3). No. 3: 18-28.
- Terry, R. George. 1968. Principle of Management. Universitas Michigan. Michigan.
- Williams, Chuck. 2001. Manajemen. Penerbit : Salemba Empat. Jakarta
- [http://media.corporateir.net/media\\_files/IROL/14/146157/Annual\\_Report\\_Mandiri\\_Gabung\\_Final.pdf](http://media.corporateir.net/media_files/IROL/14/146157/Annual_Report_Mandiri_Gabung_Final.pdf)
- [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)
- [www.bi.go.id/id/umkm/kredit/data/Documents/Perkembangan Kredit UMKM dan MKM JAN 2016\\_BD.pdf](http://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/data/Documents/Perkembangan_Kredit_UMKM_dan_MKM_JAN_2016_BD.pdf)